DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi 4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 8
2.1 Kondisi Ekonomi Daerah 8
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023 8
2.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB 11
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 12
2.1.4 Inflasi 13
2.1.5 ICOR 13
2.1.6 Ketenagakerjaan 14
2.1.7 Kemiskinan 14
2.1.8 Ketimpangan Regional 15
2.1.9 Ketimpangan Pendapatan 16
2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD 16
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 16
2.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 17
2.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 18
2.2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 30
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 48
4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 48
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 48
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 48
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah 79
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 84
5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 84
5.1.1 Pendapatan Daerah 84
5.1.2 Belanja 114
Surplus (Defisit) 165
5.1.3 Pembiayaan Daerah 165
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 166
5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL 171
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 171
5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 171
5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir 171
5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca 172

5.3.1 Aset 172
5.3.2 Kewajiban 236
5.3.3 Ekuitas 258
5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 259
5.4.1 Pendapatan – LO 259
5.4.2 Beban 278
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO 298
5.4.4 Kegiatan Non Operasional 299
5.4.5 Surplus/Defisit - LO 302
5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 303
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 303
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 304
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 306
5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 306
5.5.5 Kenaikan Penurunan Kas 309
5.5.6 Saldo Akhir Kas 309
5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 311
5.6.1 Ekuitas Awal 311
5.6.2 Surplus/Defisit – LO 312
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan 315
5.6.4 Ekuitas Akhir 317
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 319
6.1 Pelaksanaan Dana Keistimewaan 319
6.2 Belanja Dana Keistimewaan 321
BAB VII PENUTUP 330
LAMPIRAN 331

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Entitas Akuntansi di DIY 6
Tabel 2. 1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019 – 2023 11
Tabel 2. 2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%) 2019 – 2023 12
Tabel 2. 3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 – 2023 14
Tabel 2. 4 Kemiskinan di DIY Tahun 2019 – 2023 15
Tabel 2. 5 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 17
Tabel 2. 6 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta 25
Tabel 3. 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 31
Tabel 4. 1 Kualitas Piutang Pajak 53
Tabel 4. 2 Kualitas Piutang Retribusi 53
Tabel 4. 3 Kualitas Piutang Lainnya 54
Tabel 4. 4 Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 54
Tabel 4. 5 Kualitas Dana Bergulir 58
Tabel 4. 6 Besaran Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih 59
Tabel 4. 7 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap 60
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah 85
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 86
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum 86
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha 88
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa SKPD 90
Tabel 5. 6 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 91
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 92
Tabel 5. 8 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 94
Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 94
Tabel 5. 10 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 96
Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 98
Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 99
Tabel 5. 13 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 99
Tabel 5. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 103
Tabel 5. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah 104
Tabel 5. 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro 104
Tabel 5. 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD 107
Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 108
Tabel 5. 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) 109
Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 110
Tabel 5. 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 111
Tabel 5. 22 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 113
Tabel 5. 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja 115
Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada SKPD 117

Tabel 5. 25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja 119
Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada SKPD 121
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi 122
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek 123
Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada SKPD 124
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 125
Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 126
Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Sosial 126
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 127
Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 127
Tabel 5. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Biro Bina Mental Spiritual 128
Tabel 5. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat 129
Tabel 5. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 130
Tabel 5. 38 Rincian Belanja Hibah Barang berdasarkan Sub Rincian Obyek 131
Tabel 5. 39 Rincian Belanja Hibah Barang pada SKPD 131
Tabel 5. 40 Rincian Belanja Hibah Barang pada DPUP SDM 132
Tabel 5. 41 Rincian Belanja Hibah Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141
Tabel 5. 42 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial 142
Tabel 5. 43 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 142
Tabel 5. 44 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 148
Tabel 5. 45 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 148
Tabel 5. 46 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 152
Tabel 5. 47 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial 153
Tabel 5. 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Jenis 155
Tabel 5. 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah 155
Tabel 5. 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada SKPD 156
Tabel 5. 51 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156
Tabel 5. 52 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD 157
Tabel 5. 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 158
Tabel 5. 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD 158
Tabel 5. 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 160
Tabel 5. 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD 160
Tabel 5. 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 161
Tabel 5. 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD 161
Tabel 5. 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya 162
Tabel 5. 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada SKPD 162
Tabel 5. 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil 163
Tabel 5. 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan 163
Tabel 5. 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota 164
Tabel 5. 64 Surplus/Defisit 165
Tabel 5. 65 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 165
Tabel 5. 66 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 167
Tabel 5. 67 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 167

Tabel 5. 68 Kas Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2024 168
Tabel 5. 69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD 168
Tabel 5. 70 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 171
Tabel 5. 71 Rincian Kas Di Kas Daerah 172
Tabel 5. 72 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 173
Tabel 5. 73 Rincian Kas di BLUD 174
Tabel 5. 74 Sisa Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2024 di SMA/SMK/SLB Negeri 176
Tabel 5. 75 Rincian Piutang Pajak Daerah 176
Tabel 5. 76 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang Pajak Daerah 177
Tabel 5. 77 Rincian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Pokok) 177
Tabel 5. 78 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 178
Tabel 5. 79 Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 179
Tabel 5. 80 Rincian Penghapusan Piutang Denda Pajak Daerah 179
Tabel 5. 81 Rincian Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) 180
Tabel 5. 82 Rincian Mutasi Piutang RS Grhasia 180
Tabel 5. 83 Rincian Piutang RS Grhasia 181
Tabel 5. 84 Rincian Kualitas Piutang RS Grhasia 181
Tabel 5. 85 Rincian Perhitungan Piutang Lainnya 182
Tabel 5. 86 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah 182
Tabel 5. 87 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 183
Tabel 5. 88 Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi) 184
Tabel 5. 89 Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka 184
Tabel 5. 90 Rincian Persediaan pada SKPD 185
Tabel 5. 91 Rincian Obyek Persediaan 186
Tabel 5. 92 Rincian Persediaan Rusak 187
Tabel 5. 93 Rincian Persediaan Rusak pada SKPD 187
Tabel 5. 94 Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras 188
Tabel 5. 95 Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras 188
Tabel 5. 96 Rincian Nilai Persediaan Sisa Tiket di Balai Taman Hutan Raya DLHK 189
Tabel 5. 97 Mutasi Dana Bergulir 190
Tabel 5. 98 Rincian Dana Bergulir 192
Tabel 5. 99 Kelompok Umur Dana Bergulir 192
Tabel 5. 100 Perhitungan Penyertaan Modal 194
Tabel 5. 101 Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada masing-masing BUKP DIY 197
Tabel 5. 102 Rincian Obyek Tanah 201
Tabel 5. 103 Rincian Tanah pada SKPD 201
Tabel 5. 104 Rincian Mutasi Tanah 202
Tabel 5. 105 Rincian Penambahan Aset Tanah dari Hibah 202
Tabel 5. 106 Rincian Hasil Verifikasi Aset 203
Tabel 5. 107 Rincian Obyek Peralatan dan Mesin 203
Tabel 5. 108 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD 204
Tabel 5. 109 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin 205
Tabel 5. 110 Rincian Reklas dari Peralatan Mesin ke Persediaan 205
Tabel 5. 111 Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Peralatan Mesin 206
Tabel 5. 112 Rincian Obyek Gedung dan Bangunan 206
Tabel 5. 113 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD 206
Tabel 5. 114 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 207
Tabel 5. 115 Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Gedung dan Bangunan 208
Tabel 5. 116 Rincian Obyek Jalan, Irigasi dan Jaringan 208
Tabel 5. 117 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD 208

Tabel 5. 118 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 209
Tabel 5. 119 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya 210
Tabel 5. 120 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD 210
Tabel 5. 121 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 211
Tabel 5. 122 Rincian Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Persediaan 211
Tabel 5. 123 Rincian Data Aset Tetap Renovasi 212
Tabel 5. 124 Rincian Aset Tetap Lainnya yang Bernilai Rp0,00 213
Tabel 5. 125 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD 213
Tabel 5. 126 Rincian DED dan KDP pada SKPD 214
Tabel 5. 127 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 215
Tabel 5. 128 Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan 216
Tabel 5. 129 Rincian Akumulasi Penyusutan 216
Tabel 5. 130 Rincian Akumulasi Penyusutan pada SKPD 216
Tabel 5. 131 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan 217
Tabel 5. 132 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 218
Tabel 5. 133 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa 218
Tabel 5. 134 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA -Sewa 219
Tabel 5. 135 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA -Kerjasama Pemanfaatan 224
Tabel 5. 136 Rincian Reklasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga 225
Tabel 5. 137 Rincian Aset Tidak Berwujud 225
Tabel 5. 138 Aset Tidak Berwujud pada SKPD 226
Tabel 5. 139 Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD 227
Tabel 5. 140 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud 229
Tabel 5. 141 Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Aset Tidak Berwujud 229
Tabel 5. 142 Rincian Nilai Aset Lain-lain pada SKPD 229
Tabel 5. 143 Rincian Nilai Buku Aset Lain-Lain pada SKPD 230
Tabel 5. 144 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada SKPD 232
Tabel 5. 145 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 234
Tabel 5. 146 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Jaminan) 234
Tabel 5. 147 Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) 235
Tabel 5. 148 Rincian Properti Investasi 235
Tabel 5. 149 Rincian Kenaikan Uang Jaminan 237
Tabel 5. 150 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD 237
Tabel 5. 151 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah dan LLPAD yang Sah 238
Tabel 5. 152 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan 238
Tabel 5. 153 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata 238
Tabel 5. 154 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY 239
Tabel 5. 155 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan 239
Tabel 5. 156 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA 240
Tabel 5. 157 Rincian Utang Belanja pada SKPD 254
Tabel 5. 158 Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja 255
Tabel 5. 159 Rincian Utang Belanja Barang Jasa Menurut Rincian Obyek Utang Belanja 256
Tabel 5. 160 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 258
Tabel 5. 161 Rincian Pendapatan Daerah-LO 259
Tabel 5. 162 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 259
Tabel 5. 163 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 260
Tabel 5. 164 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 260
Tabel 5. 165 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 261
Tabel 5. 166 Selisih Retribusi Daerah LRA – LO pada SKPD 262

Tabel 5. 167 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada SKPD 263
Tabel 5. 168 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 264
Tabel 5. 169 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO (BUMD) 265
Tabel 5. 170 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO 267
Tabel 5. 171 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA – LO 270
Tabel 5. 172 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 271
Tabel 5. 173 Pendapatan Transfer Antar Daerah 273
Tabel 5. 174 Pendapatan Hibah – LO pada SKPD 273
Tabel 5. 175 Pendapatan Hibah LRA – LO pada SKPD 274
Tabel 5. 176 Rincian Beban 278
Tabel 5. 177 Rincian Beban Operasi – LO 278
Tabel 5. 178 Rincian Beban Pegawai 279
Tabel 5. 179 Rincian Beban Pegawai pada SKPD 279
Tabel 5. 180 Selisih Belanja – Beban Pegawai 280
Tabel 5. 181 Rincian Beban Barang dan Jasa 282
Tabel 5. 182 Beban Barang dan Jasa pada SKPD 282
Tabel 5. 183 Belanja – Beban Barang dan Jasa 284
Tabel 5. 184 Selisih Belanja – Beban Hibah 293
Tabel 5. 185 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 295
Tabel 5. 186 Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD 296
Tabel 5. 187 Rincian Beban Transfer 298
Tabel 5. 188 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 303
Tabel 5. 189 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 304
Tabel 5. 190 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 304
Tabel 5. 191 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 304
Tabel 5. 192 Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2024 305
Tabel 5. 193 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 305
Tabel 5. 194 Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi 306
Tabel 5. 195 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 307
Tabel 5. 196 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 307
Tabel 5. 197 Rincian Perhitungan Sisa Kas 307
Tabel 5. 198 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 308
Tabel 5. 199 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 309
Tabel 5. 200 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas 309
Tabel 5. 201 Rincian Kas Per 31 Desember 2024 309
Tabel 5. 202 Rincian Kas di BLUD 310
Tabel 5. 203 Rincian Ekuitas Awal pada SKPD 311
Tabel 5. 204 Rincian Surplus / Defisit – LO pada SKPD 313
Tabel 5. 205 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 315
Tabel 5. 206 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan pada SKPD 316
Tabel 5. 207 Ekuitas Akhir pada SKPD 317
Tabel 6. 1 Perkembangan Alokasi Anggaran Keistimewaan Per Urusan 2013-2024 322
Tabel 6. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 323
Tabel 6. 3 Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 328

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019 – 2023 9
Gambar 2. 2 Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019 – 2023 10
Gambar 2. 3 Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2019 – 2023 11
Gambar 2. 4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 - 2024 (%) 12
Gambar 2. 5 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019 – 2023 13
Gambar 2. 6 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019 – 2023 14
Gambar 2. 7 Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023 15
Gambar 2. 8 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019-2023 (Maret) 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pela berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 92);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 27); ;
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib Pelayanan Dasar, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
   e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   f. Sosial
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
   a. Tenaga Kerja
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   c. Pangan
   d. Pertanahan
   e. Lingkungan Hidup
   f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan Informatika
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
l. Penanaman Modal
m. Kepemudaan dan Olahraga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Kehutanan
   e. Energi dan Sumber Daya Mineral
   f. Perdagangan
   g. Perindustrian
   h. Transmigrasi
4. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang
   a. Sekretariat Daerah
   b. Sekretariat DPRD
   c. Perencanaan
   d. Keuangan
   e. Kepegawaian
   f. Pendidikan dan Pelatihan
   g. Penelitian dan Pengembangan
   h. Pengelolaan Penghubung
   i. Inspektorat Daerah
   j. Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)
   a. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   b. Kebudayaan
   c. Tata Ruang
   d. Pertanahan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2024 mengacu pada Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Entitas Akuntansi di DIY

1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Kebudayaan
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan
17.	Dinas Pariwisata
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Sekretariat Daerah
22.	Sekretariat DPRD
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
25.	Badan Kepegawaian Daerah
26.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
27.	Badan Penghubung Daerah
28.	Inspektorat
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30.	Paniradya Kaistimewan

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
II.1. Ekonomi Makro
II.2. Kebijakan Keuangan
II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
III.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
IV.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
IV.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
IV.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada SKPD
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
V.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
V.1.1. Pendapatan-LRA
V.1.2. Belanja
V.1.3. Transfer
V.1.4. Pembiayaan Netto
V.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
V.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
V.1.1. Aset
V.3.2. Kewajiban
V.3.3. Ekuitas
V.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
V.4.1. Pendapatan-LO
V.4.2. Beban
V.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
V.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
V.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
V.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
V.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
V.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
V.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian DIY melanjutkan perkembangan kinerja yang membaik sepanjang triwulan I Tahun 2024 dengan melanjutkan dinamika perekonomian yang ekspansif semenjak perekonomian terdampak pandemi Covid-19 dan mulai membaiknya kondisi di Tahun 2021. Perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,58% (2021), 5,15% (2022) dan 5,07% (2023). Sementara itu, ekonomi DIY pada triwulan I Tahun 2024 tumbuh sebesar 0,91% q-to-q atau 5,02% y-on-y. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,05% y-on-y, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY saat liburan Idulfitri, Iduladha, dan liburan sekolah, peningkatan kinerja investasi sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi, dan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh kebutuhan makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan dinamika perekonomian DIY meneruskan kinerja ekspansif.

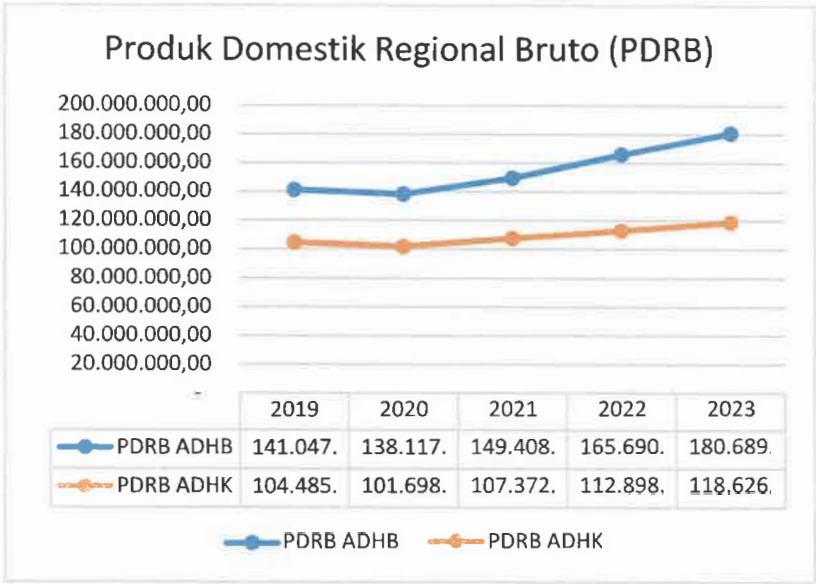
Meskipun sinyal positif perekonomian DIY di sepanjang Tahun 2024 ditunjukkan dengan kinerja ekspansif, beberapa perkembangan perekonomian nasional dan internasional patut dipertimbangkan dalam memprediksi kondisi perekonomian sepanjang Tahun 2024. Kondisi tersebut adalah adanya pemilukada di bulan November, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa Negara mitra dagang Indonesia, konflik geopolitik yang kurang kondusif.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi DIY yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu diantisipasi tantangan yang berasal dari perekonomian global maupun domestik.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023

Selama periode 2019 sampai 2023, perekonomian DIY menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2019, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp104,49 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp141,047 triliun. Tren PDRB ADHK dan ADHB meningkat sampai Tahun 2023 namun sempat menurun di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp118,63 triliun dan PDRB ADHB adalah Rp180,69 triliun.

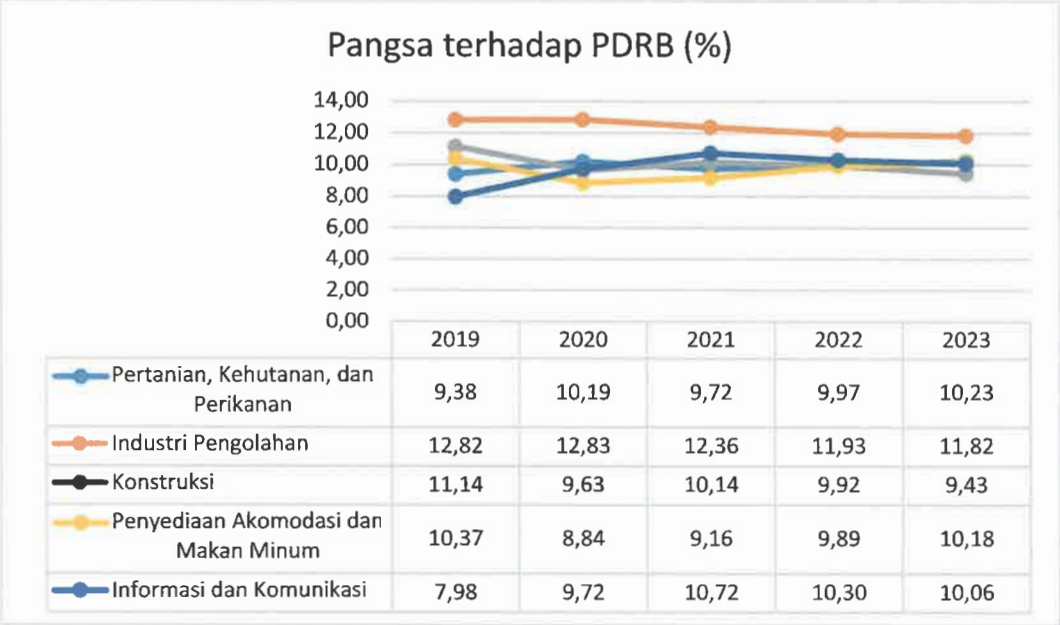
Gambar 2. 1
PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Selama Tahun 2023, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Perkembangan pangsa ke lima lapangan usaha tersebut menunjukkan dinamika. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada Tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut sampai Tahun 2023. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan sejak Tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini. Pada Tahun 2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 11,82%. Sementara itu, pangsa konstruksi adalah 9,43%, Informasi dan Komunikasi adalah 10,06% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 10,23% serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 10,18%.

Gambar 2. 2
Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019 – 2023

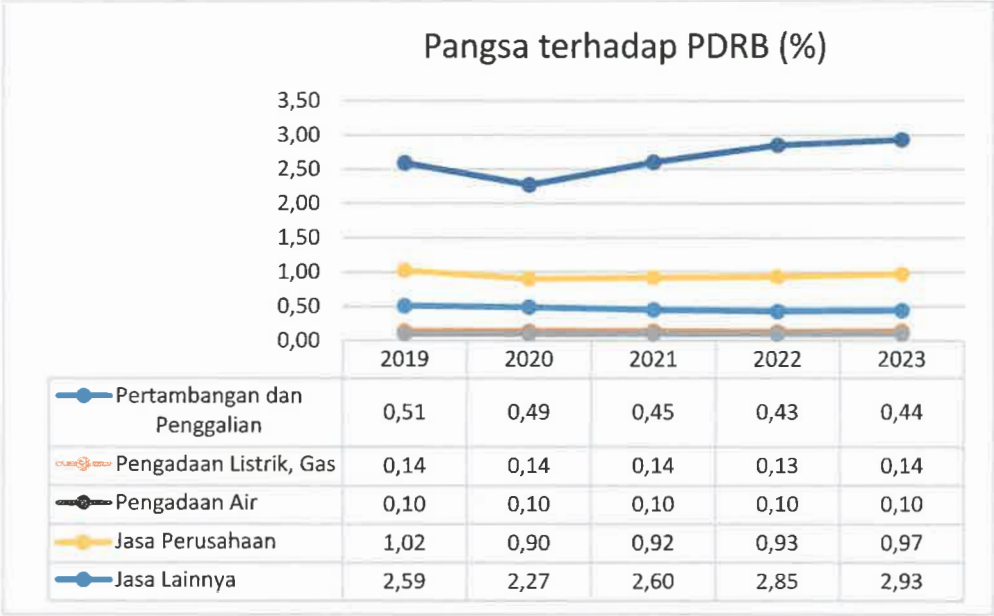


	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,38	10,19	9,72	9,97	10,23
Industri Pengolahan	12,82	12,83	12,36	11,93	11,82
Konstruksi	11,14	9,63	10,14	9,92	9,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,37	8,84	9,16	9,89	10,18
Informasi dan Komunikasi	7,98	9,72	10,72	10,30	10,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu. Sementara itu pangsa Jasa Lainnya menunjukkan tren peningkatan sejak Tahun 2020.

Gambar 2. 3
Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY (%), Tahun 2019 – 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,49	0,45	0,43	0,44
Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14
Pengadaan Air	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Jasa Perusahaan	1,02	0,90	0,92	0,93	0,97
Jasa Lainnya	2,59	2,27	2,60	2,85	2,93

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.2 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2019-2023, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, setelah menurun pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% selama Tahun 2019 – 2020 namun kemudian menurun menjadi kurang dari 62% pada tiga tahun terakhir. Pangsa Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori mengalami dinamika

Tabel 2. 1
PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019 – 2023

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	92.436.090	92.753.542	96.073.981	102.110.288	111.847.122
Konsumsi LNPRT	4.613.732	4.378.319	4.470.000	4.819.205	5.465.488
Konsumsi Pemerintah	22.434.454	22.889.807	23.707.981	24.184.623	25.582.648
Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.576.128	44.319.423	49.030.849	53.972.182	59.938.746
Perubahan Inventori	1.503.200	1.631.021	1.793.056	17.984.439	1.734.039
Net Ekspor Barang dan Jasa	(29.515.920)	(29.515.920)	(25.025.220)	(21.168.300)	(23.878.090)
PDRB	141.049.590	138.117.840	149.413.650	165.718.440	180.689.953

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Tabel 2. 2
Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%) 2019 – 2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi RT	65,54	67,16	64,30	61,62	61,90
Konsumsi LNPRT	3,27	3,17	2,99	2,91	3,02
Konsumsi Pemerintah	15,19	16,57	15,44	14,59	14,16
PMTB	35,15	33,09	32,82	32,57	33,17
Perubahan Inventori	1,07	1,18	1,20	1,09	0,96
Net Ekspor Antar Daerah	-20,93	-20,17	-16,75	-21,7	-13,21
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY 2024

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan pertumbuhan. Pada Tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021). Pada Tahun 2021, ekonomi DIY dapat *rebound* dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai Tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.

Gambar 2. 4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 - 2024 (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

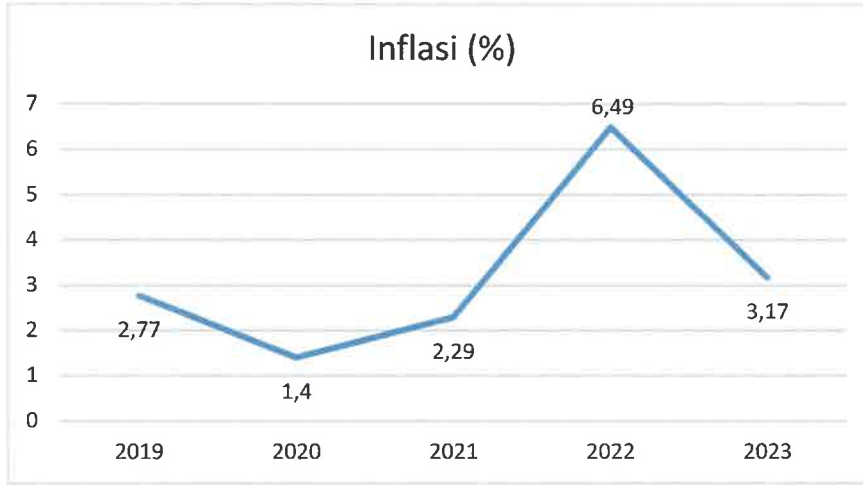
Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 diharapkan berkinerja baik setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak Tahun 2021 dengan proyeksi optimis mencapai 5,58%. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika sektor pendidikan. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak kondisi yang kurang kondusif seperti masih berlangsungnya perang di beberapa wilayah dunia pada Tahun 2023 sampai saat ini diprediksi masih melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamikan pariwisata DIY.

2.1.4 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika selama kurun waktu lima tahun, 2019-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 6,49% yang kemudian menurun di Tahun 2023 mencapai 3,17%. Sementara itu inflasi terendah terjadi di Tahun 2020 yaitu sebesar 1,4%.

Gambar 2. 5
Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.5 ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang meningkat pada periode 2020-2023. ICOR di Tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR naik dari 5,23 di Tahun 2021 menjadi 5,56 di Tahun 2023 yang menunjukkan terdapat penurunan efisiensi proses produksi selama periode.

Gambar 2. 6
Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.6 Ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah angkatan kerja tahun 2019-2023 menunjukkan dinamika jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di Tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di Tahun 2021. Namun di Tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukan tren menurun selama 2020-2023. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2023 adalah 3,69% dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 81.980 orang. Indikator ketenagakerjaan DIY Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3
Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2.291.690
Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	71.480	101.850	106.430	94.950	81.980
TPT (%)	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2019-2023 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada sub periode 2019 – 2021 dan kemudian menurun pada sub periode berikutnya. Selama sub periode pertama (2019-2021) jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 57.930 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Tahun 2023 menurun kembali sebanyak 57.930 orang dari Tahun 2021.

Tabel 2. 4
Kemiskinan di DIY Tahun 2019 – 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	448,47	475,72	506,4	454,76	448,47
Tingkat Kemiskinan (%)	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04

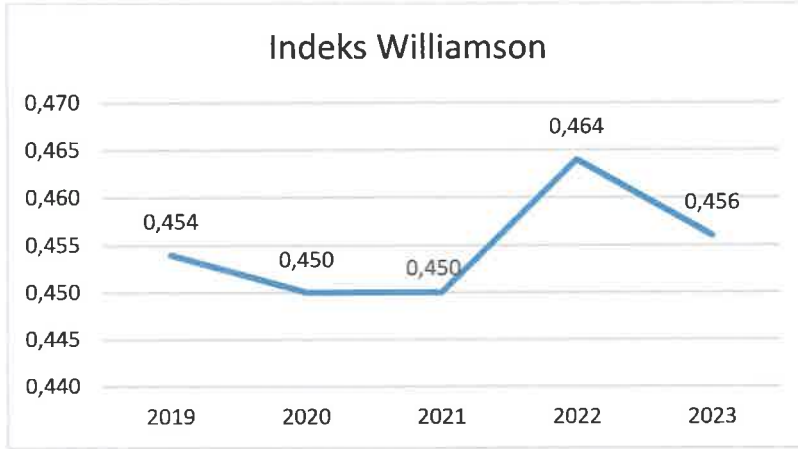
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,70% yang meningkat 12,80% di Tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian menurun menjadi 11,34% di Tahun 2022 dan kemudian menurun Kembali menjadi 11,04% di Tahun 2023.

2.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan *Indeks Williamson* (IW) menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada Tahun 2019 sampai 2021, ketimpangan regional menunjukkan penurunan. Sementara itu kenaikan ketimpangan terjadi dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Ketimpangan juga menurun di Tahun 2023, Indeks Willamson turun dari 0,464 (2022) menjadi 0,456 (2023).

Gambar 2. 7
Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023

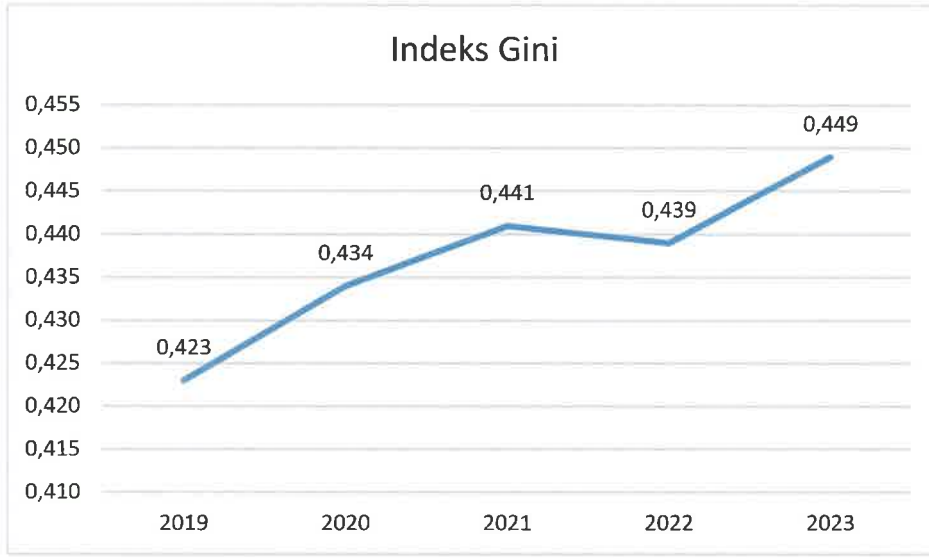


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung tren peningkatan dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Ketimpangan meningkat dari 0,423 (2019) menjadi 0,449 (2023) Pada Tahun 2022, Rasio Gini sempat menurun menjadi 0,439.

Gambar 2. 8
Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019-2023 (Maret)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasioanl (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan Tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024. Tema pembangunan Tahun 2024 yaitu:

"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik

   Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut

2. Pemerataan aktivitas ekonomi

   Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

2.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 *"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut;

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut;

Tabel 2. 5
Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target Tahun 2024
1.	*"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"*	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,16
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,1-5,6
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	30,23
				TPT	4,06	3,45-3,8

No	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target Tahun 2024
				Inflasi	6,49	3,45-3,8
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,38 – 81,56
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,78
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09
5.		Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan	Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62
			Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11

2.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di Tahun Anggaran 2025, mempersiapkan regulasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternalitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, dan karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam *Grand* Desain Keistimewaan Tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu Tata cara Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat

mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario *Moderate* karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

2.2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

4) Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
   a. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
   b. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
   c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
   d. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
   e. bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.
6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

1) Arah kebijakan penggunaan DBH
   a. mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan;
   b. memanfaatkan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat:
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   d. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
2) Arah kebijakan penggunaan DAU
   a. memanfaatkan DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundangan, antara lain untuk penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemenuhan SPM;
   b. memanfaatkan DAU untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DAU dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   d. mengelola DAU secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

3) Arah kebijakan penggunaan DAK
   a. memanfaatkan DAK sesuai dengan target keluaran (output) dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang yang telah disepakati bersama Kementerian Negara/Lembaga;
   b. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
   c. meningkatkan sinergi pendanaan DAK dengan sumber pendanaan lainnya; dan
   d. mengelola DAK secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
4) Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan
   a. memanfaatkan Dana Keistimewaan sesuai rencana kebutuhan dana keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait;
   b. memanfaatkan dana keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di DIY, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM;
   c. meningkatkan tata kelola pemanfaatan dana keistimewaan yang partisipatif;
   d. memperbaiki mekanisme tata kelola dana keistimewaan melalui keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemda DIY;
   e. meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan lainnya;
   f. mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan

infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Optimalisasi belanja

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi Ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes)* atau kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

2.2.4.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2. 6
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Kinerja Utama	*Baseline*	Target	
	2022	2023	2024
IGI (*Inclusive Growth Index*)	6,24	6,32	6,42
Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41
Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23
TPT	4,06	4,06-3,76	3,8-3,45
Inflasi	6,49	2-4	2-4
IPM	80,64	81,01	81,36
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78
Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09
Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	81,5	82,62
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11

2.2.4.2 Target Kinerja Pendapatan APBD 2024

Target Pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.839.779.293.114,00 dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp5.918.557.456.311,00 dan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp5.911.030.364.311,00 atau bertambah sebesar Rp71.251.071.197,00 adapun rincian dari Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 2024

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.289.884.435.884,00 dan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp64.097.985.184,00 menjadi sebesar Rp2.353.982.421.068,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.018.352.703.526,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.059.869.703.526,00 atau naik sebesar Rp41.517.000.000,00;

b. Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.804.109.600,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp73.205.530.203,00 atau naik sebesar Rp8.401.420.603,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp116.050.620.958,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp121.749.510.238,00 atau naik sebesar Rp5.698.889.280,00; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.677.001.800,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp99.157.677.101,00 atau naik sebesar Rp8.480.675.301,00.

2.2.4.2.2 Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.542.289.357.230,00 dan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp6.902.346.013,00 menjadi sebesar Rp3.549.191.703.243,00

a. Transfer Pemerintah Pusat
   Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.541.305.552.000,00 sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.548.207.898.013,00 atau naik sebesar Rp6.902.346.013,00.
b. Transfer Antar Daerah
   Target penerimaan dari transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp983.805.230,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak ada perubahan, sehingga anggaran tetap sebesar Rp983.805.230,00.

2.2.4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00, dan mengalami kenaikan saat Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 hingga menjadi Rp7.856.240.000,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp250.740.000,00.

2.2.4.3 Target Kinerja Belanja APBD 2024

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Belanja di Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.994.788.028.081,00 dan menjadi sebesar Rp6.001.565.896.865,00 pada saat Perubahan

Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 atau naik sebesar Rp6.777.868.784.00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

2.2.4.3.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.825.024.526.164,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.800.942.364.499,00 atau turun sebesar Rp24.082.161.665,00. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.793.350.372.623,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.752.750.894.932,00 atau turun sebesar Rp40.599.477.691,00;
2) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.220.376.247.664,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.237.669.188.360,00 atau naik sebesar Rp17.292.940.696,00;
3) Belanja Subsidi pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp91.653.295.477,00 sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 turun menjadi sebesar Rp82.570.477.931,00, atau turun sebesar Rp9.082.817.546,00.
4) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.646.245.400,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp672.421.760.776,00 atau naik sebesar Rp8.775.515.376,00; dan
5) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.998.365.000,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp55.530.042.500,00 atau turun sebesar Rp468.322.500,00.

2.2.4.3.2 Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp733.205.022.556,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp729.146.199.080,00 atau turun sebesar Rp4.058.823.476,00. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.241.355.000,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp36.434.585.000,00 atau naik sebesar Rp3.193.230.000,00;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.697.731.744,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp209.109.759.556,00 atau naik sebesar Rp31.412.027.812,00;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp347.957.496.677,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp281.419.731.340,00 atau turun sebesar Rp66.537.765.337,00;
4) Belanja ModalJalan, Irigasi, dan Jaringan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp158.933.789.100,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp185.585.676.953,00 atau naik sebesar Rp26.651.887.853,00; dan

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.430.081.035,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp11.727.993.431,00 atau naik sebesar Rp1.297.912.396,00.
6) Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.944.569.000,00 sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.868.452.800,00 atau turun sebesar Rp76.116.200,00.

2.2.4.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.607.995.743,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp12.443.010.243,00 atau turun sebesar Rp3.164.985.500,00.

2.2.4.3.4 Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.420.950.483.618,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp38.083.839.425,00 menjadi Rp1.459.034.323.043,00. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp848.882.026.968,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp881.009.565.433,00 atau naik sebesar Rp32.127.538.465,00; dan
2) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp572.068.456.650,00, sedangkan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp578.024.757.610,00 atau naik sebesar Rp5.956.300.960,00.

2.2.4.4 Target Kinerja Pembiayaan APBD 2024

2.2.4.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) adalah sebesar Rp457.508.734.967,00 Pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp293.035.532.554,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp164.473.202.413,00.

2.2.4.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jauh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari;

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp300.000.000.000,00 yang pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp100.000.000.000,00

2. Pemberian Pinjaman Daerah Rp2.500.000.000,00 direncanakan tidak mengalami perubahan pada Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2024.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp5.911.030.364.311,00 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.353.982.421.068,00, Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.549.191.703.243,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.856.240.000,00. Untuk Anggaran Belanja dan Transfer ditetapkan sebesar Rp6.001.565.896.865,00 dengan rincian anggaran Belanja Operasi sebesar Rp3.800.942.364.499,00, anggaran Belanja Modal sebesar Rp729.146.199.080,00, anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp12.443.010.243,00, dan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.459.034.323.043,00. Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2024 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;
2. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan wajib untuk dilaksanakan;
3. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak daerah;
4. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2024 dan prognosis;
5. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik; dan
6. Dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2024.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp6.001.565.896.865,00 turun sebesar Rp14.977.594.380,00 dibandingkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.016.543.491.245,00.

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.911.030.364.311,00 dapat direalisasikan sebesar Rp6.025.070.171.261,08 atau 101,93% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.481.506.565.559,08 atau 105,42% dari target setelah perubahan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.535.479.452.702,00 atau 99,61% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp8.084.153.000,00 atau 102,9% dari target setelah perubahan.

Kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp6.001.565.896.865,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.680.495.088.297,12 atau 94,65% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian

realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.589.908.402.394,35 atau 94,45% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, realisasi Belanja Modal sebesar Rp659.153.310.940,95 atau 90,40% dari target belanja setelah perubahan, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp20.000.000,00 atau 0,16% dari target belanja setelah perubahan, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.431.413.374.961,82 atau 98,11% dari target belanja setelah perubahan.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp293.035.532.554,00 dan realisasi sebesar Rp295.621.146.320,48 atau 100,88% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp295.260.470.320,48 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp360.676.000,00. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp202.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp202.500.000.000,00 atau 100,00% untuk Penyertaan Modal Kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp200.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp437.696.229.284,44 dan secara rinci realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
1	**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**8.057.737.678,00**	**10.036.257.045,00**	**1.978.519.367,00**	**124,55**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**8.057.737.678,00**	**10.036.257.045,00**	**1.978.519.367,00**	**124,55**
	Retribusi Daerah	7.256.484.000,00	8.989.547.692,00	1.733.063.692,00	123,88
	Lain-lain PAD yang Sah	801.253.678,00	1.046.709.353,00	245.455.675,00	130,63
	BELANJA DAERAH	**1.708.741.376.656,00**	**1.634.185.968.280,00**	**(74.555.408.376,00)**	**95,64**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.011.345.969.223,00	957.021.692.570,00	(54.324.276.653,00)	94,63
	Program Pengelolaan Pendidikan	612.073.410.833,00	592.656.217.018,00	(19.417.193.815,00)	96,83
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	462.475.000,00	454.906.594,00	(7.568.406,00)	98,36
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	50.000.000,00	34.490.000,00	(15.510.000,00)	68,98
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.165.534.300,00	6.088.646.075,00	(76.888.225,00)	98,75
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	43.934.328.000,00	43.888.937.700,00	(45.390.300,00)	99,90
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	32.914.378.400,00	32.254.043.875,00	(660.334.525,00)	97,99
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	295.280.900,00	287.034.448,00	(8.246.452,00)	97,21
2	**DINAS KESEHATAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**45.982.956.220,00**	**50.948.729.203,23**	**4.965.772.983,23**	**110,80**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**45.982.956.220,00**	**50.948.729.203,23**	**4.965.772.983,23**	**110,80**
	Retribusi Daerah	39.241.600.000,00	42.422.235.816,00	3.180.635.816,00	**108,11**
	Lain-lain PAD yang Sah	6.741.356.220,00	8.526.493.387,23	1.785.137.167,23	126,48
	BELANJA DAERAH	**304.501.252.292,00**	**263.710.832.509,35**	**(40.790.419.782,65)**	**86,60**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	192.409.413.867,00	154.818.745.770,35	(37.590.668.096,65)	80,46
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.225.888.113,00	80.715.078.954,00	(4.510.809.159,00)	94,71
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	507.357.600,00	2.200.090.972,00	1.692.733.372,00	433,64
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	24.308.800,00	23.621.552,00	(687.248,00)	97,17
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	57.430.000,00	52.598.500,00	(4.831.500,00)	91,59
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00	(363.139.151,00)	98,60
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	395.000.000,00	381.982.000,00	(13.018.000,00)	96,70
3	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**				
	BELANJA DAERAH	**24.530.819.318,00**	**23.541.861.132,00**	**(988.958.186,00)**	**95,97**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.134.126.668,00	10.552.733.328,00	(581.393.340,00)	94,78
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	28.609.400,00	27.709.400,00	(900.000,00)	96,85
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.633.358.600,00	3.524.691.455,00	(108.667.145,00)	97,01
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	9.120.700,00	9.120.700,00	-	100,00
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	252.238.000,00	228.823.000,00	(23.415.000,00)	90,72

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	9.473.365.950,00	9.198.783.249,00	(274.582.701,00)	97,10
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.946.620.000,00**	**2.613.207.501,00**	**666.587.501,00**	**134,24**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.946.620.000,00**	**2.613.207.501,00**	**666.587.501,00**	**134,24**
	Retribusi Daerah	1.946.620.000,00	2.613.207.500,00	666.587.500,00	134,24
	Lain-lain PAD yang Sah	-	1,00	1,00	-
	BELANJA DAERAH	**429.410.132.033,00**	**408.219.568.017,00**	**(21.190.564.016,00)**	**95,07**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.936.703.708,00	50.054.155.774,00	(3.882.547.934,00)	92,80
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	25.725.917.000,00	23.916.223.188,00	(1.809.693.812,00)	92,97
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.453.840.000,00	5.453.607.149,00	(232.851,00)	100,00
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	11.068.770.700,00	8.374.300.518,00	(2.694.470.182,00)	75,66
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	250.000.000,00	248.895.734,00	(1.104.266,00)	99,56
	Program Penataan Bangunan Gedung	230.940.000,00	230.922.751,00	(17.249,00)	99,99
	Program Penyelenggaraan Jalan	85.090.025.858,00	84.320.950.349,00	(769.075.509,00)	99,10
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	119.692.961.145,00	119.031.872.363,00	(661.088.782,00)	99,45
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.235.682.835,00	7.920.124.891,00	(315.557.944,00)	96,17
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.301.929.980,00	1.229.076.430,00	(72.853.550,00)	94,40
	Program Pengembangan Perumahan	462.500.000,00	447.534.171,00	(14.965.829,00)	96,76
	Program Kawasan Permukiman	17.526.340.000,00	16.278.243.696,00	(1.248.096.304,00)	92,88
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	78.420.000.000,00	69.476.664.418,00	(8.943.335.582,00)	88,60
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	19.687.518.800,00	18.926.386.019,00	(761.132.781,00)	96,13
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	534.034.000,00	532.435.354,00	(1.598.646,00)	99,70
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	844.971.566,00	831.419.282,00	(13.552.284,00)	98,40
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	375.927.941,00	375.515.533,00	(412.408,00)	99,89
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	572.068.500,00	571.240.397,00	(828.103,00)	99,86

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**211.350.000,00**	**255.812.000,00**	**44.462.000,00**	**121,04**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**211.350.000,00**	**255.812.000,00**	**44.462.000,00**	**121,04**
	Lain-lain PAD yang Sah	211.350.000,00	255.812.000,00	44.462.000,00	121,04
	BELANJA DAERAH	**31.048.002.124,00**	**30.001.581.447,00**	**(1.046.420.677,00)**	**96,63**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.890.165.724,00	14.932.452.105,00	(957.713.619,00)	93,97
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.986.710.800,00	1.963.311.800,00	(23.399.000,00)	98,82
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	519.870.400,00	519.771.250,00	(99.150,00)	99,98
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	12.651.255.200,00	12.586.046.292,00	(65.208.908,00)	99,48
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	BELANJA DAERAH	**17.995.141.028,00**	**17.047.525.142,00**	**(947.615.886,00)**	**94,73**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.266.154.928,00	12.417.579.161,00	(848.575.767,00)	93,60
	Program Penanggulangan Bencana	3.764.757.100,00	3.685.251.483,00	(79.505.617,00)	97,89
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	941.729.000,00	922.194.498,00	(19.534.502,00)	97,93
7	**DINAS SOSIAL**				
	PENDAPATAN DAERAH	**604.200.000,00**	**604.200.000,00**	**-**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**604.200.000,00**	**604.200.000,00**	**-**	**100,00**
	Retribusi Daerah	604.200.000,00	604.200.000,00	-	100,00
	BELANJA DAERAH	**103.377.175.688,00**	**99.308.689.542,00**	**(4.068.486.146,00)**	**96,06**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.305.501.488,00	49.628.803.709,00	(2.676.697.779,00)	94,88
	Program Pemberdayaan Sosial	1.381.971.700,00	1.373.529.185,00	(8.442.515,00)	99,39
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.299.750,00	1.242.650,00	(57.100,00)	95,61

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Rehabilitasi Sosial	44.071.775.300,00	42.798.543.701,00	(1.273.231.599,00)	97,11
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.060.466.950,00	2.025.425.374,00	(35.041.576,00)	98,30
	Program Penanganan Bencana	287.364.000,00	264.711.600,00	(22.652.400,00)	92,12
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	125.800.000,00	125.758.000,00	(42.000,00)	99,97
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.768.496.500,00	2.726.205.553,00	(42.290.947,00)	98,47
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	374.500.000,00	364.469.770,00	(10.030.230,00)	97,32
8	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**				
	BELANJA DAERAH	**17.635.032.090,00**	**16.694.734.147,00**	**(940.297.943,00)**	**94,67**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.884.935.440,00	10.237.574.269,00	(647.361.171,00)	94,05
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	778.500.000,00	757.648.500,00	(20.851.500,00)	97,32
	Program Perlindungan Perempuan	927.217.300,00	919.501.630,00	(7.715.670,00)	99,17
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	65.228.800,00	64.484.800,00	(744.000,00)	98,86
	Program Perlindungan Khusus Anak	198.282.700,00	193.285.421,00	(4.997.279,00)	97,48
	Program Pengendalian Penduduk	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	34.500.000,00	34.500.000,00	-	100,00
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.739.867.850,00	4.481.239.527,00	(258.628.323,00)	94,54
9	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**10.162.718.846,00**	**8.492.161.067,00**	**(1.670.557.779,00)**	**83,56**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**10.162.718.846,00**	**8.492.161.067,00**	**(1.670.557.779,00)**	**83,56**
	Retribusi Daerah	8.440.760.953,00	6.966.721.624,00	(1.474.039.329,00)	82,54

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Lain-lain PAD yang Sah	1.721.957.893,00	1.525.439.443,00	(196.518.450,00)	88,59
	BELANJA DAERAH	**64.876.838.222,00**	**60.640.901.749,00**	**(4.235.936.473,00)**	**93,47**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	90.000.000,00	89.888.950,00	(111.050,00)	99,88
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	117.355.000,00	117.354.750,00	(250,00)	100,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.379.477.261,00	45.076.241.303,00	(3.303.235.958,00)	93,17
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	276.319.300,00	252.869.425,00	(23.449.875,00)	91,51
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.077.901.250,00	1.062.630.316,00	(15.270.934,00)	-
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.860.000,00	10.860.000,00	-	100,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	195.207.800,00	194.544.986,00	(662.814,00)	99,66
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	285.566.000,00	282.995.800,00	(2.570.200,00)	99,10
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000,00	99.951.735,00	(48.265,00)	99,95
	Program Pengelolaan Persampahan	7.509.199.151,00	6.808.404.873,00	(700.794.278,00)	90,67
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	806.000.000,00	785.282.968,00	(20.717.032,00)	97,43
	Program Pengelolaan Hutan	5.282.208.760,00	5.117.008.637,00	(165.200.123,00)	96,87
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	247.903.400,00	247.744.480,00	(158.920,00)	99,94
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	498.840.300,00	495.123.526,00	(3.716.774,00)	99,25
10	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**2.671.641.550,00**	**3.156.612.082,00**	**484.970.532,00**	**118,15**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.671.641.550,00**	**3.156.612.082,00**	**484.970.532,00**	**118,15**
	Retribusi Daerah	2.622.641.550,00	2.992.510.862,00	369.869.312,00	114,10
	Lain-lain PAD yang Sah	49.000.000,00	164.101.220,00	115.101.220,00	334,90

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	**136.721.563.394,00**	**126.358.226.146,00**	**(10.363.337.248,00)**	**92,42**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	23.792.598.172,00	22.921.147.884,00	(871.450.288,00)	96,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.699.647.903,00	19.616.567.894,00	(1.083.080.009,00)	94,77
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	92.229.317.319,00	83.820.510.368,00	(8.408.806.951,00)	90,88
11	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	PENDAPATAN DAERAH	**151.800.000,00**	**153.020.000,00**	**1.220.000,00**	**100,80**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**151.800.000,00**	**153.020.000,00**	**1.220.000,00**	**100,80**
	Retribusi Daerah	151.800.000,00	153.020.000,00	1.220.000,00	100,80
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**48.263.566.594,00**	**47.147.354.388,00**	**(1.116.212.206,00)**	**97,69**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.481.197.694,00	10.776.786.001,00	(704.411.693,00)	93,86
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.956.157.200,00	2.887.211.008,00	(68.946.192,00)	97,67
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	50.000.000,00	48.319.547,00	(1.680.453,00)	96,64
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.000.000,00	24.797.460,00	(202.540,00)	99,19
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	33.751.211.700,00	33.410.240.372,00	(340.971.328,00)	98,99
12	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**384.200.000,00**	**755.330.123,00**	**371.130.123,00**	**196,60**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**384.200.000,00**	**755.330.123,00**	**371.130.123,00**	**196,60**
	Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	380.000.000,00	751.130.123,00	371.130.123,00	197,67
	BELANJA DAERAH	**191.217.673.782,00**	**183.749.128.596,00**	**(7.468.545.186,00)**	**96,09**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.284.005.250,00	1.163.461.359,00	(120.543.891,00)	90,61
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.877.503.804,00	13.738.733.126,00	(1.138.770.678,00)	92,35
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	777.892.000,00	774.120.640,00	(3.771.360,00)	99,52
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	254.698.000,00	244.316.000,00	(10.382.000,00)	95,92
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6.308.456.700,00	6.201.476.120,00	(106.980.580,00)	98,30
	Program Pengembangan Umkm	1.660.035.500,00	1.526.948.400,00	(133.087.100,00)	91,98
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	166.034.632.528,00	160.079.622.951,00	(5.955.009.577,00)	96,41
13	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				
	PENDAPATAN DAERAH	**319.680.000,00**	**165.090.000,00**	**(154.590.000,00)**	**51,64**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**319.680.000,00**	**165.090.000,00**	**(154.590.000,00)**	**51,64**
	Retribusi Daerah	319.680.000,00	165.090.000,00	(154.590.000,00)	51,64
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**13.252.858.850,00**	**12.482.470.313,00**	**(770.388.537,00)**	**94,19**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.934.883.550,00	9.312.338.942,00	(622.544.608,00)	93,73
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	250.150.000,00	220.715.460,00	(29.434.540,00)	88,23
	Program Promosi Penanaman Modal	195.150.000,00	193.330.000,00	(1.820.000,00)	99,07
	Program Pelayanan Penanaman Modal	258.828.850,00	257.643.599,00	(1.185.251,00)	99,54
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.544.994.000,00	1.469.036.186,00	(75.957.814,00)	95,08
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.220.750,00	69.865.549,00	(355.201,00)	99,49
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	998.631.700,00	959.540.577,00	(39.091.123,00)	96,09
14	**DINAS KEBUDAYAAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**4.930.500.000,00**	**6.239.461.601,00**	**1.308.961.601,00**	**126,55**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**4.930.500.000,00**	**6.239.461.601,00**	**1.308.961.601,00**	**126,55**
	Retribusi Daerah	4.830.500.000,00	6.217.380.000,00	1.386.880.000,00	128,71
	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	22.081.601,00	(77.918.399,00)	22,08

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA DAERAH	**410.106.725.106,00**	**405.676.354.946,00**	**(4.430.370.160,00)**	**98,92**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.722.392.300,00	28.275.307.304,00	(1.447.084.996,00)	95,13
	Program Pengelolaan Permuseuman	2.000.000.000,00	1.962.054.145,00	(37.945.855,00)	98,10
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	376.384.332.806,00	373.447.248.537,00	(2.937.084.269,00)	99,22
	Program Pengembangan Kebudayaan	2.000.000.000,00	1.991.744.960,00	(8.255.040,00)	99,59
15	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**780.800.000,00**	**1.088.329.189,00**	**307.529.189,00**	**139,39**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**780.800.000,00**	**1.088.329.189,00**	**307.529.189,00**	**139,39**
	Retribusi Daerah	780.800.000,00	1.087.085.500,00	306.285.500,00	139,23
	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.243.689,00	1.243.689,00	-
	BELANJA DAERAH	**35.552.885.543,00**	**33.829.297.726,00**	**(1.723.587.817,00)**	**95,15**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	5.887.595.650,00	5.810.898.639,00	(76.697.011,00)	98,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.460.693.043,00	18.887.356.504,00	(1.573.336.539,00)	92,31
	Program Pembinaan Perpustakaan	9.077.326.800,00	9.021.176.363,00	(56.150.437,00)	99,38
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	11.625.000,00	11.589.499,00	(35.501,00)	99,69
	Program Pengelolaan Arsip	115.645.050,00	98.276.721,00	(17.368.329,00)	84,98
16	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.144.798.500,00**	**1.156.747.102,00**	**11.948.602,00**	**101,04**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.144.798.500,00**	**1.156.747.102,00**	**11.948.602,00**	**101,04**
	Retribusi Daerah	1.144.798.500,00	1.156.747.100,00	11.948.600,00	101,04
	Lain-lain PAD yang Sah	-	2,00	2,00	-
	BELANJA DAERAH	**56.693.665.046,00**	**53.201.865.281,30**	**(3.491.799.764,70)**	**93,84**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	476.911.200,00	459.268.125,00	(17.643.075,00)	96,30
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	7.213.680.000,00	7.003.523.928,00	(210.156.072,00)	97,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.463.794.196,00	23.098.580.878,00	(1.365.213.318,00)	94,42

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.889.086.000,00	1.653.260.445,30	(235.825.554,70)	87,52
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.972.808.000,00	1.943.778.700,00	(29.029.300,00)	98,53
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	13.117.099.000,00	11.607.821.196,00	(1.509.277.804,00)	88,49
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	462.150.000,00	448.363.075,00	(13.786.925,00)	97,02
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.098.136.650,00	6.987.268.934,00	(110.867.716,00)	98,44
17	**DINAS PARIWISATA**				
	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**36.600.828.938,00**	**34.275.238.735,00**	**(2.325.590.203,00)**	**93,65**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.400.000.000,00	1.394.705.594,00	(5.294.406,00)	99,62
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	18.667.550.500,00	18.142.276.938,00	(525.273.562,00)	97,19
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.699.766.338,00	10.442.780.748,00	(1.256.985.590,00)	89,26
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.186.730.850,00	1.817.781.512,00	(368.949.338,00)	83,13
	Program Pemasaran Pariwisata	462.811.950,00	454.837.513,00	(7.974.437,00)	98,28
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	174.283.000,00	172.769.000,00	(1.514.000,00)	99,13
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.009.686.300,00	1.850.087.430,00	(159.598.870,00)	92,06
18	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**1.977.758.500,00**	**2.135.611.897,00**	**157.853.397,00**	**107,98**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.977.758.500,00**	**2.135.611.897,00**	**157.853.397,00**	**107,98**
	Retribusi Daerah	1.977.758.500,00	2.135.611.897,00	157.853.397,00	107,98
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**104.567.854.058,00**	**96.916.093.960,00**	**(7.651.760.098,00)**	**92,68**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.608.885.000,00	1.556.674.162,00	(52.210.838,00)	96,75

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	947.933.000,00	933.567.900,00	(14.365.100,00)	98,48
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	81.993.500,00	81.981.000,00	(12.500,00)	99,98
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.411.700,00	84.014.707,00	(1.396.993,00)	98,36
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	82.396.000,00	82.396.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	8.992.561.950,00	8.484.164.159,00	(508.397.791,00)	94,35
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.507.465.472,00	48.155.463.871,00	(3.352.001.601,00)	93,49
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.460.203.571,00	26.067.895.108,00	(2.392.308.463,00)	91,59
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.812.334.865,00	6.817.341.753,00	(994.993.112,00)	87,26
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.274.262.000,00	2.195.598.900,00	(78.663.100,00)	96,54
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	42.253.000,00	41.452.000,00	(801.000,00)	98,10
	Program Penyuluhan Pertanian	2.672.154.000,00	2.415.544.400,00	(256.609.600,00)	90,40
19	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**315.400.000,00**	**330.285.624,00**	**14.885.624,00**	**104,72**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**315.400.000,00**	**330.285.624,00**	**14.885.624,00**	**104,72**
	Retribusi Daerah	315.400.000,00	330.285.624,00	14.885.624,00	104,72
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**60.948.275.202,00**	**57.499.447.388,00**	**(3.448.327.314,00)**	**94,34**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1.552.176.500,00	1.536.884.157,00	(15.292.343,00)	99,01
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	12.571.007.527,00	11.996.421.151,00	(574.586.376,00)	95,43
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	9.999.700,00	9.621.847,00	(377.853,00)	96,22
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.852.606.000,00	1.847.797.106,00	(4.808.894,00)	99,74
	Program Pengembangan Ekspor	172.999.400,00	166.857.122,00	(6.142.278,00)	96,45
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	175.399.762,00	172.383.731,00	(3.016.031,00)	98,28

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	194.950.000,00	191.207.993,00	(3.742.007,00)	98,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.737.808.055,00	17.334.219.402,00	(1.403.588.653,00)	92,51
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	24.850.822.258,00	23.454.950.791,00	(1.395.871.467,00)	94,38
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	14.506.000,00	14.005.500,00	-	-
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	815.000.000,00	774.098.588,00	(40.901.412,00)	94,98
20	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				
	PENDAPATAN DAERAH	**2.085.811.000,00**	**1.940.626.113,00**	**(145.184.887,00)**	**93,04**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.085.811.000,00**	**1.940.626.113,00**	**(145.184.887,00)**	**93,04**
	Retribusi Daerah	1.869.811.000,00	1.726.626.000,00	(143.185.000,00)	92,34
	Lain-lain PAD yang Sah	216.000.000,00	214.000.113,00	(1.999.887,00)	99,07
	BELANJA DAERAH	**75.967.659.908,00**	**72.081.668.422,00**	**(3.885.991.486,00)**	**94,88**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.772.899.058,00	33.015.803.351,00	(1.757.095.707,00)	94,95
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000,00	9.792.600,00	(207.400,00)	97,93
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	23.807.020.750,00	21.807.751.511,00	(1.999.269.239,00)	-
	Program Penempatan Tenaga Kerja	61.969.000,00	61.946.944,00	(22.056,00)	99,96
	Program Hubungan Industrial	314.100.000,00	313.795.013,00	(304.987,00)	99,90
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	693.115.500,00	634.429.664,00	(58.685.836,00)	91,53
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	16.026.955.600,00	15.959.759.364,00	(67.196.236,00)	99,58
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	197.046.100,00	(2.953.900,00)	98,52
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	81.600.000,00	81.343.875,00	(256.125,00)	-
21	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**63.580.000,00**	**155.917.493,00**	**92.337.493,00**	**245,23**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**63.580.000,00**	**155.917.493,00**	**92.337.493,00**	**245,23**

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Retribusi Daerah	45.580.000,00	45.580.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000,00	110.337.493,00	92.337.493,00	612,99
	BELANJA DAERAH	**145.178.763.287,00**	**135.899.298.916,00**	**(9.279.464.371,00)**	**93,61**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.572.125.000,00	3.542.005.630,00	(30.119.370,00)	99,16
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	407.979.850,00	387.832.884,00	(20.146.966,00)	95,06
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	351.353.000,00	341.003.900,00	(10.349.100,00)	97,05
	Program Pendaftaran Penduduk	1.238.648.600,00	1.214.606.920,00	(24.041.680,00)	98,06
	Program Pencatatan Sipil	88.915.000,00	87.462.700,00	(1.452.300,00)	98,37
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	69.400.000,00	68.946.400,00	(453.600,00)	99,35
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	33.646.200,00	30.332.000,00	(3.314.200,00)	90,15
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.767.336.500,00	4.659.658.247,00	(107.678.253,00)	97,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95.771.763.007,00	87.847.950.337,00	(7.923.812.670,00)	91,73
	Program Kesejahteraan Rakyat	29.994.039.250,00	29.247.885.545,00	(746.153.705,00)	97,51
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	577.614.900,00	557.584.486,00	(20.030.414,00)	96,53
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	4.080.981.150,00	3.787.194.357,00	(293.786.793,00)	92,80
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	2.568.703.380,00	2.513.350.863,00	(55.352.517,00)	97,85
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	986.897.600,00	979.395.300,00	(7.502.300,00)	99,24
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	254.640.000,00	253.036.880,00	(1.603.120,00)	99,37
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	254.999.850,00	254.033.050,00	(966.800,00)	99,62
	Program Penataan Organisasi	159.720.000,00	127.019.417,00	(32.700.583,00)	79,53
22	**SEKRETARIAT DPRD**				
	BELANJA DAERAH	**177.851.175.565,00**	**117.864.216.057,00**	**(59.986.959.508,00)**	**66,27**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	952.407.200,00	669.642.400,00	(282.764.800,00)	70,31
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	111.798.519.765,00	62.326.103.483,00	(49.472.416.282,00)	55,75

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	65.100.248.600,00	54.868.470.174,00	(10.231.778.426,00)	84,28
23	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				
	BELANJA DAERAH	**23.096.937.640,00**	**21.289.780.694,00**	**(1.807.156.946,00)**	**92,18**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.667.702.705,00	18.084.410.522,00	(1.583.292.183,00)	91,95
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	238.481.200,00	231.748.223,00	(6.732.977,00)	97,18
	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.430.270.235,00	2.228.578.344,00	(201.691.891,00)	91,70
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	628.647.000,00	617.794.472,00	(10.852.528,00)	-
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	131.836.500,00	127.249.133,00	(4.587.367,00)	96,52
24	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**				
	PENDAPATAN DAERAH	**5.825.466.993.017,00**	**5.930.987.939.720,85**	**105.520.946.703,85**	**101,81**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.268.419.049.774,00**	**2.387.424.334.018,85**	**119.005.284.244,85**	**105,25**
	Pajak Daerah	2.059.869.703.526,00	2.157.532.293.945,00	97.662.590.419,00	104,74
	Retribusi Daerah	895.195.700,00	1.030.316.927,00	135.121.227,00	115,09
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121.749.510.238,00	120.935.677.671,93	(813.832.566,07)	99,33
	Lain-lain PAD yang Sah	85.904.640.310,00	107.926.045.474,92	22.021.405.164,92	125,63
	PENDAPATAN TRANSFER	**3.549.191.703.243,00**	**3.535.479.452.702,00**	**(13.712.250.541,00)**	**99,61**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.548.207.898.013,00	3.534.495.647.472,00	(13.712.250.541,00)	99,61
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230,00	983.805.230,00	-	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**227.913.000,00**	**102,90**
	Pendapatan Hibah	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	227.913.000,00	102,90
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	BELANJA DAERAH	**1.584.691.790.385,00**	**1.537.025.735.371,82**	**(47.666.055.013,18)**	**96,99**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	102.342.924.899,00	95.615.087.222,00	(6.727.837.677,00)	93,43
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.473.409.799.686,00	1.433.133.487.139,82	(40.276.312.546,18)	97,27
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.316.501.500,00	2.148.376.867,00	(168.124.633,00)	92,74

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.622.564.300,00	6.128.784.143,00	(493.780.157,00)	92,54
25	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**317.970.000,00**	**334.730.000,00**	**16.760.000,00**	**105,27**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**317.970.000,00**	**334.730.000,00**	**16.760.000,00**	**105,27**
	Retribusi Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
	Lain-lain PAD yang Sah	310.770.000,00	327.530.000,00	16.760.000,00	105,39
	BELANJA DAERAH	**81.366.337.093,00**	**80.131.761.224,00**	**(1.234.575.869,00)**	**98,48**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.015.380.850,00	970.047.497,00	(45.333.353,00)	95,54
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	77.144.194.793,00	76.359.216.745,00	(784.978.048,00)	98,98
	Program Kepegawaian Daerah	3.206.761.450,00	2.802.496.982,00	(404.264.468,00)	87,39
26	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	PENDAPATAN DAERAH	**2.879.049.000,00**	**2.915.058.500,00**	**36.009.500,00**	**101,25**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.879.049.000,00**	**2.915.058.500,00**	**36.009.500,00**	**101,25**
	Retribusi Daerah	175.700.000,00	211.690.000,00	35.990.000,00	120,48
	Lain-lain PAD yang Sah	2.703.349.000,00	2.703.368.500,00	19.500,00	100,00
	BELANJA DAERAH	**20.294.794.343,00**	**18.670.187.531,00**	**(1.624.606.812,00)**	**91,99**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.306.293.780,00	1.190.955.190,00	(115.338.590,00)	91,17
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.322.361.363,00	14.357.951.083,00	(964.410.280,00)	93,71
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.666.139.200,00	3.121.281.258,00	(544.857.942,00)	85,14
27	**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**				
	PENDAPATAN DAERAH	**574.800.000,00**	**605.045.000,00**	**30.245.000,00**	**105,26**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**574.800.000,00**	**605.045.000,00**	**30.245.000,00**	**105,26**
	Retribusi Daerah	574.800.000,00	601.545.000,00	26.745.000,00	104,65
	Lain-lain PAD yang Sah	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	BELANJA DAERAH	**11.922.635.013,00**	**11.295.072.195,00**	**(627.562.818,00)**	**94,74**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4.124.018.800,00	4.108.079.863,00	(15.938.937,00)	99,61

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.608.402.613,00	7.013.109.504,00	(595.293.109,00)	92,18
	Program Pelayanan Penghubung	190.213.600,00	173.882.828,00	(16.330.772,00)	91,41
28	**INSPEKTORAT**				
	BELANJA DAERAH	**25.960.592.099,00**	**24.570.692.785,00**	**(1.389.899.314,00)**	**94,65**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.775.482.299,00	18.454.027.482,00	(1.321.454.817,00)	93,32
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.784.086.950,00	5.732.203.989,00	(51.882.961,00)	99,10
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	401.022.850,00	384.461.314,00	(16.561.536,00)	95,87
29	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	BELANJA DAERAH	**29.676.129.323,00**	**28.419.558.979,00**	**(1.256.570.344,00)**	**95,77**
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.340.306.500,00	2.153.547.006,00	(186.759.494,00)	92,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.560.918.523,00	8.852.796.984,00	(708.121.539,00)	92,59
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.594.022.900,00	2.375.918.614,00	(218.104.286,00)	91,59
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	11.745.337.500,00	11.677.490.985,00	(67.846.515,00)	99,42
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	216.953.200,00	215.408.402,00	(1.544.798,00)	99,29
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	742.423.700,00	726.693.938,00	(15.729.762,00)	97,88
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.476.167.000,00	2.417.703.050,00	(58.463.950,00)	97,64
30	**PANIRADYA KAISTIMEWAN**				
	BELANJA DAERAH	**29.517.416.245,00**	**28.759.976.677,65**	**(757.439.567,35)**	**97,43**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.563.527.225,00	8.187.462.644,00	(376.064.581,00)	95,61

NO.	SKPD	ANGGARAN		BERLEBIH/(BERKURANG)	
		PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	(%)
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	20.953.889.020,00	20.572.514.033,65	(381.374.986,35)	98,18
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.911.030.364.311,00**	**6.025.070.171.261,08**	**114.039.806.950,08**	**101,93**
	JUMLAH BELANJA	**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**	**(321.070.808.567,88)**	**94,65**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(90.535.532.554,00)**	**344.575.082.963,96**	**435.110.615.517,96**	**(380,60)**
	Penerimaan Pembiayaan	**293.035.532.554,00**	**295.621.146.320,48**	**2.585.613.766,48**	**100,88**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	2.224.937.766,48	**100,76**
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	360.676.000,00	360.676.000,00	-
	Pengeluaran Pembiayaan	**202.500.000.000,00**	**202.500.000.000,00**	**-**	**100,00**
	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-	100,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**90.535.532.554,00**	**93.121.146.320,48**	**2.585.613.766,48**	**102,86**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**437.696.229.284,44**	**437.696.229.284,44**	**-**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024. Perubahan tersebut antara lain klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Adapun secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
   a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
   b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
   c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
   d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
   e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
   f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi *Covid*-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi *Covid*-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja diakui pada saat:
   a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun SKPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
   b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
   c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
   d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.
   e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.

3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
4) Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran, sedangkan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Transfer

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban diakui pada saat:
   a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
   b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
   c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan laporan arus kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Lainnya.
2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
    a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
    b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
    c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, ~~dan~~ Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah.
5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
9) Penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak

tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Tabel 4. 1
Kualitas Piutang Pajak

Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas
Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah *(force majeur)*.

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Tabel 4. 2
Kualitas Piutang Retribusi

Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau

	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Tabel 4. 3
Kualitas Piutang Lainnya

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:

a) Belanja Bahan
b) Belanja Suku Cadang
c) Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
d) Belanja Obat-obatan
e) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
f) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
g) Belanja Natura dan Pakan
h) Belanja Persediaan Penelitian
i) Belanja Persediaan dalam Proses
j) Belanja Komponen
k) Belanja Pipa
l) Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas

3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan dicatat maksimal setiap semester.
5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
6) Persediaan diukur sebagai berikut:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
   d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
   e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lainnya.

j. Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang

tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
    a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
    b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
    c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:

    a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
    b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
    c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan

bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.

15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Kualitas Dana Bergulir

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Besaran Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
    a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
    b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
    c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
        - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
        - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
        - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.

20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada

keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dariInvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
   a) Berwujud.
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
   f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
   g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 4. 7
Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.

7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
   a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
   b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
    Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    a) Biaya persiapan tempat.
    b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
    c) Biaya pemasangan.
    d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
    e) Biaya konstruksi.
12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeologicalsites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
    a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
    b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
    c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
    d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
   a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
   b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
   c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
5) DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.
6) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
   b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
   c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namunBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.

h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.

i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum dilakukan usulan penghapusan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak bisa dilanjutkan pembangunan konstruksinya, perlu dilakukan kajian atas Konstruksi Dalam Pengerjaan oleh SKPD yang mengusulkan.

m. Dana Cadangan

1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
   a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d) Sumber dana cadangan; dan
e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
3) Dana cadangan diakui pada saat penerbitan SP2D LS dan terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, dan Dana Transfer Treasury Deposit Fasility (TDF).
3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
   a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
   b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
   c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

g) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.

h) Dalam hal penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terdapat selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku kemitraan dengan pihak ketiga, maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

j) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu.

4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
   a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
   c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
   d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
   e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
   f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
   g) Kas yang dibatasi penggunaanya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu.

o. Aset Tak Berwujud

1) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaituATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Software, Kajian, Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai

Sejarah/Budaya, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud Lainnya.

6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
   a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
   b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
      - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
      - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
        - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
        - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
        - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
        - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
        - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
        - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
      - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
        - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
        - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
        - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
        - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
   c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
   d) *Software* diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
   e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware*

(tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.

f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.

e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage asets)* tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensialyang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computerharus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di

masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses

penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
    a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
    b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Utang kepada Masyarakat.
3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
    b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diakui pada saat Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan perjanjian Pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi.

e) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

f) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.

h) Utang kepada Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman

i) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman

j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman

k) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:

a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.

b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Utang Pinjaman Jangka Pendek diukur sebesar pinjaman yang diterima di Kas Daerah.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

e) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

f) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.

h) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diukur sebesar nilai transfer yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang kekurangan transfer bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota

i) Utang Kepada Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

j) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

k) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diukur sebesar jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

l) Utang kepada Masyarakat dalam bentuk Obligasi diukur sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah.

5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.

6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.

b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

   a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan
   Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

   b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

   - Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
   - Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun aset yang bersangkutan.
   - Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat.Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

v. Properti Investasi

1) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :
   - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
3) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
4) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   - Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   - Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

5) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

   Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

6) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

   Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

   Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

   Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
   a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
      - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
      - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
   b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
      - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
   c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
      - Pengadaan tanah
      - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
      - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
   a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
   b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
   e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
   f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai

meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
   a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
   b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
   c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
   a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
   b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
   a) Pengadaan/pembelian tanah
   b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
   c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,

Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
   b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1 Pendapatan Daerah	**Rp6.025.070.171.261,08**	**Rp5.840.561.001.091,65**

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp5.911.030.364.311,00 direalisasikan sebesar Rp6.025.070.171.261,08 atau 101,93%. Realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp6.025.070.171.261,08 mengalami kenaikan sebesar Rp184.509.170.169,43 atau 3,16% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.840.561.001.091,65. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	**Rp2.481.506.565.559,08**	**Rp2.368.679.166.252,65**

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.353.982.421.068,00 dan di realisasikan sebesar Rp2.481.506.565.559,08 atau 105,42%. Realisasi pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp2.481.506.565.559,08 mengalami kenaikan sebesar Rp112.827.399.306,43 atau 4,76% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.368.679.166.252,65. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.1.1 Pajak Daerah	**Rp2.157.532.293.945,00**	**Rp2.069.612.267.000,57**

Pendapatan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp2.059.869.703.526,00 direalisasikan sebesar Rp2.157.532.293.945,00 atau 104,74%. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah sehingga realisasinya bisa melampaui anggaran antara lain:

1) pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak baru,
2) penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pajak daerah,
3) optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking, e-commerce* Gopay),
4) peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak,
5) meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, operasi bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah,
6) melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli),
7) pengembangan Samsat *Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol) dan E-Posti, serta
8) penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah.

Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pajak Daerah**				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	982.285.000.000,00	1.041.662.985.900,00	106,04	978.969.042.100,00
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	423.799.000.000,00	453.957.069.400,00	107,12	440.843.761.300,00
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	350.000.000.000,00	372.113.724.291,00	106,32	369.593.604.698,57
d	Pajak Air Permukaan	547.327.500,00	806.104.996,00	147,28	612.386.532,00
e	Pajak rokok	303.208.376.026,00	288.962.709.258,00	95,30	279.593.472.370,00
f	Pajak Alat Berat	30.000.000,00	29.700.100,00	99,00	0
Jumlah		**2.059.869.703.526,00**	**2.157.532.293.945,00**	**104,74**	**2.069.612.267.000,57**

Anggaran dan realisasi pajak daerah per obyek pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp982.285.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.041.662.985.900,00 atau sebesar 106,04%
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan sebesar Rp423.799.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp453.957.069.400,00 atau sebesar 107,12%
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggarkan sebesar Rp350.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp372.113.724.291,00 atau sebesar 106,32%
4) Pajak Air Permukaan dianggarkan sebesar Rp547.327.500,00 dan realisasinya sebesar Rp806.104.996,00 atau sebesar 147,28%
5) Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp303.208.376.026,00 dan realisasinya sebesar Rp288.962.709.258,00 atau sebesar 95,30%
6) Pajak Alat Berat dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp29.700.100,00 atau sebesar 99%.

	Tahun 2024	**Tahun 2023**
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah	**Rp79.460.801.542,00**	**Rp33.213.267.052,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp73.205.530.203,00 dan realisasi sebesar Rp79.460.801.542,00 atau 108,54%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp46.247.534.490 atau 139,24% dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp33.213.267.052,00. Salah satu faktor yang berperan cukup signifikan dalam peningkatan realisasi retribusi daerah adalah pergeseran rekening pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan BLUD pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya direalisasikan pada akun Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan BLUD

direalisasikan pada 2 (dua) rekening yaitu di Retribusi Daerah dan di Lain-lain PAD yang Sah. Secara umum pergeseran rekening pada akun-akun pendapatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2024 tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 2

Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Retribusi Daerah**				
a	Retribusi Jasa Umum	43.218.603.653,00	47.595.121.875,00	110,13	14.067.477.391,00
b	Retribusi Jasa Usaha	29.667.726.550,00	31.701.069.667,00	106,85	19.123.024.661,00
c	Retribusi Perijinan Tertentu	319.200.000,00	164.610.000,00	51,57	22.765.000,00
Jumlah		**73.205.530.203,00**	**79.460.801.542,00**	**108,54**	**33.213.267.052,00**

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp43.218.603.653,00 dan direalisasikan sebesar Rp47.595.121.875,00 atau 110,13%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum dirinci per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**				
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	39.082.006.000,00	42.295.818.116,00	108,22	189.475.000,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	4.706.980.391,00
c	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	-	-	1.023.690.000,00
d	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	8.147.332.000,00
e	Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.136.597.653,00	5.299.303.759,00	128.11	-
Jumlah		**43.218.603.653,00**	**47,595,121,875.00**	**110.13**	**14.067.477.391,00**

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp39.082.006.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp42.295.818.116,00 atau 108,22%. Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.106.343.116,00 atau sebesar 22222,64% dibanding Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp189.475.000,00. Retribusi Pelayanan Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.136.597.653,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.299.303.759,00 atau 128,11%.

a. Penjelasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada masing-masing SKPD:
   1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp157.271.000,00, realisasi sebesar Rp200.856.000,00 atau 127,71%. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai

K3). Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat melampaui target karena kepatuhan perusahaan akan peraturan pemeriksaan kesehatan meningkat dan kepuasan pelanggan atas pelayanan Balai K3 meningkat sehingga banyak pelanggan yang loyal melakukan pemeriksaan ke Balai K3.

2) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp38.924.735.000,00, realisasi sebesar Rp42.094.962.116,00 atau 108,14%. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dilaksanakan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Rumah Sakit Jiwa Grhasia, dan Rumah Sakit Paru Respira. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi melebihi anggaran karena pada triwulan 4 terdapat kenaikan jumlah pelanggan yang cukup signifikan pada layanan Pemantauan Mutu Eksternal dan Kalibrasi. Pada layanan Immunologi, terdapat program kerjasama pemeriksaan HPV-DNA dengan Kementerian Kesehatan. Pada layanan patologi dan pengambilan contoh uji, diadakan paket promo dan paket pemeriksaan yang lebih murah sehingga menarik lebih banyak pelanggan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia melebihi anggaran karena jumlah kunjungan pasien meningkat dan ada klaim obat tahun 2023 tertagih di tahun 2024. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira melampaui anggaran karena terjadi peningkatan klaim BPJS baik obat maupun rawat inap dan rawat jalan seiring dengan peningkatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

b. Penjelasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.706.980.391,00, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Persampahan dianggarkan dan direalisasikan di rekening obyek Retribusi Pelayanan Kebersihan.

c. Penjelasan Retribusi Pengolahan Limbah Cair:
Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.023.690.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, retribusi terkait pengolahan limbah cair dianggarkan dan direalisasikan pada rekening rincian obyek Retribusi Pelayanan Kebersihan.

d. Penjelasan Retribusi Pelayanan Pendidikan:
Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp8.147.332.000,00 pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan karena kegiatan-kegiatan pelatihan teknis yang pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan di Retribusi Pelayanan Pendidikan, pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dan direalisasikan pada jenis Lain-lain PAD yang Sah di sub rincian obyek Hasil Kerjasama Daerah.

e. Penjelasan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada masing-masing SKPD:
1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp2.919.931.653,00 dan realisasi sebesar Rp3.590.913.759,00 atau 122,98%. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengelola retribusi pelayanan kebersihan dari TPA Piyungan melalui Balai Pengelolaan Sampah. TPA Piyungan pada mulanya direncanakan ditutup total pada tahun

2024. Hal ini sesuai dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898, tertanggal 19 Oktober 2023, perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY. Akan tetapi, karena masih terdapat kendala kesiapan fasilitas baru yang akan mengelola sampah di tingkat kabupaten/kota sehingga masih ada permintaan dari kabupaten/kota untuk pembukaan layanan TPA Piyungan secara darurat. Dengan demikian Balai Pengelolaan Sampah masih memperoleh pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan. Perhitungan Retribusi Pelayanan Persampahan dari TPA Piyungan menggunakan dasar Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan tarif Rp78.000,00/tonase.

2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp1.216.666.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.708.390.000,00 atau sebesar 140,42%. Realisasi melebihi anggaran karena beberapa faktor. Pertama, meningkatnya jumlah pelanggan atau rumah tangga yang memanfaatkan layanan pembuangan lumpur tinja karena adanya kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya sanitasi yang baik. Kedua, adanya keterbatasan infrastruktur IPLT di kabupaten/kota tersebut membuat IPAL dan IPLT Sewon menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pembuangan lumpur tinja, yang pada gilirannya meningkatkan volume penggunaan dan retribusi yang diterima oleh daerah. Saat ini, Kabupaten Sleman hanya memiliki IPLT di Madurejo dengan kapasitas 100 m^3/hari, namun fasilitas tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum beroperasi secara optimal. Sementara itu, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum memiliki IPLT yang memadai, sehingga masyarakat di wilayah tersebut sebagian besar bergantung pada fasilitas IPLT di Sewon yang dikelola oleh Balai PALPJK.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.667.726.550,00 dan realisasi sebesar Rp31.701.069.667,00 atau 106,85%. Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.578.045.006,00 atau 65,77% dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp19.123.024.661,00. Retribusi Jasa Usaha per rincian obyek pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 4

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1		**Retribusi Jasa Usaha**				
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	9.683.316.086,00
	b	Retribusi Terminal	-	-	-	388.778.000,00
	c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	1.760.726.000,00
	d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.652.323.000,00	1.899.454.200,00	114,96	603.180.000,00

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-	124.999.000,00
	f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	3.422.890.000,00
	g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	3.139.135.575,00
	h	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.212.311.050,00	1.310.852.362,00	108,13	-
	i	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2.500.950.500,00	2.853.408.500,00	114,09	-
	j	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	140.147.500,00	150.641.400,00	107,49	-
	k	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	6.674.207.000,00	8.524.013.200,00	127,72	-
	l	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	11.943.867.300,00	10.591.273.954,00	88,68	-
	m	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.543.920.200,00	6.371.426.051,00	114,93	-
Jumlah			**29.667.726.550,00**	**31.701.069.667,00**	**106,85**	**19.123.024.661,00**

Penjelasan anggaran dan realisasi per rincian obyek Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2024:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp9.683.316.086,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 karena pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundangan terbaru Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak digunakan lagi melainkan dipecah ke rekening yang lain, antara lain Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Terminal pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp388.778.000,00 sedangkan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.760.726.000,00. Kedua retribusi tersebut dilaksanakan pada SKPD Dinas Perhubungan. Pada Tahun Anggaran 2024 kedua pos rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi. Aktivitas pemanfaatan lahan atau kios di lingkungan parkir yang pada Tahun Anggaran 2023 ditempatkan pada pos Retribusi Terminal maupun Retribusi Tempat Khusus Parkir, pada Tahun Anggaran 2024 ditempatkan pada pos Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Sedangkan aktivitas pelayanan khusus lahan parkir yang pada Tahun Anggaran 2023 ditempatkan pada pos Retribusi Terminal maupun Retribusi Tempat Khusus Parkir, pada Tahun Anggaran 2024 ditempatkan pada pos Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.

c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.652.323.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.899.454.200,00 atau 114,96%. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.296.274.200,00 atau 214,91% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp603.180.000,00. Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa dilaksanakan oleh 8 (delapan) SKPD. Uraian anggaran dan realisasi dari masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	465.173.000,00	674.463.500,00	144,99	23.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	113.400.000,00	128.421.700,00	113,25	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	40.100.000,00	37.750.000,00	94,14	111.980.000,00
4	Dinas Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	750.000,00	750.000,00	100,00	12.590.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.250.000,00	42.000.000,00	101,82	30.450.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.600.000,00	3.774.000,00	104,83	3.670.000,00
8	Badan Penghubung Daerah	388.050.000,00	412.295.000,00	106,25	421.090.000,00
Jumlah		**1.652.323.000,00**	**1.899.454.200,00**	**114,96**	**603.180.000,00**

Penjelasan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa pada masing-masing SKPD:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp465.173.000,00, realisasi sebesar Rp674.463.500,00 atau 144,99%. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa berasal dari asrama di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) dan pelayanan Edotel di SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Kalasan, SMKN 3 Wonosari, dan SMKN 1 Sewon. Peningkatan pendapatan pada BLPT merupakan efek dari sewa tempat untuk tes CPNS dan PPPK sehingga berimbas pada kenaikan pendapatan sewa tempat dan penginapan. Pada SMKN 6 Yogyakarta, realisasi retribusi tempat penginapan yang jauh melebihi target disebabkan oleh strategi promosi yang efektif serta pemanfaatan berbagai event yang berlangsung di sekitar, seperti di GOR Amongrogo dan Mandala Krida. Peserta dan panitia event diarahkan untuk menginap di Edotel yang memiliki lokasi strategis. Selain itu, pasca pandemi COVID-19, berbagai event seperti konser, aktivitas olahraga, dan kompetisi telah kembali aktif, sehingga semakin mendukung peningkatan jumlah tamu yang menginap.
2) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp113.400.000,00, realisasi sebesar Rp128.421.700,00 atau 113,25%. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa berasal dari penggunaan asrama dan wisma di Balai Pelatihan Kesehatan serta Grhasia Inn di RSJ Grhasia.
3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp40.100.000,00, realisasi sebesar Rp37.750.000,00 atau 94,14%. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa berasal dari pemakaian kamar mess kaliurang dan pemakaian rumah dengan 3 kamar saja tanpa menyewa aula. Sedangkan persewaan paket kamar dan aula masuk ke dalam Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah karena memang

lebih banyak konsumen yang menyewa paket kamar dan aula daripada hanya menyewa kamar saja.

4) Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp600.000.000,00 atau 100%.
5) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp750.000,00 dan realisasi sebesar Rp750.000,00 atau 100%.
6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila pada wisma Erlangga dianggarkan sebesar Rp41.250.000,00 realisasi sebesar Rp42.000.000,00 atau 101,82%.
7) Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00, realisasi sebesar Rp3.774.000,00 atau 104,83% berupa sewa aula dan sewa asrama.
8) Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp388.050.000,00, realisasi sebesar Rp412.295.000,00 atau 106,25%.

d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp124.999.000,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 realisasinya sebesar Rp0,00 karena anggaran dan realisasi pada rekening tersebut digeser ke rekening Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp3.422.890.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan nomenklatur dan kode rekening sehingga dianggarkan dan direalisasikan di Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi sebesar Rp3.139.135.575,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan nomenklatur dan kode rekening sehingga dianggarkan dan direalisasikan di Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
g. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.212.311.050,00 dan realisasi sebesar Rp1.310.852.362,00 atau 108,13%. Pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 terdapat di 18 SKPD dengan rincian tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 6
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	563.572.000,00	631.652.000,00	112,08	-
2	Dinas Kesehatan	38.600.000,00	38.200.000,00	98,96	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	-
4	Dinas Sosial	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.280.000,00	20.280.000,00	100,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.668.000,00	6.518.000,00	75,20	-
7	Dinas Perhubungan	121.691.050,00	139.102.362,00	114,31	-

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
9	Dinas Koperasi dan UKM	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.000,00	480.000,00	100,00	-
11	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	63.000.000,00	72.000.000,00	114,29	-
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.500.000,00	30.600.000,00	120,00	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	-
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	-
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
16	Sekretariat Daerah	45.580.000,00	45.580.000,00	100,00	-
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	149.240.000,00	150.740.000,00	101,01	-
18	Badan Penghubung Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	-
Jumlah		**1.212.311.050,00**	**1.310.852.362,00**	**108,13**	-

h. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan terdapat di Dinas Perhubungan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran dengan anggaran sebesar Rp2.500.950.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.853.408.500,00 atau 114,09%. Wilayah yang dikelola meliputi tempat khusus parkir Beskalan, bandara adisucipto, terminal jombor, terminal wates, dan ketandan.

i. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai dengan anggaran sebesar Rp140.147.500,00 dan realisasi sebesar Rp150.641.400,00 atau sebesar 107,49%.

j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp6.674.207.000,00 realisasi sebesar Rp8.524.013.200,00 atau 127,72%. Pelaksanaan retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh 5 SKPD dengan rincian seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5. 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.052.433.000,00	2.551.709.200,00	124,33	-
2	Dinas Kesehatan	8.760.000,00	7.050.000,00	80,48	-
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.514.000,00	13.954.000,00	121,19	-
4	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	3.928.000.000,00	4.988.880.000,00	127,01	-
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	673.500.000,00	962.420.000,00	142,90	-
Jumlah		**6.674.207.000,00**	**8.524.013.200,00**	**127,72**	-

Penjelasan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada masing-masing SKPD:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp2.052.433.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.551.709.200,00 atau sebesar 124,33%. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dilaksanakan di Balai Pemuda dan Olahraga, Pendapatan terbesar berada pada Balai Pemuda dan Olahraga, yaitu dengan anggaran Rp1.948.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.446.335.000,00 atau sebesar 125,57%. Sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggunaan ruang di Youth Center, Gelanggang Pemuda Sorowajan, Pondok Pemuda, Stadion Mandala Krida, Kompleks Gedung Olahraga Amongraga, Kompleks Gedung Olahraga Amongraga, dan Komplek Lapangan Kenari.
2) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp8.760.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.050.000,00 atau sebesar 80,48%. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dilaksanakan di RSJ Grhasia dan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi. Proporsi pendapatan yang lebih besar terdapat di RSJ Grhasia dengan anggaran sebesar Rp7.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.150.000,00.
3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp11.514.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.954.000,00 atau 121,19%.
4) Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dianggarkan sebesar Rp3.928.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.988.880.000,00 atau 127,01%. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga hanya terdapat di Museum Sonobudoyo. Pendapatan bisa melampaui target anggaran karena beberapa faktor. Pertama, HTM tempat wisata di sekitar Museum Sonobudoyo, seperti museum Vredeburg dan museum Kraton yang lebih mahal daripada museum Sonobudoyo mengakibatkan banyak pengunjung terutama rombongan anak sekolah yang memilih berkunjung ke Museum Sonobudoyo. Kedua, adanya pameran Abhinaya Karya di liburan akhir semester dan pameran AMEX di libur akhir tahun dengan tema yang menarik dan relevan untuk segala usia. Ketiga, gencarnya postingan di media sosial terkait serunya berkunjung ke Museum Sonobudoyo. Keempat, banyak sekolah, khususnya di DIY, yang memilih Sonobudoyo sebagai lokasi pembelajaran terkait Program Pancasila di sekolah tahun 2024 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5.
5) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dianggarkan sebesar Rp673.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp962.420.000,00 atau 142,90%. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (induk) dan di Balai Layanan Perpustakaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di atas target anggaran adalah peningkatan fasilitas diorama di DPAD yang mampu menarik lebih banyak pengunjung.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp11.943.867.300,00 realisasi sebesar Rp10.591.273.954,00 atau sebesar 88,68%. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan di 7 SKPD seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 8
Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.930.447.000,00	3.460.220.492,00	118,08	-
2	Dinas Kesehatan	17.200.000,00	15.997.000,00	93,01	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	585.004.000,00	761.767.500,00	130,22	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.447.606.800,00	3.300.545.365,00	60,59	-
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	982.051.000,00	983.331.700,00	100,13	-
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.951.558.500,00	2.042.411.897,00	104,66	-
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000,00	27.000.000,00	90,00	-
Jumlah		**11.943.867.300,00**	**10.591.273.954,00**	**88,68**	-

Pencapaian realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang paling jauh dari target adalah penjualan minyak kayu putih di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak tercapainya target penjulan minyak kayu putih disebabkan oleh perdagangan minyak atisiri saat ini didominasi oleh minyak atsiri impor yaitu minyak Eucalyptus. Atas kondisi tersebut, telah dilakukan upaya sebagai berikut: (a) Koordinasi pada tanggal 11 Desember 2024 dengan KLHK, Perhutani, dan Kemendag untuk melakukan pembatasan impor minyak Euclyptus dan pengenaan pajak atas minyak tersebut; (b) Terhadap sisa minyak kayu putih produksi tahun 2024 sebanyak 19.774 liter sudah dilakukan perjanjian jual beli dengan Nomor: 00.4.7.2/1095 Tanggal 16 Desember 2024. Perjanjian dilaksanakan dengan perorangan atas nama Ir. Pramono Budi Utomo. Mekanisme pengambilan dan pembayaran barang dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Januari sampai dengan Mei 2025. Barang hanya bisa diambil setelah dilakukan pembayaran oleh pembeli. Nilai total pengambilan dan pembayaran barang sebesar 19.774 liter x Rp123.860,00 = Rp2.449.207.640,00 (belum termasuk PPn 11% yang ditanggung oleh pembeli).

1. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp5.543.920.200,00 realisasi sebesar Rp6.371.426.051,00 atau 114,93%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan di 14 SKPD seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 9
Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.244.859.000,00	1.671.502.500,00	134,27	-
2	Dinas Kesehatan	138.905.000,00	137.605.000,00	99,06	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	97.950.000,00	98.400.000,00	100,46	-
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.691.510.000,00	1.504.740.000,00	88,96	-
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.790.500,00	12.790.500,00	108,48	-
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	150.000.000,00	151.220.000,00	100,81	-
7	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	839.500.000,00	1.156.500.000,00	137,76	-

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	81.800.000,00	94.065.500,00	114,99	-
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.000.000,00	89.000.000,00	404,55	-
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	280.000.000,00	297.885.624,00	106,39	-
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	745.955.700,00	879.576.927,00	117,91	-
12	Badan Kepegawaian Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
13	Badan Pendidikan dan Pelatihan	175.700.000,00	211.690.000,00	120,48	-
14	Badan Penghubung Daerah	56.750.000,00	59.250.000,00	104,41	-
Jumlah		**5.543.920.200,00**	**6.371.426.051,00**	**114,93**	-

C. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp319.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp164.610.000,00 atau 51,57%. Retribusi perijinan tertentu berasal dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pada tahun 2024 tidak dapat mencapai target karena:

a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pembayaran retribusi penggunanaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi kewenangan daerah, yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat. Kemudian per 1 Januari 2024 juga diberlakukan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b) Pada masa transisi perpindahan kewenangan penerimaan retribusi penggunanaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang semula merupakan kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah, terdapat beberapa pembayaran retribusi TKA masih masuk ke rekening pusat. Transaksi ini terjadi kisaran bulan Januari sampai dengan bulan April 2024.
c) Target pendapatan tahun 2024 dibuat dengan melihat data jumlah TKA tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat beberapa TKA yang bekerja pada lokasi lintas Kabupaten/Kota. Akan tetapi, saat melakukan perpanjangan di tahun 2024 TKA tersebut berpindah lokasi kerja pada satu Kabupaten/Kota saja sehingga penerimaan retribusinya bukan lagi menjadi kewenangan provinsi, melainkan Kabupaten/Kota.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**Rp120.935.677.671,93**	**Rp109.790.680.460,56**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp121.749.510.238,00 dan realisasi sebesar Rp120.935.677.671,93 atau 99,33%. Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut rincian obyek yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMN, Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada

Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha). Anggaran pendapatan deviden ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada 96able sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**				
a	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**	-	-	-	**209.497.429,00**
	- PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	209.497.429,00
b	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**115.449.554.309,00**	**115.608.956.981,93**	**100,14**	**103.220.503.521,56**
	- PT Bank BPD DIY	111.028.716.629,00	111.028.716.629,00	100,00	99.223.198.838,00
	- BUKP	4.420.837.680,00	4.580.240.352,93	103,61	3.997.304.683,56
c	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka usaha)**	**6.299.955.929,00**	**5.326.720.690,00**	**84,55**	**6.360.679.510,00**
	- PT Tarumartani	5.442.700.037,00	4.469.464.798,00	82,12	5.635.909.016,00
	- PT AMI	857.255.892,00	857.255.892,00	100,00	724.770.494,00
	Jumlah	**121.749.510.238,00**	**120.935.677.671,93**	**99,33**	**109.790.680.460,56**

Penjelasan anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024:

1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00. Hal ini mengacu pada surat OJK nomor S-362/PD.11/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Larangan Pembagian Dividen dan Pembentukan Cadangan Teknis yang Mencukupi, terhadap perusahaan telah dilarang untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham pada tahun 2024 atas kinerja perusahaan tahun buku 2023. Penggunaan laba harus dioptimalkan untuk pembentukan cadangan teknis pada tingkat yang mencukupi sesuai dengan risiko yang dipertanggungkan, khususnya untuk pertanggungan asuransi kredit yang bersumber dari penutupan baru. Larangan pembagian dividen dipertegas kembali dengan surat kedua yaitu

surat OJK nomor S-37/PD.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal *reminder* terkait larangan pembagian dividen.

2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) dianggarkan sebesar Rp115.449.554.309,00 dan realisasi sebesar Rp115.608.956.981,93 atau 100,14%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga keuangan) yaitu:
   a) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp111.028.716.629,00 dan terealisasi Rp111.028.716.629,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.805.517.791,00 atau 11,90% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.223.198.838,00. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun buku 2023 sudah membaik dan mendorong peningkatan kinerja perbankan.
   b) Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp4.420.837.680,00 dan terealisasi sebesar Rp4.580.240.352,93 atau 103,61%. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp582.935.669,37 atau 14,58% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.997.304.683,56. Bagian laba dari BUKP DIY Tahun Anggaran 2024 meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2023 karena bagian laba Tahun Anggaran 2024 merupakan kinerja BUKP tahun buku 2023. Pada tahun buku 2023, kondisi perekonomian telah membaik pasca pandemi covid-19 sehingga pergerakan ekonomi 97able97k97at nasabah BUKP juga 97able97k dinamis sehingga mendorong peningkatan kredit yang disalurkan oleh BUKP. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUKP tahun 2024 melampaui target karena pada saat penyusunan RKPD Perubahan APBD 2024, angka bagian laba BUKP belum ditetapkan sehingga masih menggunakan angka perhitungan sementara.

3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) dianggarkan sebesar Rp6.299.955.929,00, dan realisasi sebesar Rp5.326.720.690,00 atau 84,55%. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) yaitu:
   a) PT. Anindya Mitra Internasional dianggarkan sebesar Rp857.255.892,00, realisasi sebesar Rp857.255.892,00 atau 100%, sesuai dengan hasil RUPS pada pengesahan laporan keuangan PT AMI tahun buku 2023. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada PT Anindya Mitra Internasional tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp132.485.398,00 atau 18,28% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp724.770.494,00. Peningkatan tersebut masih belum optimal sesuai target yang telah ditetapkan karena pada tahun buku 2023 PT. AMI membukukan pengembalian dana subsidi sebesar Rp4.228.414.466,57 sebagai tindak lanjut temuan BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023.
   b) PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp5.442.700.037,00, dan realisasi sebesar Rp4.469.464.798,00 atau 82,12%. Bagian laba dari PT.Taru Martani Tahun Anggaran 2024 menurun Rp1.166.444.218,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dan tidak mampu mencapai target 2024 karena terdapat kenaikan tarif cukai tembakau dan terjadi

permasalahan pada manajemen PT. Taru Martani sehingga mempengaruhi kinerja usaha tahun buku 2023.

4) Pengelolaan aset yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan tahun 2024 masih mengalami defisit operasional yang disebabkan oleh beberapa 98able98, antara lain:
   a) Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Bantul menunjukkan tren meningkat namun belum dapat menyerap 100% dari kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama.
   b) Pada tahun 2023, SPAM Sistem Kebonagung diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda DIY kemudian diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama. Adanya penyerahan tersebut menambah beban operasional berupa penambahan biaya 98able98k, biaya sumber daya manusia (SDM), dan biaya pemeliharaan.
   c) Tarif air bersih di Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama sebesar Rp2.250,00/m3 masih di bawah HPP sebesar Rp4.097/m3 (berdasarkan hasil audit BPKP DIY dengan data realisasi keuangan tahun 2023).

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**Rp123.577.792.400,15**	**Rp156.062.951.739,52**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp99.157.677.101,00 dan realisasi sebesar Rp123.577.792.400,15 atau 124,63%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp32.485.159.339,37 atau 20,82% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.062.951.739,52. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	2.770.000.000,00	3.117.851.516,00	112,56	4.105.305.648,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	13.111.138.700,00	15.056.973.908,00	114,84	17.527.062.256,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	3.227.809.000,00	3.235.409.000,00	100,24	-
4	Jasa Giro	8.170.759.412,00	7.953.419.673,00	97,34	5.917.546.866,77
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	11.540.000,00	-	-
6	Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00	16.371.213.210,00	163,71	18.904.579.186,00
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	900.000,00	-	8.000.000,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	1.561.478,00	-	609.917,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	735.407.168,00	-	821.835.137,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.582.434.500,00	61.431.097.950,00	121,45	54.432.302.350,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	29.208.933,00	36.788.726,00	125,95	43.216.588,00
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	182.984.070,00
13	Pendapatan dari Pengembalian	3.567.366.658,00	5.932.008.055,92	166,29	4.284.027.836,75
14	Pendapatan BLUD	7.438.609.898,00	9.373.809.715,23	126,02	49.376.262.884,00
15	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	71.000.000,00
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	260.350.000,00	319.812.000,00	122,84	388.219.000,00
Jumlah		**99.157.677.101,00**	**123.577.792.400,15**	**124,63**	**156.062.951.739,52**

Penjelasan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.770.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.117.851.516,00 atau 112,56%. Penjualan BMD dilaksanakan dalam rangka optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	a	Hasil Penjualan Tanah	-	25.000.000,00	-	-
	b	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.535.000.000,00	2.645.996.016,00	104,38	584.945.979,00
	c	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	195.750.000,00	93,21	2.330.982.569,00
	d	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	251.105.500,00	1.004,42	570.340.000,00
	e	Hasil Penjualan Aset Lainya	-	-	-	619.037.100,00
Jumlah			**2.770.000.000,00**	**3.117.851.516,00**	**112,56**	**4.105.305.648,00**

Penjelasan dari masing-masing rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 13
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)	SKPD
	Hasil Penjualan Tanah			
1	Penjualan BMD berupa Sisa Tanah Galian pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah	13/12/2024	25.000.000,00	Dinas PUP ESDM DIY yang sudah diserahkan ke Pengelola.

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)	SKPD
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin			
1	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	15/01/2024	358.500.000,00	Pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan lampiran SK SEKDA Nomor: 68/SEKDA/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024
2	Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 9 unit		110.409.216,00	Pada SKPD di Lingkungan Pemda DIY (Sekretaris DPRD DIY, BPBD DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Perhubungan DIY, DLHK DIY, BPPTDK, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY, BRTPD DIY, RS Jiwa Grhasia DIY) sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 54/SEKDA/IV/2024 Tanggal: 3 April 2024
3	Penjualan BMD berupa Peralatan Mesin dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	25/10/2024	61.000.000,00	Pada SKPD di Lingkungan Pemda DIY (Dinas Perhubungan, RS Jiwa Grhasia, SMKN 1 Tempel dan SMKN 1 Temon) sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 110/SEKDA/XII/2024 Tanggal: 11 Desember 2024
4	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	05/03/2024	568.000.000,00	Pada SKPD di Lingkungan Pemda DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 68/SEKDA/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024
5	Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit	20/03/2024	754.668.000,00	Dinas Perhubungan DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 64/SEKDA/V/2024 Tanggal: 28 Mei 2024
6	Penjualan berupa Kendaraan Bus sebanyak 9 Unit	22/04/2024	664.710.000,00	Dinas Perhubungan DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 64/SEKDA/V/2024 Tanggal : 28 Mei 2024

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)	SKPD
7	Pemusnahan BMD berupa Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku Pelajaran, dan Aset Tak Berwujud berupa Kajian		51.708.800,00	Pada SKPD di Lingkungan Pemda DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 108/SEKDA/XII/2024 Tanggal: 4 Desember 2024
8	Penjualan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	01/08/2024	77.000.000,00	Pada SKPD di Lingkungan Pemda DIY sesuai Lampirkan SK SEKDA Nomor: 91/SEKDA/IX/2024 Tanggal: 17 September 2024
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan			
1	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPPTG) Unit Fasilitasi Kemasan yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto KM 8,5 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kab Sleman D.I. Yogyakarta	25/03/2024	58.250.000,00	Pada SKPD BPPTG Disperindag DIY sesuai Lampirkan SK SEKDA Nomor: 69/SEKDA/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024.
2	Penjualan berupa 33 (tiga puluh tiga) unit Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang-Garongan	07/05/2024	68.000.000,00	Dinas PUP ESDM DIY yang sudah diserahkan ke Pengelola.
3	Penjualan berupa: 1) Bangunan Gedung Kantor Permanen (eks Gedung UPTD BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di JL. AM Sangaji No. 41 Yogyakarta. 2) Bangunan Gedung Kantor (eks UPT Kulit-Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di Jl. Parangtritis Km 11, Manding, Sabdodadi, Kabupaten Bantul	20/05/2024	12.500.000,00	Pada BPTTG Disperindag DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 69/SEKDA/VI/2024 Tanggal: 28 Juni 2024 dan Lampiran SK GUB Nomor: 253/KEP/2024 Tanggal: 03/07/2024
4	Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY	07/06/2024	37.000.000,00	Pada Sekretariat DPRD DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY sesuai Lampirkan SK SEKDA Nomor: 97/SEKDA/X/2024 Tanggal: 30/10/2024

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)	SKPD
5	Penjualan berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di Komplek Taman Hutan Raya Bunder, Playen, Gunungkidul	12/09/2024	20.000.000,00	Pada Balai Tahura DLHK DIY sesuai Lampirkan SK SEKDA Nomor: 107/SEKDA/XII/2024 Tanggal: 4 Desember 2024
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya			
1	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan	26/01/2024	11.600.000,00	Dinas PUP ESDM DIY yang sudah diserahkan ke Pengelola.
2	Penjualan berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah	29/08/2024	16.300.000,00	Dinas PUP ESDM DIY yang sudah diserahkan ke Pengelola.
3	Penjualan berupa Hewan Ternak Sapi pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan, dengan rincian: 1. Sapi Perah sebanyak 4 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl. Kaliurang Km. 23 Ngipisari, Hargobinangun, Pakem, Sleman. 2. Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Sumedang, Purwobinangun, Pakem, Sleman. 3. Sapi Potong sebanyak 3 ekor, berlokasi di Ngentak, Sumberagung, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul	03/10/2024	177.755.500,00	Pada BPPTDK dan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DPKP DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 101/SEKDA/XI/2024 Tanggal: 15 November 2024
4	Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Unit Produksi Tambak UPTD BP3MBTP, RS Jiwa Grhasia, TPA Piyungan dan JJLS Segmen Ngremang-Garongan	09/12/2024	18.000.000,00	BP3MBTP, RS Jiwa Grhasia, dan Dinas PUP ESDM DIY

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)	SKPD
5	Penjualan berupa 25 Ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	10/10/2024	27.450.000,00	Pada BPPTDK DPKP DIY sesuai Lampiran SK SEKDA Nomor: 101/SEKDA/XI/2024 Tanggal: 15 November 2025
Total			**3.117.851.516,00**	

Salah satu jenis Barang Milik Daerah yang dijual pada Tahun Anggaran 2024 adalah 25 unit bus Trans Jogja yang selama ini tercatat sebagai Barang Milik Daerah di Dinas Perhubungan DIY. Bus-bus tersebut merupakan bus dengan tahun pembelian 2015 yang diperoleh dari hibah Kementrian Perhubungan. Penghapusan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa usia bus tersebut sudah tua dan tidak layak jalan. Penghapusan dari daftar barang pengguna dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 64/SEKDA/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, sebagai tindak lanjut setelah dilakukan lelang kepada masyarakat oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.111.138.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.056.973.908,00 atau 114,84%. Hasil dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.470.088.348,00 atau 14,09% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.527.062.256,00. Penurunan tersebut sebagai imbas dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat pergeseran rekening yang pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan di Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan di Retribusi Jasa Usaha. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 14

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	a	Hasil Sewa BMD	5.796.745.000,00	6.628.728.493,00	114,35	14.741.964.505,00
	b	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	7.314.393.700,00	8.428.245.415,00	115,23	2.785.097.751,00
Jumlah			**13.111.138.700,00**	**15.056.973.908,00**	**114,84**	**17.527.062.256,00**

C. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.227.809.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.235.409.000,00 atau 100,24%. Terdapat 3 SKPD yang memiliki realisasi Hasil Kerja Sama Daerah, seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	a	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	216.000.000,00	214.000.000,00	99,07	-
	b	Badan Kepegawaian Daerah	308.460.000,00	318.060.000,00	103,11	-
	c	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.703.349.000,00	2.703.349.000,00	100,00	-
Jumlah			**3.227.809.000,00**	**3.235.409.000,00**	**100,24**	**-**

Penjelasan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan pada UPT Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja DIY dengan anggaran sebesar Rp216.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp214.000.000,00 atau 99,07%. Kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan penyelengaraan pelatihan teknis secara online bagi paramedis.
b. Badan Kepegawaian Daerah
   Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan sebesar Rp308.460.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp318.060.000,00 atau 103,11%. Kegiatan yang dilakukan adalah Quasi (*Assesment Centre* Metode Sedang), *Assement Center* Metode Sederhana, serta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.
c. Badan Pendidikan dan Pelatihan
   Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp2.703.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.703.349.000,00 atau 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah diklat kepemimpinan tingkat II, III, IV.

D. Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.170.759.412,00 dan realisasinya sebesar Rp7.953.419.673,00 atau 97,34%. Pendapatan jasa giro per subrincian obyek meliputi penerimaan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, dan jasa giro pada rekening dana BOS. Rincian angaran dan realisasi jasa giro per sub rincian obyek dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000.000,00	7.429.210.323,00	92,87	5.388.709.174,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	170.019.738,00	523.469.676,00	307,89	428.572.186,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	739.674,00	739.674,00	100,00	100.265.506,77
Total		**8.170.759.412,00**	**7.953.419.673,00**	**97,34**	**5.917.546.866,77**

E. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terdapat realisasi Rp11.540.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari bunga dan denda penyaluran dana bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sesuai dengan Bulletin Teknis No.7 Akuntansi Dana Bergulir, pendapatan berupa bunga dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

F. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga berasal dari penempatan uang pemerintah daerah berupa deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp16.371.213.210,00 atau 163,71%. Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.533.365.976,00 atau 13,40% dibanding pendapatan bunga Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp18.904.579.186,00.

G. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp900.000,00, merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pegawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan.

H. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain

Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00, direalisasikan sebesar Rp1.561.478,00.

I. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp735.407.168,00. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

J. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp50.582.434.500 dan direalisasikan sebesar Rp61.431.097.950,00 atau 121,45%. Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.998.795.600,00 atau 12,86% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp54.432.302.350,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari rincian obyek yaitu:

- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp60.385.186.350,00 atau 120,77%. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.013.117.750,00 atau 13,14% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp53.372.068.600,00.
- Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp582.434.500,00 direalisasikan sebesar Rp1.045.911.600,00 atau 179,58%. Realisasi Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2024 mengalami

penurunan sebesar Rp14.322.150,00 atau 1,35% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.060.233.750,00.

K. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.208.933,00 dan realisasi sebesar Rp36.788.726,00 atau 125,95%. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari rincian obyek Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum dan Denda Retribusi Jasa Usaha.

- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp400.193,00 direalisasikan sebesar Rp400.193,00 atau 100%. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp43.345,00 atau 12,15% dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp356.848,00.
- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp28.808.740,00 direalisasikan sebesar Rp36.388.533,00 atau 126,31%. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.471.207,00 atau 15,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp42.859.740,00.

L. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp3.567.366.658,00 direalisasikan sebesar Rp5.932.008.055,92 atau 166,29%. Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.647.980.219,17 atau 38,47% dibanding Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.284.027.836,75. Rekening Pendapatan dari Pengembalian ini merupakan rekening untuk menampung pendapatan dari pengembalian tahun-tahun yang lampau sebelum Tahun Anggaran 2024. Sub Rincian Obyek Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD, dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

M. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp7.438.609.898,00 direalisasikan sebesar Rp9.373.809.715,23 atau 126,02%. Pendapatan BLUD Tahun Anggaran

2024 mengalami penurunan sebesar Rp40.002.453.168,77 atau 81,02% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp49.376.262.884,00. Faktor utama yang berperan dalam penurunan realisasi Pendapatan BLUD adalah perubahan rekening berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan BLUD pada Tahun Anggaran 2023 seluruhnya direalisasikan pada akun Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD direalisasikan pada 2 akun yaitu di akun Retribusi Daerah dan di akun Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini berakibat mayoritas realisasi pendapatan yang pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan pada akun Lain-lain PAD yang Sah, pada Tahun Anggaran 2024 bergeser realisasinya ke akun Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing BLUD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD

No		Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	1	Balai Pelatihan Kesehatan	5.744.295.000,00	7.184.812.084,00	125,08	6.316.626.081,00
	2	RS Jiwa Grhasia	850.952.000,00	810.430.250,23	95,24	19.703.156.264,89
	3	RS Paru Respira	29.000.000,00	359.288.064,00	1.238,92	11.835.228.438,11
	4	Balai Laboratorium Kesehatan	117.109.220,00	134.100.316,00	114,51	7.439.314.742,00
	5	Balai Latihan Pendidikan Tehnik	507.944.000,00	604.702.100,00	119,05	2.211.762.951,00
	6	SMKN 6 Yogyakarta	89.718.301,00	112.773.177,00	125,70	949.751.858,00
	7	SMKN 3 Wonosari	6.306.136,00	10.485.218,00	166,27	299.877.476,00
	8	SMKN 1 Sewon Bantul	30.146.273,00	41.965.322,00	139,21	537.514.010,00
	9	SMKN 5 Yogyakarta	120.009,00	257.691,00	214,73	83.031.063,00
	10	SMKN 2 Pengasih	51.922,00	199.243,00	383,74	-
	11	SMKN 2 Wonosari	60.881.735,00	95.941.489,00	157,59	-
	12	SMKN 2 Depok	-	4.070.000,00	-	-
	13	SMKN 1 Saptosari	2.033.686,00	4.575.186,00	224,97	-
	14	SMKN 2 Yogyakarta	38.240,00	8.919.868,00	2.3326,01	-
	15	SMKN 1 Kalasan	7.250,00	1.227.625,00	16.932,76	-
	16	SMKN 1 Cangkringan	6.126,00	62.082,00	1.013,42	-
Jumlah			**7.438.609.898,00**	**9.373.809.715,23**	**126,02**	**49.376.262.884,00**

N. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp260.350.000,00 direalisasikan sebesar Rp319.812.000,00 atau 122,84%. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp68.407.000,00 atau 17,62% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp388.219.000,00. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2024 terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp211.350.000,00 direalisasikan sebesar Rp255.812.000,00 atau 121,04%. Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp49.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp64.000.000,00 atau sebesar 130,61%. Denda tersebut merupakan denda atas pelanggaran standar pelayanan minimal angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	**Rp3.535.479.452.702,00**	**Rp3.463.926.176.823,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.549.191.703.243,00 direalisasikan sebesar Rp3.535.479.452.702,00 atau 99,61%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp71.553.275.879,00 atau sebesar 2,07% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.463.926.176.823,00. Rincian Pendapatan Transfer per rincian obyek dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**				
1.A	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**				
a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	114.271.689.000,00	114.358.785.000,00	100,08	106.084.972.357,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.337.180.068.000,00	1.337.180.068.000,00	100,00	1.267.622.165.192,00
c	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.350.207.000,00	156.735.319.268,00	92,55	134.151.614.382,00
d	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	519.158.564.582,00	517.974.105.772,00	99,77	501.629.554.248,00
	Jumlah	**2.139.960.528.582,00**	**2.126.248.278.040,00**	**99,36**	**2.009.488.306.179,00**
1.B	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**				
a	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	80.876.155.000,00
b	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.396.157.452.431,00	1.396.157.452.432,00	100,00	1.372.725.809.224,00
c	Insentif Fiskal	12.089.917.000,00	12.089.917.000,00	100,00	-
	Jumlah	**1.408.247.369.431,00**	**1.408.247.369.432,00**	**100,00**	**1.453.601.964.224,00**

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				
a	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	983.805.230,00	983.805.230,00	100,00	835.906.420,00
	Jumlah	**983.805.230,00**	**983.805.230,00**	**100,00**	**835.906.420,00**
Jumlah		**3.549.191.703.243,00**	**3.535.479.452.702,00**	**99,61**	**3.463.926.176.823,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**Rp3.534.495.647.472,00**	**Rp3.463.090.270.403,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.548.207.898.013,00 direalisasikan sebesar Rp3.534.495.647.472,00 atau 99,61%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 71.405.377.069,00 atau 2,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.463.090.270.403,00.

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp114.271.689.000,00 direalisasikan sebesar Rp114.358.785.000,00 atau 100,08%. Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.273.812.643,00 atau 7,80% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp106.084.972.357,00. Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	885.796.000,00	885.796.000,00	100	951.147.789,00
b	DBH PPh Pasal 21	101.756.692.000,00	101.756.692.000,00	100	91.018.441.712,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	7.686.095.000,00	7.686.095.000,00	100	8.977.648.728,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.842.694.000,00	3.929.790.000,00	102,27	5.044.330.272,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	14.472.000,00	14.472.000,00	100	4.848.340,00
f	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	-	2.240.356,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	85.940.000,00	85.940.000,00	100	86.315.160,00
Jumlah		**114.271.689.000,00**	**114.358.785.000,00**	**100,08**	**106.084.972.357,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Tahun Anggaran 2024 melebihi anggaran dikarenakan terdapat penyaluran secara tunai atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.096.000,00 oleh pemerintah pusat. Penyaluran ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.337.180.068.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.337.180.068.000,00 atau 100%. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.557.902.808.00 atau 5,49% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.267.622.165.192,00. Rincian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
   - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dianggarkan sebesar Rp1.290.573.772.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.290.573.772.000,00 atau 100%.
   - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dianggarkan sebesar Rp30.101.296.000,00 dan direalisasikan Rp30.101.296.000,00 atau 100%.
   - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dianggarkan Rp16.505.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.505.000.000,00 atau 100%.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp169.350.207.000,00 direalisasikan sebesar Rp156.735.319.268,00 atau 92,55%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp22.583.704.886,00 atau 16,83% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp134.151.614.382,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 20
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**				
a	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	18.877.217.000,00	16.159.034.736,00	85,60	11.710.453.398,00
b	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.919.449.000,00	5.193.304.328,00	87,73	5.234.118.503,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
c	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	72.078.617.000,00	68.540.449.850,00	95,09	55.685.192.641,00
d	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	20.300.000.000,00	19.136.134.100,00	94,27	-
e	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.325.594.000,00	4.433.108.002,00	83,24	17.328.640.312,00
f	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.094.340.000,00	5.376.121.695,00	88,21	1.964.094.150,00
g	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.700.333.000,00	1.341.306.500,00	78,88	-
h	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	23.439.399.000,00	23.205.695.886,00	99,00	35.547.565.584,00
i	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.820.147.000,00	5.354.457.498,00	78,51	6.681.549.794,00
j	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.000.000.000,00	2.751.964.506,00	91,73	-
k	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	5.795.111.000,00	5.243.742.167,00	90,49	-
Jumlah		**169.350.207.000,00**	**156.735.319.268,00**	**92,55**	**134.151.614.382,00**

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp519.158.564.582,00 direalisasikan sebesar Rp517.974.105.772,00 atau 99,77%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.344.551.524,00 atau 3,26% dibandingkan dengan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp501.629.554.248,00.

Tabel 5. 21
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Uraian	Tahun 2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
a	DAK Non Fisik-BOS Reguler	262.269.081.393,00	261.162.122.583,00	99,58	254.105.494.760,00
b	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	7.837.500.000,00	7.760.000.000,00	99,01	8.207.500.000,00
c	DAK Non Fisik-TPG PNSD	232.771.182.000,00	232.771.182.000,00	100,00	225.936.904.880,00

No	Uraian	Tahun 2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
d	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.296.524.000,00	1.296.524.000,00	100,00	1.185.751.850,00
e	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.965.144.734,00	1.965.144.734,00	100,00	2.000.000.000,00
f	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.990.208.100,00	1.990.208.100,00	100,00	2.000.000.000,00
g	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2.646.792.090,00	-	3.136.694.031,00
h	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.665.417.785,00	1.665.417.785,00	100,00	995.169.000,00
i	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	337.315.000,00	337.315.000,00	100,00	597.171.250,00
j	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	100,00	-
k	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.529.399.480,00	3.529.399.480,00	100,00	3.464.868.477,00
l	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	2.646.792.090,00	-	-	-
Jumlah		**519.158.564.582,00**	**517.974.105.772,00**	**99,77**	**501.629.554.248,00**

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1) Dana Insentif Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut tidak terdapat nomenklatur Dana Insentif Daerah. Insentif bagi pemerintah daerah dianggarkan dan direalisasikan pada pos Insentif Fiskal.
2) Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.396.157.452.431,00 dan realisasi sebesar Rp1.396.157.452.432,00 atau 100%.
3) Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp12.089.917.000,00 dan direalisasikan Rp12.089.917.000,00 atau 100%.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	**Rp983.805.230,00**	**Rp835.906.420,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp983.805.230,00 dan realisasi sebesar Rp983.805.230,00 atau 100%. Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp147.898.810,00 atau 17,69% dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp835.906.420,00. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukan sharing Biaya Pengelolaan IPAL

sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita acara kontribusi (Sharing) biaya pengelolaan air limbah (IPAL) terpusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp983.805.230,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp120.347.030,00, Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp144.625.610,00, dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp718.832.590,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**Rp8.084.153.000,00**	**Rp7.955.658.016,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp7.856.240.000,00 direalisasikan sebesar Rp8.084.153.000,00 atau 102,90%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp128.494.984,00 atau 1,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp7.955.658.016,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 berasal dari Pendapatan Hibah. Sementara pada Tahun Anggaran 2023, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri**	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,9**	**7.950.630.000,00**
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri				7.950.630.000,00
b	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,9	
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**				**5.028.016,00**
a	Pendapatan atas Pengembalian Hibah				5.028.016,00
Jumlah		**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,9**	**7.955.658.016,00**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	**Rp8.084.153.000,00**	**Rp7.950.630.000,00**

Pendapatan hibah Tahun Anggaran 2024 direalisasikan pada sub rincian obyek Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan total anggaran Rp7.856.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.084.153.000,00 atau 102,9%. Pendapatan tersebut terdiri dari dealer otomotif yang dianggarkan Rp3.584.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.813.413.000,00, main dealer

dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00 dengan realisasi Rp24.000.000,00, jasa raharja dianggarkan Rp4.246.740.000,00 realisasi Rp4.246.740.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**Rp0,00**	**Rp5.028.016,00**

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2 Belanja	**Rp5.680.495.088.297,12**	**Rp5.705.855.917.726,41**

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp6.001.565.896.865,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp5.680.495.088.297,12 atau 94,65%. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.360.829.429,29 atau 0,44% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp5.705.855.917.726,41. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1 Belanja Operasi	**Rp3.589.908.402.394,35**	**Rp3.504.788.744.020,20**

Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.800.942.364.499,00 dan realisasi sebesar Rp3.589.908.402.394,35 atau 94,45%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp85.119.658.374,15 atau 2,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp3.504.788.744.020,2. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	**Rp1.651.782.965.460,00**	**Rp1.572.322.039.241,00**

Belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.752.750.894.932,00 dan realisasi sebesar Rp1.651.782.965.460,00 atau 94,24%. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp79.460.926.219,00 atau 5,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.572.322.039.241,00. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, dan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Rincian realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 23
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**				
a	Belanja Gaji Pokok ASN	720.036.301.501,00	667.501.694.227,00	92,7	627.176.546.364,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	57.434.888.058,00	51.368.109.064,00	89,44	46.988.115.345,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.929.617.561,00	8.019.305.420,00	73,37	8.217.817.000,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.568.148.652,00	33.625.465.596,00	66,5	34.366.129.966,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.532.012.000,00	6.949.316.100,00	92,26	8.226.105.000,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	30.948.080.031,00	28.060.031.344,00	90,67	27.145.203.378,00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.576.880.757,00	3.853.265.752,00	84,19	1.841.733.844,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.642.367,00	7.340.760,00	84,94	7.164.861,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.873.316.020,00	49.430.878.552,00	90,08	50.045.431.303,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.510.338.464,00	1.366.150.323,00	90,45	1.275.716.235,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.464.620.694,00	3.755.316.705,00	84,11	3.455.509.143,00
l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.429.573.036,00	-		
	Jumlah	**947.312.419.141,00**	**853.936.873.843,00**	**90,14**	**808.745.472.439,00**
II	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**				
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	192.621.160.324,00	191.403.465.839,00	99,37	181.606.946.286,00
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.321.749.400,00	6.896.402.500,00	94,19	6.872.157.200,00
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	29.356.753,00	28.853.100,00	98,28	28.240.100,00
d	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	239.811.088.594,00	238.481.848.973,00	99,45	233.580.619.022,00
	Jumlah	**439.783.355.071,00**	**436.810.570.412,00**	**99,32**	**422.087.962.608,00**
III	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**				
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	52.699.839.825,00	52.682.520.000,00	99,97	53.520.261.348,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.195.955.907,00	761.000.173,00	34,65	808.509.541,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	239.313.345.500,00	239.228.931.732,00	99,96	220.432.261.700,00
d	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.529.750.850,00	1.476.500.000,00	96,52	958.025.000,00
c	Belanja Honorarium	2.418.680.000,00	2.374.245.000,00	98,16	2.837.525.000,00
d	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.878.610.000,00	1.852.235.000,00	98,60	1.791.945.000,00
	Jumlah	**300.036.182.082,00**	**298.375.431.905,00**	**99,45**	**280.348.527.589,00**
IV	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**				
a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.749.300.000,00	1.746.900.000,00	99,86	1.728.750.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	235.530.750,00	156.975.000,00	66,65	153.480.000,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	223.053.600,00	124.634.820,00	55,88	120.651.720,00
d	Belanja Uang Paket DPRD	149.940.000,00	149.700.000,00	99,84	148.110.000,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.536.485.000,00	2.533.005.000,00	99,86	2.506.687.500,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	235.944.000,00	197.490.000,00	83,70	231.650.550,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	89.610.000,00	71.466.150,00	79,75	38.526.863,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00	100,00	9.780.000.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	2.430.000.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	148.247.900,00	89.403.123,00	60,31	79.115.819,00
k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	15.069.780.259,00	13.892.341.020,00	92,19	13.745.876.740,00
l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.990.000.000,00	10.931.000.000,00	99,46	10.605.000.000,00
m	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	742.950.000,00	679.950.000,00	91,52	36.600.000,00
	Jumlah	**43.720.841.509,00**	**42.122.865.113,00**	**96,35**	**41.604.449.192,00**
V	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**				
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	81.810.000,00	75.600.000,00	92,41	75.600.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.181.000,00	7.560.000,00	92,41	7.560.000,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	100,00	136.080.000,00
d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.345.200,00	4.055.520,00	93,33	4.055.520,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.941.024,00	4.603.503,00	77,49	4.489.036,00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.818,00	1.680,00	92,41	1.680,00
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.103.739,00	7.516.800,00	92,76	7.516.800,00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	168.295,00	155.520,00	92,41	155.520,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	504.885,00	466.560,00	92,41	466.560,00
j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	210.000,00			
	Jumlah	**245.345.961,00**	**236.039.583,00**	**96,21**	**235.925.116,00**
VI	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**				
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	300.000.000,00	83,33	348.000.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.527.000.000,00	3.017.000.000,00	85,54	3.214.000.000,00
	Jumlah	**3.887.000.000,00**	**3.317.000.000,00**	**85,34**	**3.562.000.000,00**
VII	**Belanja Pegawai BLUD**				
a	Belanja Pegawai BLUD	17.765.751.168,00	16.984.184.604,00	95,60	15.737.702.297,00
	Jumlah	**17.765.751.168,00**	**16.984.184.604,00**	**95,60**	**15.737.702.297,00**
Jumlah		**1.752.750.894.932,00**	**1.651.782.965.460,00**	**94,24**	**1.572.322.039.241,00**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	981.354.015.255,00	928.728.710.636,00	94,64	862.942.243.585,00
2	Dinas Kesehatan	116.288.358.074,00	108.613.015.033,00	93,40	100.670.714.771,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	41.419.831.831,00	39.594.553.837,00	95,59	39.110.261.485,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.964.880.715,00	9.472.574.363,00	95,06	9.107.839.410,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.597.985.624,00	11.662.967.288,00	92,58	13.055.472.721,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.395.472.278,00	10.590.961.827,00	92,94	9.699.479.478,00
7	Dinas Sosial	40.086.355.758,00	37.772.904.833,00	94,23	38.448.436.006,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
8	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	28.562.504.988,00	27.039.346.154,00	94,67	26.286.763.751,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.142.863.840,00	7.619.027.468,00	93,57	7.889.670.177,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.299.661.839,00	40.568.808.141,00	93,69	38.893.859.807,00
11	Dinas Perhubungan	14.396.063.415,00	13.516.643.077,00	93,89	13.553.770.709,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.972.750.444,00	9.334.018.117,00	93,60	8.844.470.146,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.677.639.304,00	7.235.354.891,00	94,24	7.048.763.051,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.576.819.670,00	7.966.094.652,00	92,88	7.908.075.920,00
15	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	22.576.085.800,00	21.433.779.371,00	94,94	21.653.651.914,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.816.102.029,00	14.759.672.755,00	93,32	14.491.355.324,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.951.782.296,00	16.917.634.029,00	94,24	16.659.459.770,00
18	Dinas Pariwisata	10.542.004.388,00	9.321.110.710,00	88,42	8.474.691.931,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.381.062.522,00	42.148.786.378,00	92,88	44.337.405.575,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.511.935.005,00	14.597.194.357,00	94,10	15.646.250.666,00
21	Sekretariat Daerah	70.050.947.819,00	65.242.731.731,00	93,14	62.194.943.277,00
22	Paniradya Kaistimewan	7.950.958.475,00	7.577.435.346,00	95,30	6.722.049.501,00
23	Sekretariat DPRD	53.552.049.466,00	51.207.971.633,00	95,62	50.711.654.924,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.103.498.535,00	16.111.206.750,00	94,20	16.258.990.774,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	86.782.554.179,00	80.614.113.785,00	92,89	81.428.952.462,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	15.221.626.343,00	14.486.807.585,00	95,17	13.508.313.363,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.257.286.773,00	10.608.592.091,00	94,24	10.086.871.139,00
28	Badan Penghubung Daerah	6.098.547.065,00	5.520.581.978,00	90,52	5.612.784.514,00
29	Inspektorat	15.908.436.249,00	14.831.283.508,00	93,23	14.192.027.837,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.310.814.953,00	6.689.083.136,00	91,50	6.882.815.253,00
Jumlah		**1.752.750.894.932,00**	**1.651.782.965.460,00**	**94,24**	**1.572.322.039.241,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp1.155.896.100.440,35**	**Rp1.245.945.486.879,20**

Belanja barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.237.669.188.360,00 dan realisasi sebesar Rp1.155.896.100.440,35 atau 93,39%. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.049.386.438,85 atau 7,23% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp1.245.945.486.879,20. Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 hanya terserap sebesar 93,39% disebabkan karena beberapa hal antara lain sisa lelang pengadaan, efisiensi, selisih harga barang dengan harga yang terdapat pada DPA, dan belanja yang menyesuaikan kebutuhan. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	**Belanja Barang**				
1	Belanja Barang Pakai Habis	203.799.783.111,00	192.685.652.671,00	94,55	257.321.423.583,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.211.000,00	30.198.496,00	99,96	28.761.200,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	297.130.100,00	290.717.044,00	97,84	
	Jumlah	**204.127.124.211,00**	**193.006.568.211,00**	**94,55**	**257.350.184.783,00**
II	**Belanja Jasa**				
1	Belanja Jasa Kantor	482.812.776.483,00	464.758.764.810,00	96,26	465.702.335.273,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.158.956.858,00	44.851.094.242,00	93,13	48.064.553.869,00
3	Belanja Sewa Tanah	2.709.983.756,00	2.574.121.588,00	94,99	1.971.370.897,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.826.602.200,00	26.372.307.975,00	94,77	28.216.151.533,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.539.067.000,00	16.369.523.994,00	93,33	20.194.132.023,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	197.000.000,00	194.960.400,00	98,96	241.525.500,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.120.055.000,00	4.031.796.300,00	97,86	4.234.901.410,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.568.534.260,00	9.140.491.416,00	95,53	15.415.012.845,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	17.517.939.131,00	16.862.397.740,00	96,26	25.561.124.621,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	46.550.500,00	46.403.500,00	99,68	
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	393.250.000,00	365.750.000,00	93,01	1.999.725.700,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.017.220.000,00	3.523.244.330,00	87,70	4.053.244.525,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.536.000,00	1.536.000,00	100,00	

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	**614.909.471.188,00**	**589.092.392.295,00**	**95,80**	**615.654.078.196,00**
III	**Belanja Pemeliharaan**				
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	695.317.000,00	673.618.273,00	96,88	1.938.671.823,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.595.117.732,00	16.811.700.728,00	95,55	18.104.515.481,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.310.507.114,00	16.947.940.910,00	97,91	32.990.523.589,00
4	Belanja PemeliharaanJalan, Irigasi, dan Jaringan	38.080.213.535,00	37.757.717.131,00	99,15	30.939.068.436,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.215.550.000,00	1.200.103.823,00	98,73	1.064.668.783,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	39.998.850,00
	Jumlah	**74.896.705.381,00**	**73.391.080.865,00**	**97,99**	**85.077.446.962,00**
IV	**Belanja Perjalanan Dinas**				
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.382.629.300,00	96.272.118.419,00	88,83	101.198.799.249,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	12.836.012.000,00	10.490.512.891,00	81,73	7.422.418.784,00
	Jumlah	**121.218.641.300,00**	**106.762.631.310,00**	**88,07**	**108.621.218.033,00**
V	**Belanja Uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**				
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.841.007.000,00	40.516.123.400,00	99,20	38.935.995.900,00
	Jumlah	**40.841.007.000,00**	**40.516.123.400,00**	**99,20**	**38.935.995.900,00**
VI	**Belanja Barang dan Jasa BOS**				
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	111.698.238.045,00
	Jumlah	-	-	-	**111.698.238.045,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOSP				
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	111.934.656.814,00	111.276.973.731,00	99,41	-
	Jumlah	**111.934.656.814,00**	**111.276.973.731,00**	**99,41**	-
VII	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.741.582.466,00	41.850.330.628,35	60,01	28.608.324.960,20
	Jumlah	**69.741.582.466,00**	**41.850.330.628,35**	**60,01**	**28.608.324.960,20**
Jumlah		**1.237.669.188.360,00**	**1.155.896.100.440,35**	**93,39**	**1.245.945.486.879,20**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	341.918.970.781,00	332.819.739.933,00	97,34	340.386.261.264,00
2	Dinas Kesehatan	130.516.603.606,00	98.398.157.766,35	75,39	110.520.552.971,20
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	76.408.678.999,00	73.304.750.403,00	95,94	74.966.205.752,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.293.080.203,00	9.796.428.369,00	95,17	14.593.289.630,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.856.092.500,00	16.746.710.306,00	99,35	19.215.054.614,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.316.523.750,00	6.177.042.391,00	97,79	10.441.790.721,00
7	Dinas Sosial	32.048.839.230,00	31.243.394.290,00	97,49	46.021.606.454,00
8	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	37.483.798.920,00	35.273.313.006,00	94,10	24.801.600.284,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.527.385.250,00	8.113.019.679,00	95,14	9.872.827.826,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.151.540.113,00	18.659.409.435,00	92,60	22.825.438.453,00
11	Dinas Perhubungan	22.735.804.250,00	21.601.105.137,00	95,01	19.304.180.830,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.853.902.750,00	19.408.022.422,00	97,75	19.535.227.127,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	67.307.833.075,00	65.340.506.166,00	97,08	55.580.671.644,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.450.785.700,00	4.292.177.212,00	96,44	4.081.801.456,00
15	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudavan*)	119.666.712.730,00	116.724.377.422,00	97,54	141.576.607.805,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	19.434.406.514,00	18.768.518.869,00	96,57	22.542.322.180,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.669.744.750,00	22.835.699.197,00	96,48	23.568.423.712,00
18	Dinas Pariwisata	22.517.006.550,00	21.966.453.525,00	97,55	26.727.226.849,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.702.375.221,00	24.579.469.525,00	95,63	25.060.289.066,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.184.942.398,00	17.922.918.448,00	93,42	23.946.402.157,00
21	Sekretariat Daerah	45.408.264.468,00	41.377.901.102,00	91,12	44.313.016.333,00
22	Paniradya Kaistimewan	18.322.532.770,00	17.978.082.654,00	98,12	16.982.828.625,00
23	Sekretariat DPRD	77.954.656.299,00	65.956.292.952,00	84,61	70.815.284.786,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.690.259.105,00	4.883.394.944,00	85,82	4.807.807.199,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	24.159.402.920,00	22.928.337.669,00	94,90	25.678.177.272,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	6.268.491.950,00	5.793.739.089,00	92,43	8.900.899.884,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	7.660.000.790,00	6.829.500.832,00	89,16	11.413.712.124,00
28	Badan Penghubung Daerah	5.742.387.948,00	5.692.915.217,00	99,14	5.713.519.283,00

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
29	Inspektorat	9.664.175.450,00	9.363.021.637,00	96,88	9.408.348.983,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.753.989.370,00	11.121.700.843,00	94,62	12.344.111.595,00
Jumlah		**1.237.669.188.360,00**	**1.155.896.100.440,35**	**93,39**	**1.245.945.486.879,20**

Untuk Belanja barang dan jasa, salah satu deviasi terbesar terdapat pada BLUD karena anggaran belanja barang dan jasa sudah termasuk SILPA tahun 2023 yang tidak digunakan.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1.3	**Belanja Subsidi**	**Rp75.368.890.530,00**	**Rp74.269.644.598,00**

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp82.570.477.931,00 dan realisasi sebesar Rp75.368.890.530,00 atau 91,28%. Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.245.932,00 atau 1,48% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.269.644.598,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum *(public service obligation)*. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Rincian belanja subsidi tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral	5.341.600.000,00	5.341.600.000,00	100,00	5.241.600.000,00
2	Dinas Perhubungan	77.228.877.931,00	70.027.290.530,00	90,68	69.028.044.598,00
Jumlah		**82.570.477.931,00**	**75.368.890.530,00**	**91,28**	**74.269.644.598,00**

Penjelasan belanja subsidi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral dianggarkan sebesar Rp5.341.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.341.600.000,00 atau sebesar 100%. Belanja subsidi berupa bantuan biaya produksi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama yang bertugas dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih. Subsidi yang diberikan pada Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk membayar biaya listrik yang merupakan salah satu biaya terbesar dalam operasional Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama. Dasar hukum dalam pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Dinas Perhubungan dianggarkan Rp77.228.877.931,00 dan direalisasikan Rp70.027.290.530,00 atau sebesar 90,68%. Belanja subsidi diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*. Penyerapan anggaran sebesar 90,68% disebabkan oleh:
   a. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perhitungan Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Tahun Anggaran 2024 Nomor 027/2287 Tanggal 14 Juni 2023 antara Dinas Perhubungan DIY dengan PT. AMI, terdapat kenaikan realisasi pendapatan Trans Jogja sebesar Rp2.886.752.270,00 atau 26,75% dari target yang telah ditetapkan yaitu dari Rp10.791.642.802,00 menjadi Rp13.678.395.072,00 sehingga menyebabkan nilai subsidi menjadi berkurang.
   b. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pencairan pada saat pencairan subsidi sebesar Rp2.560.275.457,00.
   c. Penurunan biaya operasional sebesar Rp1.425.124.565,00.

   Beberapa faktor tersebut menyebabkan realisasi nilai subsidi berada dibawah anggaran yang ada. Perhitungan belanja subsidi berasal dari selisih biaya (pokok dan pendukung) dan pendapatan. Jika pendapatan semakin tinggi dari yang ditargetkan maka menyebabkan nilai subsidi semakin berkurang.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1.4	**Belanja Hibah**	**Rp653.554.770.630,00**	**Rp583.965.119.370,00**

Belanja hibah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp672.421.760.776,00 dan realisasi sebesar Rp653.554.770.630,00 atau 97,19% yang terdiri dari belanja hibah uang dan belanja hibah barang. Belanja hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.589.651.260,00 atau 11,92% dibanding belanja hibah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp583.965.119.370,00.

A. Belanja Hibah Uang

Belanja hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp468.876.837.576,00 realisasi sebesar Rp465.826.553.717,00 atau 99,35%. Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk uang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp97.714.604.411,00 atau 26,54% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp368.111.949.306,00. Belanja hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sub rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang berdasarkan Sub Rincian Obyek

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	76.713.270.000,00	75.199.043.486,00	98,03	54.480.013.215,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	169.672.511.381,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	271.533.122.576,00	271.183.122.576,00	99,87	28.816.500.000,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	-	-	87.537.709.005,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	-	-	17.269.640.705,00
6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.493.725.000,00	10.493.725.000,00	100,00	10.335.575.000,00
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	108.536.720.000,00	107.350.662.655,00	98,91	-
Jumlah		**468.876.837.576,00**	**465.826.553.717,00**	**99,35**	**368.111.949.306,00**

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada 8 (delapan) SKPD dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	181.121.782.000,00	178.421.999.655,00	98,51	155.677.174.710,00
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	532.511.381,00
3	Dinas Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	451.500.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	915.000.000,00	915.000.000,00	100,00	815.000.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	813.208.000,00	812.706.486,00	99,94	800.188.215,00
6	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	250.808.122.576,00	250.808.122.576,00	100,00	169.200.000.000,00
7	Sekretariat Daerah	24.450.000.000,00	24.100.000.000,00	98,57	30.300.000.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.493.725.000,00	10.493.725.000,00	100,00	10.335.575.000,00
Jumlah		**468.876.837.576,00**	**465.826.553.717,00**	**99,35**	**368.111.949.306,00**

Penjelasan Belanja Hibah dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1) **Hibah Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga**

Hibah dalam bentuk uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai SKPD teknis dianggarkan sebesar Rp181.121.782.000,00 dan realisasi sebesar Rp178.421.999.655,00 atau 98,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**72.105.062.000,00**	**70.591.337.000,00**	**97,90**	**1.513.725.000,00**
	Belanja Hibah KORMI DIY	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah NPC DIY	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah KONI DIY	31.634.000.000,00	31.634.000.000,00	100,00	-
	Belanja Hibah Kepada Kwarda DIY	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	-
	Hibah kepada SMK SWASTA	28.471.062.000,00	26.957.337.000,00	94,68	1.513.725.000,00
2	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**480.000.000,00**	**480.000.000,00**	**100,00**	-
	Dewan Pendidikan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	-
	Lembaga Orang Tua Asuh (L-OTA) DIY	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	-
	Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
3	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOS**	**108.536.720.000,00**	**107.350.662.655,00**	**98,91**	**1.186.057.345,00**
	SMA/K dan SLB SWASTA	108.536.720.000,00	107.350.662.655,00	98,91	1.186.057.345,00
	Total Hibah Tahun 2024	**181.121.782.000,00**	**178.421.999.655,00**	**98,51**	**2.699.782.345,00**

Belanja hibah dana BOSP-BOS merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta. Pengelolaan dana BOSP didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 462/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS disahkan dengan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. Belanja hibah dana BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp108.536.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp107.350.662.655,00 atau 98,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	SMA SWASTA	28.020.990.000,00	27.372.424.334,00	97,69	648.565.666,00
2	SMK SWASTA	63.126.630.000,00	62.699.511.200,00	99,32	427.118.800,00
3	SLB SWASTA	17.389.100.000,00	17.278.727.121,00	99,37	110.372.879,00
	JUMLAH	**108.536.720.000,00**	**107.350.662.655,00**	**98,91**	**1.186.057.345,00**

2) Hibah Oleh Dinas Kesehatan

Hibah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% merupakan hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) DIY untuk Urusan Kesehatan Tahun 2024 kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

3) Hibah Oleh Dinas Sosial

Hibah berupa uang Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Sosial dirinci menurut sub rincian obyek yaitu Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di anggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Sosial

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	-
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA) DIY	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**100,00**	-
	Karang Taruna DIY	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
	LKKS BK3S DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**	-

4) Hibah Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Hibah berupa uang Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp915.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp915.500.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**915.000.000,00**	**915.000.000,00**	**100,00**	-
	P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI	715.000.000,00	715.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Kinanti Berkarya, Semanu, Semanu, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Amarta Sejahtera, Pandowoharjo, Sleman, Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Srikandi Trengginas, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Sendang Swabumi, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Anggita Kencana, Petir, Rongkop, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Nawasena, Wareng, Wonosari, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Kerto Raharjo, Girikerto, Turi, Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Sindu Jaya Kreatif, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Tunas Bangun Mandiri, Bangunkerto Turi, Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Kelompok Desa PRIMA Wiladeg Bersinar, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	**915.000.000,00**	**915.000.000,00**	**100,00**	-

5) Hibah Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Hibah berupa uang Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh SKPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY dengan anggaran sebesar Rp813.208.000,00 dan realisasi sebesar Rp812.706.486,00 atau 99,94%.

6) Hibah Oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Hibah berupa uang Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dianggarkan sebesar Rp250.808.122.576,00 dan realisasi sebesar Rp250.808.122.576,00 atau 100.00%. Hibah tersebut diberikan dalam rangka kegiatan penguatan lembaga pelestari budaya. Penerima hibah uang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 34
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**250.808.122.576,00**	**250.808.122.576,00**	**100,00**	-
	Kraton Kasultanan Yogyakarta	204.354.395.776,00	204.354.395.776,00	100,00	-
	Pura Pakualaman Yogyakarta	46.453.726.800,00	46.453.726.800,00	100,00	-
	Jumlah	**250.808.122.576,00**	**250.808.122.576,00**	**100,00**	-

7) **Hibah Oleh Sekretariat Daerah**

Hibah dalam bentuk uang oleh Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.450.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp24.100.000.000,00 atau 98,57%. Hibah dalam bentuk uang pada Sekretariat Daerah dianggarkan pada Biro Bina Mental dan Spiritual dan Biro Pemberdayaan Masyarakat. Hibah berupa uang pada Biro Bina Mental Spiritual Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp21.775.000.000,00, realisasi sebesar Rp21.425.000.000,00 atau 98,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Biro Bina Mental Spiritual

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**100,00**	-
	MUI DIY	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-
	BAZNAS DIY	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
2	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**100,00**	-
	PW Muhammadiyah DIY	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	-
	PW NU DIY	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	-
3	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**19.275.000.000,00**	**18.925.000.000,00**	**98,18**	**(350.000.000,00)**
	KEVIKEPAN DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	PGI DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	WALUBI DIY	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
	Hibah kepada sejumlah rumah ibadah: Masjid, Mushola, Gereja, Pura	19.075.000.000,00	18.725.000.000,00	98,17	350.000.000,00
	Jumlah	**21.775.000.000,00**	**21.425.000.000,00**	**98,39**	**(350.000.000,00)**

Realisasi Hibah dalam bentuk uang oleh Biro Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.675.000.000,00, realisasi Rp2.675.000.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 36
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**2.675.000.000,00**	**2.675.000.000,00**	**100,00**	-
	TP PKK DIY	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	-
	DPD LPM DIY	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	-
	LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	LPMK Melikan, Rongkop, Gunungkidul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Hargorejo, Kokap, Kulon Progo	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Sambirejo, Prambanan, Sleman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Argomulyo, Cangkringan, Sleman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Wonolelo Pleret Bantul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Mertelu Gedangsari Gunungkidul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Giripurwo Girimulyo Kulon Progo	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Sumberagung Moyudan Sleman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Giwangan Umbulharjo Yogyakarta	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	LPMK Suryatmajan Danurejan Yogyakarta	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Kaliagung Sentolo Kulon Progo	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Wukirsari Imogiri Bantul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Karangasem Paliyan Gunungkidul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Hargobinangun Pakem Sleman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Mangunan Dlingo Bantul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	LPMK Girimulyo Panggang Gunungkidul	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	**2.675.000.000,00**	**2.675.000.000,00**	**100,00**	-

8) Hibah Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah uang Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp10.493.725.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.493.725.000,00 atau 100%. Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan rincian seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 37
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**10.493.725.000,00**	**10.493.725.000,00**	**100,00**	-
	Partai Amanat Nasional DIY	777.720.000,00	777.720.000,00	100,00	-
	Partai Persatuan Pembangunan DIY	207.256.667,00	207.256.667,00	100,00	-
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Prop. DIY	2.182.156.667,00	2.182.156.667,00	100,00	-
	DPD Partai Golkar DIY	630.933.333,00	630.933.333,00	100,00	-
	Partai Keadilan Sejahtera Prop. DIY	786.960.000,00	786.960.000,00	100,00	-
	DPW Partai Nasdem DIY	448.650.000,00	448.650.000,00	100,00	-
	Partai Solidaritas Indonesia DIY	142.230.000,00	142.230.000,00	100,00	-
	Partai Kebangkitan Bangsa DIY	704.886.667,00	704.886.667,00	100,00	-
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	747.276.667,00	747.276.667,00	100,00	-
	DPD Partai Demokrat DIY	262.313.332,00	262.313.332,00	100,00	-
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIY	1.000.745.000,00	1.000.745.000,00	100,00	-
	Partai Solidaritas Indonesia DIY	101.990.000,00	101.990.000,00	100,00	-
	Partai Kebangkitan Bangsa DIY	429.346.667,00	429.346.667,00	100,00	-
	DPD Partai Golkar DIY	371.346.667,00	371.346.667,00	100,00	-
	Partai Keadilan Sejahtera Prop. DIY	483.851.667,00	483.851.667,00	100,00	-
	Partai Amanat Nasional DIY	357.023.332,00	357.023.332,00	100,00	-
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	528.716.667,00	528.716.667,00	100,00	-
	Partai Persatuan Pembangunan DIY	112.985.000,00	112.985.000,00	100,00	-
	DPW Partai Nasdem DIY	217.336.667,00	217.336.667,00	100,00	-
	Jumlah	**10.493.725.000,00**	**10.493.725.000,00**	**100,00**	-

Pada Tabel 5.37 tentang Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terlihat adanya realisasi hibah kepada partai yang sama dalam satu tahun lebih dari 1 kali. Hal ini disebabkan adanya penyaluran yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 114/KEP/2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Sedangkan tahap kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 316/KEP/2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Belanja Hibah Barang

Belanja Hibah dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp203.544.923.200,00 dan realisasi sebesar Rp187.728.216.913,00 atau 92,23%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.124.953.151,00 atau 13,03% dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp215.853.170.064,00. Belanja hibah dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 dirinci berdasarkan sub rincian oyek seperti dalam tabel sebagai berikut

Tabel 5. 38
Rincian Belanja Hibah Barang berdasarkan Sub Rincian Obyek

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.657.528.500,00	45.538.138.490,00	93,59	40.047.845.525,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.558.690.000,00	17.421.098.980,00	99,22	19.989.724.300,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	135.000.804.700,00	122.616.459.443,00	90,83	155.815.600.239,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	2.327.900.000,00	2.152.520.000,00	92,47	-
Jumlah		**203.544.923.200,00**	**187.728.216.913,00**	**92,23**	**215.853.170.064,00**

Hibah barang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada 13 (tiga belas) SKPD seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 39
Rincian Belanja Hibah Barang pada SKPD

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Olahraga	51.151.728.500,00	48.191.407.040,00	94,21	42.892.458.075,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	55.034.910,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	94.941.066.800,00	85.387.537.258,00	89,94	108.235.796.152,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	945.204.000,00	944.340.800,00	99,91	7.534.887.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.000.000,00	239.493.000,00	99,79	1.112.147.000,00
6	Dinas Sosial	366.000.000,00	362.863.000,00	99,14	365.700.964,00
7	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	8.947.744.000,00	8.869.520.500,00	99,13	4.405.127.800,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	184.517.700,00	180.020.200,00	97,56	148.983.200,00
9	Dinas Perhubungan	2.327.900.000,00	2.152.520.000,00	92,47	-
10	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	15.064.490.000,00	14.767.830.430,00	98,03	17.145.111.750,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.637.407.200,00	5.745.000.700,00	86,55	7.342.646.410,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.733.700.000,00	19.897.015.939,00	91,55	20.932.554.303,00
13	Dinas Perindustrian dan perdagangan	1.005.165.000,00	990.668.046,00	98,56	5.682.722.500,00
Jumlah		**203.544.923.200,00**	**187.728.216.913,00**	**92,23**	**215.853.170.064,00**

Penjelasan hibah dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2024 dirinci dalam sub rincian obyek, yaitu:
   - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp47.727.828.500,00 direalisasikan sebesar Rp44.767.507.040,00 atau 93,80%. Hibah tersebut merupakan DAK Fisik SMA/SMK/SLB Swasta. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta dianggarkan sebesar Rp5.278.111.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.627.952.212,00, pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dianggarkan sebesar Rp36.632.125.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp35.048.107.000,00, dan yang terakhir pada Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta dianggarkan sebesar Rp5.817.592.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.091.447.828,00.
   - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp3.423.900.000,00 direalisasikan sebesar Rp3.423.900.000,00 atau 100,00%. Hibah ditujukan kepada pemuda pemudi se-DIY dan yang memiliki usaha atau baru merintis usaha.
2) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp94.941.066.800,00 realisasi sebesar Rp85.387.537.258,00 atau 89,94%, dan direalisasikan pada sub rincian obyek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Rincian belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 40
Rincian Belanja Hibah Barang pada DPUP SDM

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**94.941.066.800,00**	**85.387.537.258,00**	**89,94**	**9.553.529.542,00**
	LMPK Kalurahan Kedungkris Kap. Nglipar Kabupaten Gunungkidul	4.831.935.000,00	4.575.770.802,00	94,70	256.164.198,00
	LPMK Kalurahan Srikayangan Kap. Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	1.284.540.000,00	1.205.731.279,00	93,86	78.808.721,00
	LPMK Lumbungrejo	176.765.000,00	161.247.706,60	91,22	15.517.293,40
	LPMK Margoagung	176.765.000,00	161.247.706,60	91,22	15.517.293,40
	LPMK Caturharjo	176.765.000,00	161.247.706,60	91,22	15.517.293,40
	LPMK Sumberrejo	353.530.000,00	322.494.233,20	91,22	31.035.766,80

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	LPMK Girikerto	157.947.450,00	144.130.251,00	91,25	13.817.199,00
	LPMK Sinduharjo	157.947.450,00	144.130.251,00	91,25	13.817.199,00
	LPMK Harjobinangun	157.947.450,00	144.130.251,00	91,25	13.817.199,00
	LPMK Sardonoharjo	157.947.450,00	144.130.251,00	91,25	13.817.199,00
	LPMK Donokerto	157.947.450,00	157.884.251,00	99,96	63.199,00
	LPMK Sidorejo	130.557.000,00	130.542.527,00	99,99	14.473,00
	LPMK Sendangarum	130.557.000,00	130.542.527,00	99,99	14.473,00
	LPMK Sendangagung	130.557.000,00	130.542.527,00	99,99	14.473,00
	LPMK Sumberarum	130.557.000,00	130.542.527,00	99,99	14.473,00
	LPMK Sumberrahayu	522.227.600,00	522.170.572,00	99,99	57.028,00
	LPMK Kelor	170.909.500,00	155.681.851,00	91,09	15.227.649,00
	LPMK Tegaltirto	139.898.500,00	127.575.848,00	91,19	12.322.652,00
	LPMK Kalitirto	139.898.500,00	127.463.848,00	91,11	12.434.652,00
	LPMK Maguwoharjo	419.695.450,00	382.458.921,00	91,13	37.236.529,00
	LPMK Bunder	194.216.000,00	193.509.706,00	99,64	706.294,00
	LPMK Siraman	194.216.000,00	193.937.706,00	99,86	278.294,00
	LPMK Kebonagung	195.144.000,00	194.730.015,00	99,79	413.985,00
	LPMK Gadingsari, Sanden, Bantul	198.971.000,00	198.911.850,00	99,97	59.150,00
	LPMK Sogan, Wates, Kulon Progo	199.349.000,00	199.300.729,00	99,98	48.271,00
	LPMK Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo	199.810.000,00	199.751.729,00	99,97	58.271,00
	LPMK Wijirejo, Pandak, Bantul	198.790.000,00	198.741.729,00	99,98	48.271,00
	LPMK Balong, Girisubo, Gunungkidul	650.000.000,00	613.873.535,00	94,44	36.126.465,00
	LPMK Pucung, Girisubo, Gunungkidul	650.000.000,00	619.257.414,00	95,27	30.742.586,00
	LPMK Giritirto, Purwosari, Gunungkidul	650.000.000,00	634.894.110,00	97,68	15.105.890,00
	LPMK Rejosari, Semin, Gunungkidul	1.889.448.000,00	1.889.349.548,00	99,99	98.452,00
	LPMK Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	1.275.331.000,00	1.275.260.562,00	99,99	70.438,00
	LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul	520.897.000,00	520.873.974,00	100,00	23.026,00
	- LPMK Bener, Tegalrejo, Yogyakarta - LPMK Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta - LPMK Pringgokusuman, Gedong Tengen, Yogyakarta - LPMK Purbayan, Kotagede, Yogyakarta - LPMK Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta - LPMK Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta - LPMK Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	2.800.000.000,00	2.358.709.629,02	84,24	441.290.370,98
	- LPMK Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo - LPMK Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo - LPMK Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo - LPMK Hargorejo, Kokap,	3.618.900.000,00	3.372.241.115,00	93,18	246.658.885,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Kulon Progo - LPMK Hargotirto, Kokap, Kulon Progo - LPMK Karangsari, Pengasih, Kulon Progo - LPMK Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo - LPMK Pengasih, Pengasih, Kulon Progo - LPMK Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo				
	- LPMK Kalurahan Karangsewu, Galur, Kulon Progo (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Bumirejo, Lendah, Kulon Progo (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Gulurejo, Lendah, Kulon Progo (1 titik) - LPMK Kalurahan Jatirejo, Lendah, Kulon Progo (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo (2 titik) - LPMK Kalurahan Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo (2 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sentolo, Sentolo, Kulon Progo (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo (1 titik) - LPMK Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo (1 titik) - LPMK Kalurahan Triharjo, Wates, Kulon Progo (1 titik) - LPMK Kalurahan Wates, Wates, Kulon Progo (2 titik dan 12 titik lampu)	3.401.100.000,00	3.116.210.324,00	91,62	284.889.676,00
	- LPMK Kalurahan Argodadi, Sedayu, Bantul (4 titik dan 2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Argomulyo, Sedayu, Bantul (6 titik) - LPMK Kalurahan Argorejo, Sedayu, Bantul (4 titik dan 3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Argosari, Sedayu, Bantul (8 titik lampu) - LPMK Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan	4.567.800.000,00	3.999.904.896,00	87,57	567.895.104,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (3 titik) - LPMK Kalurahan Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul (1 titik)				
	- 'LPMK Kalurahan Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul (2 titik) - LPMK Kalurahan Bantul, Bantul, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Palbapang, Bantul, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Ringinharjo, Bantul, Bantul (5 titik lampu) - LPMK Kalurahan Trirenggo, Bantul, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Canden, Jetis, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul (8 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sumberagung, Jetis, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Trimulyo, Jetis, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sendangsari, Pajangan, Bantul (1 titik dan 2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Triwidadi, Pajangan, Bantul (10 titik lampu) - LPMK Kalurahan Caturharjo, Pandak, Bantul (4 titik dan 3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul (1 titik dan 2 titik lampu)	4.371.600.000,00	3.873.184.620,00	88,60	498.415.380,00
	- LPMK Kalurahan Donotirto, Kretek, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Bantul (1 titik) - LPMK Kalurahan Tirtomulyo, Kretek, Bantul (1 titik dan 4 titik lampu) - LPMK Kalurahan Tirtosari, Kretek, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Poncosari, Srandakan, Bantul (1 titik)	4.924.200.000,00	4.365.916.297,00	88,66	558.283.703,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	- LPMK Kalurahan Trimurti, Srandakan, Bantul (2 titik) - PMK Kalurahan Gadingharjo, Sanden, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul (2 titik dan 4 titik lampu) - LPMK Kalurahan Murtigading, Sanden, Bantul (5 titik dan 4 titik lampu) - LPMK Kalurahan Srigading, Sanden, Bantul (6 titik dan 5 titik lampu)				
	- LPMK Kalurahan Banguntapan, Banguntapan, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Jambidan, Banguntapan, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Potorono, Banguntapan, Bantul (1 titik dan 4 titik lampu) - LPMK Kalurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul (2 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul (2 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Srimulyo, Piyungan, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Bawuran, Pleret, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul (12 titik lampu) - LPMK Kalurahan Wonolelo, Pleret, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Bangunharjo, Sewon, Bantul (1 titik dan 6 titik lampu) - LPMK Kalurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul (1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Timbulharjo, Sewon, Bantul (4 titik lampu)	4.452.800.000,00	3.911.733.438,00	87,85	541.066.562,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	- LPMK Kalurahan Dlingo, Dlingo, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Jatimulyo, Dlingo, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Mangunan, Dlingo, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Muntuk, Dlingo, Bantul (2 titik lampu) - LPMK Kalurahan Terong, Dlingo, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Selopamioro, Imogiri, Bantul (1 titik dan 1 titik lampu) - LPMK Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul (3 titik lampu) - LPMK Kalurahan Seloharjo, Pundong, Bantul (2 titik dan 4 titik lampu) - LPMK Kalurahan Srihardono, Pundong, Bantul (1 titik dan 4 titik lampu)	2.383.600.000,00	2.152.305.927,00	90,30	231.294.073,00
	1.LPMK Kalurahan Beji, Patuk, Gunungkidul 2. LPMK Kalurahan Bunder, Patuk, Gunungkidul 3.LPMK Kalurahan Nglegi, Patuk, Gunungkidul 4.LPMK Kalurahan Pengkok, Patuk, Gunungkidul 5.LPMK Kalurahan Terbah, Patuk, Gunungkidul 6.LPMK Kalurahan Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul 7.LPMK Kalurahan Natah, Nglipar, Gunungkidul 8.LPMK Kalurahan Pengkol, Nglipar, Gunungkidul 9.LPMK Kalurahan Kampung, Ngawen, Gunungkidul 10.LPMK Kalurahan Bendung, Semin, Gunungkidul 11.LPMK Kalurahan Candirejo, Semin, Gunungkidul 12.LPMK Kalurahan Kalitekuk, Semin, Gunungkidul	3.197.160.000,00	2.900.596.994,00	90,72	296.563.006,00
	1.LPMK Kalurahan Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 2. LPMK Kalurahan Giriasih, Purwosari, Gunungkidul	2.300.160.000,00	2.031.932.927,00	88,34	268.227.073,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	3.LPMK Kalurahan Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul 4.LPMK Kalurahan Melikan, Rongkop, Gunungkidul 5.LPMK Kalurahan Pringombo, Rongkop, Gunungkidul 6.LPMK Kalurahan Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul 7.LPMK Kalurahan Kepek, Saptosari, Gunungkidul 8.LPMK Kalurahan Krambilsawit, Saptosari, Gunungkidul 9.LPMK Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul 10.LPMK Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul				
	- LPMK Bandung, Playen, Gunungkidul - LPMK Banyusoco, Playen, Gunungkidul - LPMK Bleberan, Playen, Gunungkidul - LPMK Dengok, Playen, Gunungkidul - LPMK Gading, Playen, Gunungkidul '- LPMK Getas, Playen, Gunungkidul - LPMK Logandeng, Playen, Gunungkidul - LPMK Ngawu, Playen, Gunungkidul - LPMK Ngunut, Playen, Gunungkidul - LPMK Plembutan, Playen, Gunungkidul	6.783.360.000,00	6.020.524.108,00	88,75	762.835.892,00
	- LPMK Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Gari, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Kepek, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Mulo, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Piyaman, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Pulutan, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Selang, Wonosari, Gunungkidul	4.842.760.000,00	4.301.408.419,00	88,82	541.351.581,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	- LPMK Siraman, Wonosari, Gunungkidul - LPMK Wonosari, Wonosari, Gunungkidul				
	- LPMK Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul - LPMK Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul - LPMK Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul - LPMK Kenteng, Ponjong, Gunungkidul - LPMK Ponjong, Ponjong, Gunungkidul '- LPMK Sawahan, Ponjong, Gunungkidul - LPMK Ngeposari, Semanu, Gunungkidul - LPMK Pacarejo, Semanu, Gunungkidul - LPMK Semanu, Semanu, Gunungkidul	3.056.560.000,00	2.739.811.235,00	89,64	316.748.765,00
	- LPMK Purwomartani, Kalasan, Sleman - LPMK Selomartani, Kalasan, Sleman - LPMK Tamanmartani, Kalasan, Sleman - LPMK Tirtomartani, Kalasan, Sleman - LPMK Sambirejo, Prambanan, Sleman	4.058.266.666,67	3.486.391.759,33	85,91	571.874.907,34
	- LPMK Kalitirto, Berbah, Sleman - LPMK Tegaltirto, Berbah, Sleman - LPMK Codongcatur, Depok, Sleman - LPMK Maguwoharjo, Depok, Sleman - LPMK Sinduadi, Mlati, Sleman - LPMK Sumberadi, Mlati, Sleman - LPMK Tlogoadi, Mlati, Sleman	3.842.466.666,67	3.274.187.936,33	85,21	568.278.730,34
	- LPMK Kepuharjo, Cangkringan, Sleman - LPMK Umbulharjo, Cangkringan, Sleman - LPMK Wukirsari, Cangkringan, Sleman - LPMK Sindumartani, Ngemplak, Sleman - LPMK Wedomartani, Ngemplak, Sleman - LPMK Hargobinangun, Pakem, Sleman - LPMK Harjobinangun,	3.515.666.666,67	3.056.518.687,33	86,94	459.147.979,34

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	Pakem, Sleman - LPMK Pakembinangun, Pakem, Sleman - LPMK Purwobinangun, Pakem, Sleman - LPMK Banyurejo, Tempel, Sleman - LPMK Lumbungrejo, Tempel, Sleman - LPMK Margorejo, Tempel, Sleman - LPMK Wonokerto, Turi, Sleman				
	- LPMK Donoharjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Minomartani, Ngaglik, Sleman - LPMK Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Sariharjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Sinduharjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Sukoharjo, Ngaglik, Sleman - LPMK Tridadi, Sleman, Sleman	4.058.266.666,67	3.661.039.804,33	90,21	397.226.862,34
	- LPMK Balecatur, Gamping, Sleman - LPMK Banyuraden, Gamping, Sleman - LPMK Trihanggo, Gamping, Sleman - LPMK Sumberagung, Moyudan, Sleman - LPMK Sumberarum, Moyudan, Sleman - LPMK Sumberrahayu, Moyudan, Sleman - LPMK Sumbersari, Moyudan, Sleman	4.123.666.666,67	3.625.777.045,33	87,93	497.889.621,34
	- LPMK Sidoagung, Godean, Sleman - LPMK Sidokarto, Godean, Sleman - LPMK Sidomoyo, Godean, Sleman - LPMK Sidomulyo, Godean, Sleman - LPMK Sidorejo, Godean, Sleman - LPMK Sendangagung, Minggir, Sleman - LPMK Sendangrejo, Minggir, Sleman - LPMK Margodadi, Seyegan, Sleman	4.523.666.666,67	4.050.764.181,33	89,55	472.902.485,34
	- LPMK Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul	1.198.000.000,00	1.062.736.397,00	88,71	135.263.603,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
	- LPMK Patuk, Patuk, Gunungkidul - LPMK Sitimulyo, Piyungan, Bantul - LPMK Bawuran, Pleret, Bantul - LPMK Girikerto, Turi, Sleman				
	- LPMK Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul - LPMK Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Bantul	403.150.000,00	338.171.244,75	83,88	64.978.755,25
	- LPMK Sindumartani, Ngemplak, Sleman - LPMK Sinduadi, Mlati, Sleman	403.150.000,00	336.193.814,75	83,39	66.956.185,25
	- LPMK Magromulyo, Seyegan, Sleman - LPMK Caturharjo, Sleman, Sleman	403.150.000,00	361.990.894,75	89,79	41.159.105,25
	- LPMK Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul - LPMK Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul - LPMK Karangawen, Girisubo, Gunungkidul - LPMK Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul	990.550.000,00	897.227.119,75	90,58	93.322.880,25
Jumlah		**94.941.066.800,00**	**85.387.537.258,00**	**89,94**	**9.553.529.542,00**

3) Hibah dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp945.204.000,00 dan direalisasikan Rp944.340.800,00 atau 99,91% pada sub rincian obyek belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Hibah tersebut berupa rompi untuk kelompok jagawarga.
4) Hibah dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00 realisasi sebesar Rp239.493.000,00 atau 99,79%. Hibah tersebut dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana). Rincian belanja hibah dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 41
Rincian Belanja Hibah Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**			
	FPRB Gari	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	KATANA Bumijo	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	Kaltana Kricak	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	KTB Kricak Kidul	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	Tagana Yogyakarta	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	KTB Prenggan	40.000.000,00	39.915.500,00	99,79
	Jumlah	**240.000.000,00**	**239.493.000,00**	**99,79**

5) Hibah dalam bentuk Barang pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp366.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp362.863.000,00 atau 99,14% merupakan hibah yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 42
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Sosial

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**366.000.000,00**	**362.863.000,00**	**99,14**
	KUBE Lestari Budaya Sanggar Pameling	36.600.000,00	36.516.000,00	99,77
	KUBE Lestari Budaya Sanggar Laras	36.600.000,00	36.519.000,00	99,78
	KUBE Lestari Budaya Turonggo Mudho	36.600.000,00	36.230.000,00	98,99
	KUBE Lestari Budaya Makaryo	36.600.000,00	36.470.500,00	99,65
	KUBE Lestari Budaya Kembang Waru	36.600.000,00	36.314.000,00	99,22
	KUBE Lestari Budaya Bakpia Pathuk	36.600.000,00	36.235.000,00	99,00
	KUBE Lestari Budaya Rupo Deling	36.600.000,00	36.500.000,00	99,73
	KUBE Lestari Budaya Pringgading Ecoprint	36.600.000,00	36.072.000,00	98,56
	KUBE Lestari Budaya Sekar Kanthil	36.600.000,00	36.381.500,00	99,40
	KUBE Lestari Budaya Turonggo Mudho Lestari Budoyo	36.600.000,00	35.625.000,00	97,34
	Jumlah	**366.000.000,00**	**362.863.000,00**	**99,14**

6) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.947.744.000,00 realisasi sebesar Rp8.869.520.500,00 atau 99,13%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 43
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**8.947.744.000,00**	**8.869.520.500,00**	**99,13**
	LPMK Argomulyo, Sedayu, Bantul	37.800.000,00	37.770.000,00	99,92
	LPMK Argorejo, Sedayu, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Bangunharjo, Sewon, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Bangunkerto, Turi, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Banguntapan, Banguntapan, Bantul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Banyurejo, Tempel, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Banyusoca, Playen, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Bunder, Patuk, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Candirejo, Semin, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Caturharjo, Pandak, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Caturtunggal, Depok, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	LPMK Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Gari, Wonosari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Girikerto, Turi, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Girisekar, Panggang, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Girisuko, Panggang, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Gulurejo, Lendah, Kulon Progo	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Guwosari, Pajangan, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Harjobinangun, Pakem, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Kalirejo, Kokap, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Kalitekuk, Semin, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Kampung, Ngawen, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Karangasem, Paliyan, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Katongan, Nglipar, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Logandeng, Playen, Gunungkidul	25.200.000,00	25.180.000,00	99,92
	LPMK Maguwoharjo, Depok, Sleman	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Mangunan, Dlingo, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Margomulyo, Seyegan, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	31.500.000,00	31.475.000,00	99,92
	LPMK Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Murtigading, Sanden, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Natah, Nglipar, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Ngampilan, Ngampilan, Yogyakarta	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	LPMK Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Ngawu, Playen, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Nglegi, Patuk, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Palbapang, Bantul, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Pampang, Paliyan, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Panggungharjo, Sewon, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Panjangrejo, Pundong, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Patalan, Jetis, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Petir, Rongkop, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Planjan, Saptosari, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Plumbon, Temon, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Purbayan, Kotagede, Yogyakarta	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Putat, Patuk, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Segoroyoso, Pleret, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Seloharjo, Pundong, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Selomartani, Kalasan, Sleman	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Selopamioro, Imogiri, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Semanu, Semanu, Gunungkidul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Semin, Semin, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Semugih, Rongkop, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	LPMK Sendangagung, Minggir, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sendangtirto, Berbah, Sleman	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sidoluhur, Godean, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Srihardono, Pundong, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Sriharjo, Imogiri, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sumberarum, Moyudan, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sumberrahayu, Moyudan, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tamanan, Banguntapan, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tancep, Ngawen, Gunungkidul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Tegaltirto, Berbah, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Temuwuh, Dlingo, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tepus, Tepus, Gunungkidul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Terong, Dlingo, Bantul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Timbulharjo, Sewon, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tirtomulyo, Kretek, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tirtosari, Kretek, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Tlogoadi, Mlati, Sleman	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Triharjo, Pandak, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Trimulyo, Jetis, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Trimurti, Srandakan, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Trirenggo, Bantul, Bantul	18.900.000,00	18.885.000,00	99,92
	LPMK Triwidadi, Pajangan, Bantul	37.800.000,00	37.770.000,00	99,92
	LPMK Umbulharjo, Cangkringan, Sleman	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	LPMK Wates, Wates, Kulon Progo	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Wijirejo, Pandak, Bantul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul	6.300.000,00	6.295.000,00	99,92
	LPMK Wonokromo, Pleret, Bantul	12.600.000,00	12.590.000,00	99,92
	Kelompok Karya Mandiri	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Stock Opname	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Kelompok Sumber Jaya Makmur	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Kelompok Bang Maja	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Pemuda Muda Mudi Pamurga 11	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Pemuda Dan Pemudi Wijirejo	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Pemuda Dan Pemudi Wukirsari	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Karang Taruna Tirta Yuda	150.000.000,00	147.765.000,00	98,51
	Kelompok Jogjakreasi	90.620.000,00	90.000.000,00	99,32
	Kelompok Tangkilan Jaya Mandiri	82.144.000,00	82.000.000,00	99,82
	Kelompok Berkah Mandiri	82.144.000,00	82.000.000,00	99,82
	Kelompok Sidomoyo Jaya Mandiri	82.144.000,00	82.000.000,00	99,82
	Kelompok Camisado Mutimedia	82.144.000,00	82.000.000,00	99,82
	Kelompok Insan Barokah	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Indah Busana	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Beauty Fashion	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	PKK Kalurahan Kepuharjo	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Produktif Ledhok Timoho	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Sidoluhur Pakualaman	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Kesarum Jaya	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Sarinah	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	PKK Padukuhan Plembutan Timur	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Ibu-Ibu Melenial Sumbersari	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Cahari Jaya Abadi	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Menjahit Sidoasih	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Maju Bersama	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok PKK RT 19	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Menjahit Srikandi	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Menjahit Marsudi Bogo	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Plosokuning Menjahit Plosokuning V	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Sidomoyo Jaya Tailor	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Ayo Maju	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Tulip Karangkajen	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Yumna	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Pemudi Poncosari	74.624.000,00	73.725.000,00	98,80
	Kelompok Queen Beauty	53.760.000,00	50.680.000,00	94,27
	IKM Mahkota Rias	53.760.000,00	50.680.000,00	94,27
	Kelompok UMKM Kautsar	53.760.000,00	50.680.000,00	94,27
	Kelompok Hertin Salon	53.760.000,00	50.680.000,00	94,27
	Kelompok Muda Otomotif	63.500.000,00	62.915.000,00	99,08
	Kelompok Usaha Otomotif Creative Automotive	63.500.000,00	62.915.000,00	99,08
	Kelompok Akusara	63.500.000,00	62.915.000,00	99,08
	Kelompok Sidorejo Makmur	63.500.000,00	62.915.000,00	99,08
	Karang Taruna Sidomukti	63.500.000,00	62.915.000,00	99,08
	Kelompok Melati 2 Bersatu	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Arsana Mahardika	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Raos Eco	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Prima Cahaya Sejati	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Boga Rasa Ngaran	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok MTU Sukses	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Miroso	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Wistara Women	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Citra Boga	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Mbok Hanggo	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Wanita Tani Srikandi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Stock opname	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Pemudi Gadingsari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Sido Tuku	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Usaha Kartini Sejati	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Tunas Sekar Tanjung	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	KUB Kanoman Boga	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Arum Mandiri	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Paguyuban KWT M2 Bersatu	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Mekar Ayu	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Tata Boga Sekar Sari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Hoki-Koky	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Mrantasi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Pandan Wangi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	KPKI Pandansari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Srikandi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Tani Lestari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Usaha Produktif Mayanenak	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Clereng Mrungi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Ibu-Ibu Mandiri	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	KWT Kalurahan Bunder	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Anyelir	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Usaha Kue Anggrek Bakery	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Usaha Olahan Anggur Nusa Indah	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Anak Ranting Tahunan Selatan 1	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Mekar Makmur	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Sekar Arum	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok PKK Sido Makmur Klurak Tamanmartani	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok PKK Wapin (Wanita Penuh Inisiatif)	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok PKK Kebur Kidul	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Pengolahan Makanan Sejahtera Mandiri	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Wanita Tani Tanjung Lestari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok KWT Keladi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok MTU Pengolahan Makanan Bangunkerto	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Cundamani Adhikari	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Uswatun	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Sekar Boga	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Barokah Makaryo	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok UMKM Kring I	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Mantep Ing Roso	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Oryza Sativa	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Dapur Srikandi	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Bagusan Raos Eco	63.360.000,00	63.028.500,00	99,48
	Kelompok Sata Sejahtera	77.500.000,00	76.620.000,00	98,86
	Kelompok Sansevieria, Bejiharjo Sido Maju, Selo Upoyo, Maju Mandiri, Mufida Jaya, Karang Taruna Mekar Hargorejo	465.000.000,00	460.320.000,00	98,99
	Jumlah	**8.947.744.000,00**	**8.869.520.500,00**	**99,13**

7) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp184.517.700,00 realisasi sebesar Rp180.020.200,00 atau 97,56%. Hibah berupa pembangunan kebun bibit rakyat dan pembangunan *gully plug*. Rincian hibah barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**184.517.700,00**	**180.020.200,00**	**97,56**
1	**Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR)**	106.880.000,00	102.680.000,00	96,07
a	Bantuan berupa bahan dan sarpras penunjang kegiatan pembibitan kepada KTH Sedyo Nurut	53.440.000,00	51.340.000,00	96,07
b	Bantuan berupa bahan dan sarpras penunjang kegiatan pembibitan kepada KTH Wana Lestar	53.440.000,00	51.340.000,00	96,07
2	**Pembangunan Gully Plug**	77.637.700,00	77.340.200,00	99,62
a	Bahan dan material untuk pembuatan gully plug kepada KTH Margo Tani	13.993.400,00	13.937.925,00	99,60
b	Bahan dan material untuk pembuatan gully plug kepada KTHR Tani Rejo	33.307.500,00	33.176.425,00	99,61
c	Bahan dan material untuk pembuatan gully plug kepada KTH Sumber Rejeki	13.993.400,00	13.937.925,00	99,60
d	Bahan dan material untuk pembuatan gully plug kepada KTH Umbul Makmur	16.343.400,00	16.287.925,00	99,66
	Jumlah	**184.517.700,00**	**180.020.200,00**	**97,56**

8) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.327.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.152.520.000,00 atau 92,47%. Hibah Barang Milik Daerah berupa becak kayuh tenaga alternatif pada Dinas Perhubungan DIY diserahkan kepada Koperasi Jasa Becak Wisata Yogyakarta, Koperasi Becak Kayuh Yogyakarta dan Koperasi Asha Abyakta Senopati.

9) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp15.064.490.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp14.767.830.430,00 atau 98,03%. Barang yang dihibahkan antara lain berupa alat musik kesenian, pakaian kesenian, perlengkapan sanggar, dan pekerjaan fisik (konstruksi). Rincian Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 45
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**929.700.000,00**	**770.631.450,00**	**82,89**
	Paguyuban Pengusaha Malioboro Jl. Ahmad Yani (PPMAY)	929.700.000,00	770.631.450,00	82,89
2	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**14.134.790.000,00**	**13.997.198.980,00**	**99,03**
	Kelompok Seni Mayangkoro	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Nareswari	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Fajar Mustika Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Paguyuban Ketoprak Baskoro Manunggal Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kelompok Karawitan Wargo Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Laras Madya Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Marsudi Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Laras Irama	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Suropawiro	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Budaya Ngesti Manunggal Jaten	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Laras Pradonggo Mudho	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Surya Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Macapat Tresno Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Arum Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Paguyuban Ketoprak Sedyo Rahayu	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Seni Sekar Tanjung	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Randu Gumballa	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Ngudilaras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kridho Budoyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Paguyuban Seni Dan Budaya Kelurahan Kotabaru	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Madya Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Kreasi Budaya Sidikan	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Catur Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Tegal Jayan	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Kidung Kinasih	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Seni Dan Budaya Sekar Arum	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Mangestoni	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Laskita Mas	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Wahyu Jati Manunggal	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Karawitan Ngudi Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Sekar Singosuto	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Gereja Kristen Jawa Suryodiningratan	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Puspa Rini	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kel Budaya Puspo Laras Kembang	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Suro Dahono	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Mutiara Abadi	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Paguyuban Kesenian Karawitan Pringgolaras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Tari Neng Nong	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Seni Sedyo Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Kesenian Suko Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Gondo Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Sekar Nyawiji	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Tresno Budoyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kelompok Langen Kidung	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Namas Teja Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Bangun Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Purwo Manunggal	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Siswi Manunggal Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Suko Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Laras Puri	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Argo Gandes	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Kanegawa	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	LOSARI NYAWIJI	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Ngudi Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Murti Wiromo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Kumoro Cahyo Kalinampu	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Donomulyo (Lestari Budoyo)	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Paguyuban Kampung Cyber	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Laras sembung manunggal (Sekar Gending)	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	SMP N 3 Sewon	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Karawitan Mulyo Sari Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sanggar Adem Ayem	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Sari Budoyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Madya Laras	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Lestari Budaya	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Suryo BUdoyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Taruno Budoyo	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Cah enom	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Museum Wayang bebersekartaji	147.000.000,00	146.400.000,00	99,59
	Satya Wirama Pandemen Budaya Jawa	300.000.000,00	299.500.000,00	99,83
	IKA – ARTISTIKA (Ikatan Alumni Aski – STSI – ISI Surakarta)	650.000.000,00	641.250.000,00	98,65
	Universitas Widya Mataram	650.000.000,00	641.250.000,00	98,65
	Ikatan Keluarga Gunungkidul tanggal	650.000.000,00	641.250.000,00	98,65
	kelompok Seni Reog Tunggal Karso	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kudho Rukun Santoso	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo Seto Manggolo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Jatilan Turonggo Jati	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian Jatilan Seto Rogo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Krido Sari Budaya	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Kembang Mudho Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Seni Jatilan Wahyu Turonggo Jati	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Seni Kuda Lumping Ngesti Budhoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kelompok Lengger Tapeng Indro Cipto	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Lestari Turonggo Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	kelompok Seni Jathilan " Krido Budoyo"	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Jathilan Kreasi Baru Tri Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kelompok Kesenian Jathilan Bekso Turonggo Among Mudo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian Doger Kreasi Jathilan Singo Maruto	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian Jathilan Bekso Kridho Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Satria Muda Pagerharjo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kelompok Seni jathilan Samudro Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian jathilan Tamtomo Kudho Mataram	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian Tri rasa Mudha Samberembe	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo Aryo Seto	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kudho Pamungkas	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kudho Manunggal	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Surya Kudho Budaya Kawedan	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Klasik Kudho Tresno	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Eka Karti Budaya	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Setyo Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kesenian Jathil Turonggo Bekso	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kesenian jathilan Wayang Wong Turonggo Mega Mendung	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Kesenian Jathilan Hargo Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo Dwi Mudha	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo Kaisar	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Gandes Luwes	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo manunggal Bonorejo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Panca Warga Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Bimo kurdo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Sumber rukun budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Sumber rukun budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Garangan Squad	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Seni Widodo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kridho manggolo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	NOGO Simo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Rogo sejiwo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo budoyo girinyono	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo budoyo girinyono	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo bekso Code Laras	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Sanggar Munggur	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Turonggo bekso Code Laras	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kelompok Jatil Putro Ragil Kudho Sembodo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Seni Suro Yudho Yono	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Paguyuban Seni Suro Yudho Yono	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Tunas Mudho Budoyo	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Jathilan Satrio Manunggal	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Kudho Satrio Mudho	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Bregodo Kusumo Bronto	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	hibah yang belum disalurkan dan dicatat kembali sebagai persediaan	15.990.000,00	15.990.000,00	100,00
	Laras Kinasih	12.000.000,00	11.250.000,00	93,75
	Paguyuban Bregada Hastha Wiratama	55.500.000,00	54.000.000,00	97,30
	Shohibul Hidayah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Khairunnisa	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh 'Al-Ikhlas'	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hidayah Nur-Taji	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Nurul Istiqomah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Al-Abror	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Syaiful Qolbi	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Al Hidayah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Mocopat Sekar Mekar	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Putri Syauqunnida	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Qotrunnada	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Group Hadroh Putri Baitusalam	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Grup Sholawatan Jawa " Mudo Palupi " Brajan	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh An Nur	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kalurahan Minomartani	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Putri Hargosari	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Sirojul Ummah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Al Hidayah Jonggrangan	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Plumbungan	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Dono Sworo	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Annisa	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Gandrung Sholawat	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Ponpes Ainul Yakin	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Mmis "Muda Mudi Islam Masjid Sokotunggal"	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Bahrul Ulum Ngentak	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Sholawat Nurul Jannah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Sholawat Tombo Ati	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Kyai Sastro	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Karang Taruna Bergerak	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Al Ikhtiyar Kotagede	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hikmah Salam	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Asaadah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Dawatul Islam	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kidung Demangan	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Miftahul Jannah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Al Bayinah	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Hadroh Nurul Aini	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Hadroh Mar'alusholiha	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kel Hadroh Permata	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Kelompok Hadroh Nasuroh	5.400.000,00	4.855.000,00	89,91
	Turonggo Sekar Arum	34.700.000,00	34.700.000,00	100,00
	Darmo Mudo Budoyo	34.700.000,00	34.700.000,00	100,00
	Gempita Kreasi Muda	34.700.000,00	34.700.000,00	100,00
	Sanggar Seni Dewa Dewi	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00
	Jonggrang Community	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00
	Ervivi Musik Istimewa	60.037.000,00	59.760.000,00	99,54
	Pendukung Hibah	215.713.000,00	174.798.980,00	81,03
	Jumlah	**15.064.490.000,00**	**14.767.830.430,00**	**98,03**

10) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp6.637.407.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.745.000.700,00 atau 86,55%. Hibah tersebut berupa Hibah Sarana Budidaya Perikanan, Hibah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Non Konsumsi (Budinonsi), Hibah Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan, Rehab Tunnel Garam, dan Perlengkapan POKMASWAS.
11) Belanja hibah dalam bentuk barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp21.733.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.897.015.939,00 atau 91,55% pada sub rincian obyek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Penerima hibah adalah kelompok tani-kelompok tani di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12) Hibah dalam bentuk barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.005.165.000,00 realisasi sebesar Rp990.668.046,00 atau 98,56%. Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 46
Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**1.005.165.000,00**	**990.668.046,00**	**98,56**
	IKM Trubus Mandiri	120.000.000,00	119.790.000,00	99,83
	IKM KKMM Mlangi	120.000.000,00	107.657.658,00	89,71
	Kelompok IKM Omah Kakao	154.600.000,00	156.225.881,00	101,05
	KWT Putri Kencana	13.965.000,00	13.905.000,00	99,57
	Kelompok IKM Griya Coklat	139.000.000,00	136.694.597,00	98,34
	Kelompok IKM Ngudi Raharjo	92.300.000,00	92.273.000,00	99,97
	Kelompok IKM Bingkon	53.600.000,00	57.584.179,00	107,43
	Kelompok IKM Sedyo Maju / KWT Ngudi Makmur	56.200.000,00	54.834.537,00	97,57
	Kelompok IKM Sido Dadi	64.500.000,00	62.620.597,00	97,09
	Kelompok IKM Sari Mulyo	191.000.000,00	189.082.597,00	99,00
	Jumlah	**1.005.165.000,00**	**990.668.046,00**	**98,56**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	**Rp53.305.675.334,00**	**Rp28.286.453.932,00**

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp55.530.042.500,00 realisasi sebesar Rp53.305.675.334,00 atau 95,99%. Belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 terdiri dari belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan sebesar Rp30.543.200.000,00 direalisasikan sebesar Rp29.607.800.000,00 sedangkan bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan Rp24.986.842.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.697.875.334,00.

1) Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Sosial sebesar Rp30.543.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.607.800.000,00 atau 96,94%. Rincian bantuan sosial dalam bentuk uang di Dinas Sosial diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 47
Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang pada Dinas Sosial

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**	**30.142.200.000,00**	**29.206.800.000,00**	**96,90**
	Bansos JSLU bagi individu	28.800.000.000,00	27.888.600.000,00	96,84
	buruh pabrik PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA	400.200.000,00	397.800.000,00	99,40
	buruh pabrik PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA	528.600.000,00	516.600.000,00	97,73
	buruh pabrik PT. PUTRA PATRIA ADIKARSA	159.000.000,00	153.600.000,00	96,60
	buruh pabrik PT. MITRA ADI JAYA	254.400.000,00	250.200.000,00	98,35
2	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**	**380.000.000,00**	**380.000.000,00**	**100,00**
	KUBE Makmur Barokah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Arumsari	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Bejono Lestari	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Notomanah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	LPMK SOROSUTAN	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE FM Greget Makaryo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Paliyan Lor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Bulurejo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE FM Harapan Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tri Manunggal	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Kelompok Mutiara Asih	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Kelompok KUBE Lancar Jaya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Sri Rejeki	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Sekar Arum	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tunas Rejeki	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tunas Karya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tunas Rejeki	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tunas Harapan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	KUBE Tunas Mekar	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
3	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**100,00**
	LKS PA Bhakti Luhur	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	LKSA Almarina	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	Jumlah	**30.543.200.000,00**	**29.607.800.000,00**	**96,94**

Di antara penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 mekanisme penyaluran bantuan kepada KUBE, yaitu melalui hibah barang dan bantuan sosial uang. Bantuan bagi KUBE yang sumber dananya berasal dari APBD reguler dapat diberikan berupa bantuan sosial uang. Sedangkan bantuan bagi KUBE yang sumber dananya berasal dari dana keistimewaan diberikan dalam bentuk hibah barang sesuai arahan. Kemudian untuk penerima Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, termasuk diantaranya adalah buruh pabrik rokok pada PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia, PT. Cahaya Mulia Persada Nusa, PT. Putra Patria Adikarsa, dan PT. Mitra Adi Jaya sesuai usulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bantuan sosial uang tersebut merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sesuai ketentuan yang berlaku, kriteria penerima BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM , BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rincian belanja bantuan sosial dalam bentuk barang Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
   a. DPUP ESDM

      Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp20.260.167.500,00 dan direalisasikan Rp19.000.110.934,00 atau 93,78% pada sub rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu. Bantuan diberikan kepada masyarakat sesuai BNBA dan individu di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Peningkatan Kualitas rumah/rehab, Pembangunan Baru Rumah Layak Huni, Pembangunan Baru Rumah Layak Huni terintegrasi, Pembangunan Baru Rumah Layak Huni untuk Korban bencana, dan Instalasi Sambungan listrik rumah tangga.
   b. BPBD

      Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp18.445.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.765.000,00 atau 85,47% pada sub rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga. Bentuk bantuan yang diberikan adalah pensertifikatan tanah huntap.
   c. Dinas Sosial

      Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp39.750.000,00 dan direalisasikan Rp38.807.000,00 atau 97,63% pada sub rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Bantuan diberikan berupa barang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhu'Afa Muhammadiyah Prambanan sebesar Rp15.361.550,00, Panti Asuhan Putri An Nur Sumberharjo Aisyiyah Cabang Prambanan sebesar Rp11.747.775,00, dan Yayasan IndoCharis Rp11.697.675,00.
   d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

      Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp4.668.480.000,00 dan direalisasikan Rp4.643.192.400,00 atau 99,46% pada sub rincian obyek Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa telur ayam untuk penanggulangan stunting.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**Rp659.153.310.940,95**	**Rp745.354.723.452,00**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp659.153.310.940,95,00 atau 90,40% dari anggaran sebesar Rp729.146.199.080,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp86.201.412.511,05 atau 11,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp745.354.723.452,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Jenis

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	36.434.585.000,00	35.792.256.125,00	98,24	169.306.929.192,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.109.759.556,00	204.099.193.397,00	97,60	186.110.825.035,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.419.731.340,00	220.538.449.546,95	78,37	150.886.570.710,00
4	Belanja ModalJalan, Irigasi, dan Jaringan	185.585.676.953,00	182.299.322.051,00	98,23	225.450.247.009,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.727.993.431,00	11.562.606.421,00	98,59	13.437.651.506,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	4.868.452.800,00	4.861.483.400,00	99,86	162.500.000,00
Jumlah		**729.146.199.080,00**	**659.153.310.940,95**	**90,40**	**745.354.723.452,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**Rp35.792.256.125,00**	**Rp169.306.929.192,00**

Belanja modal tanah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp36.434.585.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.792.256.125,00 atau 98,24%. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.514.673.067,00 atau 78,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp169.306.929.192,00. Rincian belanja modal tanah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 49
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**35.834.585.000,00**	**35.391.638.925,00**	**98,76**	**130.213.102.270,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.616.585.000,00	10.358.397.425,00	97,57	74.920.800.720,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	25.218.000.000,00	25.033.241.500,00	99,27	55.292.301.550,00
2	**Belanja Modal Lapangan**	**600.000.000,00**	**400.617.200,00**	**66,77**	**39.093.826.922,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	600.000.000,00	400.617.200,00	66,77	14.118.464.506,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi	-	-	0,00	23.672.078.416,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	-	-	0,00	1.303.284.000,00
Jumlah		**36.434.585.000,00**	**35.792.256.125,00**	**98,24**	**169.306.929.192,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal tanah pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	-	-	-	1.303.284.000,00
2	Dinas Kesehatan	25.218.000.000,00	25.033.241.500,00	99,27	55.132.373.350,00
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.616.585.000,00	10.358.397.425,00	97,57	74.920.800.720,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	600.000.000,00	400.617.200,00	66,77	37.790.542.922,00
5	Sekretariat Daerah	-	-	-	159.928.200,00
Jumlah		**36.434.585.000,00**	**35.792.256.125,00**	**98,24**	**169.306.929.192,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp204.099.193.397,00**	**Rp186.110.825.035,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp209.109.759.556,00 dan realisasi sebesar Rp204.099.193.397,00 atau 97,60%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.988.368.362,00 atau 9,67% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp186.110.825.035,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 per obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	17.523.371.327,00	17.362.490.078,00	99,08	8.273.098.310,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	11.306.532.000,00	11.235.494.133,00	99,37	9.328.416.446,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.395.000,00	90.806.637,00	90,45	328.052.301,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	532.376.150,00	517.409.993,00	97,19	6.970.481.884,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.160.416.058,00	30.932.932.502,00	96,18	35.116.687.775,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.366.315.700,00	4.082.139.606,00	93,49	5.915.683.283,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.302.048.114,00	13.872.405.224,00	97,00	510.667.333,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	29.753.899.010,00	29.028.523.167,00	97,56	34.710.486.313,00
9	Belanja Modal Komputer	42.908.507.496,00	41.736.193.587,00	97,27	37.769.850.363,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	7.564.000,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	69.300.000,00	69.247.924,00	99,92	60.569.016,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	75.000.000,00	74.869.500,00	99,83	421.554.379,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Belanja Modal Alat Peraga	960.000,00	957.375,00	99,73	-
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	9.632.646.138,00	9.010.332.244,00	93,54	1.768.847.226,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	220.532.400,00	208.438.315,00	94,52	114.156.162,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	38.132.795.800,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	43.139.115.688,00	43.130.067.186,00	99,98	-
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.018.344.475,00	2.746.885.926,00	91,01	6.681.914.444,00
Jumlah		**209.109.759.556,00**	**204.099.193.397,00**	**97,60**	**186.110.825.035,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 52
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	48.028.000,00	46.928.000,00	97,71	141.770.500,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	117.600.000,00	115.050.000,00	97,83	180.172.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.700.000,00	24.262.924,00	98,23	168.123.000,00
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan	829.846.780,00	799.912.000,00	96,39	230.036.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.924.002.000,00	1.703.960.146,00	88,56	725.474.722,00
6	Badan Penghubung Daerah	48.700.000,00	48.575.000,00	99,74	400.000.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	303.180.000,00	295.179.000,00	97,36	364.798.948,00
8	Dinas Kebudayaan	1.689.814.000,00	1.643.164.147,00	97,24	8.624.932.757,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.282.980.000,00	2.255.022.900,00	98,78	3.614.268.052,00
10	Dinas Kesehatan	19.610.115.064,00	18.912.157.739,00	96,44	12.353.700.073,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.623.705.400,00	17.592.607.363,00	99,82	13.439.456.999,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.125.788.666,00	13.919.187.564,00	98,54	2.653.781.535,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	213.503.570,00	211.544.500,00	99,08	2.614.160.841,00
14	Dinas Pariwisata	146.468.000,00	143.650.000,00	98,08	28.956.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	504.355.000,00	495.918.224,00	98,33	418.088.521,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	49.783.000,00	47.687.000,00	95,79	899.790.529,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.135.000,00	46.134.998,00	100,00	267.986.960,00
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	110.764.713.023,00	108.585.083.339,00	98,03	108.931.271.508,00
19	Dinas Perhubungan	17.194.749.138,00	16.566.987.465,00	96,35	4.746.233.346,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.797.724.400,00	13.530.472.940,00	98,06	207.781.514,00

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	146.286.000,00	145.658.947,00	99,57	1.239.746.391,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.490.744.015,00	2.056.150.800,00	82,55	9.530.312.282,00
23	Dinas Sosial	193.530.700,00	184.153.099,00	95,15	1.382.726.458,00
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	973.612.000,00	899.488.762,00	92,39	505.824.533,00
25	Inspektorat	369.750.000,00	358.787.640,00	97,04	465.191.250,00
26	Paniradya Kaistimewan	708.600.000,00	674.618.000,00	95,20	2.466.863.263,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	573.720.000,00	573.311.900,00	99,93	1.370.278.781,00
28	Sekretariat Daerah	1.985.956.000,00	1.917.815.000,00	96,57	6.270.808.560,00
29	Sekretariat DPRD	321.669.800,00	305.724.000,00	95,04	1.868.289.712,00
Jumlah		**209.109.759.556,00**	**204.099.193.397,00**	**97,60**	**186.110.825.035,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**Rp220.538.449.546,95**	**Rp150.886.570.710,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp281.419.731.340,00 dan realisasi sebesar Rp220.538.449.546,95 atau 78,37%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.651.878.836,95 atau 46,16% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp150.886.570.710,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	267.827.587.440,00	209.937.496.081,95	78,39	137.137.344.157,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	50.172.000,00	49.054.000,00	97,77	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.278.299.900,00	9.562.757.683,00	77,88	9.508.015.442,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.263.672.000,00	989.141.782,00	78,28	4.241.211.111,00
Jumlah		**281.419.731.340,00**	**220.538.449.546,95**	**78,37**	**150.886.570.710,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan bangunan pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 54
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Badan Kepegawaian Daerah	59.828.190.800,00	59.804.286.550,00	99,96	10.145.859.205,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	49.159.000,00
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan	527.660.000,00	412.186.240,00	78,12	-
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	348.498.000,00	345.948.810,00	99,27	399.000.000,00

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	199.840.098,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	143.455.700,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.016.290.800,00	5.313.793.555,30	88,32	20.967.495.216,00
8	Dinas Kesehatan	12.233.067.548,00	12.127.144.401,00	99,13	4.035.399.111,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	188.631.000,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	86.821.347.737,00	82.252.490.150,00	94,74	26.152.865.905,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	170.000.000,00	169.000.000,00	99,41	20.636.521.000,00
12	Dinas Pariwisata	3.395.350.000,00	2.844.024.500,00	83,76	2.697.053.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.019.827.700,00	8.331.123.826,00	75,60	5.963.794.583,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.118.480,00	178.063.451,00	99,41	-
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	32.156.545.666,00	27.320.773.620,00	84,96	36.206.003.251,00
16	Dinas Perhubungan	633.972.910,00	633.972.910,00	100,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.728.644.399,00	9.923.588.597,00	92,50	5.456.116.998,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	56.000.000,00	55.408.869,00	98,94	-
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.402.733.300,00	4.578.166.162,00	84,74	12.994.325.977,00
20	Dinas Sosial	24.500.000,00	23.767.320,00	97,01	407.578.230,00
21	Inspektorat	-	-	-	52.325.400,00
22	Paniradya Kaistimewan	2.535.325.000,00	2.529.840.677,65	99,78	548.870.061,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000,00	74.251.153,00	99,00	2.698.813.483,00
24	Sekretariat Daerah	3.267.659.000,00	3.244.915.083,00	99,30	943.463.492,00
25	Sekretariat DPRD	46.000.000.000,00	375.703.672,00	0,82	-
Jumlah		**281.419.731.340,00**	**220.538.449.546,95**	**78,37**	**150.886.570.710,00**

Belanja modal Gedung dan Bangunan yang serapannya jauh dibawah target terdapat pada Sekretariat DPRD, yaitu untuk Pembangunan Gedung DPRD DIY. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, yaitu jarak antara review, penyerahan review ke PPK, dan pembetulan dokumen sebelum diumumkannya lelang terlalu dekat dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**Rp182.299.322.051,00**	**Rp225.450.247.009,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp185.585.676.953,00 dan realisasi sebesar Rp182.299.322.051,00 atau 98,23%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.150.924.958,00 atau 19,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp225.450.247.009,00. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 55
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	169.930.176.203,00	168.837.751.171,00	99,36	160.275.514.662,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	12.184.349.000,00	10.538.068.831,00	86,49	14.099.350.525,00
3	Belanja Modal Instalasi	689.418.000,00	673.098.952,00	97,63	50.223.119.637,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.421.625.750,00	1.897.287.027,00	78,35	274.060.000,00
5	Belanja ModalJalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD	360.108.000,00	353.116.070,00	98,06	578.202.185,00
Jumlah		**185.585.676.953,00**	**182.299.322.051,00**	**98,23**	**225.450.247.009,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 56
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	135.460.000,00	134.714.900,00	99,45	84.810.000,00
2	Dinas Kesehatan	360.108.000,00	353.116.070,00	98,06	439.201.400,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	856.970.000,00	851.474.563,00	99,36	-
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	178.914.604.203,00	176.363.356.335,00	98,57	223.674.910.068,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	33.768.000,00	32.966.000,00	97,62	229.997.845,00
6	Dinas Perhubungan	2.204.195.750,00	1.859.707.027,00	84,37	-
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	217.430.000,00	37.580.000,00	17,28	-
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	82.500.000,00
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.863.141.000,00	2.666.407.156,00	93,13	844.077.696,00
10	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	69.750.000,00
11	Sekretariat Daerah	-	-	-	25.000.000,00
Jumlah		**185.585.676.953,00**	**182.299.322.051,00**	**98,23**	**225.450.247.009,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**Rp11.562.606.421,00**	**Rp13.437.651.506,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp11.727.993.431,00 dan realisasi sebesar Rp11.562.606.421,00 atau 98,59%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.875.045.085,00 atau 13,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp13.437.651.506,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 57
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	389.616.225,00	359.469.099,00	92,26	133.996.310,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.587.499.700,00	2.462.838.616,00	95,18	4.558.791.016,00
3	Belanja Modal Hewan	994.000.000,00	990.000.000,00	99,60	169.400.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	507.500,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	8.574.956.680,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.741.877.506,00	7.735.298.706,00	99,92	-
Jumlah		**11.727.993.431,00**	**11.562.606.421,00**	**98,59**	**13.437.651.506,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 58
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	19.996.368,00	99,98	-
2	Badan Penghubung Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	-
3	Dinas Kebudayaan	301.500.000,00	299.081.000,00	99,20	4.265.519.767,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	29.800.000,00
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	9.710.400,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	645.000,00	644.910,00	99,99	-
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	7.009.410,00
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	10.239.853.431,00	10.085.288.057,00	98,49	8.936.196.429,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.000,00	-	-	-
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100.091.000,00	100.038.286,00	99,95	-
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	994.098.000,00	990.098.000,00	99,60	174.400.000,00
12	Dinas Sosial	-	-	-	507.500,00
13	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	617.000,00
14	Sekretariat Daerah	15.936.000,00	15.936.000,00	100,00	1.588.000,00
15	Sekretariat DPRD	22.800.000,00	18.523.800,00	81,24	12.303.000,00
Jumlah		**11.727.993.431,00**	**11.562.606.421,00**	**98,59**	**13.437.651.506,00**

		Tahun 2024	**Tahun 2023**
5.1.2.2.6	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**Rp4.861.483.400,00**	**Rp162.500.000,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.868.452.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.861.483.400,00 atau 99,86%. Belanja modal

aset lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp4.698.983.400,00 dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp162.500.000,00 atau naik hingga 2891,68%. Belanja modal aset lainnya direalisasikan di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Inspektorat.

Tabel 5. 59
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	4.793.452.800,00	4.787.483.400,00	99,88	162.500.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	75.000.000,00	74.000.000,00	98,67	-
Jumlah		**4.868.452.800,00**	**4.861.483.400,00**	**99,86**	**162.500.000,00**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Lainnya pada SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 60
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada SKPD

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	-	-	154.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	74.000.000,00	98,67	-
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	8.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	502.364.000,00	497.025.000,00	98,94	-
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.272.858.400,00	4.272.858.400,00	100,00	-
6	Inspektorat	18.230.400,00	17.600.000,00	96,54	-
Jumlah		**4.868.452.800,00**	**4.861.483.400,00**	**99,86**	**162.500.000,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**Rp20.000.000,00**	**Rp198.487.268,00**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp12.443.010.243,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.000.000,00 atau 0,16%.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.3.1	**Belanja Tidak Terduga**	**Rp20.000.000,00**	**Rp198.487.268,00**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa bantuan kekurangan biaya tagihan pada RS Panti Rapih Yogyakarta atas nama Ibu Nuraeni. Ibu Nuraeni merupakan korban bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem). Gubernur DIY telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 23 November 2024, dan telah diperpanjang sampai dengan 2 Februari 2025.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.4	**Belanja Transfer**	**Rp1.431.413.374.961,82**	**Rp1.455.513.962.986,21**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.459.034.323.043,00 dan realisasi sebesar Rp1.431.413.374.961,82 atau 98,11%, dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**Rp870.359.406.509,00**	**Rp886.411.063.641,00**

Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp881.009.565.433,00 dan realisasi sebesar Rp870.359.406.509,00 atau 98,79%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.051.657.132,00 atau 1,81% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp886.411.063.641,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 61
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten**	**728.598.144.703,00**	**719.748.610.040,00**	**98,79**	**733.339.431.691,00**
a	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	203.233.386.575,00	200.933.285.798	98,87	201.588.461.475,00
b	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	128.114.630.897,00	126.121.177.020	98,44	127.194.303.115,00
c	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	109.544.569.452,00	108.139.200.272	98,72	109.863.998.262,00
d	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	287.705.557.779,00	284.554.946.950	98,90	294.692.668.839,00
2	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota**	**152.411.420.730,00**	**150.610.796.469,00**	**98,82**	**153.071.631.950,00**
a	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,82	153.071.631.950,00
Jumlah		**881.009.565.433,00**	**870.359.406.509,00**	**98,79**	**886.411.063.641,00**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**Rp561.053.968.452,82**	**Rp569.102.899.345,21**

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp578.024.757.610,00 dan realisasi sebesar Rp561.053.968.452,82 atau 97,06%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.048.930.892,39 atau 1,41% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp569.102.899.345,21. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari dua jenis belanja, yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 62
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	445.070.578.811,00	428.964.512.711,77	96,38	432.033.573.508,53
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	132.954.178.799,00	132.089.455.741,05	99,35	137.069.325.836,68
Jumlah		**578.024.757.610,00**	**561.053.968.452,82**	**97,06**	**569.102.899.345,21**

Rincian Belanja Bantuan Keuangan per kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 63
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	**Pemerintah Kota Yogyakarta**	**87.250.881.380,00**	**85.699.630.854,00**	**98,22**	**1.551.250.526,00**
a	BKK Padat Karya Infrastruktur	300.000.000,00	299.348.600,00	99,78	651.400,00
b	BKK Penyelengaraan Pemilukada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
c	BKK untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Kunjungan Gubernur	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
d	BKK urusan keistimewaan	84.950.881.380,00	84.400.282.254,00	99,35	550.599.126,00
2	**Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**	**87.202.664.960,00**	**82.542.413.214,00**	**94,66**	**4.660.251.746,00**
a	BKK Padat Karya Infrastruktur	20.900.000.000,00	20.565.826.000,00	98,40	334.174.000,00
b	BKK Penyelengaraan Pemilukada	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-
c	BKK untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Kunjungan Gubernur	1.810.000.000,00	-	-	1.810.000.000,00
d	BKK urusan keistimewaan	60.492.664.960,00	57.976.587.214,00	95,84	2.516.077.746,00
3	**Pemerintah Kabupaten Bantul**	**91.565.132.897,00**	**88.016.646.014,00**	**96,12**	**3.548.486.883,00**
a	BKK Padat Karya Infrastruktur	32.600.000.000,00	32.394.593.634,00	99,37	205.406.366,00
b	BKK Penyelengaraan Pemilukada	2.500.000.000,00	2.394.400.000,00	95,78	105.600.000,00
c	BKK untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Kunjungan Gubernur	1.324.000.000,00	-	-	1.324.000.000,00
d	BKK urusan keistimewaan	55.141.132.897,00	53.227.652.380,00	96,53	1.913.480.517,00
4	**Pemerintah Kabupaten Kulon Progo**	**115.535.205.874,00**	**111.333.629.775,00**	**96,36**	**4.201.576.099,00**
a	BKK Padat Karya Infrastruktur	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	-
b	BKK Penyelengaraan Pemilukada	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	-
c	BKK untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Kunjungan Gubernur	1.958.000.000,00	-	-	1.958.000.000,00
d	BKK urusan keistimewaan	101.077.205.874,00	98.833.629.775,00	97,78	2.243.576.099,00
5	**Pemerintah Kabupaten Sleman**	**63.516.693.700,00**	**61.372.192.854,77**	**96,62**	**2.144.500.845,23**
a	BKK Padat Karya Infrastruktur	28.800.000.000,00	28.800.000.000,00	100,00	-
b	BKK Penyelengaraan Pemilukada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
c	BKK untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Kunjungan Gubernur	1.281.000.000,00	-	-	1.281.000.000,00
d	BKK urusan keistimewaan	32.435.693.700,00	31.572.192.854,77	97,34	863.500.845,23
Jumlah		**445.070.578.811,00**	**428.964.512.711,77**	**96,38**	**16.106.066.099,23**

	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus (Defisit)	**Rp344.575.082.963,96**	**Rp134.705.083.365,24**

Surplus sebesar Rp344.575.082.963,96 merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan dan total realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024. Surplus Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp209.869.999.598,72 atau 155,80% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2023 yaitu sebesar Rp134.705.083.365,24. Surplus/Defisit tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 64
Surplus/Defisit

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Pendapatan	5.911.030.364.311,00	6.025.070.171.261,08	101,93	5.840.561.001.091,65
2	Belanja	6.001.565.896.865,00	5.680.495.088.297,12	94,65	5.705.855.917.726,41
3	**Surplus/Defisit**	**(90.535.532.554,00)**	**344.575.082.963,96**		**134.705.083.365,24**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3 Pembiayaan Daerah	**Rp93.121.146.320,48**	**Rp160.555.386.955,24**

Pembiayaan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp90.535.532.554,00 dan direalisasikan sebesar Rp93.121.146.320,48 atau sebesar 102,86%, terdiri atas:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	**Rp295.621.146.320,48**	**Rp465.555.386.955,24**

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp293.035.532.554,00 direalisasikan sebesar Rp295.621.146.320,48 atau 100,88%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp169.934.240.634,76 atau 36,50% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp465.555.386.955,24. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp295.621.146.320,48 dapat dirinci seperti tabel berikut:

Tabel 5. 65
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	100,76	462.271.562.955,24
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	360.676.000,00	-	3.283.824.000,00
JUMLAH		**293.035.532.554,00**	**295.621.146.320,48**	**100,88**	**465.555.386.955,24**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**Rp295.260.470.320,48**	**Rp462.271.562.955,24**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp295.260.470.320,48 dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp22.183.456.278,00
2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp6.234.221.086,00
3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp350.158.016,00
4) Penghematan Belanja sebesar Rp261.089.570.056,48
5) Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp5.403.064.884,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	**Rp360.676.000,00**	**Rp3.283.824.000,00**

Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp360.676.000,00 berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat yang diberikan melalui lembaga keuangan nonbank (BUKP) sebesar Rp340.000.000,00 dan penerimaan kembali dana bergulir kepada Masyarakat yang diberikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanaan Pangan (LUEP dan LDPM) sebesar Rp20.676.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	**Rp202.500.000.000,00**	**Rp305.000.000.000,00**

Pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebear Rp202.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp202.500.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp102.500.000.000,00 atau 33,61% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp305.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	**Rp200.000.000.000,00**	**Rp300.000.000.000,00**

Penyertaan modal daerah berupa penyertaan modal daerah pada BUMD dianggarkan sebesar Rp200.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 100%. Penyertaan modal ini merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY kepada PT. Bank BPD DIY dalam rangka memenuhi modal dasar yang dimiliki oleh Pemda DIY dan untuk menjaga proporsi kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah	**Rp2.500.000.000,00**	**Rp5.000.000.000,00**

Pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100%. Pemberian pinjaman daerah ini dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan non-Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**Rp437.696.229.284,44**	**Rp295.260.470.320,48**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp437.696.229.284,44 mengalami kenaikan sebesar Rp142.435.758.963,96 atau 48,24% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar

Rp295.260.470.320,48. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer (Surplus/Defisit) ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
I	Pendapatan	5.911.030.364.311,00	6.025.070.171.261,08	101,93	5.840.561.001.091,65
2	Belanja dan Transfer	6.001.565.896.865,00	5.680.495.088.297,12	94,65	5.705.855.917.726,41
3	Surplus/Defisit	(90.535.532.554,00)	344.575.082.963,96	(380,60)	134.705.083.365,24
4	Pembiayaan Netto	90.535.532.554,00	93.121.146.320,48	102,86	160.555.386.955,24
5	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	-	**437.696.229.284,44**	-	**295.260.470.320,48**

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 67
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Jumlah
1	**Kas di Kas Daerah**	**401.871.389.579,29**
	Giro BPD	401.871.389.579,29
2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**37.854.231,00**
	Bendahara Penerimaan DISDIKPORA	1.350.000,00
	Bendahara Penerimaan DPUP ESDM	2.784.000,00
	Bendahara Penerimaan DLHK	11.368.000,00
	Bendahara Penerimaan DINAS PERHUBUNGAN	7.756.000,00
	Bendahara Penerimaan DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	14.116.231,00
	Bendahara Penerimaan DPAD	480.000,00
3	**Kas di Bendahara BOS 2024**	**673.312.376,00**
4	**Kas di BLUD**	**35.113.673.098,15**
	Kas di BLUD RS Grhasia	9.143.842.746,17
	Kas di BLUD Respira	11.367.865.817,36
	Kas di BLUD Bapelkes	3.469.720.547,00
	Kas di BLUD Balabkes	7.878.188.355,62
	Kas di BLUD BLPT	2.596.468.895,00
	Kas di BLUD SMKN 6 Yogyakarta	326.436.446,00
	Kas di BLUD SMKN 1 Sewon	79.031.170,00
	Kas di BLUD SMKN 3 Wonosari	68.905.278,00
	Kas di BLUD SMKN 5 Yogyakarta	16.716.354,00
	Kas di BLUD SMKN 2 Depok	10.416.103,00
	Kas di BLUD SMKN 2 Yogyakarta	28.340.657,00
	Kas di BLUD SMKN 1 Saptosari	5.422.511,00
	Kas di BLUD SMKN 2 Pengasih	23.691.743,00
	Kas di BLUD SMKN 1 Kalasan	4.952.687,00
	Kas di BLUD SMKN 1 Cangkringan	882.719,00
	Kas di BLUD SMKN 2 Wonosari	92.791.069,00
JUMLAH		**437.696.229.284,44**

Penjelasan:

1. Kas di Kas Daerah tahun 2024 sebesar Rp401.871.389.579,29 merupakan Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059.
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 dan terdapat di 6 SKPD yaitu DISDIKPORA, DPUP ESDM, DLHK, Dinas Perhubungan, Diskop dan UKM, dan DPAD.
3. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp673.312.376,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang berada di rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri terdiri dari Sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp438.632.790,00, dan Sisa Dana BOS Kinerja sebesar Rp234.679.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 68
Kas Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2024

URAIAN	PENERIMAAN DANA BOS (Rp)	REALISASI BELANJA BOS (Rp)	SISA DANA BOS (Rp)
BOS REGULER			
SMA NEGERI	67.906.702.663,00	67.684.819.812,00	221.882.851,00
SMK NEGERI	84.629.735.009,00	84.436.307.036,00	193.427.973,00
SLB NEGERI	5.250.190.863,00	5.226.868.897,00	23.321.966,00
	157.786.628.535,00	**157.347.995.745,00**	**438.632.790,00**
BOS KINERJA			
SMA NEGERI	3.254.504.065,00	3.044.768.745,00	209.735.320,00
SMK NEGERI	983.699.828,00	958.755.562,00	24.944.266,00
SLB NEGERI	790.819.571,00	790.819.571,00	0,00
	5.029.023.464,00	**4.794.343.878,00**	**234.679.586,00**
TOTAL	**162.815.651.999,00**	**162.142.339.623,00**	**673.312.376,00**

4. Kas di BLUD sebesar Rp35.113.673.098,15 merupakan Sisa Anggaran Lebih tahun berjalan yang berada di rekening BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

NO	URAIAN	JUMLAH
1	RS Grhasia	
	Silpa 31 Desember 2023	13.796.178.983,54
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	21.216.905.790,23
	Belanja BLUD Tahun 2024	25.869.242.027,60
	Silpa 31 Desember 2024	**9.143.842.746,17**
2	Balai Pelatihan Kesehatan	
	Silpa 31 Desember 2023	3.595.835.528,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	7.318.418.784,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	7.444.533.765,00
	Silpa 31 Desember 2024	**3.469.720.547,00**
3	RS.Respira	
	Silpa 31 Desember 2023	14.268.250.211,11
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	14.095.899.013,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	16.996.283.406,75
	Silpa 31 Desember 2024	**11.367.865.817,36**
4	Balai laboratorium Kesehatan	
	Silpa 31 Desember 2023	6.802.915.647,62

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	8.313.305.616,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	7.238.032.908,00
	Silpa 31 Desember 2024	**7.878.188.355,62**
5	Balai Latihan Pendidikan Teknis	
	Silpa 31 Desember 2023	2.529.771.762,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	2.441.637.852,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	2.374.940.719,00
	Silpa 31 Desember 2024	**2.596.468.895,00**
6	SMKN 6 Yogyakarta	
	Silpa 31 Desember 2023	263.470.142,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	1.478.013.778,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	1.415.047.474,00
	Silpa 31 Desember 2024	**326.436.446,00**
7	SMKN 1 Sewon	
	Silpa 31 Desember 2023	62.514.010,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	643.975.043,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	627.457.883,00
	Silpa 31 Desember 2024	**79.031.170,00**
8	SMKN 3 Wonosari	
	Silpa 31 Desember 2023	71.968.665,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	385.123.246,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	388.186.633,00
	Silpa 31 Desember 2024	**68.905.278,00**
9	SMKN 5 Yogyakarta	
	Silpa 31 Desember 2023	11.879.263,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	81.628.391,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	76.791.300,00
	Silpa 31 Desember 2024	**16.716.354,00**
10	SMKN 2 Depok	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	113.082.000,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	102.665.897,00
	Silpa 31 Desember 2024	**10.416.103,00**
11	SMKN 2 Yogyakarta	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	113.397.158,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	85.056.501,00
	Silpa 31 Desember 2024	**28.340.657,00**
12	SMKN 1 Saptosari	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	55.456.186,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	50.033.675,00
	Silpa 31 Desember 2024	**5.422.511,00**
13	SMKN 2 Pengasih	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	98.399.243,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	74.707.500,00
	Silpa 31 Desember 2024	**23.691.743,00**
14	SMKN 1 Kalasan	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	58.968.625,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	54.015.938,00

NO	URAIAN	JUMLAH
	Silpa 31 Desember 2024	**4.952.687,00**
15	SMKN 1 Cangkringan	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	128.669.082,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	127.786.363,00
	Silpa 31 Desember 2024	**882.719,00**
16	SMKN 2 Wonosari	
	Silpa 31 Desember 2023	-
	Pendapatan BLUD Tahun 2024	165.668.089,00
	Belanja BLUD Tahun 2024	72.877.020,00
	Silpa 31 Desember 2024	**92.791.069,00**
SILPA BLUD TAHUN 2024		**35.113.673.098,15**

5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp295.260.470.320,48**	**Rp462.271.562.955,24**

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp295.260.470.320,48 mengalami penurunan sebesar Rp167.011.092.634,76 atau 36,13% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp462.271.562.955,24. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**Rp437.696.229.284,44**	**Rp295.260.470.320,48**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp437.696.229.284,44 berasal dari:

Tabel 5. 70
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	6.025.070.171.261,08
2	Belanja dan Transfer	5.680.495.088.297,12
	Surplus (Defisit)	**344.575.082.963,96**
3	Penerimaan Pembiayaan	295.621.146.320,48
4	Pengeluaran Pembiayaan	202.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**93.121.146.320,48**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**437.696.229.284,44**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir	**Rp437.696.229.284,44**	**Rp295.260.470.320,48**

Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp437.696.229.284,44 mengalami kenaikan sebesar Rp142.435.758.963,96 atau 48,24% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp295.260.470.320,48.

5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.3.1 Aset	**Rp14.116.381.217.103,10**	**Rp13.204.764.072.841,50**
5.3.1.1 Aset Lancar	**Rp542.797.010.020,00**	**Rp455.820.187.650,32**
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	**Rp437.696.229.284,44**	**Rp315.881.587.526,42**
A. Kas di Kas Daerah	**Rp401.871.389.579,29**	**Rp252.515.577.083,21**

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp401.871.389.579,29 merupakan saldo Giro per 31 Desember 2024 dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp401.871.389.579,29 dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.515.577.083,21 mengalami kenaikan sebesar Rp149.355.812.496,08 atau 59,15 %.

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 71
Rincian Kas Di Kas Daerah

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	**Rekening Giro BPD DIY**	**401.871.389.579,29**	**250.000.942.317,21**
	- Saldo Giro	401.871.389.579,29	250.000.942.317,21
2	**Setoran kas setelah tahun anggaran**	-	**2.514.634.766,00**
	- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Kebudayaan	-	254.745.498,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Kesehatan	-	17.488.619,00
	- Setoran pengembalian belanja Bantuan Khusus Keuangan Dais pada BPKA	-	590.067.712,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	-	87.330.332,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	9.369.720,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Dinas Perhubungan	-	1.203.688.009,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Disnakertrans	-	2.100.000,00
	- Setoran pengembalian belanja pada Biro UHP Setda	-	16.675.376,00
	- Setoran pengembalian belanja pada BPBD	-	43.472.500,00
	- Setoran Dalam Perjalanan DBH CHT	-	289.697.000,00
	Jumlah	**401.871.389.579,29**	**252.515.577.083,21**

B. Kas di Bendahara Penerimaan **Rp37.854.231,00** **Rp97.916.954,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.854.231,00 merupakan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah, baik yang diterima Bendahara Penerima secara tunai maupun melalui QRIS.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.854.231,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.916.954,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.062.723,00 atau 61,34%.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 72
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	7.756.000,00	22.259.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.368.000,00	23.150.754,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.350.000,00	3.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	44.525.000,00
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.116.231,00	-
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	480.000,00	4.982.200,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.784.000,00	-
	Jumlah	**37.854.231,00**	**97.916.954,00**

Penjelasan :

1. **Dinas Perhubungan**
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.756.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir di Luar Badan Jalan pada Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.
2. **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp11.368.000,00 merupakan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.
3. **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.350.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Balai Pemuda dan Olah Raga yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.
4. **Dinas** Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp14.116.231,00 merupakan Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD berupa Galeri UMKM Pasar Kotagede di YIA, yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.
5. **Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp480.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.
6. **Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM**
   Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.784.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri pada Balai Pengelolaan Air Limbah Dan Pengembangan Jasa Konstruksi yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2025.

C. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

D. Kas di BLUD **Rp35.113.673.098,15** **Rp41.402.784.212,27**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.113.673.098,15 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada 4 (empat) BLUD pada Dinas Kesehatan dan 12 (dua belas) BLUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.113.673.098,15 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.402.784.212,27 mengalami penurunan sebesar Rp6.289.111.114,12 atau 15,19%.
Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 73
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	RS Grhasia	9.143.842.746,17	13.796.178.983,54
2	RS Paru Respira	11.367.865.817,36	14.268.250.211,11
3.	Balai Pelatihan Kesehatan	3.469.720.547,00	3.595.835.528,00
4.	Balai Laboratorium Kesehatan	7.878.188.355,62	6.802.915.647,62
5.	Balai Latihan Pendidkan Teknik (BLPT)	2.596.468.895,00	2.529.771.762,00
6.	SMKN 6 Yogyakarta	326.436.446,00	263.470.142,00
7.	SMKN 1 Sewon Bantul	79.031.170,00	62.514.010,00
8.	SMKN 3 Wonosari	68.905.278,00	71.968.665,00
9.	SMKN 5 Yogyakarta	16.716.354,00	11.879.263,00
10.	SMKN 2 Depok	10.416.103,00	-
11.	SMKN 2 Yogyakarta	28.340.657,00	-
12.	SMKN 1 Saptosari	5.422.511,00	-
13	SMKN 2 Pengasih	23.691.743,00	--
14	SMKN 1 Kalasan	4.952.687,00	-
15.	SMKN 1 Cangkringan	882.719,00	-
16.	SMKN 2 Wonosari	92.791.069,00	-
	Jumlah	**35.113.673.098,15**	**41.402.784.212,27**

Penjelasan:

a. Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp9.143.842.746,17 dirinci sebagai berikut :
   - Rekening giro BPD DIY Nomor 041.111.000043 terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.629.931.280,61 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp2.294.510,00.
   - Uang tunai hasil penerimaan pada tanggal 31 Desember 2024 yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.505.160,00 dan baru disetor ke rekening BLUD pada tanggal 2 Januari 2025.
   - Rekening giro BTN Nomor 00341-01-30-000027-7 terdiri dari saldo giro sebesar Rp508.796.713,18 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp315.082,38.

b. Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp11.367.865.817,36 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.360.881.131,36, dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp6.984.686,00.

c. Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.469.720.547,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050, terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.465.493.425,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp4.227.122,00.

d. Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp7.878.188.355,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31

Desember 2024 sebesar Rp7.868.575.830,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp9.612.525,00.

e. Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.596.468.895,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.593.477.212,00, dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp2.991.683,00.
f. Kas di BLUD pada SMKN 6 Yogyakarta sebesar Rp326.436.446,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001803 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp326.055.905,00, dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp380.541,00.
g. Kas di BLUD pada SMKN 1 Sewon Bantul sebesar Rp79.031.170,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 004.111.001764 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.969.296,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp61.874,00.
h. Kas di BLUD pada SMKN 3 Wonosari sebesar Rp68.905.278,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 002.111.001064 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.836.442,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp68.836,00.
i. Kas di BLUD pada SMKN 5 Yogyakarta sebesar Rp16.716.354,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001964 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.696.047,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp20.307,00.
j. Kas di BLUD pada SMKN 2 Depok sebesar Rp10.416.103,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 042.111.000390 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.416.103,00 dan tidak terdapat Jasa Giro yang diterima di bulan Desember 2024.
k. Kas di BLUD pada SMKN 2 Yogyakarta sebesar Rp28.340.657,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.002020 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.311.290,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp29.367,00.
l. Kas di BLUD pada SMKN 1 Saptosari sebesar Rp5.422.511,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 002.111.001146 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.415.742,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp6.769,00.
m. Kas di BLUD pada SMKN 2 Pengasih sebesar Rp23.691.743,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 003.111.001203 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.662.515,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp29.228,00.
n. Kas di BLUD pada SMKN 1 Kalasan sebesar Rp4.952.687,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000307 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.949.749,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp2.938,00.
o. Kas di BLUD pada SMKN 1 Cangkringan sebesar Rp882.719,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 041.111.000436 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp881.617,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp1.102,00.
p. Kas di BLUD pada SMKN 2 Wonosari sebesar Rp92.791.069,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor : 002.111.001144 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.702.236,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2024 sebesar Rp88.833,00

E. Kas Dana BOS **Rp673.312.376,00** **Rp1.244.192.071,00**

Kas Dana BOS pada Tahun 2024 merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp673.312.376,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Reguler sebesar

Rp438.632.790,00, dan Sisa Dana BOS Kinerja sebesar Rp234.679.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 74
Sisa Dana BOS Reguler dan Kinerja Tahun 2024 di SMA/SMK/SLB Negeri

URAIAN	SISA BOS 2023 (Rp)	PENERIMAAN DANA BOS 2024 (Rp)	REALISASI BELANJA BOS 2024 (Rp)	SISA DANA BOS 2024 (Rp)
BOS REGULER				
SMA NEGERI	11.026.053,00	67.895.676.610,00	67.684.819.812,00	221.882.851,00
SMK NEGERI	238.589.706,00	84.391.145.303,00	84.436.307.036,00	193.427.973,00
SLB NEGERI	1.802.848,00	5.248.388.015,00	5.226.868.897,00	23.321.966,00
	251.418.607,00	**157.535.209.928,00**	**157.347.995.745,00**	**438.632.790,00**
BOS KINERJA				
SMA NEGERI	654.504.065,00	2.600.000.000,00	3.044.768.745,00	209.735.320,00
SMK NEGERI	168.699.828,00	815.000.000,00	958.755.562,00	24.944.266,00
SLB NEGERI	169.569.571,00	621.250.000,00	790.819.571,00	-
	992.773.464,00	**4.036.250.000,00**	**4.794.343.878,00**	**234.679.586,00**
TOTAL	**1.244.192.071,00**	**161.571.459.928,00**	**162.142.339.623,00**	**673.312.376,00**

F. Kas Lainnya **Rp0,00** **Rp20.621.117.205,94**

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pencatatan Uang Jaminan Tambang direklasifikasi ke Aset Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya).

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp20.621.117.205,94 merupakan uang jaminan terkait ijin pertambangan dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah **Rp116.492.000,00** **Rp116.492.000,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.492.000,00, merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA. Piutang Pajak Daerah tidak mengalami penambahan dan pengurangan pada Tahun 2024. Piutang Pajak Daerah terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp82.854.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp33.638.000,00 dengan rincian pada masing-masing KPPD sebagai berikut:

Tabel 5. 75
Rincian Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	**Piutang PKB**	
	KPPD di Kota Yogyakarta	29.432.300,00
	KPPD di Kab. Bantul	18.912.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	-
	KPPD di Kab. Kulon Progo	5.559.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
	KPPD di Kab. Sleman	28.950.700,00
	Jumlah	**82.854.000,00**
2	**Piutang BBNKB**	
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	3.422.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	-
	KPPD di Kab. Kulon Progo	-
	KPPD di Kab. Sleman	28.161.000,00
	Jumlah	**33.638.000,00**
	Total	**116.492.000,00**

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut.

Tabel 5. 76
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	Jumlah (Rp)
0 – 1 Tahun	Lancar	-	-	-
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	-	-	-
2 – 5 Tahun	Diragukan	2.092.500,00	-	2.092.500,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	80.761.500,00	33.638.000,00	114.399.500,00
	Jumlah	**82.854.000,00**	**33.638.000,00**	**116.492.000,00**

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah.
Dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.492.000,00, telah diusulkan penghapusan piutang pajak daerah sebesar Rp79.445.700,00 yaitu pada KPPD di Kab. Sleman sebesar Rp57.111.700,00 dan KPPD di Kab. Bantul sebesar Rp22.334.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 77
Rincian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Pokok)

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	KPPD Sleman (Rp)	KPPD Bantul (Rp)	Total (Rp)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2 – 5 Tahun	Diragukan	1.714.500,00	378.000,00	2.092.500,00
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	27.236.200,00	18.534.000,00	45.770.200,00
Jumlah			**28.950.700,00**	**18.912.000,00**	**47.862.700,00**
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Lebih dari 5 Tahun	Macet	28.161.000,00	3.422.000,00	31.583.000,00
Jumlah			**28.161.000,00**	**3.422.000,00**	**31.583.000,00**
Jumlah			**57.111.700,00**	**22.334.000,00**	**79.445.700,00**

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah Rp5.250.000,00 Rp223.054.235,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.250.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata. Piutang tersebut merupakan piutang dari PT. Karya Bhakti Jaya Mandiri kepada Dinas Pariwisata atas Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk wartel di Tourist Information Centre yang sejak tahun 2007 tidak terbayar, Umur piutang dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2024 (lebih dari 5 tahun) sehingga termasuk kategori piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan **Rp185.156.692,98** **Rp185.156.692,98**

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp185.156.692,98 pada BPKA merupakan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUKP Wates tahun 2023 yang belum disetor, dengan rincian Bagian Laba Pemda DIY sebesar Rp170.992.410,86, Dana Pembinaan sebesar Rp8.093.875,50 dan Jasa Produksi sebesar Rp6.070.406,62.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **Rp6.921.462.567,55** **Rp4.841.669.606,55**

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.921.462.567,55 meliputi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp210.348.281,55, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp28.957.850,00, Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.220.131.482,00, Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp136.774.000,00,dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp4.323.200.954,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31/12/2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 31/12/2024 (Rp)
1	**BPKA**				
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	211.248.281,55	-	900.000,00	210.348.281,55
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	28.957.850,00	-	-	28.957.850,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	142.914.000,00	337.018.400,00	343.158.400,00	136.774.000,00
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	2.225.531.482,00	4.790.878.000,00	4.796.278.000,00	2.220.131.482,00
	Jumlah	**2.610.701.613,55**	**5.127.896.400,00**	**5.140.336.400,00**	**2.598.261.613,55**
2	**DINKES**				
	RS Grhasia - Piutang Pendapatan BLUD	2.187.891.334,00	1.368.866.177,00	1.385.387.050,00	2.171.370.461,00
	RS RESPIRA - Piutang Pendapatan BLUD	14.796.300,00	2.123.550.134,00	14.796.300,00	2.123.550.134,00
	Jumlah	**2.202.687.634,00**	**3.492.416.311,00**	**1.400.183.350,00**	**4.294.920.595,00**
3	**DIKPORA**				
	BLPT - Piutang Pendapatan BLUD	28.280.359,00	-	-	28.280.359,00
	Jumlah	**28.280.359,00**	**-**	**-**	**28.280.359,00**
		4.841.669.606,55	**8.620.312.711,00**	**6.540.519.750,00**	**6.921.462.567,55**

A. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp210.348.281,55

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp210.348.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024 dengan kondisi macet. Piutang tersebut adalah piutang Tuntutan Ganti Rugi terhadap Anggota DPRD yang terjadi sejak tahun 2013. Adapun pengurangan piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp900.000,00 merupakan pembayaran piutang tahun 1998 atas nama Sudjono.

B. Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

C. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp28.957.850,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp28.957.850,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 79
Rincian Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Keterangan
Piutang Pendapatan Denda PKB	2 – 5 Tahun	Diragukan	1.129.700,00	564.850,00	Piutang Tahun 2019
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	25.949.950,00	25.949.950,00	Piutang Tahun 2007 -2018
Jumlah			**27.079.650,00**	**26.514.800,00**	
Piutang Pendapatan Denda BBNKB	2 – 5 Tahun	Diragukan	-	-	
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	1.878.200,00	1.878.200,00	Piutang Tahun 2012 - 2015
Jumlah			**1.878.200,00**	**1.878.200,00**	
Total			**28.957.850,00**	**28.393.000,00**	

Dari saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.957.850,00, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp19.092.000,00 yaitu pada KPPD di Kab. Sleman sebesar Rp7.407.400,00 dan KPPD di Kab. Bantul sebesar Rp11.684.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 80
Rincian Penghapusan Piutang Denda Pajak Daerah

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	KPPD Sleman (Rp)	KPPD Bantul (Rp)	Total (Rp)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2 – 5 Tahun	Diragukan	945.300,00	184.400,00	1.129.700,00
	Lebih dari 5 Tahun	Macet	5.190.900,00	10.893.200,00	16.084.100,00
Jumlah			**6.136.200,00**	**11.077.600,00**	**17.213.800,00**
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Lebih dari 5 Tahun	Macet	1.271.200,00	607.000,00	1.878.200,00
Jumlah			**1.271.200,00**	**607.000,00**	**1.878.200,00**
Jumlah			**7.407.400,00**	**11.684.600,00**	**19.092.000,00**

D. Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp136.774.000,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebesar Rp136.774.000,00 merupakan denda dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp31.500.000,00, LDPM sebesar Rp7.500.000,00, DPM LUEP sebesar Rp90.250.000,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp7.524.000,00.
Rincian Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM) sebagai berikut.

Tabel 5. 81
Rincian Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Keterangan
Piutang DPM PHP	Lebih dari 5 Tahun	Macet	31.500.000,00	31.500.000,00	Piutang 20 Desember 2012
Piutang LDPM	Lebih dari 5 Tahun	Macet	7.500.000,00	7.500.000,00	Piutang 20 Desember 2013
Piutang DPM LUEP	Lebih dari 5 Tahun	Macet	90.250.000,00	90.250.000,00	Piutang 20 Desember 2008
Piutang DPM (KELAUTAN)	Lebih dari 5 Tahun	Macet	7.524.000,00	7.524.000,00	Piutang 20 Desember 2013
Jumlah			**136.774.000,00**	**136.774.000,00**	

E. Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.220.131.482,00

Saldo Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp2.220.131.482,00 merupakan bunga dari dana bergulir yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, yang terdiri dari DPM PHP tahun 2012 sebesar Rp9.900.000,00, LDPM sebesar Rp4.125.000,00, DPM LUEP sebesar Rp54.750.000,00, Koperasi sebesar Rp2.140.856.482,00 dan DPM (Kelautan) tahun 2013 sebesar Rp10.500.000,00

F. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp4.323.200.954,00

Piutang BLUD sebesar Rp4.323.200.954,00 terdiri dari Piutang BLUD RS Grhasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp2.171.370.461,00, Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp2.123.550.134,00 dan Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp28.280.359,00.

1) Piutang BLUD RS Grhasia sebesar Rp2.171.370.461,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp674.558.487,00, Piutang Diklat sebesar Rp211.013.000,00, dan Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp1.285.798.974,00 dengan mutasi sebagai berikut

Tabel 5. 82
Rincian Mutasi Piutang RS Grhasia

Uraian	Saldo Awal 31-12-2023	Tambah	Kurang	Saldo Akhir 31-12-2024
Piutang Pasien Umum	658.334.060,00	17.078.577,00	854.150,00	674.558.487,00
Piutang Diklat	64.411.000,00	188.442.000,00	41.840.000,00	211.013.000,00
Piutang Jamkes	1.465.146.274,00	1.163.345.600,00	1.342.692.900,00	1.285.798.974,00
Jumlah	**2.187.891.334,00**	**1.368.866.177,00**	**1.385.387.050,00**	**2.171.370.461,00**

Rincian piutang RS Grhasia sebesar Rp2.171.370.461,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 83
Rincian Piutang RS Grhasia

No	Uraian	Tahun	Jumlah Pasien	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Keterangan
1	**Piutang Pasien Umun**	2001 - 2024	802	2.225.715,00	11.128,58	Lancar
				1.690.293,00	169.029,30	Kurang Lancar
				1.592.549,00	796.274,50	Diragukan
				669.049.930,00	669.049.930,00	Macet
				674.558.487,00	**670.026.362,38**	
2	**Piutang Diklat**	2021 - 2024	-	88.219.000,00	441.095,00	Lancar
				36.043.000,00	3.604.300,00	Kurang Lancar
				31.088.000,00	15.544.000,00	Diragukan
				55.663.000,00	55.663.000,00	Macet
				211.013.000,00	**75.252.395,00**	
3	**Piutang Jamkes, BPJS, Covid 19**					
	Jamkesda Sleman	2009 - 2012	1.316	29.980.976,00	29.980.976,00	Macet
	Jamkesda Bantul	2013-2020	239	81.688,00	81.688,00	Macet
	Jamkesda Gunung Kidul	2013	73	1.158.102,00	1.158.102,00	Macet
	Askessos	2010 - 2013	2.611	220.000,00	220.000,00	Macet
	Jamkessos	2010 - 2021	614	2.978.208,00	2.978.208,00	Macet
	BPJS	2021 - 2024	81.046	1.163.345.600,00	5.816.728,00	Lancar
	Covid 19	2021 - 2024	113	88.034.400,00	88.034.400,00	Macet
				1.285.798.974,00	**128.270.102,00**	
	TOTAL			**2.171.370.461,00**	**873.548.859,38**	

Adapun rincian kualitas piutang RS Grhasia per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 84
Rincian Kualitas Piutang RS Grhasia

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	1.253.790.315,00
Kurang Lancar	37.733.293,00
Diragukan	32.680.549,00
Macet	847.166.304,00
Jumlah	**2.171.370.461,00**

Dari saldo Piutang Pasien Umum per 31 Desember 2024 dengan kualitas macet sebesar Rp669.049.930,00, telah diajukan usulan penghapusan bersyarat ke PPKD untuk diterbitkan PPDTO sebesar Rp259.106.662,87 dan dilimpahkan ke PUPN sebesar Rp57.448.188,00. Total pengajuan usulan penghapusan Piutang Pasien Umum yang macet sebesar Rp316.554.850,87.

2) Piutang BLUD Rumah Sakit Paru Respira (Dinas Kesehatan) dalam kategori lancar sebesar Rp2.123.550.134,00.
3) Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) dalam kategori macet sebesar Rp28.280.359,00.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya Rp2.562.560.482,50 Rp2.556.272.310,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.562.560.482,50 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan PT. TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada PT. TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 229.311,90 kg. Hasil stock opname pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5. 85
Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras yang diedarkan (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Total Persediaan (kg)	Harga (Rp)
1	TARUMARTANI	229.311,90	76.437,30	305.749,20	11.175,00
	Jumlah	**229.311,90**	**76.437,30**	**305.749,20**	

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2024, sedangkan selisih antara total cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dengan Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2024 dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.562.560.482,50 (229.311,90 kg x Rp11.175,00).

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang Pendapatan Rp3.638.698.901,89 Rp3.432.641.157,74

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.638.698.901,89 merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp115.445.750,00 Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp5.250.000,00, Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp18.515.669,29 dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp3.499.487.482,60 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp115.445.750,00 Rp114.836.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp115.445.750,00 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp81.807.750,00 dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp33.638.000,00

Tabel 5. 86
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang		Total (Rp)
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	
0 – 1 Tahun	Lancar	-	-	-
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	-	-	-
2 – 5 Tahun	Diragukan	1.046.250,00	-	1.046.250,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	80.761.500,00	33.638.000,00	114.399.500,00
Jumlah		**81.807.750,00**	**33.638.000,00**	**115.445.750,00**

B. Penyisihan Piutang Retribusi Rp5.250.000,00 Rp6.339.021,18

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.250.000,00 merupakan Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Pariwisata yang macet.

C. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp18.515.669,29 Rp925.783,46

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BPKA sebesar Rp18.515.669,29 merupakan penyisihan dari piutang kurang lancar sebesar Rp185.156.692,98.

D. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp3.499.487.482,60 Rp3.310.540.353,10

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.499.487.482,60 terdiri dari:

Tabel 5. 87
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	**RS JIWA GRHASIA**	1.253.790.315,00	Lancar	6.268.951,58
		37.733.293,00	Kurang Lancar	3.773.329,30
		32.680.549,00	Diragukan	16.340.274,50
		847.166.304,00	Macet	847.166.304,00
	Jumlah	**2.171.370.461,00**		**873.548.859,38**
2	**RS PARU RESPIRA**	**2.123.550.134,00**	Lancar	**10.617.750,67**
3	**BLPT**	**28.280.359,00**	Macet	**28.280.359,00**
4	**BPKA**			
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	210.348.281,55	Macet	210.348.281,55
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.129.700,00	Diragukan	564.850,00
		27.828.150,00	Macet	27.828.150,00
	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	136.774.000,00	Macet	136.774.000,00
	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	2.198.818.982,00	Macet	2.198.818.982,00
		21.312.500,00	Diragukan	10.656.250,00
	Jumlah	**2.598.261.613,55**		**2.587.040.513,55**
	Total	**6.921.462.567,55**		**3.499.487.482,60**

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka Rp419.305.475,69 Rp562.414.813,82

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp419.305.475,69 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka pembayaran asuransi sebesar Rp270.870.740,57 dan pembayaran sewa sebesar Rp148.434.735,12 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp270.870.740,57 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar

Rp489.444.655,00 dikurangi dengan Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp218.573.914,43 dengan uraian sebagai berikut :

a. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp284.097.655,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2025. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp126.871.007,58 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp157.226.647,42 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 21 Juli 2025.
b. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp205.347.000,00 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2025. Premi Asuransi Kendaraan Dinas tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah diakui menjadi Beban Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp91.702.906,85 dan sisanya diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp113.644.093,15 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 21 Juli 2025.

Tabel 5. 88
Rincian Beban Dibayar Dimuka (Asuransi)

No	Nama Asuransi	Periode Pertanggungan	Total Premi (Rp)	Periode Beban Jasa Dibayar Dimuka	Beban Jasa dibayar dimuka (Rp)
1	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2024 s/d 20/07/2025	284.097.655,00	01-01-2024 s/d 20-07-2025	157.226.647,42
2	PT Asuransi Sinar Mas	21/07/2024 s/d 20/07/2025	205.347.000,00	01-01-2024 s/d 20-07-2025	113.644.093,15
	Jumlah		**489.444.655,00**		**270.870.740,57**

2. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp148.434.735,12 merupakan pembayaran sewa yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp26.119.556,16 , Dinas Kesehatan sebesar Rp47.653.164,72, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.806.239,74 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp72.855.774,49 dengan rincian sebagai berikut:

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp26.119.556,16 merupakan beban dibayar dimuka untuk sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp1.232.876,71 dan KPPD Bantul sebesar Rp24.886.679,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo	01/04/2024 s.d 31/03/2025	5.000.000,00	01/01/2025 s.d. 31/03/2025	1.232.876,71
Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul	01/12/2024 s.d 30/11/2025	16.000.000,00	01/01/2025 s/d 30/11/2025	14.641.095,89
Pemerintah Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon	28/11/2024 s/d 27/11/2025	11.298.000,00	01/01/2025 s/d 27/11/2024	10.245.583,56
Jumlah		**32.298.000,00**		**26.119.556,16**

b. Dinas Kesehatan

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp47.653.164,72 terdiri dari :

1) Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 - 31 Desember 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.997.261,77.
2) Pembayaran sewa tanah Magersari milik Sultan Ground pada RS Grhasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 - 20 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.981.390,26.
3) Pembayaran sewa tanah magersari pada RS Grhasia sebesar Rp16.000.000,00 untuk jangka waktu mulai 17 Mei 2024 - 17 Mei 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.961.643,84.
4) Pembayaran sewa tanah warga Palbapang pada RS Respira sebesar Rp43.17.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun mulai 15 Februari 2023 - 15 Februari 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.712.868,85.

c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) terdapat pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.806.239,74.

d. Dinas Perhubungan

Pada Dinas Perhubungan terdapat pembayaran sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpakiran) sebesar Rp185.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 9 Desember 2018 – 9 Desember 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.855.774,49.

5.3.1.1.9 Persediaan Rp98.529.252.418,73 Rp134.886.181.623,29

Saldo Persediaan sebesar Rp98.529.252.418,73 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 SKPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 90
Rincian Persediaan pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	45.627.878.308,85	40.295.783.212,32
2	Dinas Kesehatan	25.783.860.850,39	61.965.368.832,75
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.619.350,00	14.553.700,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	6.820.566.546,54	5.999.139.577,77
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.853.780,00	25.613.860,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.178.191.335,43	3.332.529.816,35
7	Dinas Sosial	704.240.065,19	1.055.192.334,50
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	143.131.600,00	99.464.346,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.557.499.069,70	4.457.277.582,10
10	Dinas Perhubungan	1.421.013.027,26	3.717.079.775,88
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	184.736.258,00	66.875.973,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	731.566.828,50	679.871.859,75
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.906.446,00	14.039.196,17
14	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	1.602.414.087,13	1.999.301.782,60
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	90.004.132,06	153.596.991,69
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	802.255.061,12	1.080.442.786,80
17	Dinas Pariwisata	44.732.334,00	50.578.185,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.527.414.808,94	3.502.936.673,62
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.770.760.183,23	1.652.305.729,33
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	538.523.058,32	458.300.574,68
21	Sekretariat Daerah	710.811.103,88	553.513.523,84
22	Sekretariat DPRD	126.293.899,00	136.414.954,00
23	Badan Perencanaan Daerah	378.645.792,20	330.585.052,40
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.324.372.674,67	2.679.033.658,57
25	Badan Kepegawaian Daerah	63.316.627,39	63.157.175,55
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	63.821.340,00	25.425.571,00
27	Badan Penghubung Daerah	113.744.652,28	222.043.343,62
28	Inspektorat	129.799.514,00	88.850.295,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.336.182,65	32.695.087,00
30	Paniradya Kaistimewan	56.943.502,00	134.210.172,00
	Jumlah	**98.529.252.418,73**	**134.886.181.623,29**

Persediaan berdasarkan Rincian Obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 91

Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
	Barang Pakai Habis		
1	Bahan	38.135.850.779,96	50.358.552.411,83
2	Suku Cadang	2.641.810.649,74	2.663.668.786,90
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	37.575.094.028,54	36.502.929.872,03
4	Obat-Obatan	6.654.422.798,73	28.858.367.568,33
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	9.822.346.649,86	12.149.144.127,20
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.574.175.331,90	3.325.891.802,00
7	Natura dan Pakan	421.499.390,00	331.831.765,00
8	Persediaan Dalam Proses	698.325.290,00	695.795.290,00
	Barang Tak Pakai Habis		
1	Komponen	1.605.000,00	-
2	Pipa	4.122.500,00	-
	Barang Bekas Dipakai		
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-
	Jumlah	**98.529.252.418,73**	**134.886.181.623,29**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.529.252.418,73 belum termasuk persediaan ikan nila hasil pengadaan untuk kolam budidaya ikan di Jogja Argo Park, yang merupakan unit kerja

dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Terdapat pengadaan ikan nila sebanyak 100 kg senilai Rp4.200.000,00 dan 185 kg senilai Rp7.770.000,00, yang kemudian terjual sebanyak 250 kg sehingga terdapat sisa sebanyak 35 kg ikan senilai Rp1.470.000,00 belum tercatat dalam aplikasi persediaan.

Selain saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.529.252.418,73 terdapat persediaan yang telah rusak sebesar Rp9.567.743.122,84 dengan rician sebagai berikut :

Tabel 5. 92
Rincian Persediaan Rusak

No	Uraian	Nilai (Rp)
	BARANG PAKAI HABIS	
1	BAHAN	3.514.328.550,00
	Bahan Kimia	2.538.650.000,00
	Bahan Lainnya	975.678.550,00
2	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	50.633.500,00
	Alat Tulis Kantor	6.052.000,00
	Bahan Cetak	29.989.500,00
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	14.592.000,00
3	OBAT-OBATAN	3.766.746.978,33
4	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	2.236.034.094,51
	Jumlah	**9.567.743.122,84**

Adapun rincian persediaan rusak pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 93
Rincian Persediaan Rusak pada SKPD

No	SKPD	Barang Pakai Habis				
		Bahan	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Obat-Obatan	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	Total
1	Dinas Kesehatan	3.514.328.550,00	-	3.766.746.978,33	-	7.281.075.528,33
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.568.000,00	-	-	1.568.000,00
3	Dinas Perhubungan	-	44.581.500,00	-	2.190.000.000,00	2.234.581.500,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	4.484.000,00	-	-	4.484.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	46.034.094,51	46.034.094,51
	Jumlah	**3.514.328.550,00**	**50.633.500,00**	**3.766.746.978,33**	**2.236.034.094,51**	**9.567.743.122,84**

Terhadap persediaan rusak sebesar Rp9.567.743.122,84 tersebut telah dilakukan reklasifikasi ke catatan persediaan rusak berat/usang sebesar Rp1.579.323.683,93, diusulkan penghapusan sebesar Rp4.484.000,00 dan telah diterbitkan SK Penghapusan sebesar Rp7.983.935.438,91.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp98.529.252.418,73 termasuk di dalamnya persediaan untuk strategis berupa persediaan cadangan pangan beras yang dititipkan kepada pihak ketiga yaitu pada Gudang Tarumartani sebanyak 76.437,30 kg dengan nilai sebesar Rp854.186.827,50.

Hasil *stock opname* persediaan pada tanggal 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 94
Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Cadangan Beras yang beredar (kg)	Stock Opname cadangan beras (kg)	Total cadangan beras (kg)
1	TARU MARTANI	229.311,90	76.437,30	305.749,20
	Jumlah	**229.311,90**	**76.437,30**	**305.749,20**

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2024 sebesar Rp854.186.827,50 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 95
Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Stock Opname cadangan beras (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Cadangan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	76.437,30	11.175,00	854.186.827,50
	Jumlah	**76.437,30**		**854.186.827,50**

Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Selain saldo persediaan sebesar Rp98.529.252.418,73 tersebut di atas, terdapat antara lain :

1. Barang sitaan berupa minuman keras di Satpol PP yang akan dijadikan barang bukti di persidangan, dimana setelah persidangan dan keputusan oleh Kejaksaan maka barang bukti tersebut akan diambil oleh Kejaksaan untuk disimpan di RUPBASAN dan kemudian akan dimusnahkan.
2. Persediaan berupa alat bengkel yang sudah dikeluarkan dari aplikasi persediaan namun masih digunakan untuk praktek lebih dari 1 tahun sebanyak 20 unit di SMKN 5 Yogyakarta.
3. Persediaan berupa sisa tiket di Balai Taman Hutan Raya DLHK senilai Rp448.086.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 96
Rincian Nilai Persediaan Sisa Tiket di Balai Taman Hutan Raya DLHK

No	Jenis Tiket	Sisa per 31 Desember 2024			Nilai per lembar (Rp)	Nilai Sisa Tiket (Rp)
		Telah perforasi	Belum perforasi	Jumlah Tiket		
1	Tanda Masuk	335	-	335	5.000,00	1.675.000,00
2	Motor	315	-	315	1.000,00	315.000,00
3	Mobil	193	300	493	2.000,00	986.000,00
4	Camping Ground	144	200	344	10.000,00	3.440.000,00
5	Foto Komersial	99	100	199	200.000,00	39.800.000,00
6	Film Komersial	99	100	199	1.000.000,00	199.000.000,00
7	Sewa Area	100	100	200	1.000.000,00	200.000.000,00
8	Bus	87	200	287	10.000,00	2.870.000,00
Jumlah						**448.086.000,00**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp2.403.324.094.535,51 Rp2.314.261.699.024,12

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.403.324.094.535,51 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp7.462.500.000,00 Rp6.319.276.632,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen tahun 2024 sebesar Rp7.462.500.000,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sebesar Rp10.794.077.964,00, ditambah penyaluran tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00, dikurangi pelunasan sebesar Rp360.676.000,00 dan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp5.470.901.964,00.
Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 97
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pergulira n	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		Saldo 31/12/2024 (Rp)	Jatuh Tempo per 31/12/2024	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2024		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan			%	(Rp)		
1	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**											
	DPM PHP Tahun Anggaran 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	-	-	185.000.000,00	20 Desember 2011	100%	185.000.000,00	-	Suku Bunga 3%, Jangka Waktu 1 Tahun
	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	-	-	241.000.000,00	20 Desember 2012	100%	241.000.000,00	-	
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	104.500.000,00	-	10.000.000,00	94.500.000,00	20 Desember 2013	100%	94.500.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	2011	3.569.417.900,00	1.356.826.000,00	-	10.676.000,00	1.346.150.000,00	20 Desember 2008 dan 20 Desember 2009	100%	1.346.150.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
	Jumlah			**1.887.326.000,00**	-	**20.676.000,00**	**1.866.650.000,00**			**1.866.650.000,00**	-	
2	**Dinas Koperasi dan UKM**											
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	-	-	92.422.098,00	2003	100%	92.422.098,00	-	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00	-	-	567.715.775,00	2016	100%	567.715.775,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 10 Tahun
	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	-	-	64.950.000,00	2010	100%	64.950.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	2010	100%	55.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Setelah Gempa) 2007	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	-	-	50.800.000,00	2010	100%	50.800.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00	2011	100%	80.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	2011	100%	25.000.000,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	165.734.227,00	-	-	165.734.227,00	2011	100%	165.734.227,00	-	Suku Bunga 6 %, Jangka Waktu 3 Tahun

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pergulira n	Nilai Awal Digulirkan (Rp)	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		Saldo 31/12/2024 (Rp)	Jatuh Tempo per 31/12/2024	Penyisihan Dana Bergulir per 31 Des 2024		Net Present Value (NPV) per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan			%	(Rp)		
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	-	-	55.615.598,00	2012	100%	55.615.598,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJKS/UJKS Kop 2010	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	2013	100%	150.000.000,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	166.057.582,00	-	-	166.057.582,00	2013	100%	166.057.582,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	-		239.912.400,00	2014	100%	239.912.400,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	-		400.736.502,00	2014	100%	400.736.502,00	-	Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	-		184.909.300,00	2015	100%	184.909.300,00	-	Suku Bunga 1 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	-		86.560.178,00	2016	100%	86.560.178,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2016	3.500.000.000,00	30.319.604,00	-		30.319.604,00	2019	100%	30.319.604,00	-	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	158.863.500,00	-		158.863.500,00	2020	100%	158.863.500,00	-	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	68.655.200,00	-		68.655.200,00	2020	100%	68.655.200,00	-	Suku Bunga 9 %, Jangka Waktu 3 Tahun
	Jumlah			**2.643.251.964,00**	-		**2.643.251.964,00**			**2.643.251.964,00**	-	
3	**BUKP**									-		-
	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	-	-	-	-	2021	-	-		
	Tahun 2020	2020	4.000.000.000,00	1.130.000.000,00	-	340.000.000,00	790.000.000,00	2023	100%	790.000.000,00	-	
	Tahun 2023	2023	-	5.000.000.000,00	-	-	5.000.000.000,00	2026	0,5%	25.000.000,00	4.975.000.000,00	
	Tahun 2024	2024	-	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	2027	0,5%	12.500.000,00	2.487.500.000,00	
	Jumlah			**6.130.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**340.000.000,00**	**8.290.000.000,00**			**827.500.000,00**	**7.462.500.000,00**	
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**											-
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	-	-	133.500.000,00		100%	133.500.000,00	--	Suku Bunga 3 %, Jangka Waktu 1 Tahun
	Jumlah			**133.500.000,00**	-	-	**133.500.000,00**			**133.500.000,00**	-	
	TOTAL			**10.794.077.964,00**	**2.500.000.000,00**	**360.676.000,00**	**12.933.401.964,00**			**5.470.901.964,00**	**7.462.500.000,00**	

Mutasi kurang sebesar Rp360.676.000,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp20.676.000,00 dan BUKP sebesar Rp340.000.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Investasi Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp7.462.500.000,00 merupakan Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi melalui Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.643.251.964,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp2.643.251.964,00, Dana Bergulir kepada masyarakat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.000.150.000,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp2.000.150.000,00 dan Dana Bergulir kepada masyarakat melalui BUKP sebesar Rp8.290.000.000,00 dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp827.500.000,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5. 98
Rincian Dana Bergulir

Uraian Dana Bergulir	Nilai Perolehan (Rp)	Klasifikasi		Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Dana bergulir kepada Koperasi (Dinas Koperasi dan UKM)	2.643.251.964,00	Macet	100%	2.643.251.964,00	-
Jumlah	**2.643.251.964,00**			**2.643.251.964,00**	**-**
Dana bergulir kepada Masyarakat (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan)	2.000.150.000,00	Macet	100%	2.000.150.000,00	-
Dana bergulir kepada Masyarakat (BUKP)	7.500.000.000,00	Lancar	0,5%	37.500.000,00	7.462.500.000,00
	790.000.000,00	Macet	100%	790.000.000,00	-
Jumlah	**10.290.150.000,00**			**2.827.650.000,00**	**7.462.500.000,00**
Total	**12.933.401.964,00**			**5.470.901.964,00**	**7.462.500.000,00**

Pengelompokan Saldo Dana Bergulir berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 99
Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)	Diragukan Tertagih (Rp)	NPV (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	7.500.000.000,00	37.500.000	7.462.500.000
2	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	5.433.401.964,00	5.433.401.964,00	-
	Jumlah	**12.933.401.964,00**	**5.470.901.964,00**	**7.462.500.000,00**

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.470.901.964,00 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp7.462.500.000,00.

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir antara lain diatur sebagai berikut:

- Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

5.3.1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**Rp2.395.861.594.535,51**	**Rp2.307.942.422.392,12**

Saldo awal Penyertaan Modal Tahun 2024 diperoleh dari perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited milik PT. Bank BPD DIY dan Laporan Keuangan Tahun 2023 Unaudited milik PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Tarumartani, BUKP dan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
Penyertaan Modal Tahun 2024 sebesar Rp2.395.861.594.535,51 dihitung dengan cara penyesuaian terhadap ekuitas BUMD berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2023 Audited milik PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Tarumartani, BUKP dan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY serta berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024 Audited milik PT. Bank BPD DIY, Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Tarumartani dan BUKP. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited diketahui bahwa Perumda Air Bersih Tirtatama DIY mengalami kerugian sebesar Rp6.284.042.615,74 sedangkan PT. Tarumartani mengalami kerugian sebesar Rp17.427.195.507,16.

Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 100
Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Perhitungan Penyertaan Modal 2023				Mutasi Tahun Anggaran 2024				Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD	Penyertaan Modal Tahun 2024	Keterangan LK BUMD Tahun 2024
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2023 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2023	Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke BUD Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024					
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12 = 7 x 11 - (1 + 5 + 6 - 8 +10)	13 = 1+5+6-8+10+12	
METODE EKUITAS															
1	PT. Bank BPD DIY	1.994.491.661.504,15	52,803%	3.680.064.611.904,00	1.943.169.750.256,05	(51.321.911.248,10)	200.000.000.000,00	52,000%	111.028.716.629,00	317.338.139.350,00	165.015.832.462,00	4.085.228.395.857,00	(72.838.100.243,41)	2.124.318.765.845,64	Audited, Opini Wajar
2	PT. Anindya Mitra Internasional	42.148.523.235,40	99,968%	39.209.657.865,00	39.197.072.478,66	(2.951.450.756,74)	-	99,990%	857.255.892,00	6.397.808.071,00	6.397.168.290,19	43.388.692.218,00	(1.352.631.528,08)	43.384.353.348,78	Audited, Opini Wajar
3	PT. Tarumartani	74.295.677.454,19	99,999%	72.147.329.417,00	72.146.607.943,71	(2.149.069.510,48)	-	99,990%	4.469.464.798,00	(17.428.938.401,00)	(17.427.195.507,16)	45.326.986.920,00	(4.927.493.417,24)	45.322.454.221,31	Audited, Opini Wajar
4	BUKP DIY	46.010.572.778,97	82,246%	54.611.094.627,00	44.915.440.886,66	(1.095.131.892,31)	-	Per masing-masing BUKP	4.580.240.352,93	583.945.958,94	794.665.770,60	45.240.922.656,00	(3.005.789.993,50)	38.124.076.310,82	Audited
5	Perumda Air Bersih Tirtalarna DIY	149.805.987.419,42	100,000%	149.805.987.424,70	149.805.987.424,70	5,28	-	100,000%	-	(6.284.042.615,74)	(6.284.042.615,74)	143.521.944.808,96	-	143.521.944.808,96	Audited, Opini Wajar
METODE HARGA PEROLEHAN															
6	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.190.000.000,00	0,373%	-		-	-	0,373%	-	-	-			1.190.000.000,00	
	TOTAL	**2.307.942.422.392,12**			**2.249.234.858.989,78**	**(57.517.563.402,35)**	**200.000.000.000,00**		**120.935.677.671,93**	**300.606.912.363,20**	**148.496.428.399,89**	**4.362.706.942.459,96**	**(82.124.015.182,23)**	**2.395.861.594.535,51**	

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.124.318.765.845,64. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2023 Audited		Rp	**1.994.491.661.504,15**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2023 Audited		Rp	(51.321.911.248,10)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2023		Rp	1.943.169.750.256,05
Tambahan Modal		Rp	200.000.000.000,00
Deviden Tahun 2023 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		Rp	(111.028.716.629,00)
Laba Tahun 2024	Rp317.338.139.350,00		
Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	52,000%	Rp	165.015.832.462,00
Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		Rp	(72.838.100.243,41)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp**	**2.124.318.765.845,64**

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.384.353.348,78. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2023 Audited		**Rp**	**42.148.523.235,40**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2023 Audited		Rp	(2.951.450.756,74)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2023		Rp	39.197.072.478,66
Tambahan Modal		Rp	-
Deviden Tahun 2023 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		Rp	(857.255.892,00)
Laba Tahun 2024	Rp6.397.808.071,00		
Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	99,999%	Rp	6.397.168.290,19
Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		Rp	(1.352.631.528,08)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp**	**43.384.353.348,78**

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp45.322.454.221,3. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2023 Audited		**R p**	**74.295.677.454,19**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2023 Audited		Rp	(2.149.069.510,48)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2023		Rp	72.146.607.943,71

Tambahan Modal		Rp	-
Deviden Tahun 2023 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		Rp	(4.469.464.798,00)
Laba Tahun 2024	Rp (17.428.938.401,00)		
Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	99,999%	Rp	(17.427.195.507,16)
Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		Rp	(4.927.493.417,24)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp**	**45.322.454.221,31**

d. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp143.521.944.808,96. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2023 Audited		**Rp**	**149.805.987.419,42**
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2023 Audited		Rp	5,28
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2023		Rp	149.805.987.424,70
Tambahan Modal		Rp	-
Deviden Tahun 2023 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2024		Rp	-
Laba Tahun 2024	Rp(6.284.042.615,74)		
Laba Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	100,000%	Rp	(6.284.042.615,74)
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2024		**Rp**	**143.521.944.808,96**

e. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.190.000.000,00.

f. Penyertaan Modal pada 75 BUKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp38.124.076.310,82. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada masing-masing BUKP DIY per 31 Desember 2024 menggunakan data dari KAP yang mana hingga LKPD diterbitkan, Laporan Hasil Audit KAP belum selesai.

Rincian perhitungan ekuitas pada masing-masing BUKP adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 101
Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada masing-masing BUKP DIY

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Perhitungan Penyertaan Modal 2023			Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2023	Mutasi Tahun Anggaran 2024							Penyertaan Modal Tahun 2024	Keterangan LK BUMD Tahun 2024
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2023 (LK BUMD) Audited	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY		Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	% Saham Pemda DIY	Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke BUD Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD LK Audited Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12 = 7 x 11 - (1 + 5 + 6 - 8 +10)	13 = 1+5+6-8+10+12	
	KOTA YOGYAKARTA														
1	UMBULHARJO	175.683.029,39	82,246%	208.522.562,60	171.501.466,84	(4.181.562,56)	-	80,804%	-	(442.465.889,00)	(357.527.979,59)	(233.943.327,00)	(3.007.912,54)	(189.034.425,30)	Audited
2	TEGALREJO	43.825.558,70	82,246%	52.017.647,00	42.782.433,95	(1.043.124,75)	-	85,763%	-	(279.975.569,00)	(240.116.268,44)	(227.957.922,00)	1.829.613,22	(195.504.221,27)	Audited
3	KOTAGEDE	(298.213.691,65)	82,246%	(353.957.257,00)	(291.115.685,59)	7.098.006,06	-	94,967%	-	(136.496.993,00)	(129.626.773,98)	(490.454.250,00)	(45.026.058,95)	(465.768.518,52)	Audited
4	MANTRIJERON	(653.697.099,05)	82,246%	(775.889.365,80)	(638.137.967,80)	15.559.131,25	-	96,352%	-	(231.751.320,00)	(223.297.899,52)	(1.009.257.518,00)	(111.007.715,07)	(972.443.582,38)	Audited
5	WIROBRAJAN	84.107.921,54	82,246%	99.829.786,60	82.106.006,29	(2.001.915,25)	-	78,711%	11.850.002,94	(195.858.661,00)	(154.162.263,33)	(113.431.206,00)	(5.376.549,16)	(89.282.809,14)	Audited
6	JETIS	(313.673.795,28)	82,246%	(372.307.239,00)	(306.207.811,79)	7.465.983,49	-	97,188%	-	24.401.990,00	23.715.803,51	(347.905.248,00)	(55.630.108,11)	(338.122.116,39)	Audited
7	GONDOMANAN	(932.957.246,34)	82,246%	(1.107.350.189,00)	(910.751.236,44)	22.206.009,89	-	89,606%	-	(45.862.767,00)	(41.095.669,35)	(1.153.212.956,00)	(81.498.036,85)	(1.033.344.942,65)	Audited
8	GONDOKUSUMAN	966.153.860,47	82,246%	1.146.752.077,00	943.157.713,25	(22.996.147,22)	-	77,179%	99.353.915,60	(45.862.767,00)	(35.396.594,70)	(1.153.212.956,00)	(1.698.449.698,88)	(890.042.495,94)	Audited
9	KRATON	(521.205.473,66)	82,246%	(618.631.756,20)	(508.799.874,20)	12.405.599,45	-	89,606%	-	(280.734.522,00)	(251.554.231,18)	(899.366.278,00)	(45.529.656,26)	(805.883.761,65)	Audited
10	NGAMPILAN	431.921.037,09	82,246%	512.657.835,00	421.640.562,97	(10.280.474,12)	-	87,260%	40.791.144,47	29.314.253,00	25.579.627,40	487.446.825,00	18.917.223,73	425.346.269,63	Audited
11	GEDONGTENGEN	(355.295.390,95)	82,246%	(421.708.947,40)	(346.838.740,88)	8.456.650,07	-	90,416%	-	(97.730.153,00)	(88.363.610,31)	(519.439.099,00)	(34.453.253,70)	(469.655.604,88)	Audited
12	PAKUALAMAN	(460.779.164,61)	82,246%	(546.910.265,20)	(449.811.816,72)	10.967.347,89	-	87,260%	-	(4.259.099,00)	(3.716.491,27)	(610.807.165,00)	(79.462.237,38)	(532.990.545,38)	Audited
13	MERGANGSAN	(2.486.995.434,96)	82,246%	(2.951.876.815,10)	(2.427.800.605,35)	59.194.829,62	-	96,684%	-	(237.899.253,00)	(230.011.414,96)	(3.189.776.069,00)	(426.203.157,47)	(3.084.015.177,78)	Audited
14	DANUREJAN	208.159.720,81	82,246%	247.069.956,40	203.205.156,34	(4.954.564,46)	-	95,877%	14.491.930,46	(77.564.277,00)	(74.366.516,78)	151.742.074,00	31.139.459,64	145.486.168,74	Audited
	KABUPATEN BANTUL					-									
15	IMOGIRI	1.264.164.415,43	82,246%	1.500.468.226,00	1.234.075.097,16	(30.089.318,27)	-	87,325%	51.031.505,35	69.643.029,00	60.815.684,37	1.501.944.182,00	67.711.524,68	1.311.570.800,86	Audited
16	SRANDAKAN	899.156.869,50	82,246%	1.067.231.680,00	877.755.367,53	(21.401.501,96)	-	79,206%	72.887.293,75	185.143.660,00	146.644.929,69	1.145.944.589,00	(43.855.870,20)	907.657.133,27	Audited
17	PANDAK	(37.347.304,19)	82,246%	(44.328.445,40)	(36.458.373,20)	888.930,99	-	84,099%	-	(257.692.573,00)	(216.716.258,45)	(302.021.020,00)	(821.301,04)	(253.995.932,69)	Audited
18	KRETEK	1.763.478.787,52	82,246%	2.093.116.888,60	1.721.504.916,20	(41.973.871,32)	-	85,345%	193.426.633,78	439.589.090,00	375.165.340,45	2.268.845.600,00	33.092.494,91	1.936.336.117,77	Audited
19	PLERET	644.085.212,33	82,246%	764.480.778,09	628.754.860,75	(15.330.351,58)	-	78,987%	24.270.899,98	(59.605.602,00)	(47.080.577,05)	669.345.218,00	(28.708.797,09)	528.694.586,63	Audited
20	PIYUNGAN	125.196.194,00	82,246%	148.598.480,40	122.216.306,19	(2.979.887,81)	-	71,975%	-	(247.502.545,00)	(178.138.763,93)	(97.817.535,00)	(14.481.241,65)	(70.403.699,38)	Audited
21	SEDAYU	922.518.548,85	82,246%	1.094.960.239,00	900.560.998,17	(21.957.550,69)	-	71,502%	76.597.890,48	74.526.685,00	53.287.902,63	1.046.792.816,00	(128.775.566,15)	748.475.444,17	Audited
22	PAJANGAN	292.443.007,61	82,246%	347.107.888,40	285.482.353,89	(6.960.653,71)	-	82,832%	5.109.523,86	67.616.871,00	56.008.397,97	407.561.769,00	1.210.284,55	337.591.512,55	Audited

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Perhitungan Penyertaan Modal 2023			Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2023	Mutasi Tahun Anggaran 2024							Penyertaan Modal Tahun 2024	Keterangan LK BUMD Tahun 2024
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2023 (LK BUMD) Audited	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY		Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	% Saham Pemda DIY	Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke BUD Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD LK Audited Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12 = 7 x 11 - (1 + 5 + 6 - 8 +10)	13 = 1+5+6-8+10+12	
23	SANDEN	(6.720.959,40)	82,246%	(7.977.274,08)	(6.560.988,84)	159.970,56	-	86,695%	-	(160.200.202,00)	(138.885.904,45)	(168.177.476,00)	(354.925,75)	(145.801.819,05)	Audited
24	DLINGO	1.671.080.704,68	82,246%	1.983.447.303,10	1.631.306.068,91	(39.774.635,77)	-	90,999%	71.876.456,49	237.670.782,00	216.277.427,00	2.128.671.308,00	161.357.119,47	1.937.064.158,89	Audited
25	BAMBANGLIPURO	1.236.470.751,47	82,246%	1.467.597.926,60	1.207.040.590,71	(29.430.160,76)	-	84,627%	77.759.054,45	260.890.881,00	220.783.945,64	1.621.592.620,00	22.238.584,41	1.372.304.066,31	Audited
26	SEWON	595.382.746,87	82,246%	706.674.609,00	581.211.598,92	(14.171.147,95)	-	86,116%	87.651.164,96	165.182.170,00	142.248.917,98	753.269.640,00	12.879.251,92	648.688.603,86	Audited
27	BANGUNTAPAN	781.507.638,98	82,246%	927.590.878,50	762.906.393,93	(18.601.245,05)	-	81,332%	52.138.348,56	(22.709.126,00)	(18.469.891,30)	830.561.983,00	(16.781.643,84)	675.516.510,23	Audited
28	JETIS	1.996.548.237,03	82,246%	2.369.752.822,33	1.949.026.906,25	(47.521.330,78)	-	89,159%	173.639.664,26	334.724.022,00	298.436.274,17	2.476.912.141,00	134.564.236,79	2.208.387.752,95	Audited
29	PUNDONG	1.068.110.687,99	82,246%	1.267.767.174,60	1.042.687.790,42	(25.422.897,56)	-	81,180%	134.076.423,42	191.906.999,00	155.790.335,05	1.268.230.456,00	(34.850.676,37)	1.029.551.025,67	Audited
30	BANTUL	922.880.480,60	82,246%	1.095.389.824,80	900.914.315,31	(21.966.165,29)	-	71,716%	46.568.023,27	112.703.478,00	80.826.493,94	1.133.701.507,00	(122.126.732,66)	813.046.053,31	Audited
31	KASIHAN	863.823.237,78	82,246%	1.025.293.312,60	843.262.737,88	(20.560.499,89)	-	81,808%	107.113.384,80	147.605.853,00	120.753.221,52	1.021.024.790,00	(21.623.822,88)	835.278.751,72	Audited
	KABUPATEN KULON PROGO					-									
32	GALUR	863.247.028,11	82,246%	1.024.609.395,00	842.700.243,01	(20.546.785,10)	-	87,413%	-	(552.270.206,00)	(482.753.322,93)	402.938.354,00	(7.728.337,19)	352.218.582,89	Audited
33	TEMON	614.145.481,52	82,246%	728.944.566,00	599.527.747,75	(14.617.733,76)	-	87,348%	6.594.915,87	4.588.743,00	4.008.163,59	724.726.040,00	36.090.866,59	633.031.862,06	Audited
34	SENTOLO	424.210.311,69	82,246%	503.505.783,00	414.113.366,29	(10.096.945,40)	-	87,090%	47.209.425,34	72.955.138,00	63.536.660,90	513.243.515,00	16.543.394,99	446.983.996,84	Audited
35	KALIBAWANG	(21.054.305,41)	82,246%	(24.989.879,40)	(20.553.176,21)	501.129,20	-	95,286%	-	(200.667.401,00)	(191.208.029,74)	(225.657.281,00)	(3.258.692,06)	(215.019.898,00)	Audited
36	NANGGULAN	1.019.816.645,57	82,246%	1.210.445.773,00	995.543.230,46	(24.273.415,11)	-	83,642%	66.780.051,98	119.861.538,00	100.254.659,68	1.237.516.979,00	6.066.857,50	1.035.084.695,66	Audited
37	KOKAP	1.349.068.359,02	82,246%	1.601.242.831,00	1.316.958.178,78	(32.110.180,23)	-	84,127%	118.902.864,33	125.689.642,00	105.738.787,78	1.562.587.820,00	10.762.445,57	1.314.556.547,80	Audited
38	WATES	1.235.133.508,82	82,246%	1.466.010.720,00	1.205.735.176,77	(29.398.332,05)	-	96,028%	-	(1.536.156.086,00)	(1.475.139.121,73)	(70.145.366,00)	202.044.791,46	(67.359.153,50)	Audited
39	LENDAH	1.619.835.683,23	82,246%	1.922.623.311,00	1.581.280.768,37	(38.554.914,87)	-	93,193%	207.655.917,49	155.495.682,00	144.910.413,66	125.689.642,00	(1.401.401.863,91)	117.133.400,63	Audited
40	SAMIGALUH	473.142.832,07	82,246%	561.585.010,00	461.881.207,32	(11.261.624,74)	-	94,272%	45.694.120,98	(17.334.607,00)	(16.341.675,06)	487.360.904,00	59.599.301,18	459.444.712,47	Audited
41	PANJATAN	135.003.924,52	82,246%	160.239.520,00	131.790.595,62	(3.213.328,90)	-	95,338%	-	(280.853.855,00)	(267.760.730,16)	(120.614.335,00)	20.978.718,78	(114.991.415,76)	Audited
42	PENGASIH	994.085.498,45	82,246%	1.179.904.833,70	970.424.529,52	(23.660.968,93)	-	96,318%	105.214.310,08	191.164.462,94	184.125.620,35	1.242.646.965,00	147.555.777,94	1.196.891.617,73	Audited
43	GIRIMULYO	351.147.714,90	82,246%	416.785.967,40	342.789.786,75	(8.357.928,15)	-	95,836%	-	(439.725.866,00)	(421.416.822,18)	(22.939.898,00)	56.642.295,25	(21.984.740,18)	Audited
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL					-									
44	PONJONG	830.344.593,08	82,246%	985.556.675,50	810.580.943,33	(19.763.649,75)	-	97,717%	146.278.786,45	248.983.857,00	243.298.506,35	1.058.359.004,00	126.591.544,87	1.034.192.208,10	Audited
45	PLAYEN	837.208.822,22	82,246%	993.704.000,00	817.281.791,84	(19.927.030,38)	-	95,417%	142.862.724,06	281.543.365,00	268.641.174,14	1.099.353.025,00	105.913.110,49	1.048.973.352,42	Audited
46	SEMIN	2.570.093.600,03	82,246%	3.050.508.096,60	2.508.920.889,13	(61.172.710,90)	-	97,874%	364.302.545,57	683.135.122,00	668.614.909,66	3.295.523.517,00	412.243.065,64	3.225.476.318,86	Audited

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Perhitungan Penyertaan Modal 2023			Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2023	Mutasi Tahun Anggaran 2024							Penyertaan Modal Tahun 2024	Keterangan LK BUMD Tahun 2024
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2023 (LK BUMD) Audited	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY		Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	% Saham Pemda DIY	Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke BUD Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD LK Audited Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12 = 7 x 11 - (1 + 5 + 6 - 8 +10)	13 = 1+5+6-8+10+12	
47	PANGGANG	1.453.988.945,06	82,246%	1.725.775.687,40	1.419.381.471,86	(34.607.473,20)	-	97,895%	171.489.618,42	330.139.240,00	323.188.284,72	1.849.716.152,00	239.690.948,56	1.810.771.086,72	Audited
48	RONGKOP	1.042.821.109,07	82,246%	1.237.750.343,60	1.018.000.147,60	(24.820.961,47)	-	98,220%	149.417.777,55	258.616.601,00	254.012.925,83	1.317.257.831,00	171.213.819,34	1.293.809.115,22	Audited
49	NGLIPAR	1.160.794.307,34	82,246%	1.377.775.670,50	1.133.165.377,96	(27.628.929,38)	-	96,276%	145.116.206,06	276.123.981,00	265.841.055,21	1.476.702.654,00	167.819.652,43	1.421.709.879,54	Audited
50	SEMANU	467.432.763,99	82,246%	554.807.588,00	456.307.048,83	(11.125.715,16)	-	98,748%	46.965.404,47	102.835.402,00	101.547.761,09	601.623.493,00	83.200.932,58	594.090.338,03	Audited
51	PALIYAN	1.427.417.713,03	82,246%	1.694.237.630,40	1.393.442.681,50	(33.975.031,53)	-	98,259%	182.517.272,29	320.178.269,00	314.602.521,02	1.795.709.617,00	238.910.281,95	1.764.438.212,18	Audited
52	KARANGMOJO	816.297.021,70	82,246%	968.883.263,20	796.867.728,65	(19.429.293,05)	-	98,920%	89.660.635,15	127.026.867,00	125.655.281,30	989.137.017,00	145.594.333,23	978.456.708,03	Audited
53	NGAWEN	1.052.497.459,45	82,246%	1.249.235.444,84	1.027.446.183,96	(25.051.275,49)	-	95,097%	164.199.509,53	314.983.132,00	299.540.058,24	1.361.426.042,00	131.890.964,24	1.294.677.696,91	Audited
54	PATUK	1.058.095.626,40	82,246%	1.255.880.048,60	1.032.911.104,77	(25.184.521,63)	-	98,541%	175.862.726,97	252.318.855,00	248.637.514,53	1.298.025.516,00	173.401.388,30	1.279.087.280,63	Audited
55	WONOSARI	491.860.257,19	82,246%	583.801.188,00	480.153.125,08	(11.707.132,11)	-	99,393%	23.676.898,10	50.851.816,00	50.542.930,47	606.581.239,00	95.877.568,70	602.896.726,15	Audited
56	SAPTOSARI	868.815.285,20	82,246%	1.031.218.498,00	848.135.965,87	(20.679.319,33)	-	98,286%	171.597.210,72	223.635.873,00	219.802.588,44	1.049.286.335,00	134.959.446,19	1.031.300.789,77	Audited
57	TEPUS	(1.180.043.227,76)	82,246%	(1.400.622.693,50)	(1.151.956.140,50)	28.087.087,26	-	99,010%	-	318.402.354,00	315.249.855,45	(1.082.220.340,00)	(234.799.002,08)	(1.071.505.287,13)	Audited
58	GEDANGSARI	2.191.825.113,80	82,246%	2.601.531.810,00	2.139.655.852,45	(52.169.261,35)	-	98,970%	342.355.329,80	601.608.273,00	595.411.313,41	2.795.632.873,00	374.124.185,71	2.766.836.021,78	Audited
	KABUPATEN SLEMAN					-									
59	TEMPEL	697.885.567,14	82,246%	828.337.759,00	681.274.673,27	(16.610.893,88)	-	74,234%	-	(497.270.642,00)	(369.143.992,32)	351.760.041,00	(51.005.058,58)	261.125.622,36	Audited
60	GODEAN	320.406.332,60	82,246%	380.298.255,20	312.780.102,97	(7.626.229,63)	-	50,856%	1.665.714,87	(44.169.452,00)	(22.462.856,43)	292.392.368,00	(139.952.204,77)	148.699.326,91	Audited
61	TURI	636.279.960,74	82,246%	755.216.530,60	621.135.387,76	(15.144.572,98)	-	77,116%	-	(216.829.449,00)	(167.209.774,12)	538.387.081,00	(38.744.084,48)	415.181.529,16	Audited
62	SEYEGAN	1.043.582.567,86	82,246%	1.238.654.138,00	1.018.743.482,34	(24.839.085,52)	-	43,184%	30.499.482,35	79.071.238,00	34.146.030,27	1.241.818.618,00	(486.124.541,22)	536.265.489,04	Audited
63	PAKEM	961.459.730,63	82,246%	1.141.180.497,40	938.575.311,89	(22.884.418,74)	-	83,026%	12.044.597,36	(560.788.295,00)	(465.601.083,32)	563.543.043,00	6.958.614,07	467.888.245,28	Audited
64	PRAMBANAN	749.622.358,87	82,246%	889.745.445,50	731.780.039,11	(17.842.319,77)	-	52,289%	26.328.611,30	53.526.098,00	27.988.226,82	887.648.692,00	(269.297.603,25)	464.142.051,37	Audited
65	MLATI	608.758.751,92	82,246%	722.550.922,50	594.269.231,72	(14.489.520,20)	-	0,59%	17.520.938,75	15.422.531,00	9.049.008,19	704.693.098,00	(172.326.022,28)	413.471.278,88	Audited
66	NGAGLIK	752.964.352,03	82,246%	893.712.140,40	735.042.486,99	(17.921.865,03)	-	60,976%	33.910.561,78	101.914.264,00	62.142.843,90	933.013.899,00	(194.363.855,09)	568.910.914,02	Audited
67	NGEMPLAK	994.921.305,58	82,246%	1.180.896.874,00	971.240.442,99	(23.680.862,59)	-	74,562%	40.272.949,92	65.564.897,00	48.886.773,10	1.184.345.473,00	(96.777.634,37)	883.076.631,79	Audited
68	GAMPING	337.111.204,45	82,246%	400.125.683,60	329.087.369,73	(8.023.834,72)	-	61,614%	1.621.637,87	(97.670.394,00)	(60.178.924,21)	299.488.584,00	(82.759.029,46)	184.527.778,19	Audited
69	DEPOK	586.559.159,65	82,246%	696.201.673,60	572.598.028,47	(13.961.131,18)	-	60,147%	4.683.213,96	(48.533.383,00)	(29.191.256,47)	638.915.955,00	(154.436.324,19)	384.287.233,85	Audited
70	MOYUDAN	819.748.729,38	82,246%	972.980.181,00	800.237.279,67	(19.511.449,71)	-	84,125%	38.113.386,30	72.170.692,00	60.713.290,94	992.470.154,00	12.074.156,27	834.911.340,57	Audited
71	SLEMAN	577.572.567,68	82,246%	685.535.263,80	563.825.333,06	(13.747.234,62)	-	65,876%	18.871.107,70	(14.313.153,00)	(9.428.954,55)	638.691.233,00	(114.780.058,04)	420.745.212,78	Audited
72	MINGGIR	657.482.105,32	82,246%	780.381.884,00	641.832.884,31	(15.649.221,01)	-	64,020%	17.203.389,88	55.647.482,00	35.625.788,73	805.608.785,00	(144.500.619,27)	515.754.663,89	Audited

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Perhitungan Penyertaan Modal 2023			Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2023	Mutasi Tahun Anggaran 2024							Penyertaan Modal Tahun 2024	Keterangan LK BUMD Tahun 2024
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2023 (LK BUMD) Audited	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY		Tambahan Modal Disetor Tahun 2024	% Saham Pemda DIY	Deviden Tahun 2023 yang Disetor ke BUD Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD LK Audited Tahun 2024	Laba (Rugi) BUMD Tahun 2024 Bagian Pemda DIY	Ekuitas BUMD Tahun 2024	Penyesuaian Nilai Ekuitas BUMD		
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12 = 7 x 11 - (1 + 5 + 6 - 8 +10)	13 = 1+5+6-8+10+12	
73	CANGKRINGAN	1.270.288.719,65	82,246%	1.507.737.315,20	1.240.053.632,26	(30.235.087,39)	-	76,491%	64.499.755,70	29.806.789,00	22.799.394,51	1.440.332.371,00	(96.634.265,13)	1.101.719.005,94	Audited
74	BERBAH	(310.437.940,18)	82,246%	(368.466.522,00)	(303.048.975,68)	7.388.964,50	-	63,957%	-	33.929.285,00	21.700.294,83	(334.537.237,00)	67.387.299,83	(213.961.381,02)	Audited
75	KALASAN	269.322.144,83	82,246%	319.665.160,60	262.911.807,99	(6.410.336,85)	-	68,032%	18.017.493,10	6.588.814,00	4.482.484,00	296.075.691,00	(47.951.191,10)	201.425.407,78	Audited
	TOTAL	**46.010.572.778,97**		**54.611.094.626,68**	**44.915.440.886,66**	**(1.095.131.892,31)**	-		**4.580.240.352,93**	**583.945.958,94**	**794.665.770,60**	**45.240.922.656,00**	**(3.005.789.993,50)**	**38.124.076.310,82**	

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp10.037.933.360.631,90** **Rp10.094.876.152.768,00**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.037.933.360.631,90 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp15.496.973.032.015,50 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.459.039.671.383,66, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah **Rp4.660.989.682.245,12** **Rp4.832.248.991.615,00**

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.660.989.682.245,12 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5. 102

Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung TempatTinggal	46.162.727.190,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	377.535.406.596,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	2.178.896.000,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.379.632.199.211,12
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	59.221.200.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	27.238.178.200,00
7	Tanah Persil Lainnya	-
8	Tanah Basah	4.878.262.000,00
9	Tanah Kering	200.310.000,00
10	Tanah Perkebunan	1.349.500.000,00
11	Tanah Pertanian	38.708.749.000,00
12	Tanah Lapangan Olahraga	32.516.450.000,00
13	Tanah Lapangan Parkir	141.553.591.945,00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	11.757.927.892,00
15	Tanah Lapangan Terbang	7.420.190.375,00
16	Tanah untuk Jalan	2.222.892.516.952,00
17	Tanah untuk Bangunan Air	30.501.757.091,00
18	Tanah untuk Bangunan Instalasi	41.680.943.758,00
19	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	192.028.051.639,00
20	Tanah untuk Makam	123.483.000,00
21	Tanah Kampung	43.409.341.396,00
	Jumlah	**4.660.989.682.245,12**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 103

Rincian Tanah pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	428.491.102.972,12	352.085.645.086,00
2	Dinas Kesehatan	131.863.507.850,00	9.249.665.001,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.259.641.415.953,00	2.611.784.468.700,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	85.954.418.175,00	92.859.304.855,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.500.000,00	133.500.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.975.357.000,00	-
7	Dinas Sosial	6.501.947.490,00	18.708.779.490,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.800.680,00	4.551.800.680,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.646.810.000,00	1.646.810.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	42.819.470.972,00	42.819.470.972,00
11	Dinas Perhubungan	61.240.048.920,00	59.158.648.920,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.504.000.000,00	8.750.000.000,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	243.748.467.456,00	190.616.341.511,00
14	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	326.660.158.184,00	459.469.700.184,00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	43.345.213.774,00	43.345.213.774,00
17	Dinas Pariwisata	63.635.490.540,00	63.635.490.540,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	122.199.307.899,00	122.199.307.899,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.409.962.000,00	20.608.532.000,00
20	Sekretariat Daerah	175.261.009.010,00	175.261.009.010,00
21	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
22	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	595.379.993.370,00	534.338.602.993,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
25	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
	Jumlah	**4.660.989.682.245,12**	**4.832.248.991.615,00**

Rincian mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 104
Rincian Mutasi Tanah

Saldo awal per 31 Desember 2023	**4.832.248.991.615,00**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	35.792.256.125,00
Hibah dari BNPB	2.975.357.000,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	600.148.000,00
Reklas dari KDP	55.175.550.042,00
Reklas dari Kemitraan (Sewa)	4.886.048.657,00
Verifikasi aset belum dicatat	457.890,12
Koreksi Nilai (Inventarisasi Rp1,00)	541.590.996.111,00
Jumlah	**641.020.813.825,12**
Pengurangan:	
Reklasifikasi Ke Gedung	1.248.397.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	400.617.200,00
Reklasifikasi ke ALL (Aset yang tidak digunakan)	775.574.725.555,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	35.056.383.440,00
Jumlah	**812.280.123.195,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**4.660.989.682.245,12**

Penjelasan :

- Penambahan aset Tanah dari Hibah sebesar Rp3.575.505.000,00, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 105
Rincian Penambahan Aset Tanah dari Hibah

SKPD	Hibah	Nilai (Rp)
BPBD	Hibah tanah huntap dari BNPB	2.975.357.000,00
DIKPORA	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	600.000.000,00
DINAS KOPERASI	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	148.000,00
Jumlah		**3.575.505.000,00**

- Hasil verifikasi aset Aset Tetap Tanah sebesar Rp541.591.454.001,12 merupakan penambahan nila aset Tanah hasil dari kegiatan verifikasi aset tetap, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 106
Rincian Hasil Verifikasi Aset

SKPD	Hasil verifikasi aset	Nilai (Rp)
DIKPORA	Koreksi Nilai Tanah Rp1,00	75.811.999.996,00
DINKES	Koreksi Nilai Tanah Rp1,00	43.669.999.999,00
DPUPESDM	Koreksi Nilai Tanah Rp1,00	422.108.996.116,00
		541.590.996.111,00
DIKPORA	Verifikasi aset belum dicatat	457.890,12
Jumlah		**541.591.454.001,12**

- Reklasifikasi Tanah ke Persediaan sebesar Rp400.617.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM, karena merupakan tanah Sultan Ground hasil pengadaan untuk jalan yang diatasnya terdapat bangunan rumah dan pohon yang akan dibongkar dan dijual, sehingga direklasifikasi ke Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
- Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp775.574.725.555,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM karena berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, maka ruas jalan CONGOT - NGREMANG, ruas jalan PANDANSIMO – SAMAS, ruas jalan GIRIJATI - LEGUNDI, ruas jalan LEGUNDI - SAPTOSARI, ruas jalan SAPTOSARI - PLANJAN, ruas jalan JERUKWUDEL - BARAN - DUWET, akan diserahkan kepada Kementerian PUPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga pencatatan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM direklas ke Aset Lain-Lain (Aset yang tidak digunakan), yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR.
- Koreksi Nilai Tanah Rp1,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp422.108.996.116,00 merupakan penyesuaian nilai tanah untuk jalan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) atas 380 bidang tanah di sekitar ruas jalan. Penyesuaian nilai tanah tersebut berdasarkan SK Sekretaris Daerah DIY Nomor 24/SEKDA/IV/2025 tentang Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyajian Neraca Tahun 2024 Berupa Tanah di Pemda DIY.

5.3.1.3.2 Peralatan Mesin Rp2.272.476.209.148,43 Rp2.111.178.568.079,94

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.272.476.209.148,43 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 107
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Alat Besar	133.332.031.279,57
2	Alat Angkutan	231.199.211.222,02
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	136.072.504.427,00
4	Alat Pertanian	19.907.506.037,92
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	561.225.816.046,44
6	Alat Studio, , Komunikasi, dan Pemancar	169.565.931.824,74
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.835.153.213,14
8	Alat Laboratorium	308.431.655.008,98
9	Alat Persenjataan	11.333.017.371,50
10	Komputer	487.184.399.695,36
11	Alat Eksplorasi	1.175.523.599,00
12	Alat Pengeboran	94.939.950,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	379.856.924,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	18.870.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
15	Alat Keselamatan Kerja	5.176.857.638,00
16	Alat Peraga	845.715.177,00
17	Peralatan Proses/Produksi	4.212.183.227,48
18	Rambu-rambu	113.399.042.473,04
19	Peralatan Olahraga	5.085.994.033,24
	Jumlah	**2.272.476.209.148,43**

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 108
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	920.824.936.073,25	816.519.126.114,41
2	Dinas Kesehatan	175.436.724.699,98	157.455.840.029,98
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	64.072.198.951,04	65.174.898.910,36
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.999.565.791,36	12.832.951.972,36
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.735.347.046,99	3.720.256.046,99
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.383.271.979,00	14.017.618.329,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.227.397.209,67	46.472.370.577,67
8	Dinas Sosial	30.322.981.853,77	31.629.653.089,06
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.837.907.838,98	40.182.365.959,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.712.987.221,00	8.667.767.221,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.192.383.679,34	66.952.554.098,92
12	Dinas Perhubungan	166.551.817.127,94	174.457.327.662,88
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	111.053.378.604,02	97.638.307.833,02
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50.437.028.286,25	27.884.720.624,63
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.447.189.900,95	5.622.291.702,53
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	97.419.048.229,76	97.101.136.066,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	63.422.898.111,71	64.085.579.923,71
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.067.513.661,28	23.322.775.035,94
19	Dinas Pariwisata	7.735.768.334,08	7.581.021.164,08
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	54.749.884.144,83	53.960.575.622,83
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.521.081.276,00	47.183.827.959,00
22	Sekretariat Daerah	59.560.245.527,54	58.839.452.544,54
23	Badan Penghubung Daerah	7.680.674.923,00	8.295.463.007,00
24	Sekretariat DPRD	25.531.606.036,09	26.896.044.041,09
25	Inspektorat	12.349.922.913,28	12.079.930.273,28
26	Paniradya Kaistimewan	11.855.467.796,96	11.648.007.367,96
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.106.219.595,96	11.447.602.595,96
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	100.192.407.845,40	94.737.684.239,40
29	Badan Kepegawaian Daerah	19.040.311.723,00	13.890.305.379,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.008.042.766,00	10.881.112.686,60
	Jumlah	**2.272.476.209.148,43**	**2.111.178.568.079,94**

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 109
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo awal per 31 Desember 2023	**2.111.178.568.079,94**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	204.099.193.397,00
Hibah	5.915.029.118,00
Reklas dari ALL	24.000.000,00
Verifikasi Aset- blm tercatat	198.640.057,00
Reklas dari ekstrakom (penilaian Rp 1)	586.030.000,00
Reklas dari AT Lainnya	2.449.455.038,00
Reklas dari ATB	451.875.000,00
Reklas dari Persediaan	674.384.987,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan	6.839.038.088,00
Reklas dari JIJ	22.177.800,00
Reklas dari Extracom	1.760.937.355,10
Reklas dari Beban Barjas	339.954.655,00
	244.530.664.460,00
Pengurangan:	
Reklas ke ALL -Usulan Penghapusan	63.615.918.590,21
Extracomptable	1.205.271.340,30
Reklas ke AT Lainnya	41.914.419,00
Reklas ke Persediaan	792.515.157,75
Reklas ke JIJ	83.217.820,00
Reklas ke Gedung Bangunan	9.066.579.568,00
Reklas ke Beban Barjas	15.850.000,00
Reklas ke KDP	8.381.056.496,25
Reklas ke ATB	30.700.000,00
	83.233.023.391,51
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**2.272.476.209.148,43**

Penjelasan :

- Reklas Peralatan Mesin dari Aset Lain-Lain sebesar Rp24.000.000,00 merupakan pembatalan penghapusan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Reklas ke Persediaan sebesar Rp792.515.157,75 terdapat pada :

Tabel 5. 110
Rincian Reklas dari Peralatan Mesin ke Persediaan

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Kominfo	238.137.800,00	Suku Cadang
Badan Kepegawaian Daerah	928.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahhraga	170.466.438,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas
	202.125.766,00	Bahan-Bahan Lainnya
Dinas Kesehatan	27.555.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas PPP dan PA	1.932.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas Sosial	701.000,00	Perabot Kantor
DPU ESDM	75.926.575,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas Perhubungan	11.820.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.598.500,00	Bahan-Bahan Lainnya
Dinas Koperasi	23.393.428,75	Alat/bahan untuk kegiatan kantor

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	370.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas Perikanan dan Kelautan	14.342.000,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	425.000,00	Bahan-Bahan Lainnya
BPKA	793.650,00	Alat/bahan untuk kegiatan kantor
Jumlah	**792.515.157,75**	

- Reklas dari Beban Barjas ke Peralatan Mesin sebesar Rp339.954.655,00 terdapat pada :

Tabel 5. 111
Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Peralatan Mesin

SKPD	Nilai (Rp)
Dinas Kominfo	2.061.270,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	131.628.235,00
Dinas Kesehatan	35.346.700,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.435.000,00
Dinas Kebudayaan	33.000.000,00
Dinas Perhubungan	101.773.450,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.710.000,00
Jumlah	**339.954.655,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp3.485.996.151.283,92 Rp3.227.811.390.168,90

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.485.996.151.283,92 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 112
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	3.413.680.895.051,01
2	Monumen	15.010.742.175,98
3	Bangunan Menara	739.982.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	56.564.532.056,93
	Jumlah	**3.485.996.151.283,92**

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 113
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.213.685.536.215,41	1.144.800.055.925,30
2	Dinas Kesehatan	151.722.986.722,54	144.067.167.656,54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	58.391.204.209,00	48.431.922.596,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.149.372.322,05	6.342.908.158,05
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	800.449.016,00	806.115.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.774.070.367,00	8.699.819.214,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.154.961.350,00	9.308.799.350,00
8	Dinas Sosial	110.431.970.308,28	109.408.395.972,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.081.969.221,00	43.098.447.221,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	23.881.801.813,00	23.881.801.813,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.615.553.909,66	64.299.642.680,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
12	Dinas Perhubungan	78.883.206.060,46	69.011.843.905,91
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.293.990.281,00	5.293.990.281,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	177.685.561.770,68	109.136.428.072,59
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.161.304.474,00	2.983.241.023,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	125.281.192.868,00	122.176.220.532,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	138.238.120.529,00	138.020.517.179,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	93.513.149.990,32	90.704.862.272,02
19	Dinas Pariwisata	74.325.845.984,93	71.265.091.751,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	123.459.891.069,48	120.290.161.392,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.235.489.199,06	28.923.832.071,00
22	Sekretariat Daerah	47.282.302.251,00	44.413.141.748,61
23	Badan Penghubung Daerah	12.126.659.798,00	8.713.665.260,00
24	Sekretariat DPRD	576.741.303.378,00	575.781.319.533,00
25	Inspektorat	24.620.496.207,00	24.620.496.207,00
26	Paniradya Kaistimewan	9.321.673.874,65	6.791.833.197,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.989.171.200,00	4.989.171.200,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	178.069.740.402,00	169.672.596.442,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	71.930.012.261,00	7.294.871.816,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.147.164.231,40	24.583.030.699,40
	Jumlah	**3.485.996.151.283,92**	**3.227.811.390.168,90**

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 114
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo awal per 31 Desember 2023	**3.227.811.390.168,90**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	220.538.449.546,95
Gabung Aset (Inventarisasi)--reklas dari extracom	8.538.556.256,76
Hibah	40.015.456.744,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	1.982.792.111,00
penilaian BMD	532.660.000,00
Reklasifikasi dari aset extracomtable	225.896.400,00
Reklas dari KDP	157.422.723.206,11
Reklas dari PM	9.066.579.568,00
Reklas dari JIJ	2.314.912.785,66
Reklas dari AT Lainnya	15.722.477.429,66
Reklas dari Kemitraan (Sewa)	4.722.854.275,00
Reklas dari tanah	1.248.397.000,00
Reklas dari Persediaan	73.303.600,00
Reklas dari ATB	117.239.440,00
	462.522.298.363,14
Pengurangan:	
Extracomtabel	235.664.693,95
Reklas ke PM	6.839.038.088,00
Reklas ke KDP	159.410.609.949,75
Reklas ke ATL	14.352.322.420,00
Reklas ke JIJ	10.004.172.583,16
Reklas ke ALL-usulan penghapusan	13.495.729.513,26
	204.337.537.248,12
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**3.485.996.151.283,92**

Penjelasan:

- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.982.792.111,00 terdapat pada :

Tabel 5. 115
Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Gedung dan Bangunan

SKPD	Nilai (Rp)
DIKPORA	646.747.433,00
DINKES	227.940.005,00
DISBUD	741.700.150,00
DISHUB	70.386.206,00
DLHK	261.959.299,00
BPKA	34.059.018,00
Jumlah	**1.982.792.111,00**

- Reklas dari Persediaan sebesar Rp73.303.600,00 terdapat pada Dinas PU ESDM, berupa Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp63.203.600,00 dan Alat Listrik sebesar Rp10.100.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp4.792.597.995.746,42 Rp4.616.743.164.616,93

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.792.597.995.746,42 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 116
Rincian Obyek Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	3.685.522.770.152,33
2	Bangunan Air	678.303.301.802,98
3	Instalasi	322.795.063.165,45
4	Jaringan	105.976.860.625,66
	Jumlah	**4.792.597.995.746,42**

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut

Tabel 5. 117
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	33.566.744.257,05	28.260.179.546,16
2	Dinas Kesehatan	7.562.728.200,34	7.995.045.799,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	4.330.334.046.948,51	4.172.904.224.395,51
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.993.544.000,00	8.770.257.849,47
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.759.000,00	52.759.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	429.834.000,00	429.834.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.792.186.700,00	6.638.348.700,00
8	Dinas Sosial	3.741.617.252,66	2.802.112.964,94
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.983.490.200,00	1.965.012.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	91.775.000,00	91.775.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.294.999.730,34	35.479.684.456,00
12	Dinas Perhubungan	9.765.449.869,00	9.805.699.189,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.055.366.189,00	13.055.366.189,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.344.526.077,99	418.510.764,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172.868.000,00	172.868.000,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	12.336.965.466,00	12.178.004.443,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.044.573.591,00	7.044.573.591,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	238.164.349.625,04	235.204.304.515,04
19	Dinas Pariwisata	12.581.738.400,00	12.581.738.400,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.639.890.007,00	8.739.849.216,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.233.382.089,94	6.452.968.800,00
22	Sekretariat Daerah	23.873.636.677,08	23.176.350.621,47
23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
24	Sekretariat DPRD	736.629.559,00	522.131.759,00
25	Inspektorat	3.534.355.475,00	3.534.355.475,00
26	Paniradya Kaistimewan	69.750.000,00	69.750.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	20.686.509.539,47	15.883.179.851,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	835.782.413,00	835.782.413,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.561.329.979,00	1.561.329.979,00
	Jumlah	**4.792.597.995.746,42**	**4.616.743.164.616,93**

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 118
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo awal per 31 Desember 2023	**4.616.743.164.616,93**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	182.299.322.051,00
Hibah	211.624.500,00
Reklas dari Gedung Bangunan	10.004.172.583,16
Reklas dari Peralatan mesin	83.217.820,00
Reklas dari KDP	7.065.296.134,99
Koreksi nilai aset Rp 1,00	2.115.839,00
Reklas dari Aset Lain-lain	2.103.252.916,00
Reklas dari beban barjas	74.642.250,00
	201.843.644.094,15
Pengurangan:	
Reklas ke ALL-Usulan Penghapusan	2.605.276.836,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin	22.177.800,00
Reklas ke Gedung dan Bangunan	2.314.912.785,66
Reklas ke KDP	21.046.445.543,00
	25.988.812.964,66
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**4.792.597.995.746,42**

Penjelasan :

- Reklas dari Aset Lain-lain sebesar Rp2.103.252.916,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM merupakan reklas dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Bangunan Air, Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Jaringan Distribusi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
- Reklas dari Beban Barjas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp74.642.250,00 terdapat pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp66.511.500,00 dari Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan ke Jalan Lainnya, dan Dinas Kesehatan sebesar

Rp8.130.750,00 dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Jembatan Penyeberangan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp227.838.874.197,64 Rp227.208.802.124,40

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.838.874.197,64 dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 119
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	135.555.096.839,23
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	30.739.814.603,23
3	Hewan	2.436.430.834,98
4	Biota Perairan	2.415.000,00
5	Tanaman	1.104.991.465,20
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	58.000.125.455,00
	Jumlah	**227.838.874.197,64**

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut

Tabel 5. 120
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	133.438.951.157,24	135.001.069.663,21
2	Dinas Kesehatan	401.580.146,00	417.903.076,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	40.103.778.916,00	40.105.296.816,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	49.650.000,00	1.400.664.465,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	221.073.780,00	16.659.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.145.000,00	419.145.000,00
8	Dinas Sosial	630.777.882,00	637.727.882,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.369.050,00	41.369.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	40.170.400,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.581.845.101,00	5.283.982.587,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	864.327.389,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.304.903.940,00	4.473.075.329,73
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	5.738.058.880,00	5.673.308.899,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.051.109.809,20	15.014.186.464,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.051.000,00	37.192.000,00
19	Dinas Pariwisata	44.121.695,01	444.409.203,94
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.583.812.515,18	1.845.076.913,51
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.911.167.050,00	98.642.450,00
22	Sekretariat Daerah	11.964.784.406,00	11.993.954.678,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.110.903.650,00	1.135.141.763,00
24	Sekretariat DPRD	855.691.352,01	841.043.552,01
25	Inspektorat	35.345.461,00	37.427.461,00
26	Paniradya Kaistimewan	224.508.200,00	224.508.200,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.983.840,00	83.983.840,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.311.964.727,00	234.400.692,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	57.454.333,00	126.786.300,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	690.064.818,00	674.068.450,00
	Jumlah	**227.838.874.197,64**	**227.208.802.124,40**

Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 121
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo awal per 31 Desember 2023	**227.208.802.124,40**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	11.562.606.421,00
Hibah	3.698.487.532,00
Reklas dari Gedung Bangunan	14.352.322.420,00
Reklas dari KDP	40.000.000,00
Koreksi Nilai (Inventarisasi)--Rp 1	36.055.887,60
Reklas dari Persediaan	75.350.000,00
Reklas dari Beban Barjas	49.650.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	41.914.419,00
	29.856.386.679,60
Pengurangan:	
Reklas ke ALL- Usulan Penghapusan	11.018.431.128,70
Reklas ke Peralatan Mesin	2.449.455.038,00
Reklas ke Gedung Bangunan	15.722.477.429,66
Reklas ke Persediaan	9.950.410,00
Reklas ke beban barjas BOS	26.000.600,00
	29.226.314.606,36
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**227.838.874.197,64**

Penjelasan :

- Reklas dari Beban Barjas ke Aset Tetap Lainya sebesar Rp49.650.000,00 terdapat pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ke Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah.
- Reklas dari Persediaan sebesar Rp75.350.000,00 terdapat pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp34.500.000,00 berupa Bahan- Bahan Lainnya dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp40.850.000,00 berupa Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.
- Reklas ke Beban Barjas BOS sebesar Rp26.000.600,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa Beban Langganan E Book.
- Reklas ke Persediaan sebesar Rp9.950.410,00 terdapat pada :

Tabel 5. 122
Rincian Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Persediaan

SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
DIKPORA	7.707.500,00	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
DISBUD	1.500.000,00	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
DLHK	644.910,00	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
DPKP	98.000,00	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Jumlah	**9.950.410,00**	

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.838.874.197,64 termasuk didalamnya Aset Tetap Renovasi sebesar Rp58.000.125.455,00, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan SKPD tetapi milik SKPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp18.457.814.577,00 dan aset tetap yang digunakan oleh SKPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp39.542.310.878,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 123
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	33.508.214.981,00	Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN	55.754.115,00
			Ruang Rapat Balai PSDA	4.689.336,00
			Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara	7.906.995,00
			Garasi Balai PSDA	14.980.854,00
			Jalan Ngalang - Nguwot - Gading	23.544.922.024,00
			Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek	1.308.985.500,00
			Jembatan Bancang	6.061.355.700,00
			Jembatan Buyutan	1.893.199.500,00
			Pagar Eks Kantor BP3ESDM Logandeng Gunungkidul	199.678.200,00
			Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak – Bawuran	416.742.757,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.058.886.600,00	Jembatan dekat kantor Balai Pengelolaan Sampah	79.842.400,00
			Bronjong	1.243.181.500,00
			Jalan masuk ke tempat pembuangan sampah	2.372.135.700,00
			Pembangunan talud pengaman dan pembuatan kolam lindi dengan geomembran	363.727.000,00
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum	11.381.285.799,00	Rehab Gedung Woro, Gadri, Bangsal	7.327.994.753,00
			Rehab Masjid Sulthoni Komplek Kepatihan	1.398.678.694,00
			Rehab Bale Tanjung Komplek Kepatihan	2.270.469.200,00
			Gedung Sekda	223.300.152,00
			Penambahan alat bantu (pengaman) toilet Pareanom, Wiyoto Projo, Bale Kenyo, Gedhong Pacar, Depan Pareanom	21.250.000,00
			Rehap ruang sanitary Pareanom Pria dan Wanita	139.593.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum	826.567.388,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.677.000,00	SLB BINA SIWI	339.677.000,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.977.148.940,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA	3.977.148.940,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.203.000,00	Gedung Sekolah	19.203.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.076.617.147,00	Jalan Provinsi Kolektor Jalan Senopati-Bantul	675.952.682,00
			Peningkatan jalan ruas pasar bendo-beku	1.400.664.465,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.812.524.600,00	Pembangunan Interior dan Eksterior Gedung PDIN (Sekretariat Disperindag DIY)	1.812.524.600,00
	Jumlah	**58.000.125.455,00**		**58.000.125.455,00**

Selain Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.838.874.197,64 di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya sebanyak 71.592 unit yang memiliki nilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 124
Rincian Aset Tetap Lainnya yang Bernilai Rp0,00

No	SKPD/Sekolah	Bahan Perpustakaan Tercetak	Barang Bercorak/ Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	Aset Tetap Rusak	Jumlah
1	Museum Negeri Sonobudoyo	27.690	41.243	-	68.933
2	Taman Budaya	2.290	16	-	2.306
3	Sekretariat Dinas PUESDM	17	-	-	17
4	21 SMAN	-	230	17	247
5	11 SMKN	-	89	-	89
	Jumlah	**29.997**	**41.578**	**17**	**71.592**

Selain itu, terdapat 75 unit Aset Tetap Lainnya Hilang Kelompok Arkeologi pada Museum Sonobudoyo hasil hibah tahun 2000 yang benilai Rp0,00 yang hilang karena pencurian. Pencurian benda cagar budaya di ruang koleksi emas UPTD Museum Sonobudoyo terjadi pada tanggal 11 Agustus 2010. Kejadian telah dilaporkan kepada Kepolisian Kota Besar Yogyakarta melalui Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan sesuai Laporan/Pengaduan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta Nomor STBL/324-B/VIII/2010/DIY/TABESYKA tanggal 11 Agustus 2010 jam 13.30 dan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Surat Kepala Dinas Kebudayaan kepada Nomor 646/2763 tanggal Agustus 2010.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp57.074.119.394,00 Rp107.662.307.978,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.074.119.394,00 terdapat dalam beberapa SKPD berikut ini:

Tabel 5. 125
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	376.084.714,00	376.084.714,00
2	Dinas Kesehatan	2.962.105.000,00	55.820.926.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	44.543.801.822,00	27.278.686.011,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	142.005.000,00	585.954.100,00
5	Dinas Sosial	230.230.820,00	366.905.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.014.600,00	179.014.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.728.512.450,00	2.666.372.600,00
8	Dinas Perhubungan	663.327.500,00	1.323.261.500,00
9	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	179.370.210,00	3.156.304.901,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	899.762.849,00	1.665.891.149,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.700.000,00	9.700.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	375.801.373,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	63.369.625,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.700.000,00	109.700.000,00
15	Sekretariat DPRD	2.208.063.922,00	1.832.360.250,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	143.455.700,00	143.455.700,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.248.065.182,00	401.317.200,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
18	Badan Kepegawaian Daerah	74.200.000,00	11.040.284.905,00
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	266.917.000,00
	Jumlah	**57.074.119.394,00**	**107.662.307.978,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.074.119.394,00 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp30.267.208.063,00 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp26.806.911.331,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 126
Rincian DED dan KDP pada SKPD

No	SKPD	DED (Rp)	KDP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	232.447.947,00	143.636.767,00	376.084.714,00
2	Dinas Kesehatan	2.962.105.000,00	-	2.962.105.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	18.735.681.003,00	25.808.120.819,00	44.543.801.822,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	98.940.000,00	43.065.000,00	142.005.000,00
5	Dinas Sosial	-	230.230.820,00	230.230.820,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.014.600,00	-	179.014.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.728.512.450,00	-	2.728.512.450,00
8	Dinas Perhubungan	663.327.500,00	-	663.327.500,00
9	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	149.900.210,00	29.470.000,00	179.370.210,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	899.762.849,00	-	899.762.849,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	9.700.000,00	9.700.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	-	86.433.000,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	63.369.625,00	63.369.625,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.700.000,00	-	69.700.000,00
15	Sekretariat DPRD	2.208.063.922,00	-	2.208.063.922,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	143.455.700,00	-	143.455.700,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	768.746.882,00	479.318.300,00	1.248.065.182,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	74.200.000,00	-	74.200.000,00
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	-	266.917.000,00
	Jumlah	**30.267.208.063,00**	**26.806.911.331,00**	**57.074.119.394,00**

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp143.636.767,00 merupakan Master Plan BLPT sebesar Rp94.550.000,00, perencanaan pengadaan konstruksi pagar depan Balai Tekkomdik sebesar Rp4.894.450,00, Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Pondok Pemuda sebesar Rp4.398.317,00 dan Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur SMK Negeri 2 Wonosari sebesar Rp39.794.000,00.
2. **Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp25.808.120.819,00 merupakan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Terminal VIP Bandara Internasional Baru Yogyakarta sebesar Rp5.617.511.830,00, Perencanaan Peningkatan Jembatan Tangisan dan Blaburan sebesar Rp381.509.560,00 dan Pembangunan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo Sleman sebesar Rp19.809.099.429,00.
3. **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp43.065.000,00 merupakan Masterplan Renovasi Gedung Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

4. **Dinas Sosial**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Sosial sebesar Rp230.230.820,00 merupakan pembangunan kolam terapi pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas sebesar Rp41.937.500,00, perencanaan pembangunan gedung pada Balai Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak sebesar Rp138.952.000,00, perencanaan pembangunan gedung pada Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha sebesar Rp15.564.000,00, perencanaan pembangunan gedung pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sebesar Rp10.010.000,00 dan Perencanaan Fasilitas Penunjang Mini Teater TMPN Kusumanegera K3KRS sebesar Rp23.767.320,00.
5. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp479.318.300,00 merupakan Penyusunan Masterplan Kawasan Lereng Gunung Merapi (Tempel, Turi dan Cangkringan) sebesar Rp361.186.100,00 dan Pengadaan Update Masterplan Gedung sebesar Rp118.132.200,00.
6. **Dinas Kebudayaan**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp29.470.000,00 merupakan Perencanaan rehab banguna gedung Eks KONI.
7. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp9.700.000,00 merupakan Perencanaan Rehab Gedung Kantor DPPM.
8. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
   Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp63.369.625,00 merupakan Perencanaan Rehab Gedung C dan Gedung A.

Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp57.074.119.394,00 dapat dirinci sebagai berikut.
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah sebesar Rp5.639.611.049,00
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.140.658.153,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp35.293.850.192,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 127
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo awal per 31 Desember 2023	**107.662.307.978,00**
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2024	-
Reklas dari Peralatan Mesin	8.381.056.496,25
Reklas dari Gedung dan Bangunan	159.410.609.949,75
Reklas dari Beban Barjas	3.311.570.275,00
Reklas dari JIJ	21.046.445.543,00
Hibah dari BPD	478.341.000,00
	192.628.023.264,00
Pengurangan:	
Koreksi Kode Barang --reklas ke ATB	1.522.317.500,00
Reklas ke ALL-- Usulan penghapusan	820.376.000,00
Reklas ke Tanah	55.175.550.042,00

Reklas ke Peralatan Mesin	21.169.948.964,90
Reklas ke Gedung dan Bangunan	157.422.723.206,11
Reklas keJalan, Irigasi, dan Jaringan	7.065.296.134,99
Reklas ke AT Lainnya	40.000.000,00
	243.216.211.848,00
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**57.074.119.394,00**

Penjelasan :

Reklas dari Beban Barjas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.311.570.275,00 terdapat pada SKPD berikut :

Tabel 5. 128
Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

SKPD	Nilai (Rp)
Badan Kepegawaian Daerah	152.686.990,00
Dinas Kesehatan	2.367.901.500,00
DPU-ESDM	140.025.635,00
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	98.940.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	112.705.900,00
Dinas Koperasi	439.310.250,00
Jumlah	**3.311.570.275,00**

5.3.1.3.7 **Akumulasi Penyusutan** **Rp5.459.039.671.383,66** **Rp5.027.977.071.815,16**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.459.039.671.383,66 merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 129
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.658.142.315.942,02
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.206.692.948.619,34
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.589.979.444.155,25
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.224.962.667,05
	Jumlah	**5.459.039.671.383,66**

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 130
Rincian Akumulasi Penyusutan pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	951.196.582.203,87	805.484.262.980,36
2	Dinas Kesehatan	170.358.815.584,19	155.793.095.477,28
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.525.836.339.225,43	2.349.301.411.883,19
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.484.094.348,72	19.481.223.358,21
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.763.507.053,18	3.704.710.420,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.558.640.345,89	10.771.603.880,93
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.829.136.010,27	43.010.710.322,71
8	Dinas Sosial	62.915.387.381,46	59.942.473.394,12
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.678.078.211,71	48.359.648.645,21
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	12.533.979.695,46	11.468.118.823,14
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81.025.476.253,93	82.868.138.757,76
12	Dinas Perhubungan	161.360.156.903,49	160.210.540.745,09

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	92.710.159.998,56	83.692.820.673,85
14	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	33.659.591.275,51	99.210.689.316,49
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.104.822.741,56	26.731.144.743,28
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.368.209.731,29	5.843.171.680,22
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	82.088.973.732,30	74.986.088.854,66
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.413.488.819,90	73.466.093.376,55
19	Dinas Pariwisata	23.522.480.548,47	20.177.551.439,43
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	71.776.734.747,66	66.836.303.770,22
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.370.053.519,94	35.954.935.133,71
22	Sekretariat Daerah	78.172.068.837,10	74.022.317.880,86
23	Sekretariat DPRD	523.300.474.332,17	518.553.857.806,79
24	Badan Penghubung Daerah	9.942.439.041,96	8.174.549.368,15
25	Inspektorat	10.441.496.570,49	8.196.763.781,63
26	Paniradya Kaistimewan	7.589.661.835,28	6.203.728.537,58
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.076.669.272,82	14.201.787.131,34
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	146.436.344.207,30	128.439.916.224,53
29	Badan Kepegawaian Daerah	14.664.027.453,93	14.527.737.128,86
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	18.861.781.499,82	18.361.676.278,03
	Jumlah	**5.459.039.671.383,66**	**5.027.977.071.815,16**

Mutasi Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 131
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

Saldo awal per 31 Desember 2023	**5.027.977.071.815,16**
Penambahan:	
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	455.508.600.416,80
Pecah gabung aset	33.011.887.366,65
Koreksi Kode Barang	4.302.315.481,36
Penyesuaian saldo awal	115.221,64
Reklas dari Aset Lain-lain	339.295.376,64
Beban Penyusutan yang menambah HPP	33.110.125,00
Reklas dari Kemitraan	739.247.732,76
Hibah	1.135.690.860,22
Koreksi Salah Nilai Aset	4.604.739.561,97
Reklas dari ATB	3.250.000,00
Pencatatan Aset hasil iventarisasi	161.937.559,04
	499.840.189.702,08
Pengurangan:	
Usul Penghapusan - Akumulasi Penyusutan	64.508.795.384,09
Akumulasi penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.268.794.749,49
	68.777.590.133,58
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**5.459.039.671.383,66**

5.3.1.4 Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya **Rp996.132.767.844,79** **Rp339.806.033.399,04**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp996.132.767.844,79 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF).

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga **Rp51.551.011.285,00** **Rp196.327.170.817,00**

Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.551.011.285,00 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 132
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	SKPD	Sewa (Rp)	Kerjasama Pemanfaatan (Rp)	Total (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	310.000.000,00	-	310.000.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	38.947.241.285,00	7.709.270.000,00	46.656.511.285,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.581.500.000,00	-	4.581.500.000,00
	Jumlah	**43.841.741.285,00**	**7.709.270.000,00**	**51.551.011.285,00**

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa dan kerjasama pemanfaatan, bangun guna dengan uraian sebagai berikut:

A. Sewa sebesar Rp43.841.741.285,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.841.741.285,00 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 133
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	SKPD	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	310.000.000,00	Tanah	Talenta Body Repair dan PT. Naragita
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.000.000,00	Tanah	Masyarakat umum
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	38.947.241.285,00	Tanah dan Bangunan	Terlampir
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.581.500.000,00	Tanah	
	Jumlah	**43.841.741.285,00**		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut.

Tabel 5. 134
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA -Sewa

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
	TANAH	**37.273.518.400,00**								
1	Sewa Tanah	379.750.000,00	19/PERJ/SEKDA/IV/2023	31.725.000,00	Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kab. Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	01/03/2023	s/d	28/02/2027	Penyerahan ke Pengelola Barang
2	Sewa Tanah	525.000.000,00	137/KEP/2024	18.150.000,00	Jalan Kusumanegara Nomor 168E Yogyakarta	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	01/02/2024	s/d	31/01/2025	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
3	Sewa Tanah	940.000.000,00	13/PERJ/GUB/IX/2024	120.000.000,00	eks pabrik Sabut Pengasih Kulonprogo	PT Formula Land	01/09/2024	s/d	31/08/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah perkotaan
4	Sewa Tanah	1.724.000.000,00								Disewakan/Dipinjamkan ** tanah perkotaan
5	Sewa Tanah	1.386.325.000,00	6/PERJ/SEKDA/IV/2024	17.460.000,00	Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	28/03/2024	s/d	27/03/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Parkir
6	Sewa Tanah	1.500.000.000,00	10/PERJ/SEKDA/I/2023	115.000.000,00	Tambak Udang di Gadingsari, Sanden	YB Pratomo	01/02/2023	s/d	31/01/2027	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Bangunan Kantor Pem
7	Sewa Tanah	918.000.000,00	14/PERJ/GUB/XI/2024	191.250.000,00	Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Suprihanto, B.Sc	01/04/2024	s/d	31/03/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah kantor
8	Sewa Tanah	487.755.000,00	6/PERJ/GUB/IV/2023	233.400.000,00	Dlaban, Sentolo, Kulonprogo	PT. Selo Adi Karto	01/04/2023	s/d	31/03/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Base camp
9	Sewa Tanah	3.266.000,00	10/PERJ/GUB/VII/2024	188.125.000,00	Jalan DI. Panjaitan No 66 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yk	dr. Soedarman	03/09/2024	s/d	02/09/2028	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Negara
10	Sewa Tanah	45.000.000,00	5/PERJ/SEKDA/III/2024	7.050.000,00	Jl. Perwakilan, Wates	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2024	s/d	20/02/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** tanah kantor
11	Sewa Tanah	10.770.000.000,00	3/PERJ/GUB/III/2024	320.000.000,00	Hargobinangun, Pakem, Sleman	PT. Anindya Mitra Internasional	27/03/2024	s/d	26/03/2028	Tanah Bangunan Wisata

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
12	Sewa Tanah	52.020.000,00	17/PERJ/SEKDA/VII/2024	25.600.000,00	Komplek Griya Permata Hijau Nomor D.1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	CV. Plainthing Group	08/04/2024	s/d	07/04/2024	Tanah Perumahan Rumah DInas
13	Sewa Tanah	619.400.000,00	68/PERJ/SEKDA/XII/2023	67.704.000,00	Eks Diklat Perindustrian, Malangan Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	23/10/2023	s/d	22/10/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Sekolah
14	Sewa Tanah	2.316.100.000,00								
15	Sewa Tanah	111.200.000,00	27/PERJ/SEKDA/X/2021	24.000.000,00	Jangkang, Widodomartani, Ngemplak Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	01/09/2021	s/d	31/08/2026	Tanah Kantor Kejuron
16	Sewa Tanah	150.000.000,00	012/05919/PBD	3.264.000,00	Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta	Umi Hartini	01/10/2024	s/d	30/09/2025	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
17	Sewa Tanah	2.450.000,00	57/PERJ/SEKDA/XI/2023	19.500.000,00	Komplek Colombo Nomor 56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala Darma Saputra	31/01/2023	s/d	30/07/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Perumahan
18	Sewa Tanah	1.115.200.000,00	12/PERJ/SEKDA/II/2023	72.000.000,00	Mrican Baru,Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	01/01/2023	s/d	31/12/2024	Disewakan/Dipinjamkan **
19	Sewa Tanah	2.107.500.000,00	1/PERJ/SEKDA/I/2023	45.200.000,00	Jalan Wisata Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	20/11/2021	s/d	19/11/2026	Disewakan/Dipinjamkan ** Tanah Sekolah
20	Sewa Tanah	51.500.000,00	23/PERJ/SEKDA/X/2024	12.500.000,00	Patehan Tengah No 25 Kraton, Yogyakarta	Tien Setiantoro	01/09/2024	s/d	31/08/2024	Disewakan/Dipinjamkan **
			60/PERJ/SEKDA/XI/2023	6.300.000,00		Aris Purnomo	01/09/2023	s/d	31/08/2025	
			61/PERJ/SEKDA/XI/2023	12.600.000,00		Sumartiningsih	01/09/2023	s/d	31/08/2025	
			62/PERJ/SEKDA/XI/2023	8.190.000,00		Roos Ani	01/09/2023	s/d	31/08/2025	
			22/PERJ/SEKDA/X/2024	3.310.000,00		Hermawan	01/09/2024	s/d	31/08/2024	
21	Sewa Tanah	2.100.000.000,00	10/PERJ/SEKDA/III/2020	20.000.000,00	Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Gapoktan Tirto Manunggal	01/08/2019	s/d	31/07/2024	Disewakan/Dipinjamkan **

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
22	Sewa Tanah	1.517.952.000,00	7/PERJ/GUB/VIII/2021	126.000.000,00	Jalan D.I. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center	01/04/2021	s/d	31/03/2026	Disewakan/Dipinjamkan **
23	Sewa Tanah	6.774.000.000,00	9/PERJ/SEKDA/IV/2024	39.500.000,00	Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Depri Priatna	01/10/2023	s/d	30/09/2027	Disewakan/Dipinjamkan **
			25/PERJ/SEKDA/XI/2024	5.000.000,00		Uep Sumiarsah	01/10/2024	s/d	30/09/2024	Disewakan/Dipinjamkan **
			24/PERJ/SEKDA/XI/2024	4.000.000,00		Juju	01/10/2024	s/d	30/09/2024	Disewakan/Dipinjamkan **
			8/PERJ/SEKDA/I/2023	22.500.000,00		Zuljasrifon	01/10/2021	s/d	30/09/2026	Disewakan/Dipinjamkan **
24	Sewa Tanah	15.000.000,00	2/PERJ/SEKDA/I/2024	24.400.000,00	Eks PPK Kulonprogo, Jalan Wates - Purworejo Km.10 Seworan,Triharjo, Wates, Kulon Progo	Koperasi Angkasa Pura I Avia	15/12/2023	s/d	14/12/2024	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
25	Sewa Tanah	662.100.400,00	900.1.13.1/42	9.721.500,00	Bleberan, Playen, Gunungkidul	BUMK Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul	02/01/2024	s/d	31/12/2024	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	**2.673.722.885,00**								
1	Sewa Gedung dan Bangunan	597.790.000,00	137/KEP/2024	18.150.000,00	Jalan Kusumanegara Nomor 168E Yogyakarta	Lembaga Pengembangan dan	01/02/2024	s/d	31/01/2025	Disewakan ** Gedung Perumahan
2	Sewa Gedung dan Bangunan	102.535.755,00	8/PERJ/GUB/VIII/2023	990.000.000,00	Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan Jl. Malioboro No 14 Yogyakarta	BPD DIY	01/07/2023	s/d	30/06/2027	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY
3	Sewa Gedung dan Bangunan	15.892.000,00	2/PERJ/SEKDA/I/2024	24.400.000,00	Eks PPK Kulonprogo Jalan Wates - Purworejo Km.10 Seworan,Triharjo, Wates, Kulon Progo	Koperasi Angkasa Pura I Avia	15/12/2023	s/d	14/12/2024	-
4	Sewa Gedung dan Bangunan	29.982.000,00	7/PERJ/GUB/VIII/2021	126.000.000,00	Jalan D.I. Panjaitan No. 70 Mantrijeron,	Early Childhood Care and Development Resource Center	01/04/2021	s/d	31/03/2026	Disewakan ** Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
					Suryodiningratan, Yogyakarta					
5	Sewa Gedung dan Bangunan	56.965.800,00								Disewakan ** Gudang, Kepsek, Belajar& Adm
6	Sewa Gedung dan Bangunan	33.979.600,00								Disewakan ** Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan
7	Sewa Gedung dan Bangunan	54.967.000,00								Disewakan ** Kamar mandi, Office, TK Kecil
8	Sewa Gedung dan Bangunan	85.948.400,00								Disewakan ** Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik
9	Sewa Gedung dan Bangunan	27.542.400,00								Disewakan ** Ruang Perpustakaan
10	Sewa Gedung dan Bangunan	35.978.400,00								Disewakan ** Ruang Tunggu
11	Sewa Gedung dan Bangunan	18.988.600,00								Disewakan ** Ruang UKS, Bayi, Balok
12	Sewa Gedung dan Bangunan	63.961.600,00								Disewakan ** TK Kecil Ruang Kelas
13	Sewa Gedung dan Bangunan	202.390.876,00	16/PERJ/SEKDA/VII/2024	6.300.000,00	Glugo, Panggungharjo, Sewon	Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif	01/11/2023	s/d	31/10/2024	Disewakan ** Rumah Dinas V
14	Sewa Gedung dan Bangunan	19.500.000,00	20/PERJ/SEKDA/VI/2021	12.000.000,00	Jalan Sriti Nomor 20 G Caturtunggal,Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2021	s/d	31/05/2024	Disewakan ** Eks Rumah Negara Gol II Tipe C
15	Sewa Gedung dan Bangunan	158.875.200,00	67/PERJ/SEKDA/XII/2023	11.500.000,00	Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	01/12/2023	s/d	30/11/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Rumah Dinas
16	Sewa Gedung dan Bangunan	175.733.000,00	14/PERJ/GUB/XI/2024	191.250.000,00	Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Suprihanto, B.Sc	01/04/2024	s/d	31/03/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung sekolah AM Sangaji
17	Sewa Gedung dan Bangunan	840.913.920,00	68/PERJ/SEKDA/XII/2023	67.704.000,00	Eks Diklat Perindustrian, Malangan Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	23/10/2023	s/d	22/10/2024	Disewakan/Dipinjamkan ** Gedung Kantor
18	Sewa Gedung dan Bangunan	112.338.334,00	17/PERJ/SEKDA/VII/2024	25.600.000,00	Komplek Griya Permata Hijau Nomor	CV. Plainthing Group	08/04/2024	s/d	07/04/2024	Eks Parsenibud

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
					D.1 Purwomartani, Kalasan, Sleman					
19	Sewa Gedung dan Bangunan	39.440.000,00	982/05182	3.800.000,00	Samsat Kota	Bpk. Wahyono Suryo	02/01/2024	s/d	31/12/2024	Disewakan untuk usaha Foto copy dan kantin
			982/05183	3.800.000,00		Ibu. Sukinem	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			982/05184	3.800.000,00		Bpk.Iwan Dharta	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			982/05186	5.500.000,00		Ibu. Sutinah	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			982/05187	5.500.000,00		G.Suyatmi	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			982/05185	4.830.000,00		Bpk. Anton Widosantoso	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			982/05189	2.500.000,00		Ibu. M. Suyatmi	02/01/2024	s/d	31/12/2024	
			934/6558	60.000.000,00		Suroso, S.E. (BPD DIY Cabang Wates)	01/08/2024	s/d	31/07/2024	
			934/6558	15.000.000,00		Suroso, S.E. (BPD DIY Cabang Wates)	01/08/2024	s/d	31/07/2024	
			934/873	3.000.000,00		Sri Susilo, S.H. (PT. BRI Cabang Wates)	01/08/2024	s/d	31/07/2024	
			943/003	8.895.000,00		T. Budi Purwanto (PT. Global Teknologi Nusantara)	01/01/2024	s/d	31/12/2024	
	TOTAL	**39.947.241.285,00**								

B. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp7.709.270.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.709.270.000,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset, berupa Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 135
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga BPKA -Kerjasama Pemanfaatan

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	NOMOR PERJANJIAN	HARGA SEWA (Rp)	LOKASI	PENYEWA	PERIODE			KETERANGAN
	PERALATAN MESIN									
1	Kerjasama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	7.709.270.000,00	12/PERJ/GUB/IX/2024	7.650.000.000,00	Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta	PT. Setia Mataram Tritunggal	13/09/2024	s/d	12/09/2024	Mall Malioboro dan Hotel IBIS Malioboro
	TOTAL	**7.709.270.000,00**								

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.551.011.285,00 mengalami penurunan sebesar Rp144.776.159.532,00 dibandingkan saldo per 31 Desmber 2023 sebesar Rp196.327.170.817,00 karena adanya reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp4.886.048.657,00, ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.722.854.275,00 dan ke Properti Investasi sebesar Rp135.167.256.600,00

Adapun reklasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Tanah dan Gedung Bangunan, dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 136
Rincian Reklasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Nilai (Rp)
Reklasifikasi ke Tanah	
DPU	1.279.500.000,00
DISHUB	2.081.400.000,00
BPKA	1.525.148.657,00
Jumlah	**4.886.048.657,00**
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	
BAHUBDA	2.911.574.538,00
DPU	968.983.752,00
DISHUB	36.500.000,00
DIKPORA	532.733.106,00
BPKA	273.062.879,00
Jumlah	**4.722.854.275,00**
Reklasifikasi ke Properti Investasi	
BPKA	135.167.256.600,00
TOTAL	**144.776.159.532,00**

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud Rp86.600.451.350,00 Rp96.552.529.303,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud adalah goodwill, lisensi dan franchise, hak cipta, hak paten, software, kajian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan, dan Aset Tidak Berwujud lainnya.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.600.451.350,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 137
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	4.307.858.400,00
2	Hak Cipta	916.849.000,00
3	Software	2.093.078.097,00
4	Kajian	12.310.699.050,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	62.933.282.803,00
6	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	4.038.684.000,00
	Jumlah	**86.600.451.350,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 138
Aset Tidak Berwujud pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.791.329.007,00	6.894.734.357,00
2	Dinas Kesehatan	2.095.937.985,00	2.875.536.755,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	10.949.488.135,00	17.448.429.735,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.993.066.000,00	7.844.423.600,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	145.315.000,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	38.950.000,00	38.950.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	394.500.000,00	394.500.000,00
8	Dinas Sosial	188.849.150,00	225.815.150,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	509.223.200,00	570.753.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	587.612.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.156.869.250,00	3.996.135.250,00
12	Dinas Perhubungan	2.170.092.308,00	2.170.092.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.465.757.500,00	6.901.650.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	249.500.000,00	693.994.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.471.469.540,00	2.471.469.540,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	11.764.818.425,00	12.872.189.925,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.250.673.500,00	4.438.256.962,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	393.153.500,00	446.186.500,00
19	Dinas Pariwisata	-	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	407.993.500,00	341.993.500,00
22	Sekretariat Daerah	2.901.466.305,00	2.904.716.305,00
23	Sekretariat DPRD	917.246.745,00	1.120.433.245,00
24	Inspektorat	674.637.300,00	721.266.200,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.803.373.825,00	9.339.114.325,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6.941.667.895,00	6.613.739.116,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	645.766.500,00	671.466.500,00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	485.368.250,00	521.218.250,00
	Jumlah	**86.600.451.350,00**	**96.552.529.303,00**

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 139
Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD

No	SKPD	Lisensi dan Franchise (Rp)	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	35.000.000,00	-	388.906.127,00	-	5.367.422.880,00	-	5.791.329.007,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	208.598.500,00	-	1.887.339.485,00	-	2.095.937.985,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	-	-	-	1.522.317.500,00	9.427.170.635,00	-	10.949.488.135,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.272.858.400,00	-	-	6.558.117.600,00	162.090.000,00	-	10.993.066.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	145.315.000,00	-	145.315.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	38.950.000,00	-	38.950.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	20.000.000,00	-	374.500.000,00	-	394.500.000,00
8	Dinas Sosial	-	-	89.649.150,00	-	99.200.000,00	-	188.849.150,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	287.623.200,00	-	221.600.000,00	-	509.223.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	-		387.893.750,00	199.719.000,00	-	587.612.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-		2.199.118.000,00	957.751.250,00	-	3.156.869.250,00
12	Dinas Perhubungan	-	-	16.650.000,00	-	2.153.442.308,00	-	2.170.092.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-		-	7.465.757.500,00	-	7.465.757.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	71.500.000,00	-	178.000.000,00	-	249.500.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	2.471.469.540,00	-	2.471.469.540,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	-	5.000.000,00	-	-	10.280.504.425,00	1.479.314.000,00	11.764.818.425,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	780.000.000,00	-	-	911.303.500,00	2.559.370.000,00	4.250.673.500,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	393.153.500,00	-	393.153.500,00
19	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	1.206.325.780,00	-	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	407.993.500,00	-	407.993.500,00
22	Sekretariat Daerah	-	131.849.000,00	543.526.375,00	-	2.226.090.930,00	-	2.901.466.305,00

No	SKPD	Lisensi dan Franchise (Rp)	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Jumlah
23	Sekretariat DPRD	-	-	209.218.745,00	519.036.200,00	188.991.800,00	-	917.246.745,00
24	Inspektorat	-	-	-	-	674.637.300,00	-	674.637.300,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	8.803.373.825,00	-	8.803.373.825,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	-	257.406.000,00	1.124.216.000,00	5.560.045.895,00	-	6.941.667.895,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	-	-		-	645.766.500,00	-	645.766.500,00
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-		-	485.368.250,00	-	485.368.250,00
	Jumlah	**4.307.858.400,00**	**916.849.000,00**	**2.093.078.097,00**	**12.310.699.050,00**	**62.933.282.803,00**	**4.038.684.000,00**	**86.600.451.350,00**

Mutasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 140
Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

Saldo awal per 31 Desember 2023	**96.552.529.303,00**
Penambahan:	
Belanja Modal	4.861.483.400,00
Reklas dari Beban Barjas	882.921.600,00
Reklas dari PM	30.700.000,00
Koreksi kode aset (Inventarisasi)	1.522.317.500,00
	7.297.422.500,00
Pengurangan:	
Reklas ke ALL -Usulan penghapusan	16.680.386.013,00
Reklas ke PM	451.875.000,00
Reklas ke Gedung Bangunan	117.239.440,00
	17.249.500.453,00
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**86.600.451.350,00**

Penjelasan :

- Reklas dari beban barjas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp882.921.600,00 terdapat pada :

Tabel 5. 141
Rincian Reklas dari Beban Barjas ke Aset Tidak Berwujud

SKPD	NILAI (Rp)
INSPEKTORAT	89.421.600,00
DPAD	780.000.000,00
DLHK	13.500.000,00
Jumlah	**882.921.600,00**

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain **Rp991.224.697.506,18** **Rp192.108.500.384,95**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dengan rincian pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 5. 142
Rincian Nilai Aset Lain-lain pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.823.425.491,41	10.745.291.443,45
2	Dinas Kesehatan	8.970.807.941,00	820.187.883,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	929.057.628.427,00	146.590.410.312,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	111.007.200,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.000,00	139.365.829,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	362.850.210,00	362.850.210,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.590.987.081,00	10.000.000,00
8	Dinas Sosial	1.152.505.975,00	813.734.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	837.343.358,00	1.615.635.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.797.000,00	2.797.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.814.840.370,58	650.459.925,00

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
12	Dinas Perhubungan	3.601.476.121,00	16.123.387.650,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.031.012.475,00	5.043.447.249,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	810.967.601,28	123.107.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	221.236.799,58	-
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	702.886.279,00	554.926.010,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.946.673.133,50	3.529.928.603,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.696.652.635,83	838.150.485,50
19	Dinas Pariwisata	302.451.806,00	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.056.504.575,00	869.730.060,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	371.687.500,00	764.246.000,00
22	Sekretariat Daerah	937.617.307,00	1.395.328.600,00
23	Badan Penghubung Daerah	257.657.134,00	-
24	Sekretariat DPRD	1.286.566.933,00	77.425.000,00
25	Inspektorat	138.132.500,00	-
26	Paniradya Kaistimewan	210.868.270,00	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	862.047.500,00	586.196.525,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.231.753.806,00	244.687.400,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	526.398.676,00	103.950.000,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	304.153.400,00	103.257.500,00
	Jumlah	**991.224.697.506,18**	**192.108.500.384,95**

Rincian nilai buku Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut

Tabel 5. 143
Rincian Nilai Buku Aset Lain-Lain pada SKPD

No	SKPD	ASET LAIN-LAIN (Rp)	AKUM PENYUSUTAN ALL (RUSAK + TDK DIGUNAKAN) (Rp)	NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.823.425.491,41	(12.121.769.250,41)	3.701.656.241,00
2	Dinas Kesehatan	8.970.807.941,00	(3.404.191.537,83)	5.566.616.403,17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	929.057.628.427,00	(106.176.282.119,96)	822.881.346.307,04
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	111.007.200,00	(111.007.200,00)	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.000,00	-	3.760.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	362.850.210,00	(204.608.952,00)	158.241.258,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.590.987.081,00	(1.561.976.904,80)	29.010.176,20
8	Dinas Sosial	1.152.505.975,00	(841.698.067,46)	310.807.907,54
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	837.343.358,00	(774.784.786,49)	62.558.571,51
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.797.000,00	(1.818.050,00)	978.950,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.814.840.370,58	(2.182.926.770,05)	2.631.913.600,53

No	SKPD	ASET LAIN-LAIN (Rp)	AKUM PENYUSUTAN ALL (RUSAK + TDK DIGUNAKAN) (Rp)	NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN (Rp)
12	Dinas Perhubungan	3.601.476.121,00	(2.729.956.263,38)	871.519.857,62
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.031.012.475,00	(6.705.123.980,06)	1.325.888.494,94
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	810.967.601,28	(369.815.935,28)	441.151.666,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	221.236.799,58	(221.236.799,58)	-
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	702.886.279,00	(528.970.511,60)	173.915.767,40
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.946.673.133,50	(418.330.160,00)	4.528.342.973,50
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.696.652.635,83	(1.119.904.384,66)	576.748.251,17
19	Dinas Pariwisata	302.451.806,00	(96.655.501,00)	205.796.305,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.056.504.575,00	(1.549.331.342,20)	507.173.232,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	371.687.500,00	(301.887.500,00)	69.800.000,00
22	Sekretariat Daerah	937.617.307,00	(469.231.164,95)	468.386.142,05
23	Badan Penghubung Daerah	257.657.134,00	(257.657.134,00)	-
24	Sekretariat DPRD	1.286.566.933,00	(1.079.504.433,00)	207.062.500,00
25	Inspektorat	138.132.500,00	-	138.132.500,00
26	Paniradya Kaistimewan	210.868.270,00	(174.793.110,00)	36.075.160,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	862.047.500,00	(308.217.000,00)	553.830.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.231.753.806,00	(334.604.718,24)	897.149.087,76
29	Badan Kepegawaian Daerah	526.398.676,00	(384.678.776,00)	141.719.900,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	304.153.400,00	(161.045.900,00)	143.107.500,00
	Jumlah	**991.224.697.506,18**	**(144.592.008.252,95)**	**846.632.689.253,23**

5.3.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya — Rp153.639.527.223,33 — Rp172.150.440.105,91

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp153.639.527.223,33 merupakan pengakuan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain yang rusak dan tidak digunakan sebesar Rp144.592.008.252,95, akumulasi penyusutan dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp1.830.791.827,48, serta akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp7.216.727.142,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 144
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada SKPD

No	SKPD	Aset Lain-Lain		Sewa		Kerjasama Pemanfaatan		Total Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp)
		Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.823.425.491,41	(12.121.769.250,41)	-	-	-	-	(12.121.769.250,41)
2	Dinas Kesehatan	8.970.807.941,00	(3.404.191.537,83)	-	-	-	-	(3.404.191.537,83)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	929.057.628.427,00	(106.176.282.119,96)	-	-	-	-	(106.176.282.119,96)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	111.007.200,00	(111.007.200,00)	-	-	-	-	(111.007.200,00)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	362.850.210	(204.608.952,00)	-	-	-	-	(204.608.952,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.590.987.081,00	(1.561.976.904,80)	-	-	-	-	(1.561.976.904,80)
8	Dinas Sosial	1.152.505.975,00	(841.698.067,46)	-	-	-	-	(841.698.067,46)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	837.343.358,00	(774.784.786,49)	3.000.000,00	-	-	-	(774.784.786,49)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.797.000,00	(1.818.050,00)	-	-	-	-	(1.818.050,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.814.840.370,58	(2.182.926.770,05)	-	-	-	-	(2.182.926.770,05)
12	Dinas Perhubungan	3.601.476.121,00	(2.729.956.263,38)	-	-	-	-	(2.729.956.263,38)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.031.012.475,00	(6.705.123.980,06)	-	-	-	-	(6.705.123.980,06)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	810.967.601,28	(369.815.935,28)	-	-	-	-	(369.815.935,28)

No	SKPD	Aset Lain-Lain		Sewa		Kerjasama Pemanfaatan		Total Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp)
		Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	221.236.799,58	(221.236.799,58)	-	-	-	-	(221.236.799,58)
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	702.886.279,00	(528.970.511,60)	-	-	-	-	(528.970.511,60)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.946.673.133,50	(418.330.160,00)	-	-	-	-	(418.330.160,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.696.652.635,83	(1.119.904.384,66)	-	-	-	-	(1.119.904.384,66)
19	Dinas Pariwisata	302.451.806,00	(96.655.501,00)	-	-	-	-	(96.655.501,00)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.056.504.575,00	(1.549.331.342,20)	4.581.500.000,00	-	-	-	(1.549.331.342,20)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	371.687.500,00	(301.887.500,00)	-	-	-	-	(301.887.500,00)
22	Sekretariat Daerah	937.617.307,00	(469.231.164,95)	-	-	-	-	(469.231.164,95)
23	Badan Penghubung Daerah	257.657.134,00	(257.657.134,00)	-	-	-	-	(257.657.134,00)
24	Sekretariat DPRD	1.286.566.933,00	(1.079.504.433,00)	-	-	-	-	(1.079.504.433,00)
25	Inspektorat	138.132.500,00	-	-	-	-	-	-
26	Paniradya Kaistimewan	210.868.270,00	(174.793.110,00)	-	-	-	-	(174.793.110,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	862.047.500,00	(308.217.000,00)	-	-	-	-	(308.217.000,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.231.753.806,00	(334.604.718,24)	114.785.168.885,00	(1.830.791.827,48)	67.038.599.000,00	(7.216.727.142,90)	(9.382.123.688,62)
29	Badan Kepegawaian Daerah	526.398.676,00	(384.678.776,00)	-	-	-	-	(384.678.776,00)
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	304.153.400,00	(161.045.900,00)	-	-	-	-	(161.045.900,00)
	Jumlah	**991.224.697.506,18**	**(144.592.008.252,95)**	**119.369.668.885,00**	**(1.830.791.827,48)**	**67.038.599.000,00**	**(7.216.727.142,90)**	**(153.639.527.223,33)**

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 145
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo awal per 31 Desember 2023	**172.150.440.105,91**
Penambahan:	
Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 (LO)	4.268.794.749,49
Usul Penghapusan - Akumulasi Penyusutan	60.634.641.528,77
Penyesuaian saldo awal	4.000.000,20
	64.907.436.278,46
Pengurangan:	
Penghapusan	46.822.145.383,69
Gabung Aset	1.307.911.360,89
Koreksi Kode Barang	16.569.515,69
Reklas ke Peralatan Mesin	24.000.000,00
Reklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	315.295.376,64
Reklas ke Gedung dan Bangunan	739.247.732,76
Akumulasi Kemitraan dengan pihak ketiga	163.523.822,27
Reklas ke Properti Investasi	34.029.655.969,10
	83.418.349.161,04
Saldo akhir per 31 Desember 2024	**153.639.527.223,33**

5.3.1.5.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp20.224.325.926,94 Rp0,00

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.224.325.926,94 merupakan reklasifikasi dari akun Kas Lainnya, yang terdiri dari Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp812.519.029,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.546.142.211,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.865.664.686,18. Uang Jaminan tersebut terdapat di beberapa bank yaitu BPD DIY Cabang Utama, BNI Trikora, BRI Cik Ditiro, BPD Wates dan Bank Pasar.

Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 5. 146
Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Jaminan)

URAIAN	DEPOSITO (Rp)	TABUNGAN (Rp)	NILAI (Rp)
JAMINAN KESUNGGUHAN			
BPD DIY Cabang Utama	651.461.300,00	94.552.694,00	746.013.994,00
BNI Trikora	66.505.035,00	-	66.505.035,00
JUMLAH	**717.966.335,00**	**94.552.694,00**	**812.519.029,00**
JAMINAN REKLAMASI			
Bank Pasar	539.600.000,00	474.780.829,00	1.014.380.829,00
BRI Cik Ditiro	4.397.212.193,76	-	4.397.212.193,76
BNI Trikora	5.134.549.189,00	-	5.134.549.189,00
JUMLAH	**10.071.361.382,76**	**474.780.829,00**	**10.546.142.211,76**
JAMINAN PASCA TAMBANG			
Bank Pasar	573.805.675,00	-	573.805.675,00
BNI Trikora	4.983.039.041,00	-	4.983.039.041,00
BRI Cik Ditiro	3.255.144.056,18	-	3.255.144.056,18
BPD Wates	40.100.000,00	13.575.914,00	53.675.914,00
JUMLAH	**8.852.088.772,18**	**13.575.914,00**	**8.865.664.686,18**
TOTAL	**19.641.416.489,94**	**582.909.437,00**	**20.224.325.926,94**

5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility Rp171.809.000,00 Rp26.968.273.000,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp171.809.000,00 merupakan dana DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF yang dibatasi penggunaannya. Pencatatan ini berdasarkan pada Surat Edaran Nomor. 900.1.14.1/7481/Keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Rekening T*reasury Deposit Facility* (TDF).

Rincian dari Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 147
Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No.	Rincian Alokasi DBH	Penyaluran KB (Rp)	Penyelesaian LB diperhitungkan dalam Penyaluran KB (Rp)	Penyaluran KB - LB (Rp)
1	DBH PPh Pasal 21	464.115.000,00	464.115.000,00	-
2	DBH PPh Pasal 25/29	455.713.000,00	312.599.000,00	143.114.000,00
3	DBH PBB	21.532.000,00	-	21.532.000,00
4	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi	3.000,00	-	3.000,00
5	DBH Pertambangan Umum-Iuran Tetap	7.063.000,00	-	7.063.000,00
6	DBH Pertambangan Panas Bumi-Iuran Tetap	96.000,00	-	96.000,00
7	DBH Kehutanan - PSDH	1.000,00	-	1.000,00
	Jumlah	**948.523.000,00**	**776.714.000,00**	**171.809.000,00**

5.3.1.6 Properti Investasi Rp136.193.984.070,90 Rp0,00

Sesuai PSAP No. 17 dijelaskan bahwa Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Akun Properti Investasi baru disajikan pada tahun 2024. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.193.984.070,90 meliputi Properti Investasi Tanah yang terdiri dari 6 (enam) bidang Tanah senilai Rp58.988.583.440,00, Properti Investasi Bangunan Gedung yang terdiri dari 4 (empat) unit Bangunan Gedung senilai Rp111.235.056.600,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung senilai Rp34.029.655.969,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148
Rincian Properti Investasi

NO	JENIS PROPERTI INVESTASI		NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah	Tanah Lapangan Parkir	332.000.000,00	Kerjasama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Tanah Lapangan Parkir	3.115.200.000,00	Kerjasama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	70.800.000,00	Kerjasama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Kawasan JEC Barat	20.414.200.000,00	Sewa (Kemitraan)
		Jalan tengah JEC	9.338.999.440,00	Sewa (Aset Tetap)
		Kawasan JEC Timur	25.717.384.000,00	Sewa (Aset Tetap)
			58.988.583.440,00	
2	Bangunan Gedung	Bangunan Malioboro Mall	23.191.729.000,00	Kerjasama Pemanfaatan (Kemitraan)

NO	JENIS PROPERTI INVESTASI		NILAI (Rp)	KETERANGAN
		Bangunan Malyabhara Hotel	32.619.600.000,00	Kerjasama Pemanfaatan (Kemitraan)
		Bangunan gedung disewa PT. AMI	1.033.385.000,00	Sewa (Kemitraan)
		Gedung JEC	54.390.342.600,00	Sewa
			111.235.056.600,00	
	Jumlah		**170.223.640.040,00**	
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung		(34.029.655.969,10)	
	Total		**136.193.984.070,90**	

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah **Rp58.988.583.440,00** **Rp0,00**

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.988.583.440,00 merupakan reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga berupa Sewa Tanah sebesar Rp20.414.200.000,00, reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga berupa Kerjasama Pemanfaatan Tanah sebesar Rp3.518.000.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah (Jalan Tengah JEC dan Kawasan JEC Timur) sebesar Rp35.056.383.440,00.

5.3.1.6.2 Properti Investasi Bangunan Gedung **Rp111.235.056.600,00** **Rp0,00**

Saldo Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.235.056.600,00 merupakan reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga berupa Sewa Bangunan Gedung sebesar Rp55.423.727.600,00, dan Kemitraan Pihak Ketiga berupa Kerjasama Pemanfaatan Bangunan Gedung sebesar Rp 55.811.329.000,00.

5.3.1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi **Rp34.029.655.969,10** **Rp0,00**

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.029.655.969,10 merupakan pengakuan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung.

5.3.2 Kewajiban **Rp70.785.503.907,15** **Rp34.717.835.503,82**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.785.503.907,15 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp70.785.503.907,15** **Rp34.717.835.503,82**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.785.503.907,15 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp20.224.325.926,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.339.391.944,88, dan Utang Belanja sebesar Rp46.221.786.035,33 dengan rincian sebagai berikut

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak KeTiga (PFK) **Rp20.224.325.926,94** **Rp20.621.117.205,94**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.224.325.926,94 merupakan Utang Jaminan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, terdiri dari Jaminan

Kesungguhan sebesar Rp812.519.029,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.546.142.211,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp8.865.664.686,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp396.791.279,00 dibandingkan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023, karena adanya pencairan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp610.905.267,00, pencairan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp17.387.787,00, pencairan Jaminan Reklamasi sebesar Rp671.489.062,00 dan kenaikan uang jaminan yang terkait dengan ijin pertambangan sebesar Rp902.990.837,00.

Kenaikan uang jaminan yang terkait dengan ijin pertambangan sebesar Rp902.990.837,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 149
Rincian Kenaikan Uang Jaminan

No	Jenis Jaminan	Pembukaan Rekening Baru (Rp)	Bunga dan Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	JAMPAS	303.100.000,00	200.374.639,00	503.474.639,00
2	JAMREK	90.700.000,00	276.852.584,00	367.552.584,00
3	JAMSUNG	25.000.000,00	6.963.614,00	31.963.614,00
		418.800.000,00	**484.190.837,00**	**902.990.837,00**

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp4.339.391.944,88 Rp8.581.334.505,84

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.339.391.944,88 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2024 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.

Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 150
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	177.555.962,80	465.620.089,22
2	Dinas Pariwisata	478.091.318,00	704.645.604,00
3	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	64.256.386,86	139.520.547,95
4	Dinas Kesehatan	22.721.311,48	22.735.694,82
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.596.516.965,74	7.248.812.569,85
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000,00	-
	Jumlah	**4.339.391.944,88**	**8.581.334.505,84**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.339.391.944,88 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah sebesar Rp219.138.620,04 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp4.120.253.324,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 151
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka untuk Retribusi Daerah dan LLPAD yang Sah

SKPD	PDD RETRIBUSI (Rp)	PDD LLPAD yang Sah (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Perhubungan	77.555.962,80	100.000.000,00	177.555.962,80
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	54.354.958,90	3.542.162.006,84	3.596.516.965,74
Dinas Kesehatan	22.721.311,48	-	22.721.311,48
Dinas Pariwisata	-	478.091.318,00	478.091.318,00
Sekretariat Daerah (Biro Umum)	64.256.386,86	-	64.256.386,86
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	250.000,00	-	250.000,00
Jumlah	**219.138.620,04**	**4.120.253.324,84**	**4.339.391.944,88**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan (Balai Parkir) merupakan penerimaan pembayaran Sewa Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah) sebesar Rp100.000.000,00, Sewa Kios Terminal Wates Kulon Progo sebesar Rp76.442.991,77, Sewa Koperasi sebesar Rp565.573,77 dan Sewa Kantin sebesar Rp547.397,26 (Pendapatan Retribusi Daerah), dengan total sebesar Rp177.555.962,80 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum menjadi hak Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 152
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
Sewa Koperasi Dinas Perhubungan			
09-09-2024 s.d 09-09-2025	3.000.000,00	01-01-2025 s.d 09-09-2025	565.573,77
Sewa Kantin Dinas Perhubungan			
22-04-2024 s.d 21-04-2025	1.800.000,00	01-01-2025 s.d 21-04-2025	547.397,26
Sewa Kios Terminal Wates			
01-12-2024 s.d 30-11-2025	56.500.000,00	01-01-2025 s.d 30-11-2025	76.442.991,77
Sewa Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali			
01-01-2025 s.d 31-03-2025	100.000.000,00	01-01-2025 s.d 31-03-2025	100.000.000,00
Jumlah	**161.300.000,00**		**177.555.962,80**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp478.091.318,00 merupakan penerimaan sewa dari PT TWC (Pendapatan Retribusi Daerah) namun sampai dengan per 31 Desember 2024 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 153
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
20-02-2022 s.d 19-02-2025	180.000.000,00	01-01-2025 s.d 19 -02-2025	8.076.923,00
08-10-2022 s.d 07-10-2025	180.000.000,00	01-01-2025 s.d 07-10-2025	45.989.011,00
01-01-2024 s.d 31-12-2028	530.250.000,00	01-01-2025 s.d 31-12-2028	424.025.384,00
Jumlah	**890.250.000,00**		**478.091.318,00**

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp64.256.386,86 merupakan Sewa basement untuk server/penguat sinyal (Pendapatan Retribusi Daerah), namun

sampai dengan per 31 Desember 2024 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 154
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Setda DIY

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
10-11-2022 s.d 09-11-2025	225.000.000,00	01-01-2025 s.d 09-11-2025	64.256.386,86
Jumlah	**225.000.000,00**		**64.256.386,86**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kesehatan (RS Grhasia) sebesar Rp22.721.311,48 merupakan penerimaan sewa Pemanfaatan Aset Gedung Layanan dan Penunjang (Pendapatan Retribusi Daerah), namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 155
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
24-10-2024 s.d 24-10-2025	28.000.000,00	01-01-2025 s.d 24-10-2025	22.721.311,48
Jumlah	**28.000.000,00**		**22.721.311,48**

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp250.000,00 merupakan penerimaan sewa kantin untuk masa sewa bulan Januari 2025 (Pendapatan Retribusi Daerah), dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa.

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp3.596.516.965,74 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah berupa Penyewaan Tanah dan Bangunan, dan Pemakaian Ruangan pada KPPD Bantul dan KPPD Kulon Progo (Pendapatan Retribusi Daerah) total sebesar Rp54.354.958,90 serta sewa BMD pada BPKA Induk (Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah) sebesar Rp3.542.162.006,84, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 156
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
BPKA INDUK								
1	Tanah dan Bangunan	PT Formula Land	01/09/2024	s/d	31/08/2025	124.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	82.553.424,66
2	Bangunan	BPD DIY	01/07/2022	s/d	30/06/2027	990.000.000,00	01/01/2025 s/d 30/06/2025	98.186.301,37
								198.000.000,00
			01/07/2022	s/d	30/06/2023	198.000.000,00		198.000.000,00
			01/07/2023	s/d	30/06/2024	198.000.000,00		
			01/07/2024	s/d	30/06/2025	198.000.000,00		
			01/07/2025	s/d	30/06/2026	198.000.000,00		
			01/07/2026	s/d	30/06/2027	198.000.000,00		
3	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2024	s/d	31/03/2026	249.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/03/2025	30.698.630,14
								124.500.000,00
			01/04/2024	s/d	31/03/2025	124.500.000,00		
			01/04/2025	s/d	31/03/2026	124.500.000,00		
4	Tanah dan Bangunan	Yayasan Yogyakarta	23/10/2024	s/d	22/10/2025	67.704.000,00	01/01/2025 s/d 22/10/2025	54.719.671,23
		Angga Binangun						
5	Tanah dan Bangunan	BUKP Gondokusuman	01/03/2024	s/d	28/02/2027	51.000.000,00	01/01/2025 s/d 28/02/2025	2.747.945,21
								17.000.000,00
			01/03/2024	s/d	28/02/2025	17.000.000,00		17.000.000,00
			01/03/2025	s/d	28/02/2026	17.000.000,00		
			01/03/2026	s/d	28/02/2027	17.000.000,00		
6	Tanah	Yayasan Perguruan	20/11/2021	s/d	19/11/2026	45.200.000,00	01/01/2025 s/d 19/11/2025	7.999.780,82
		Dharma Pala Sleman						9.040.000,00
			20/11/2021	s/d	19/11/2022	9.040.000,00		
			20/11/2022	s/d	19/11/2023	9.040.000,00		
			20/11/2023	s/d	19/11/2024	9.040.000,00		
			20/11/2024	s/d	19/11/2025	9.040.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			20/11/2025	s/d	19/11/2026	9.040.000,00		
7	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2024	s/d	27/03/2025	17.970.000,00	01/01/2025 s/d 27/03/2025	4.234.027,40
8	Tanah dan bangunan	Koperasi Angkasa Pura I Avia	15/12/2023	s/d	14/12/2025	51.200.000,00	01/01/2025 s/d 14/12/2025	24.407.671,23
			15/12/2023	s/d	14/12/2024	25.600.000,00		
			15/12/2024	s/d	14/12/2025	25.600.000,00		
9	Tanah	dr. Soedarman	03/09/2023	s/d	02/09/2028	188.125.000,00	01/01/2025 s/d 02/09/2025	25.255.136,99
								37.625.000,00
			03/09/2023	s/d	02/09/2024	37.625.000,00		37.625.000,00
			03/09/2024	s/d	02/09/2025	37.625.000,00		37.625.000,00
			03/09/2025	s/d	02/09/2026	37.625.000,00		
			03/09/2026	s/d	02/09/2027	37.625.000,00		
			03/09/2027	s/d	02/09/2028	37.625.000,00		
10	Tanah	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2024	s/d	20/02/2025	7.332.000,00	01/01/2025 s/d 20/02/2025	1.024.471,23
11	Tanah	Gapoktan Tirto Manunggal	01/08/2024	s/d	31/07/2029	25.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/07/2025	2.904.109,59
								5.000.000,00
			01/08/2024	s/d	31/07/2025	5.000.000,00		5.000.000,00
			01/08/2025	s/d	31/07/2026	5.000.000,00		5.000.000,00
			01/08/2026	s/d	31/07/2027	5.000.000,00		5.000.000,00
			01/08/2027	s/d	31/07/2028	5.000.000,00		
			01/08/2028	s/d	31/07/2029	5.000.000,00		
12	Tanah	PT. Surya Abhinaya Sentosa	01/01/2024	s/d	31/12/2028	1.770.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	354.000.000,00
								354.000.000,00
			01/01/2024	s/d	31/12/2024	354.000.000,00		354.000.000,00
			01/01/2025	s/d	31/12/2025	354.000.000,00		354.000.000,00
			01/01/2026	s/d	31/12/2026	354.000.000,00		
			01/01/2027	s/d	31/12/2027	354.000.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/01/2028	s/d	31/12/2028	354.000.000,00		
13	Tanah	Pemerintah Kalurahan	01/09/2021	s/d	31/08/2026	24.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	3.195.616,44
		Widodomartani						4.800.000,00
			01/09/2021	s/d	31/08/2022	4.800.000,00		
			01/09/2022	s/d	31/08/2023	4.800.000,00		
			01/09/2023	s/d	31/08/2024	4.800.000,00		
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	4.800.000,00		
			01/09/2025	s/d	31/08/2026	4.800.000,00		
14	Tanah	PT. Daya Armada Nusantara	25/03/2022	s/d	24/03/2027	143.500.000,00	01/01/2025 s/d 24/03/2025	6.526.301,37
								28.700.000,00
			25/03/2022	s/d	24/03/2023	28.700.000,00		28.700.000,00
			25/03/2023	s/d	24/03/2024	28.700.000,00		
			25/03/2024	s/d	24/03/2025	28.700.000,00		
			25/03/2025	s/d	24/03/2026	28.700.000,00		
			25/03/2026	s/d	24/03/2027	28.700.000,00		
15	Tanah dan Bangunan	Tien Setiantoro	01/09/2024	s/d	31/08/2025	14.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	9.320.547,95
		Aris Purnomo	01/09/2022	s/d	31/08/2025	6.300.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	1.398.082,19
			01/09/2022	s/d	31/08/2023	2.100.000,00		
			01/09/2023	s/d	31/08/2024	2.100.000,00		
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	2.100.000,00		
		Sumartiningsih	01/09/2022	s/d	31/08/2025	12.600.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	2.796.164,38
			01/09/2022	s/d	31/08/2023	4.200.000,00		
			01/09/2023	s/d	31/08/2024	4.200.000,00		
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	4.200.000,00		
		Roos Ani	01/09/2022	s/d	31/08/2025	8.190.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	1.817.506,85

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/09/2022	s/d	31/08/2023	2.730.000,00		
			01/09/2023	s/d	31/08/2024	2.730.000,00		
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	2.730.000,00		
		Hermawan	01/09/2024	s/d	31/08/2025	3.500.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	2.330.136,99
16	Sebagian Tanah	Romi Sukma	01/01/2025	s/d	31/12/2025	4.750.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	4.750.000,00
	dan Bangunan							
		PT. Avo Innovation Technology	01/05/2023	s/d	30/04/2025	32.300.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	5.309.589,04
			01/05/2023	s/d	30/04/2024	16.150.000,00		
			01/05/2024	s/d	30/04/2025	16.150.000,00		
17	Sebagian Tanah	Ir. Bambang Priambodo	01/01/2024	s/d	31/12/2025	80.200.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	40.100.000,00
	dan Bangunan							
			01/01/2024	s/d	31/12/2024	40.100.000,00		
			01/01/2025	s/d	31/12/2025	40.100.000,00		
18	Tanah	YB Pratomo	01/02/2022	s/d	31/01/2027	115.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	1.953.424,66
								23.000.000,00
			01/02/2022	s/d	31/01/2023	23.000.000,00		23.000.000,00
			01/02/2023	s/d	31/01/2024	23.000.000,00		
			01/02/2024	s/d	31/01/2025	23.000.000,00		
			01/02/2025	s/d	31/01/2026	23.000.000,00		
			01/02/2026	s/d	31/01/2027	23.000.000,00		
19	Tanah dan Bangunan	PT. Anindya Mitra Internasional	01/01/2025	s/d	31/12/2025	350.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	350.000.000,00
20	Tanah	Muhyudi Prabowo	01/01/2024	s/d	31/12/2028	8.250.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	1.650.000,00
								1.650.000,00
			01/01/2024	s/d	31/12/2024	1.650.000,00		1.650.000,00
			01/01/2025	s/d	31/12/2025	1.650.000,00		1.650.000,00
			01/01/2026	s/d	31/12/2026	1.650.000,00		
			01/01/2027	s/d	31/12/2027	1.650.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/01/2028	s/d	31/12/2028	1.650.000,00		
		Widodo Mulyo	01/10/2022	s/d	30/09/2025	4.800.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	1.196.712,33
			01/10/2022	s/d	30/09/2023	1.600.000,00		
			01/10/2023	s/d	30/09/2024	1.600.000,00		
			01/10/2024	s/d	30/09/2025	1.600.000,00		
21	Tanah	Early Childhood Care and	01/04/2021	s/d	30/09/2026	126.000.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	18.848.219,18
	dan Bangunan	Development Resource Center						25.200.000,00
		(ECCD-RC)	01/04/2021	s/d	30/09/2022	25.200.000,00		
			01/04/2022	s/d	30/09/2023	25.200.000,00		
			01/04/2023	s/d	30/09/2024	25.200.000,00		
			01/04/2024	s/d	30/09/2025	25.200.000,00		
			01/04/2025	s/d	30/09/2026	25.200.000,00		
22	Tanah	Depri Priatna	01/10/2022	s/d	30/09/2027	39.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	5.908.767,12
								7.900.000,00
			01/10/2022	s/d	30/09/2023	7.900.000,00		7.900.000,00
			01/10/2023	s/d	30/09/2024	7.900.000,00		
			01/10/2024	s/d	30/09/2025	7.900.000,00		
			01/10/2025	s/d	30/09/2026	7.900.000,00		
			01/10/2026	s/d	30/09/2027	7.900.000,00		
		Yani Suryani (Pengganti Uep Sumiarsah)	01/10/2024	s/d	30/09/2025	5.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	4.113.698,63
		Juju	01/10/2024	s/d	30/09/2025	4.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	3.365.753,42
		Zuljasrifon	01/10/2021	s/d	30/09/2026	22.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/09/2025	3.365.753,42
								4.500.000,00
			01/10/2021	s/d	30/09/2022	4.500.000,00		
			01/10/2022	s/d	30/09/2023	4.500.000,00		
			01/10/2023	s/d	30/09/2024	4.500.000,00		
			01/10/2024	s/d	30/09/2025	4.500.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/10/2025	s/d	30/09/2026	4.500.000,00		
23	Tanah	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	01/03/2022	s/d	28/02/2027	31.725.000,00	01/01/2025 s/d 28/02/2025	1.025.630,14
								6.345.000,00
			01/03/2022	s/d	28/02/2023	6.345.000,00		6.345.000,00
			01/03/2023	s/d	28/02/2024	6.345.000,00		
			01/03/2024	s/d	28/02/2025	6.345.000,00		
			01/03/2025	s/d	28/02/2026	6.345.000,00		
			01/03/2026	s/d	28/02/2027	6.345.000,00		
24	Tanah	PT. Anindya Mitra Internasional	27/03/2023	s/d	26/03/2028	320.000.000,00	01/01/2025 s/d 26/03/2025	14.904.109,59
								64.000.000,00
			27/03/2023	s/d	26/03/2024	64.000.000,00		64.000.000,00
			27/03/2024	s/d	26/03/2025	64.000.000,00		64.000.000,00
			27/03/2025	s/d	26/03/2026	64.000.000,00		
			27/03/2026	s/d	26/03/2027	64.000.000,00		
			27/03/2027	s/d	26/03/2028	64.000.000,00		
25	Tanah dan Bangunan	BUKP Kemantren Kotagede	01/04/2022	s/d	31/03/2025	30.300.000,00	01/01/2025 s/d 31/03/2025	2.490.410,96
			01/04/2022	s/d	31/03/2023	10.100.000,00		
			01/04/2023	s/d	31/03/2024	10.100.000,00		
			01/04/2024	s/d	31/03/2025	10.100.000,00		
26	Tanah dan Bangunan	Lembaga Advokasi Konsumen Rentan	01/09/2024	s/d	31/08/2025	6.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	3.994.520,55
27	Tanah dan Bangunan	Erselita Rachma Sari	01/05/2024	s.d	30/04/2025	3.500.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	1.150.684,93
		Sedioko	01/05/2024	s.d	30/04/2029	560.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
								112.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	112.000,00		112.000,00

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	112.000,00		112.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	112.000,00		112.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	112.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	112.000,00		
		Sulistyaningsih	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.305.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	85.808,22
								261.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	261.000,00		261.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	261.000,00		261.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	261.000,00		261.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	261.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	261.000,00		
		Tri Jalu Suryowaseso	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.580.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	103.890,41
								316.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	316.000,00		316.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	316.000,00		316.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	316.000,00		316.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	316.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	316.000,00		
		Aries Nuzuli	01/05/2024	s.d	30/04/2029	895.000,00		
							01/01/2025 s/d 30/04/2025	58.849,32
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	179.000,00		179.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	179.000,00		179.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	179.000,00		179.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	179.000,00		179.000,00
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	179.000,00		
		Ir. Subur Raharjo	01/05/2024	s.d	30/04/2029	6.250.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	410.958,90
								1.250.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	1.250.000,00		1.250.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	1.250.000,00		1.250.000,00

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	1.250.000,00		1.250.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	1.250.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	1.250.000,00		
		Ignatia Sumartinah	01/05/2024	s.d	30/04/2029	67.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	4.405,48
								13.400,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	13.400,00		13.400,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	13.400,00		13.400,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	13.400,00		13.400,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	13.400,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	13.400,00		
		Sri Widiastuti	01/05/2024	s.d	30/04/2029	560.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
								112.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	112.000,00		112.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	112.000,00		112.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	112.000,00		112.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	112.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	112.000,00		
		Yulianto Wibowo	01/05/2024	s.d	30/04/2029	560.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	36.821,92
								112.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	112.000,00		112.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	112.000,00		112.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	112.000,00		112.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	112.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	112.000,00		
		Sugiarto	01/05/2024	s.d	30/04/2029	140.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	9.205,48
								28.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	28.000,00		28.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	28.000,00		28.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	28.000,00		28.000,00

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	28.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	28.000,00		
		Suyatini	01/05/2024	s.d	30/04/2029	140.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	9.205,48
								28.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	28.000,00		28.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	28.000,00		28.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	28.000,00		28.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	28.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	28.000,00		
		RL Mawarti Dwi Astuti DR.	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.150.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	75.616,44
								230.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	230.000,00		230.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	230.000,00		230.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	230.000,00		230.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	230.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	230.000,00		
		Supartini	01/05/2024	s.d	30/04/2029	535.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	35.178,08
								107.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	107.000,00		107.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	107.000,00		107.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	107.000,00		107.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	107.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	107.000,00		
		Bambang Setyo Pambudi	01/05/2024	s.d	30/04/2026	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	56.000,00		56.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	56.000,00		56.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	56.000,00		56.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	56.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	56.000,00		
		Sigit Istiarto	01/05/2024	s.d	30/04/2029	195.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	12.821,92
								39.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	39.000,00		39.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	39.000,00		39.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	39.000,00		39.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	39.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	39.000,00		
		Toni Aris Munandar	01/05/2024	s.d	30/04/2029	195.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	12.821,92
								39.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	39.000,00		39.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	39.000,00		39.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	39.000,00		39.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	39.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	39.000,00		
		Wisnubroto	01/05/2024	s.d	30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	56.000,00		56.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	56.000,00		56.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	56.000,00		56.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	56.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	56.000,00		
		Hari Murti	01/05/2024	s.d	30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	56.000,00		56.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	56.000,00		56.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	56.000,00		56.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	56.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	56.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
		Bayu Muliawan	01/05/2024	s.d	30/04/2029	280.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	18.410,96
								56.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	56.000,00		56.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	56.000,00		56.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	56.000,00		56.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	56.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	56.000,00		
		Siti Dahliah	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.090.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	71.671,23
								218.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	218.000,00		218.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	218.000,00		218.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	218.000,00		218.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	218.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	218.000,00		
		Iwan Supriyadi	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.310.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	86.136,99
								262.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	262.000,00		262.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	262.000,00		262.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	262.000,00		262.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	262.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	262.000,00		
		Gunarto	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.345.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	88.438,36
								269.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	269.000,00		269.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	269.000,00		269.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	269.000,00		269.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	269.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	269.000,00		
		Dwi Ariyanto	01/05/2024	s.d	30/04/2029	1.695.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	111.452,05

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
								339.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	339.000,00		339.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	339.000,00		339.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	339.000,00		339.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	339.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	339.000,00		
		Anton Rudianto	01/05/2024	s.d	30/04/2025	1.790.000,00	01/01/2025 s/d 30/04/2025	117.698,63
								358.000,00
			01/05/2024	s.d	30/04/2025	358.000,00		358.000,00
			01/05/2025	s.d	30/04/2026	358.000,00		358.000,00
			01/05/2026	s.d	30/04/2027	358.000,00		358.000,00
			01/05/2027	s.d	30/04/2028	358.000,00		
			01/05/2028	s.d	30/04/2029	358.000,00		
28	Tanah	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2024	s/d	31/05/2027	12.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/05/2025	1.654.794,52
								4.000.000,00
			01/06/2024	s/d	31/05/2025	4.000.000,00		4.000.000,00
			01/06/2025	s/d	31/05/2026	4.000.000,00		
			01/06/2026	s/d	31/05/2027	4.000.000,00		
29	Tanah dan Bangunan	Aswin Kumala Darma Saputra	31/07/2024	s/d	30/07/2025	23.600.000,00	01/01/2025 s/d 30/07/2025	13.642.739,73
30	Tanah	PT. Yudhistira Mahadana Sampurna	01/01/2025	s.d	31/12/2025	190.000.000,00	01/01/2025 s/d 31/12/2025	190.000.000,00
31	Tanah dan Bangunan	Sigit Ariantawibawa	01/09/2023	s/d	31/08/2025	2.858.400,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	951.494,79
			01/09/2023	s/d	31/08/2024	1.429.200,00		
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	1.429.200,00		
32	Tanah dan Bangunan	Ajie Mardana ST	01/07/2023	s/d	30/06/2025	1.560.000,00	01/01/2025 s/d 30/06/2025	386.794,52
			01/07/2023	s/d	30/06/2024	780.000,00		

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
			01/07/2024	s/d	30/06/2025	780.000,00		
33	Tanah dan Bangunan	Heny Purnawati	01/06/2024	s/d	31/05/2025	2.023.800,00	01/01/2025 s/d 31/05/2025	837.243,29
34	Tanah dan Bangunan	Yuliana Hartati	01/07/2024	s/d	30/06/2025	7.262.574,00	01/01/2025 s/d 30/06/2025	3.601.440,81
35	Tanah dan Bangunan	Hasan Khoiri AMD	01/09/2024	s/d	31/08/2026	775.800,00	01/01/2025 s/d 31/08/2025	258.245,75
			01/09/2024	s/d	31/08/2025	387.900,00		387.900,00
			01/09/2025	s/d	31/08/2026	387.900,00		
36	Tanah dan Bangunan	Bambang Hermanto	01/02/2024	s/d	31/01/2025	2.460.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	208.931,51
37	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	01/02/2023	s/d	31/01/2025	18.150.000,00	01/01/2025 s/d 31/01/2025	770.753,42
			01/02/2023	s/d	31/01/2024	9.075.000,00		
			01/02/2024	s/d	31/01/2025	9.075.000,00		
							TOTAL BPKA INDUK	**3.542.162.006,83**
KPPD BANTUL								
	Bangunan	Pimpinan PT Bank BPD DIY Cabang Bantul	01/01/2022	s.d	31/12/2026	17.500.000,00	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	3.500.000,00
			01/01/2022	s.d	31/12/2022	3.500.000,00		3.500.000,00
			01/01/2023	s.d	31/12/2023	3.500.000,00		
			02/01/2024	s.d	01/01/2024	3.500.000,00		
			03/01/2025	s.d	02/01/2025	3.500.000,00		
			04/01/2026	s.d	03/01/2026	3.500.000,00		
							TOTAL KPPD BANTUL	**7.000.000,00**
KPPD KULON PROGO								
	Bangunan	PT Bank BRI Cabang Wates (ATM)	01/08/2024	s/d	31/07/2025	3.000.000,00	01/01/2025 s.d. 31/07/2025	1.742.465,75
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2024	s/d	31/07/2025	5.040.000,00	01/01/2025 s.d 31/07/2025	2.927.342,47
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2024	s/d	31/07/2025	16.800.000,00	01/01/2025 s.d 31/07/2025	9.757.808,22
		Painem (Kantin)	01/08/2024	s/d	31/07/2025	5.040.000,00	01/01/2025 s.d 31/07/2025	2.927.342,47

No	Jenis Aset	Penyewa	Periode			Harga Sewa	Pendapatan Diterima Dimuka	
							Periode	Nilai (Rp)
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2022	s/d	31/12/2026	60.000.000,00	01/01/2025 s.d 31/12/2025	12.000.000,00
								12.000.000,00
		Catatan : per tahun @ 12.000.000	01/01/2022	s/d	31/12/2022	12.000.000,00		
			01/01/2023	s/d	31/12/2023	12.000.000,00		
			01/01/2024	s/d	31/12/2024	12.000.000,00		
			01/01/2025	s/d	31/12/2025	12.000.000,00		
			01/01/2026	s/d	31/12/2026	12.000.000,00		
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	01/01/2022	s/d	31/12/2026	15.000.000,00	01/01/2025 s.d 31/12/2025	3.000.000,00
								3.000.000,00
		Catatan : per tahun @ 3.000.000	01/01/2022	s/d	31/12/2022	3.000.000,00		
			01/01/2023	s/d	31/12/2023	3.000.000,00		
			02/01/2024	s/d	31/12/2024	3.000.000,00		
			01/01/2025	s/d	31/12/2025	3.000.000,00		
			01/01/2026	s/d	31/12/2026	3.000.000,00		
							TOTAL KPPD KULON PROGO	**47.354.958,90**
							TOTAL PDD BPKA	**3.596.516.965,74**

5.3.2.1.3 Utang Belanja Rp46.221.786.035,33 Rp5.515.383.792,04

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.221.786.035,33 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2024 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp461.615.537,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.612.165.978,33 dan Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp43.148.004.520,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 157
Rincian Utang Belanja pada SKPD

No	SKPD	Nilai Per 31-12-2024 (Rp)	Nilai Per 31-12-2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	295.370.631,00	690.718.061,00
2	Dinas Kesehatan	717.024.260,00	1.006.841.049,04
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	206.518.442,00	327.082.495,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	13.231.339,00	12.428.562,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.087.795,00	11.566.715,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	20.639.970,00	12.503.804,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.266.057,00	43.490.722,00
8	Dinas Sosial	79.836.474,00	81.022.427,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.017.662,00	54.299.315,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	25.288.650,00	26.748.053,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69.582.188,00	74.382.945,00
12	Dinas Perhubungan	48.858.627,00	46.723.811,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.484.838,00	19.834.993,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	137.292.359,00	117.594.852,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.972.122,00	8.780.016,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	215.108.011,00	203.492.306,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	150.946.084,00	150.543.980,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	107.884.423,00	118.200.468,00
19	Dinas Pariwisata	45.889.213,00	32.996.581,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.221.050,33	97.351.398,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.950.990,00	66.230.225,00
22	Sekretariat Daerah	247.475.118,00	244.683.293,00
23	Badan Penghubung Daerah	19.165.176,00	23.743.457,00
24	Sekretariat DPRD	82.623.813,00	85.946.255,00
25	Inspektorat	22.798.962,00	21.935.106,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	402.085,00	384.617,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	43.349.261.333,00	1.875.574.471,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	37.279.641,00	27.071.511,00
29	Badan Pendidikan dan Pelatihan	32.308.722,00	33.212.304,00
	Jumlah	**46.221.786.035,33**	**5.515.383.792,04**

A. Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang Jasa Rp3.073.781.515,33 Rp3.850.545.327,04

Saldo Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.073.781.515,33 dirinci menurut jenis utang belanja sebagai berikut :

Tabel 5. 158
Rincian Utang Belanja Menurut Jenis Utang Belanja

No	SKPD	Utang Blj Pegawai (Rp)	Utang Blj Barang Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	295.370.631,00	295.370.631,00
2	Dinas Kesehatan	461.615.537,00	255.408.723,00	717.024.260,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	-	206.518.442,00	206.518.442,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	13.231.339,00	13.231.339,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	14.087.795,00	14.087.795,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	20.639.970,00	20.639.970,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	39.266.057,00	39.266.057,00
8	Dinas Sosial	-	79.836.474,00	79.836.474,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	54.017.662,00	54.017.662,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	25.288.650,00	25.288.650,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	69.582.188,00	69.582.188,00
12	Dinas Perhubungan	-	48.858.627,00	48.858.627,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	19.484.838,00	19.484.838,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	137.292.359,00	137.292.359,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6.972.122,00	6.972.122,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	-	215.108.011,00	215.108.011,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	150.946.084,00	150.946.084,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	107.884.423,00	107.884.423,00
19	Dinas Pariwisata	-	45.889.213,00	45.889.213,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	99.221.050,33	99.221.050,33
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	63.950.990,00	63.950.990,00
22	Sekretariat Daerah	-	247.475.118,00	247.475.118,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	19.165.176,00	19.165.176,00
24	Sekretariat DPRD	-	82.623.813,00	82.623.813,00
25	Inspektorat	-	22.798.962,00	22.798.962,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	402.085,00	402.085,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	201.256.813,00	201.256.813,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	37.279.641,00	37.279.641,00
29	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	32.308.722,00	32.308.722,00
	Jumlah	**461.615.537,00**	**2.612.165.978,33**	**3.073.781.515,33**

Saldo utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp2.612.165.978,33 terdiri dari Utang Telepon sebesar Rp30.318.230,00, Utang Air sebesar Rp83.449.338,33, Utang Listrik sebesar Rp2.411.322.775,00, Utang Internet sebesar Rp26.416.160,00, Utang Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp44.921.155,00, Utang Medical Check Up sebesar Rp3.600.000,00, Utang Suku Cadang sebesar Rp11.461.644,00 dan Utang Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp676.676,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 159

Rincian Utang Belanja Barang Jasa Menurut Rincian Obyek Utang Belanja

No	SKPD	Utang Telepon (Rp)	Utang Air (Rp)	Utang Listrik (Rp)	Utang Internet (Rp)	Utang Bahan Pakai Habis (Obat-obatan) (Rp)	Utang Medical Check Up (Rp)	Utang Suku Cadang (Rp)	Utang Jasa Pengolahan Sampah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.551.783,00	7.317.244,00	286.501.604,00	-	-	-	-	-	295.370.631,00
2	Dinas Kesehatan	2.606.085,00	6.593.517,00	185.692.132,00	534.190,00	44.921.155,00	3.600.000,00	11.461.644,00	-	255.408.723,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.792.364,00	449.700,00	202.573.078,00	1.703.300,00	-	-	-	-	206.518.442,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	170.412,00	54.500,00	13.006.427,00	-	-	-	-	-	13.231.339,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	108.011,00	168.000,00	13.811.784,00	-	-	-	-	-	14.087.795,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	94.597,00	-	19.562.796,00	982.577,00	-	-	-	-	20.639.970,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	510.285,00	67.500,00	38.688.272,00	-	-	-	-	-	39.266.057,00
8	Dinas Sosial	3.975.701,00	8.401.270,00	65.795.416,00	1.664.087,00	-	-	-	-	79.836.474,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.583.433,00	594.700,00	51.839.529,00	-	-	-	-	-	54.017.662,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.471.799,00	1.127.000,00	22.689.851,00	-	-	-	-	-	25.288.650,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	814.316,00	1.742.422,00	67.025.450,00	-	-	-	-	-	69.582.188,00
12	Dinas Perhubungan	937.535,00	657.000,00	47.264.092,00	-	-	-	-	-	48.858.627,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	260.700,00	-	19.224.138,00	-	-	-	-	-	19.484.838,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	137.537,00	29.339.800,00	105.201.984,00	2.613.038,00	-	-	-	-	137.292.359,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.294.122,00	-	5.678.000,00	-	-	-	-	-	6.972.122,00
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	603.493,00	141.000,00	214.363.518,00	-	-	-	-	-	215.108.011,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.702.262,00	54.500,00	147.670.622,00	-	-	-	-	518.700,00	150.946.084,00

No	SKPD	Utang Telepon (Rp)	Utang Air (Rp)	Utang Listrik (Rp)	Utang Internet (Rp)	Utang Bahan Pakai Habis (Obat-obatan) (Rp)	Utang Medical Check Up (Rp)	Utang Suku Cadang (Rp)	Utang Jasa Pengolahan Sampah (Rp)	Jumlah (Rp)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	258.257,00	3.786.350,00	103.839.816,00	-	-	-	-	-	107.884.423,00
19	Dinas Pariwisata	282.944,00	895.000,00	44.711.269,00	-	-	-	-	-	45.889.213,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.063.930,00	1.906.065,33	96.251.055,00	-	-	-	-	-	99.221.050,33
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	348.852,00	-	63.602.138,00	-	-	-	-	-	63.950.990,00
22	Sekretariat Daerah	2.993.376,00	-	244.481.742,00	-	-	-	-	-	247.475.118,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.042.638,00	-	18.122.538,00	-	-	-	-	-	19.165.176,00
24	Sekretariat DPRD	299.007,00	16.040.400,00	66.284.406,00	-	-	-	-	-	82.623.813,00
25	Inspektorat	219.904,00	67.500,00	22.511.558,00	-	-	-	-	-	22.798.962,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	402.085,00	-	-	-	-	-	-	-	402.085,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.472.298,00	3.925.870,00	176.939.677,00	18.918.968,00	-	-	-	-	201.256.813,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	1.247.679,00	-	36.031.962,00	-	-	-		-	37.279.641,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	72.825,00	120.000,00	31.957.921,00	-	-	-		157.976,00	32.308.722,00
	Jumlah	**30.318.230,00**	**83.449.338,33**	**2.411.322.775,00**	**26.416.160,00**	**44.921.155,00**	**3.600.000,00**	**11.461.644,00**	**676.676,00**	**2.612.165.978,33**

B. Utang Belanja Bagi Hasil Rp43.148.004.520,00 Rp1.664.838.465,00

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.148.004.520,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Pencatatan Utang Belanja Bagi Hasil sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar Atas Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024.

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 160
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	Total
- PKB	3.388.286.926,00	2.060.004.754,00	2.037.966.829,00	8.071.765.663,00	2.255.371.597,00	17.813.395.769,00
- BBN-KB	1.663.565.541,00	852.979.380,00	854.448.288,00	4.850.583.501,00	1.504.036.290,00	9.725.613.000,00
- PBB-KB	3.147.818.252,00	2.510.498.216,00	2.360.683.641,00	5.483.336.049,00	1.977.270.845,00	15.479.607.003,00
- PAP	42.529.659,00	27.888.618,00	39.331.040,00	11.876.106,00	7.763.325,00	129.388.748,00
- Pajak Rokok	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**8.242.200.378,00**	**5.451.370.968,00**	**5.292.429.798,00**	**18.417.561.319,00**	**5.744.442.057,00**	**43.148.004.520,00**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1 Utang Dalam Negeri Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.3 Ekuitas Rp14.045.595.713.196,00 Rp13.170.046.237.337,60

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp14.045.595.713.196,00 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2024. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.045.595.713.196,00 mengalami kenaikan sebesar Rp875.549.475.858,40 atau 6,65% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp13.170.046.237.337,60.

5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1 Pendapatan – LO	**Rp6.072.732.381.987,25**	**Rp6.097.582.665.731,53**

Pendapatan - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.072.732.381.987,25. Pendapatan LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp24.850.283.744,28) atau sebesar (0,41%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan - LO Pemda DIY meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 161
Rincian Pendapatan Daerah-LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2.426.318.805.662,52	2.420.809.847.170,37	5.508.958.492,15	0,23
2	Pendapatan Transfer-LO	3.508.682.988.702,00	3.479.169.753.466,00	29.513.235.236,00	0,85
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	137.730.587.622,73	197.603.065.095,16	(59.872.477.472,43)	(30,30)
	JUMLAH	**6.072.732.381.987,25**	**6.097.582.665.731,53**	**(24.850.283.744,28)**	**(0,41)**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**Rp2.426.318.805.662,52**	**Rp2.420.809.847.170,37**

Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.426.318.805.662,52. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.508.958.492,15 atau sebesar 0,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah - LO Pemda DIY meliputi : Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 162
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Daerah-LO	2.157.532.293.945,00	2.069.606.143.000,57	87.926.150.944,43	4,25
2	Retribusi Daerah-LO	75.672.674.116,21	31.606.869.297,25	44.065.804.818,96	139,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	66.372.413.217,67	168.468.204.425,61	(102.095.791.207,94)	(60,60)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	126.741.424.383,64	151.128.630.446,94	(24.387.206.063,30)	(16,14)
	JUMLAH	**2.426.318.805.662,52**	**2.420.809.847.170,37**	**5.508.958.492,15**	**0,23**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	**Rp2.157.532.293.945,00**	**Rp2.069.606.143.000,57**

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.157.532.293.945,00. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp87.926.150.944,43 atau sebesar 4,25% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2024 berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemda DIY Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 163
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	1.041.662.985.900,00	978.964.253.100,00	62.698.732.800,00	6,40
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	453.957.069.400,00	440.842.426.300,00	13.114.643.100,00	2,97
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- LO	372.113.724.291,00	369.593.604.698,57	2.520.119.592,43	0,68
4	Pajak Air Permukaan - LO	806.104.996,00	612.386.532,00	193.718.464,00	31,63
5	Pajak Rokok - LO	288.962.709.258,00	279.593.472.370,00	9.369.236.888,00	3,35
6	Pajak Alat Berat - LO	29.700.100,00	0,00	29.700.100,00	-
	JUMLAH	**2.157.532.293.945,00**	**2.069.606.143.000,57**	**87.926.150.944,43**	**4,25**

Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak baru yang diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Tahun Anggaran 2024. Namun, target pendapatan Pajak Alat Berat tidak tercapai karena Permendagri yang mengatur tentang NJKB dan NJAB Tahun 2024 baru diundangkan pada bulan Agustus sehingga pendaftaran dan penetapan alat berat baru mulai dilakukan pada bulan November 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	**Rp75.672.674.116,21**	**Rp31.606.869.297,25**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.672.674.116,21. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.065.804.818,96 atau sebesar 139,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemda DIY meliputi : Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Retribusi pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 164
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum - LO	47.383.445.640,00	13.791.694.346,86	33.591.751.293,14	243,57
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	28.124.618.476,21	17.792.409.950,39	10.332.208.525,82	58,07
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	164.610.000,00	22.765.000,00	141.845.000,00	623,08
	JUMLAH	**75.672.674.116,21**	**31.606.869.297,25**	**44.065.804.818,96**	**139,42**

Tabel 5. 165
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	**- Retribusi Jasa Umum - LO**	**47.383.445.640,00**	**13.791.694.346,86**	**33.591.751.293,14**	**243,57**
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.295.818.116,00	189.475.000,00	42.106.343.116,00	22.222,64
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	-	4.431.197.346,86	(4.431.197.346,86)	(100,00)
	- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	-	1.023.690.000,00	(1.023.690.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	-	8.147.332.000,00	(8.147.332.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	5.087.627.524,00	-	5.087.627.524,00	-
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**28.124.618.476,21**	**17.792.409.950,39**	**10.332.208.525,82**	**58,07**
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	128.752.984,27	9.882.210.612,89	(9.753.457.628,62)	(98,70)
	- Retribusi Terminal - LO	-	392.464.000,00	(392.464.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	-	1.762.898.000,00	(1.762.898.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	1.899.454.200,00	603.180.000,00	1.296.274.200,00	214,91
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	-	124.999.000,00	(124.999.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	-	3.422.890.000,00	(3.422.890.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	-	1.603.768.337,50	(1.603.768.337,50)	(100,00)
	- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	1.256.851.176,94	-	1.256.851.176,94	-
	- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	2.851.142.500,00	-	2.851.142.500,00	-
	- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	150.641.400,00	-	150.641.400,00	-
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	8.524.013.200,00	-	8.524.013.200,00	-
	- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	6.942.336.964,00	-	6.942.336.964,00	-
	- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	6.371.426.051,00	-	6.371.426.051,00	-
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**164.610.000,00**	**22.765.000,00**	**141.845.000,00**	**623,08**
	- Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	-	22.440.000,00	(22.440.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	-	325.000,00	(325.000,00)	(100,00)
	- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO	164.610.000,00	-	164.610.000,00	-
	JUMLAH	**75.672.674.116,21**	**31.606.869.297,25**	**44.065.804.818,96**	**139,42**

Terdapat perbedaan saldo akhir antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Rp75.672.674.116,21
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Rp79.460.801.542,00
Selisih = (Rp3.788.127.425,79)

Selisih sebesar (Rp3.788.127.425,79) berasal dari beberapa SKPD yaitu :

Tabel 5. 166
Selisih Retribusi Daerah LRA – LO pada SKPD

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.989.547.692,00	8.989.547.692,00	-
2	Dinas Kesehatan	42.422.235.816,00	42.399.514.504,52	(22.721.311,48)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.613.207.500,00	2.613.207.500,00	-
4	Dinas Sosial	604.200.000,00	604.200.000,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.726.626.000,00	1.726.626.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.966.721.624,00	4.326.024.649,00	(2.640.696.975,00)
7	Dinas Perhubungan	2.992.510.862,00	2.974.446.988,42	(18.063.873,58)
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	153.020.000,00	153.020.000,00	-
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.200.000,00	4.200.000,00	-
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	165.090.000,00	165.090.000,00	-
11	Dinas Kebudayaan	6.217.380.000,00	6.217.380.000,00	-
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.087.085.500,00	1.087.085.500,00	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.156.747.100,00	1.156.747.100,00	-
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.135.611.897,00	942.445.647,00	(1.193.166.250,00)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	330.285.624,00	303.285.624,00	(27.000.000,00)
16	Sekretariat Daerah	45.580.000,00	120.716.861,31	75.136.861,31
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.030.316.927,00	1.068.701.049,96	38.384.122,96
18	Badan Kepegawaian Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	-
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	211.690.000,00	211.690.000,00	-
20	Badan Penghubung Daerah	601.545.000,00	601.545.000,00	-
	JUMLAH	**79.460.801.542,00**	**75.672.674.116,21**	**(3.788.127.425,79)**

Penjelasan :

1) Dinas Kesehatan sebesar (Rp22.721.311,48) berasal dari :
   - Selisih pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp14.383,34)
   - Pendapatan diterima dimuka RSJ Grhasia pada tahun 2023 sebesar (Rp22.735.694,82)
2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar (Rp2.640.696.975,00) merupakan :
   - Selisih piutang akhir dan awal sebesar (Rp211.676.235,00)
   - Selisih pendapatan diterima dimuka sebesar Rp250.000,00
   - Penyesuaian harga pokok produksi minyak kayu putih sebesar (Rp2.428.770.740,00)
3) Dinas Perhubungan sebesar (Rp18.063.873,58) merupakan :
   - Selisih piutang akhir dan awal sebesar (Rp6.128.000,00)
   - Selisih pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp11.935.873,58)

4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp1.193.166.250,00) merupakan penyesuaian pendapatan karena adanya selisih perhitungan harga pokok produksi (HPP) dibandingkan dengan harga jual
5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp27.000.000,00) merupakan penyesuaian pendapatan karena adanya selisih perhitungan penjualan harga pokok produksi (HPP) dibandingkan dengan harga jual
6) Sekretariat Daerah sebesar Rp75.136.861,31 berasal dari :
   - selisih pendapatan diterima dimuka sebesar Rp75.264.161,08
   - penyesuaian saldo awal pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp127.299,77)
7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp38.384.122,96 merupakan selisih atas penyesuaian pendapatan diterima dimuka

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA sebesar (Rp3.788.127.425,79) berasal dari :

1) Selisih Piutang Akhir dan Awal sebesar (Rp217.804.235,00)
2) Selisih Pendapatan Diterima Dimuka Akhir dan Awal sebesar Rp101.476.793,80
3) Selisih Penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp3.671.799.984,59)

Tabel 5. 167
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada SKPD

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8.989.547.692,00	3.267.999.852,00	5.721.547.840,00	175,08
2	Dinas Kesehatan	42.399.514.504,52	-	42.399.514.504,52	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.613.207.500,00	1.800.949.900,00	812.257.600,00	45,10
4	Dinas Sosial	604.200.000,00	544.200.000,00	60.000.000,00	11,03
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.726.626.000,00	2.148.754.000,00	(422.128.000,00)	(19,65)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.326.024.649,00	5.358.419.021,86	(1.032.394.372,86)	(19,27)
7	Dinas Perhubungan	2.974.446.988,42	2.172.173.510,78	802.273.477,64	36,93
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	153.020.000,00	1.200.000,00	151.820.000,00	12.651,67
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	165.090.000,00	22.765.000,00	142.325.000,00	625,19
11	Dinas Kebudayaan	6.217.380.000,00	4.104.645.000,00	2.112.735.000,00	51,47
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.087.085.500,00	325.588.100,00	761.497.400,00	233,88
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.156.747.100,00	1.120.711.300,00	36.035.800,00	3,22
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	942.445.647,00	669.062.744,50	273.382.902,50	40,86
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	303.285.624,00	247.780.041,00	55.505.583,00	22,40
16	Sekretariat Daerah	120.716.861,31	118.599.452,05	2.117.409,26	1,79
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.068.701.049,96	1.071.299.375,06	(2.598.325,10)	(0,24)

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
18	Badan Kepegawaian Daerah	7.200.000,00	469.535.000,00	(462.335.000,00)	(98,47)
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	211.690.000,00	7.686.397.000,00	(7.474.707.000,00)	(97,25)
20	Badan Penghubung Daerah	601.545.000,00	472.590.000,00	128.955.000,00	27,29
	JUMLAH	**75.672.674.116,21**	**31.606.869.297,25**	**44.065.804.818,96**	**139,42**

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO**	**Rp66.372.413.217,67**	**Rp168.468.204.425,61**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp66.372.413.217,67. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar (Rp102.095.791.207,94) atau (60,60%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemda DIY Tahun 2024 berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Pemda DIY Tahun 2024 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 168
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	-	209.497.429,00	(209.497.429,00)	(100,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	89.966.607.995,68	162.949.791.663,69	(72.983.183.668,01)	(44,79)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	(23.594.194.778,01)	5.308.915.332,92	(28.903.110.110,93)	(544,43)
	JUMLAH	**66.372.413.217,67**	**168.468.204.425,61**	**(102.095.791.207,94)**	**(60,60)**

Tabel 5. 169
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO (BUMD)

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	PT Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) (Metode Perolehan)	-	209.497.429,00	(209.497.429,00)	(100,00)
2	PT BPD DIY (Metode Ekuitas)	92.177.732.218,59	157.826.130.733,48	(65.648.398.514,89)	(41,60)
3	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	(2.211.124.222,91)	5.123.660.930,21	(7.334.785.153,12)	(143,16)
4	PT Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	5.044.536.762,12	3.101.879.672,08	1.942.657.090,04	62,63
5	PT Taru Martani (Metode Ekuitas)	(22.354.688.924,40)	8.386.990.896,49	(30.741.679.820,89)	(366,54)
6	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY (Metode Ekuitas)	(6.284.042.615,73)	(6.179.955.235,65)	(104.087.380,08)	1,68
	JUMLAH	**66.372.413.217,67**	**168.468.204.425,62**	**(102.095.791.207,95)**	**(60,60)**

Penjelasan :

1. **PT. BPD DIY**

   Pada tahun 2024, PT BPD DIY mendapatkan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp200.000.000.000,00 sehingga kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2024 menjadi sebesar 52,000%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2024 PT. BPD DIY membagikan Dividen ke Pemda DIY sebesar Rp111.028.716.629,00 dan pendapatan LO atas Dividen tersebut diperhitungkan menjadi pengurangan perhitungan Penyertaan Modal 2024. PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp317.338.139.350,00 dan persentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar

   52,000% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp165.015.832.462,00 (52,000% x 317.338.139.350,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp165.015.832.462,00. Selain daripada itu, terdapat penyesuaian berkurang nilai ekuitas BUMD bagian Pemda DIY sebesar Rp72.838.100.243,41 yang mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sehingga Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO pada PT. BPD DIY menjadi sebesar Rp92.177.732.218,59

2. **Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)**

   Kepemilikan saham Pemda DIY pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 83,14%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, kepemilikan

saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2024 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) membagikan Dividen ke Pemda DIY sebesar Rp4.580.240.352,93 dan pendapatan LO atas Dividen tersebut diperhitungkan menjadi pengurangan perhitungan Penyertaan Modal 2024. Pada Tahun 2024 BUKP mencatat laba dan Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp794.665.770,60. Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal atas laba tersebut dicatat sebesar Rp794.665.770,60. Selain daripada itu, terdapat penyesuaian berkurang nilai ekuitas BUMD bagian Pemda DIY sebesar Rp3.005.789.993,50 yang mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sehingga Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO pada BUKP menjadi sebesar (Rp2.211.124.222,91).

3. **PT. Anindya Mitra Internasional**

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 99,990%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2024 PT. AMI mencatat laba sebesar Rp6.397.808.071,00 dan persentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,990% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp6.397.168.290,19 (99,990% x Rp6.397.808.071,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal atas laba tersebut dicatat sebesar Rp6.397.168.290,19. Selain daripada itu, terdapat penyesuaian berkurang nilai ekuitas BUMD bagian Pemda DIY sebesar (Rp1.352.631.528,08) yang mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sehingga Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO pada PT. AMI menjadi sebesar Rp5.044.536.762,12.

4. **PT Tarumartani**

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Tarumartani sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 99,990%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Tarumartani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memilikihak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2024 PT. Tarumartani mencatat rugi sebesar (Rp17.428.938.401,00) dan persentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,990% sehingga Pemda DIY mempunyai bagian atas rugi sebesar (Rp17.427.195.507,16) (99,990% x Rp17.428.938.401,00). Bagian atas rugi tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar (Rp17.427.195.507,16). Selain daripada itu, terdapat penyesuaian berkurang nilai ekuitas BUMD bagian Pemda DIY sebesar (Rp4.927.493.417,24) yang mengurangi nilai Investasi

Permanen-Penyertaan Modal sehingga Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO pada PT. Tarumartani menjadi sebesar (Rp22.354.688.924,40).

5. **Perumda Air Bersih Tirtatama DIY**

Kepemilikan saham Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 100,00%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2024 Perumda Air Bersih Tirtatama DIY tidak membagikan Dividen ke Pemda DIY. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY mencatat rugi sebesar Rp6.284.042.616,00 dan persentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 100% sehingga Pemda DIY mempunyai bagian atas rugi sebesar Rp6.284.042.616,00. Bagian atas rugi tersebut dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan mengurangi nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp6.284.042.616,00. Selain daripada itu, terdapat penyesuaian bertambah nilai ekuitas BUMD bagian Pemda DIY sebesar Rp0,01 yang menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sehingga Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menjadi sebesar (Rp6.284.042.615,73).

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.1.4	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO**	**Rp126.741.424.383,64**	**Rp151.128.630.446,94**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp126.741.424.383,64. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp24.387.206.063,30) atau sebesar (16,14%.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemda DIY terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170
Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Tanah-LO	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1,52	87.003.406,25	(87.003.404,73)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	1.873.760,00	51.050.000,00	(49.176.240,00)	(96,33)
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	36.615.315,00	203.704.000,00	(167.088.685,00)	(82,03)
5	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	-	7.784.500,00	(7.784.500,00)	(100,00)
6	Hasil Sewa BMD-LO	10.769.194.260,15	14.999.123.636,41	(4.229.929.376,26)	-

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
7	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	8.428.245.415,00	2.127.245.251,00	6.301.000.164,00	296,20
8	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.235.409.000,00	-	3.235.409.000,00	-
9	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	7.429.210.323,00	5.388.709.174,00	2.040.501.149,00	37,87
10	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	523.469.676,00	428.572.186,00	94.897.490,00	22,14
11	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	739.674,00	100.265.506,77	(99.525.832,77)	(99,26)
12	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	16.371.213.210,00	18.901.735.590,58	(2.530.522.380,58)	(13,39)
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)	-
14	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.561.478,00	609.917,00	951.561,00	156,01
15	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	735.407.168,00	821.835.137,00	(86.427.969,00)	(10,52)
16	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	60.385.186.350,00	53.370.569.600,00	7.014.616.750,00	13,14
17	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	1.045.911.600,00	1.060.212.450,00	(14.300.850,00)	(1,35)
18	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	400.193,00	356.848,00	43.345,00	12,15
19	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	36.388.533,00	42.859.740,00	(6.471.207,00)	(15,10)
20	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	-	182.984.070,00	(182.984.070,00)	(100,00)
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	-	3.781.347.486,75	(3.781.347.486,75)	(100,00)
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	300.000,00	396.731.581,00	(396.431.581,00)	(99,92)
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	2.335.246.936,00	-	2.335.246.936,00	-
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO	649.680,00	-	649.680,00	-
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	439.870.142,00	-	439.870.142,00	-

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	26.314.945,00	34.292.352,00	(7.977.407,00)	(23,26)
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	12.777.526,83	61.684.648,00	(48.907.121,17)	(79,29)
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO	3.069.594.276,09	-	3.069.594.276,09	-
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	9.391.877,00	-	9.391.877,00	-
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	-	9.971.769,00	(9.971.769,00)	(100,00)
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja ModalJalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	37.862.673,00	-	37.862.673,00	-
32	Pendapatan dari BLUD-LO	2.092.232.961,00	48.603.762.597,18	(46.511.529.636,18)	(95,70)
33	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	32.658.899,82	-	32.658.899,82	-
34	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	8.280.748.155,00	-	8.280.748.155,00	-
35	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	1.083.138.355,23	-	1.083.138.355,23	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	-	71.000.000,00	(71.000.000,00)	(100,00)
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	319.812.000,00	388.219.000,00	(68.407.000,00)	(17,62)
	JUMLAH	**126.741.424.383,64**	**151.128.630.446,94**	**(24.387.206.063,30)**	**(16,14)**

Terdapat perbedaan saldo akhir pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2024 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Rp126.741.424.383,64
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Rp123.577.792.400,15
Selisih = Rp3.163.631.983,49

Selisih sebesar Rp3.163.631.983,49 berasal dari beberapa SKPD yaitu :

Tabel 5. 171
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA – LO

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.046.709.353,00	1.046.709.353,00	-
2	Dinas Kesehatan	8.526.493.387,23	10.641.462.043,05	2.114.968.655,82
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	1,00	1,00	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	255.812.000,00	255.812.000,00	-
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.000.113,00	214.000.113,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.525.439.443,00	1.525.439.443,00	-
7	Dinas Perhubungan	164.101.220,00	464.101.220,00	300.000.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	751.130.123,00	751.130.123,00	-
9	Dinas Kebudayaan	22.081.601,00	22.081.601,00	-
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.243.689,00	1.243.689,00	-
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,00	2,00	-
12	Dinas Pariwisata	-	226.554.286,00	226.554.286,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	13.624.000,00	13.624.000,00
14	Sekretariat Daerah	110.337.493,00	110.337.493,00	-
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	107.926.045.474,92	108.434.530.516,59	508.485.041,67
16	Badan Kepegawaian Daerah	327.530.000,00	327.530.000,00	-
17	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.703.368.500,00	2.703.368.500,00	-
18	Badan Penghubung Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	JUMLAH	**123.577.792.400,15**	**126.741.424.383,64**	**3.163.631.983,49**

Penjelasan :

1) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.114.968.655,82 merupakan selisih piutang sebesar Rp2.092.232.961,00 dan selisih pendapatan diterima dimuka sebesar Rp22.735.694,82
2) Dinas Perhubungan sebesar Rp300.000.000 merupakan selisih pendapatan diterima dimuka
3) Dinas Pariwisata sebesar Rp226.554.286,00 merupakan selisih pendapatan diterima dimuka
4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp13.624.00,00 merupakan koreksi atas kurang catat Bahan-Bahan/Bibit Ternak yang berada di Jogja Agro Park.
5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp508.485.041,67 merupakan selisih piutang sebesar Rp900.000,00 ; selisih hasil penjualan BMD sebesar Rp3.092.986.439,48 ; pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp3.542.162.006,84 ; penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp7.156.073.487,99) ; mutasi bunga dan denda dana bergulir sebesar Rp11.540.000,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dengan Pendapatan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp3.163.631.983,49 berasal dari :

1) Selisih Piutang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.079.792.961,00

2) Selisih Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.140.465.767,54
3) Selisih penyesuaian lainnya sebesar (Rp3.070.250.745,06)
4) Penyesuaian atas kurang catat Bahan-Bahan/Bibit Ternak yang berada di Jogja Agro Park sebesar Rp13.624.00,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah di LRA dan LO sebesar Rp1,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Rp2,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan transaksi yang timbul karena adanya percobaan pembayaran melalui QRIS.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO	**Rp3.508.682.988.702,00**	**Rp3.479.169.753.466,00**

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.508.682.988.702,00. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.513.235.236,00 atau 0,85% meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp3.507.699.183.472,00 dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp983.805.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	**Rp3.507.699.183.472,00**	**Rp3.478.333.847.046,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.507.699.183.472,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.365.336.426,00 atau sebesar 0,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemda DIY meliputi Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) - LO, Dana Alokasi Umum (DAU)- LO, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 172
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	**Dana Perimbangan**	**2.099.451.814.040,00**	**2.024.731.882.822,00**	**74.719.931.218,00**	**3,69**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	87.562.321.000,00	121.328.549.000,00	(33.766.228.000,00)	(27,83)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.337.180.068.000,00	1.267.622.165.192,00	69.557.902.808,00	5,49
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	156.735.319.268,00	134.151.614.382,00	22.583.704.886,00	16,83
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	517.974.105.772,00	501.629.554.248,00	16.344.551.524,00	3,26
2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	-	**80.876.155.000,00**	**(80.876.155.000,00)**	**(100,00)**

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
	- DID - LO	-	80.876.155.000,00	(80.876.155.000,00)	(100,00)
3	**Dana Keistimewaan**	**1.396.157.452.432,00**	**1.372.725.809.224,00**	**23.431.643.208,00**	**1,71**
	- Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta - LO	1.396.157.452.432,00	1.372.725.809.224,00	23.431.643.208,00	1,71
4	**Insentif Fiskal**	**12.089.917.000,00**	-	**12.089.917.000,00**	-
	- Insentif Fiskal-LO	12.089.917.000,00	-	12.089.917.000,00	-
	JUMLAH	**3.507.699.183.472,00**	**3.478.333.847.046,00**	**29.365.336.426,00**	**0,84**

Terdapat perbedaan saldo akhir Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemda DIY Tahun 2024 dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LRA Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbedaan Saldo:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Rp3.507.699.183.472,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Rp3.534.495.647.472,00

Selisih = (Rp26.796.464.000,00)

Selisih sebesar Rp26.796.464.000,00 merupakan selisih atas Treasury Deposit Facility (TDF) dari Kemenkeu yang ditransfer non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD pada Tahun Anggaran 2024 dengan pembayaran non tunai Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun Anggaran 2023 ke RKUD. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO BPKA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.507.699.183.472,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.534.495.647.472,00 ditambah dengan Pengakuan Treasury Deposit Facility dari Kementerian Keuangan RI yang ditransfer non tunai namun belum ditarik atau ditransfer ke RKUD sebesar Rp171.809.000,00 dan dikurangi dengan realisasi transfer non tunai Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2023 ke RKUD sebesar Rp26.968.273.000,00.

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**Rp983.805.230,00**	**Rp835.906.420,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp983.805.230,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp147.898.810,00 atau sebesar (17,69%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bantuan Keuangan tersebut merupakan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kotadapat dirinci sebagai berikut:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah DIY dari BPKAD Kota Yogyakarta sebesar Rp718.832.590,00
- Belanja bantuan keuangan khusus dari BPKAD Kabupaten Bantul kepada pemerintah provinsi untuk sharing dan kontribusi pengelolaan IPAL Sewon sebesar Rp120.347.030,00

- Kontribusi biaya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat dari BPKAD KabupatenSleman sebesar Rp144.625.610,00

Tabel 5. 173
Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan	983.805.230,00	835.906.420,00	147.898.810,00	17,69
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	983.805.230,00	835.906.420,00	147.898.810,00	17,69

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	**Rp137.730.587.622,73**	**Rp197.603.065.095,16**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp137.730.587.622,73. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp59.872.477.472,43 atau sebesar 30,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Pemda DIY terdiri dari Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp137.730.587.622,73.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO	**Rp137.730.587.622,73**	**Rp197.598.037.079,16**

Pendapatan Hibah - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp137.730.587.622,73. Pendapatan Hibah - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp59.867.449.456,43 atau sebesar 30,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 174
Pendapatan Hibah – LO pada SKPD

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89.913.920.981,44	39.046.071.019,92	50.867.849.961,52	130,28
2	Pendapatan Hibah pada Dinas Kesehatan	28.201.315.302,15	19.895.486.145,60	8.305.829.156,55	41,75
3	Pendapatan Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.162.810.000,00	937.428.984,00	4.225.381.016,00	450,74
4	Pendapatan Hibah pada Dinas Sosial	2.209.374.638,34	9.000.000,00	2.200.374.638,34	24.448,61
5	Pendapatan Hibah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	413.374.500,00	(413.374.500,00)	(100,00)
6	Pendapatan Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	39.550.000,00	-	39.550.000,00	-

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
7	Pendapatan Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.645.562,00	149.351.127,00	(46.705.565,00)	(31,27)
8	Pendapatan Hibah pada Dinas Perhubungan	176.600.000,00	8.801.688.600,00	(8.625.088.600,00)	(97,99)
9	Pendapatan Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-
10	Pendapatan Hibah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	148.000,00	-	148.000,00	-
11	Pendapatan Hibah pada Dinas Kebudayaan	-	5.167.246.000,00	(5.167.246.000,00)	(100,00)
12	Pendapatan Hibah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.816.650,00	-	2.816.650,00	-
13	Pendapatan Hibah pada Dinas Kelautan dan Perikanan	216.319.190,00	1.078.025.626,00	(861.706.436,00)	(79,93)
14	Pendapatan Hibah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.515.809.095,80	1.322.591.735,07	193.217.360,73	14,61
15	Pendapatan Hibah pada Sekretariat Daerah	617.934.000,00	-	617.934.000,00	-
16	Pendapatan Hibah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset	9.508.797.678,00	120.569.044.341,57	(111.060.246.663,57)	(92,11)
17	Pendapatan Hibah pada Badan Kepegawaian Daerah	-	199.946.000,00	(199.946.000,00)	(100,00)
18	Pendapatan Hibah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.659.900,00	8.783.000,00	1.876.900,00	21,37
19	Pendapatan Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.886.625,00	-	9.886.625,00	-
	JUMLAH	**137.730.587.622,73**	**197.598.037.079,16**	**(59.867.449.456,43)**	**(30,30)**

Terdapat perbedaan saldo akhir Pendapatan Hibah – LO dengan Pendapatan Hibah – LRA Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hibah – LO Rp 137.730.587.622,73

Pendapatan Hibah – LRA Rp 8.084.153.000,00

Selisih = Rp129.646.434.622,73

Selisih sebesar Rp129.646.434.622,73 berasal dari SKPD yaitu :

Tabel 5. 175

Pendapatan Hibah LRA – LO pada SKPD

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	89.913.920.981,44	89.913.920.981,44
2	Dinas Kesehatan	-	28.201.315.302,15	28.201.315.302,15
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	5.162.810.000,00	5.162.810.000,00

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
4	Dinas Sosial	-	2.209.374.638,34	2.209.374.638,34
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	39.550.000,00	39.550.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	102.645.562,00	102.645.562,00
7	Dinas Perhubungan	-	176.600.000,00	176.600.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	42.000.000,00	42.000.000,00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	148.000,00	148.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	2.816.650,00	2.816.650,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	216.319.190,00	216.319.190,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	1.515.809.095,80	1.515.809.095,80
13	Sekretariat Daerah	-	617.934.000,00	617.934.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8.084.153.000,00	9.508.797.678,00	1.424.644.678,00
15	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	10.659.900,00	10.659.900,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	9.886.625,00	9.886.625,00
	JUMLAH	**8.084.153.000,00**	**137.730.587.622,73**	**129.646.434.622,73**

Penjelasan :

1. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp89.913.920.981,44 meliputi :
   a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp16.485.348.518,44
   b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp95.000.000,00
   c) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp27.728.508.099,00
   d) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp45.605.064.364,00
2. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.201.315.302,15 meliputi :
   a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp28.087.581.588,15
   b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp4.300.000,00
   c) Penyesuaian untuk mencatat hibah obat dari Kementerian Kesehatan yang di salurkan melalui Dinas Kesehatan Bantul pada RS. Respira sebesar Rp109.433.714,00
3. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.162.810.000,00 merupakan :
   a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp182.640.000,00 yaitu Kementerian Dalam Negeri berupa meubel
   b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp4.980.170.000,00 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis Berjaga-Jaga Lainnya yaitu tenda, selimut, velbed, perahu katamaran, genset, dan matras sebesar Rp2.004.813.000,00 dan Tanah Huntap sebesar Rp2.975.357.000,00.
4. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Dinas Sosial sebesar Rp2.209.374.638,34 merupakan :

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp 2.009.374.638,34 yaitu Kementerian Sosial berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
b) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp200.000.000,00 yaitu PT. BPD DIY sebesar berupa 1 unit kendaraan (mobil ambulance)

5. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp39.550.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa peralatan elektronik
6. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp102.645.562,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO berupa bibit/benih tanaman
7. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perhubungan sebesar Rp176.600.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar Rp164.500.000,00 dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dari PT. Juara Bike (SELIS) sebesar Rp 12.100.000,00 berupa 2 unit Elektronik Motor Sepeda
8. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp42.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO yaitu CSR PT BPD DIY berupa komputer sebesar Rp13.150.000,00 dan rehabilitasi area publik papan nama kantor sebesar Rp28.850.000,00
9. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp148.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO berupa tanah yang baru dicatat pada tahun 2024 namun sudah diterima dari tahun 2022.
10. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.816.650,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa buku koleksi perpustakaan sebanyak 50 eksemplar
11. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp216.319.190,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp216.319.190,00 merupakan penyesuaian pengakuan hasil produksi
12. Pendapatan Hibah-LO pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.515.809.095,80 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp227.017.000,00 yaitu Kementerian Pertanian c.q Ditjend Perkebunan berupa kendaraan minibus dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp1.288.792.095,80 yaitu penambahan hasil inventaris atas produksi usaha daerah. Oleh karen itu,selama proses inventarisasi diketahui bahwa terdapat pertambahan usia dan pertambahan kuantitas akibat berkembang biak.
13. Pendapatan Hibah-LO pada Sekretariat Daerah sebesar Rp617.934.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
14. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp9.508.797.678,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp1.423.354.678,00 ;

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp8.084.153.000,00 ; dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp1.290.000,00. Pendapatan Hibah-LO terdiri atas dua bentuk hibah, yaitu:

- Hibah uang sebesar Rp8.084.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah dari Dealer Otomotif sebesar Rp3.813.413.000,00
  - Pendapatan hibah dari Main Dealer sebesar Rp24.000.000,00
  - Pendapatan hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp4.246.740.000,00
- Hibah barang sebesar Rp1.423.354.678,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pendapatan hibah atas hibah masuk aset tetap dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp 747.401.996,00
  - Pendapatan hibah atas hibah masuk aset tetap dari Balai Besar PJN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp675.952.682,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp1.290.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari:

- Pembayaran piutang dan penambahan penyisihan piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp900.000,00
- Penambahan Dana Bergulir pada *Net Present Value* sebesar Rp20.676.000,00
- Penambahan bunga dan denda dana bergulir sebesar Rp390.000,00
- Penyesuaian nilai Neto antara penambahan Penyisihan dan Pengurangan Penyisihan sebesar (Rp20.676.000,00)

15. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.659.900,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO yang berasal dari :
    - PT. BPD DIY sebesar Rp709.900,00 berupa peralatan hidrologi (troli)
    - Peserta Diklat PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) sebesar Rp9.000.000,00 berupa Alat Pendingin (AC standing)
    - Peserta Diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sebesar Rp950.000,00 berupa Alat Kedokteran Umum (kursi dorong)
16. Pendapatan Hibah-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp9.886.625 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO yaitu Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum berupa laptop.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.1.3.2 Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO	**Rp0,00**	**Rp5.028.016,00**

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.028.016,0 atau 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2 Beban	**Rp5.610.813.380.933,16**	**Rp5.451.846.042.753,06**

Beban Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.610.813.380.933,16. Beban Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp158.967.338.180,10 atau sebesar 2,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Pemda DIY merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 176
Rincian Beban

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Operasi	3.682.388.239.499,54	3.552.693.665.642,60	129.694.573.856,94	3,65
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	455.508.600.416,80	449.417.178.923,25	6.091.421.493,55	1,36
3	Beban Transfer	1.472.896.541.016,82	1.449.536.710.919,21	23.359.830.097,61	1,61
4	Beban Tidak Terduga	20.000.000,00	198.487.268,00	(178.487.268,00)	(89,92)
	JUMLAH	**5.610.813.380.933,16**	**5.451.846.042.753,06**	**158.967.338.180,10**	**2,92**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1 Beban Operasi	**Rp3.682.388.239.499,54**	**Rp3.552.693.665.642,60**

Beban Operasi Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.682.388.239.499,54. Beban Operasi Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp129.694.573.856,94 atau 3,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Operasi Pemda DIY terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 177
Rincian Beban Operasi – LO

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pegawai	1.650.498.776.567,00	1.572.433.471.898,00	78.065.304.669,00	4,96
2	Beban Barang dan Jasa	1.273.341.369.470,21	1.264.556.443.361,37	8.784.926.108,84	0,69
3	Beban Subsidi	75.368.890.530,00	74.269.644.598,00	1.099.245.932,00	1,48
4	Beban Hibah	652.312.293.535,00	613.132.476.638,17	39.179.816.896,83	6,39
5	Beban Bantuan Sosial	29.662.372.000,00	28.261.169.932,00	1.401.202.068,00	4,96
6	Beban Penyisihan Piutang	1.204.537.397,33	40.459.215,06	1.164.078.182,27	2.877,16
	JUMLAH	**3.682.388.239.499,54**	**3.552.693.665.642,60**	**129.694.573.856,94**	**3,65**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	**Rp1.650.498.776.567,00**	**Rp1.572.433.471.898,00**

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp1.650.498.776.567,00. Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp78.065.304.669,00 atau 4,96%. Beban Pegawai Pemda DIY merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri

sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.650.498.776.567,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 178
Rincian Beban Pegawai

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	855.264.789.188,00	808.682.248.876,00	46.582.540.312,00	5,76
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	438.639.253.066,00	422.087.962.608,00	16.551.290.458,00	3,92
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	309.386.282.906,00	280.470.927.589,00	28.915.355.317,00	10,31
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	42.122.865.113,00	41.604.449.192,00	518.415.921,00	1,25
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	236.039.583,00	235.925.116,00	114.467,00	0,05
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.317.000.000,00	3.562.000.000,00	(245.000.000,00)	(6,88)
8	Beban Pegawai BLUD	1.532.546.711,00	15.789.958.517,00	(14.257.411.806,00)	(90,29)
	JUMLAH	**1.650.498.776.567,00**	**1.572.433.471.898,00**	**78.065.304.669,00**	**4,96**

Tabel 5. 179
Rincian Beban Pegawai pada SKPD

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	928.696.301.836,00	862.942.243.585,00	65.754.058.251,00	7,62
2	Dinas Kesehatan	107.368.669.389,00	100.678.811.812,00	6.689.857.577,00	6,64
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	39.594.553.837,00	39.110.261.485,00	484.292.352,00	1,24
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.472.574.363,00	9.107.839.410,00	364.734.953,00	4,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.662.967.288,00	13.055.472.721,00	(1.392.505.433,00)	(10,67)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.590.961.827,00	9.699.479.478,00	891.482.349,00	9,19
7	Dinas Sosial	37.772.904.833,00	38.448.436.006,00	(675.531.173,00)	(1,76)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.039.346.154,00	26.286.763.751,00	752.582.403,00	2,86
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.619.027.468,00	7.889.670.177,00	(270.642.709,00)	(3,43)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.568.808.141,00	38.893.859.807,00	1.674.948.334,00	4,31

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
11	Dinas Perhubungan	13.516.643.077,00	13.553.770.709,00	(37.127.632,00)	(0,27)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.334.018.117,00	8.844.470.146,00	489.547.971,00	5,54
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.235.354.891,00	7.048.763.051,00	186.591.840,00	2,65
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.966.094.652,00	7.908.075.920,00	58.018.732,00	0,73
15	Dinas Kebudayaan	21.433.779.371,00	21.653.651.914,00	(219.872.543,00)	(1,02)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14.759.672.755,00	14.491.355.324,00	268.317.431,00	1,85
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.917.634.029,00	16.659.459.770,00	258.174.259,00	1,55
18	Dinas Pariwisata	9.321.110.710,00	8.474.691.931,00	846.418.779,00	9,99
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.148.786.378,00	44.337.405.575,00	(2.188.619.197,00)	(4,94)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.597.194.357,00	15.646.250.666,00	(1.049.056.309,00)	(6,70)
21	Sekretariat Daerah	65.238.502.524,00	62.317.860.972,00	2.920.641.552,00	4,69
22	Paniradya Kaistimewan	7.577.435.346,00	6.722.049.501,00	855.385.845,00	12,73
23	Sekretariat DPRD	51.207.971.633,00	50.711.094.924,00	496.876.709,00	0,98
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.111.206.750,00	16.258.990.774,00	(147.784.024,00)	(0,91)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	80.614.113.785,00	81.428.952.462,00	(814.838.677,00)	(1,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah	14.484.679.123,00	13.510.441.825,00	974.237.298,00	7,21
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.607.515.311,00	10.065.720.598,00	541.794.713,00	5,38
28	Badan Penghubung Daerah	5.520.581.978,00	5.612.784.514,00	(92.202.536,00)	(1,64)
29	Inspektorat	14.831.283.508,00	14.192.027.837,00	639.255.671,00	4,50
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.689.083.136,00	6.882.815.253,00	(193.732.117,00)	(2,81)
	JUMLAH	**1.650.498.776.567,00**	**1.572.433.471.898,00**	**78.065.304.669,00**	**4,96**

Terdapat perbedaan saldo akhir pada Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2024 dengan Belanja Pegawai Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Pegawai – LO Rp1.650.498.776.567,00

Belanja Pegawai – LRA Rp1.651.782.965.460,00

Selisih = (Rp1.284.188.893,00)

Selisih sebesar (Rp1.284.188.893,00) berasal dari beberapa SKPD yaitu :

Tabel 5. 180

Selisih Belanja – Beban Pegawai

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	928.728.710.636,00	928.696.301.836,00	(32.408.800,00)
2	Dinas Kesehatan	108.613.015.033,00	107.368.669.389,00	(1.244.345.644,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	39.594.553.837,00	39.594.553.837,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.472.574.363,00	9.472.574.363,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.662.967.288,00	11.662.967.288,00	-

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.590.961.827,00	10.590.961.827,00	-
7	Dinas Sosial	37.772.904.833,00	37.772.904.833,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.039.346.154,00	27.039.346.154,00	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.619.027.468,00	7.619.027.468,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.568.808.141,00	40.568.808.141,00	-
11	Dinas Perhubungan	13.516.643.077,00	13.516.643.077,00	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.334.018.117,00	9.334.018.117,00	-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.235.354.891,00	7.235.354.891,00	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.966.094.652,00	7.966.094.652,00	-
15	Dinas Kebudayaan	21.433.779.371,00	21.433.779.371,00	-
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	14.759.672.755,00	14.759.672.755,00	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.917.634.029,00	16.917.634.029,00	-
18	Dinas Pariwisata	9.321.110.710,00	9.321.110.710,00	-
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.148.786.378,00	42.148.786.378,00	-
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.597.194.357,00	14.597.194.357,00	-
21	Sekretariat Daerah	65.242.731.731,00	65.238.502.524,00	(4.229.207,00)
22	Paniradya Kaistimewan	7.577.435.346,00	7.577.435.346,00	-
23	Sekretariat DPRD	51.207.971.633,00	51.207.971.633,00	-
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.111.206.750,00	16.111.206.750,00	-
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	80.614.113.785,00	80.614.113.785,00	-
26	Badan Kepegawaian Daerah	14.486.807.585,00	14.484.679.123,00	(2.128.462,00)
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.608.592.091,00	10.607.515.311,00	(1.076.780,00)
28	Badan Penghubung Daerah	5.520.581.978,00	5.520.581.978,00	-
29	Inspektorat	14.831.283.508,00	14.831.283.508,00	-
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.689.083.136,00	6.689.083.136,00	-
	JUMLAH	**1.651.782.965.460,00**	**1.650.498.776.567,00**	**(1.284.188.893,00)**

Penjelasan :

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar (Rp32.408.800,00) merupakan pengakuan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023
2) Dinas Kesehatan sebesar (Rp1.244.345.644,00) merupakan pengakuan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023
3) Sekretariat Daerah sebesar (Rp4.229.207,00) merupakan adanya pengakuan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023
4) Badan Kepegawaian Daerah sebesar (Rp2.128.462,00) merupakan pengakuan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023
5) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar (Rp1.076.780,00) merupakan pengakuan pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023

Terdapat perbedaan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai sebesar (Rp1.284.188.893,00) yang berasal dari :

1) Selisih Utang Belanja Pegawai Tahun Akhir dan Awal sebesar Rp27.990.210,00
2) Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar (Rp1.312.179.103,00)

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	**Rp1.273.341.369.470,21**	**Rp1.264.556.443.361,37**

Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.273.341.369.470,21. Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.784.926.108,84 atau sebesar 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa Pemda DIY merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2024 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 181
Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Barang	410.369.525.706,59	360.427.307.180,73	49.942.218.525,86	13,86
2	Beban Jasa	593.627.917.056,00	618.697.769.345,10	(25.069.852.289,10)	(4,05)
3	Beban Pemeliharaan	61.893.619.043,66	72.270.565.991,51	(10.376.946.947,85)	(14,36)
4	Beban Perjalanan Dinas	107.968.945.722,00	109.359.963.864,00	(1.391.018.142,00)	(1,27)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.882.754.829,00	39.270.097.575,00	1.612.657.254,00	4,11
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	64.469.150.050,03	(64.469.150.050,03)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	58.598.607.112,96	-	58.598.607.112,96	-
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	61.589.355,00	(61.589.355,00)	(100,00)
	JUMLAH	**1.273.341.369.470,21**	**1.264.556.443.361,37**	**8.784.926.108,84**	**0,69**

Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.273.341.369.470,21 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 182
Beban Barang dan Jasa pada SKPD

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	372.637.510.374,97	336.796.262.304,83	35.841.248.070,14	10,64
2	Dinas Kesehatan	161.117.830.576,19	143.802.373.616,19	17.315.456.960,00	12,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	95.292.123.125,23	72.277.882.141,11	23.014.240.984,12	31,84
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.641.662.496,00	14.591.403.273,00	(4.949.740.777,00)	(33,92)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.389.796.552,00	19.208.930.611,29	(1.819.134.059,29)	(9,47)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.137.415.706,92	11.877.723.564,49	(3.740.307.857,57)	(31,49)
7	Dinas Sosial	31.596.201.607,31	45.524.459.011,05	(13.928.257.403,74)	(30,60)

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.434.297.369,36	24.807.043.555,96	10.627.253.813,40	42,84
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.050.855.022,00	9.853.563.417,00	(1.802.708.395,00)	(18,29)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.063.865.535,56	21.439.148.864,16	(3.375.283.328,60)	(15,74)
11	Dinas Perhubungan	21.765.828.415,29	18.150.107.638,17	3.615.720.777,12	19,92
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.529.097.052,00	19.578.075.500,50	(48.978.448,50)	(0,25)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	69.563.627.863,00	54.199.633.945,00	15.363.993.918,00	28,35
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.302.502.068,17	3.930.104.538,83	372.397.529,34	9,48
15	Dinas Kebudayaan	115.829.389.022,47	139.116.881.747,98	(23.287.492.725,51)	(16,74)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18.071.513.740,63	22.191.199.908,90	(4.119.686.168,27)	(18,56)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.336.752.067,68	31.645.708.635,86	(8.308.956.568,18)	(26,26)
18	Dinas Pariwisata	21.985.618.746,75	26.779.676.774,00	(4.794.058.027,25)	(17,90)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.777.434.785,82	23.620.074.706,31	157.360.079,51	0,67
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.858.945.461,35	23.951.295.063,67	(6.092.349.602,32)	(25,44)
21	Sekretariat Daerah	41.244.095.553,96	44.417.526.939,59	(3.173.431.385,63)	(7,14)
22	Paniradya Kaistimewan	18.055.349.324,00	17.019.646.053,00	1.035.703.271,00	6,09
23	Sekretariat DPRD	65.963.589.565,00	70.033.196.022,00	(4.069.606.457,00)	(5,81)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.835.351.672,20	4.781.860.914,60	53.490.757,60	1,12
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	11.167.176.507,50	17.476.061.569,74	(6.308.885.062,24)	(36,10)
26	Badan Kepegawaian Daerah	5.654.157.239,16	8.800.076.850,45	(3.145.919.611,29)	(35,75)
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.827.690.891,00	11.399.807.265,00	(4.572.116.374,00)	(40,11)
28	Badan Penghubung Daerah	5.827.875.627,34	5.643.453.401,69	184.422.225,65	3,27
29	Inspektorat	9.240.234.674,00	9.311.251.181,00	(71.016.507,00)	(0,76)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.143.580.827,35	12.332.014.346,00	(1.188.433.518,65)	(9,64)
	JUMLAH	**1.273.341.369.470,21**	**1.264.556.443.361,37**	**8.784.926.108,84**	**0,69**

Terdapat perbedaan saldo akhir Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2024 dengan Belanja Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbedaan Saldo :

Beban Barang dan Jasa – LO Rp1.273.341.369.470,21

Belanja Barang dan Jasa – LRA Rp1.155.896.100.440,35

Selisih = Rp 117.445.269.029,86

Selisih sebesar Rp117.445.269.029,86 berasal dari beberapa SKPD yaitu:

Tabel 5. 183

Belanja – Beban Barang dan Jasa

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	332.819.739.933,00	372.637.510.374,97	39.817.770.441,97
2	Dinas Kesehatan	98.398.157.766,35	161.117.830.576,19	62.719.672.809,84
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	73.304.750.403,00	95.292.123.125,23	21.987.372.722,23
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.796.428.369,00	9.641.662.496,00	(154.765.873,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.746.710.306,00	17.389.796.552,00	643.086.246,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.177.042.391,00	8.137.415.706,92	1.960.373.315,92
7	Dinas Sosial	31.243.394.290,00	31.596.201.607,31	352.807.317,31
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.273.313.006,00	35.434.297.369,36	160.984.363,36
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	8.113.019.679,00	8.050.855.022,00	(62.164.657,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.659.409.435,00	18.063.865.535,56	(595.543.899,44)
11	Dinas Perhubungan	21.601.105.137,00	21.765.828.415,29	164.723.278,29
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.408.022.422,00	19.529.097.052,00	121.074.630,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	65.340.506.166,00	69.563.627.863,00	4.223.121.697,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.292.177.212,00	4.302.502.068,17	10.324.856,17
15	Dinas Kebudayaan	116.724.377.422,00	115.829.389.022,47	(894.988.399,53)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18.768.518.869,00	18.071.513.740,63	(697.005.128,37)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.835.699.197,00	23.336.752.067,68	501.052.870,68
18	Dinas Pariwisata	21.966.453.525,00	21.985.618.746,75	19.165.221,75
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.579.469.525,00	23.777.434.785,82	(802.034.739,18)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.922.918.448,00	17.858.945.461,35	(63.972.986,65)
21	Sekretariat Daerah	41.377.901.102,00	41.244.095.553,96	(133.805.548,04)
22	Paniradya Kaistimewan	17.978.082.654,00	18.055.349.324,00	77.266.670,00
23	Sekretariat DPRD	65.956.292.952,00	65.963.589.565,00	7.296.613,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.883.394.944,00	4.835.351.672,20	(48.043.271,80)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	22.928.337.669,00	11.167.176.507,50	(11.761.161.161,50)
26	Badan Kepegawaian Daerah	5.793.739.089,00	5.654.157.239,16	(139.581.849,84)
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.829.500.832,00	6.827.690.891,00	(1.809.941,00)
28	Badan Penghubung Daerah	5.692.915.217,00	5.827.875.627,34	134.960.410,34
29	Inspektorat	9.363.021.637,00	9.240.234.674,00	(122.786.963,00)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.121.700.843,00	11.143.580.827,35	21.879.984,35
	JUMLAH	**1.155.896.100.440,35**	**1.273.341.369.470,21**	**117.445.269.029,86**

Penjelasan :

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp39.817.770.441,97 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp394.526.630,00)
   - Selisih Beban Dibayar Dimuka antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.509.031,20

- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.332.095.096,53)
- Ekstrakomtabel sebesar Rp1.023.684.885,30
- Hibah persediaan sebesar Rp44.904.789.563,00
- Reklasifikasi dari beban pegawai sebesar Rp31.588.000,00
- Reklasifikasi dari beban hibah sebesar Rp3.423.900.000,00
- Reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp227.491.717,00
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp2.680.000,00
- Reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar (Rp621.361.283,00)
- Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan sebesar (Rp29.989.745,00)
- Penyesuaian karena salah pencatatan beban sebesar (Rp3.423.900.000,00)

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp62.719.672.809,84 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp326.062.248,04)
   - Selisih Beban Dibayar Dimuka antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp44.996.925,37
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp36.290.941.696,36
   - Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp28.087.581.588,15
   - Kapitalisasi ke persediaan dari aset tetap sebesar Rp27.555.000,00
   - Reklasifikasi dari pemeliharaan ke peralatan dan mesin sebesar (Rp35.346.700,00)
   - Reklasifikasi dari pemeliharaan ke gedung dan bangunan sebesar (Rp227.940.005,00)
   - Reklasifikasi dari Jasa Konsultansi Pengawasan Fasilitasi Pengembangan Instalasi Laboratorium RS Jiwa Grhasia ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp8.130.750,00)
   - Beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar (Rp2.367.901.500,00)
   - Reklasifikasi ke aset tetap dari persediaan sebesar (Rp55.831.000,00)
   - Koreksi ekstrakomtabel sebesar Rp1.076.700,00
   - Ekstrakomtabel sebesar Rp8.142.000,00
   - Reklasifikasi beban pegawai BLUD ke beban jasa tenaga kesehatan BLKK sebesar Rp1.280.591.103,00

3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp21.987.372.722,23 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp120.564.053,00)
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp821.426.968,77)
   - Reklasifikasi dari Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp104.387.648.192,00
   - Ekstrakomtabel sebesar Rp1.878.675,00
   - Reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp400.617.200,00

- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.926.575,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp73.303.600,00)
- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp140.025.635,00)
- Penyesuaian karena salah pencatatan beban sebesar (Rp81.723.377.663)

4) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar (Rp154.765.873,00) berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp802.777,00
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.934.350,00
   - Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah sebesar (Rp98.940.000,00)
   - Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp49.650.000,00)
   - Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp21.978.000,00)
   - Mutasi masuk Persediaan dari BPBD sebesar Rp12.065.000,00
5) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp643.086.246,00 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8.136.166,00
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp19.760.080,00
   - Mutasi masuk persediaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.046.250.000,00
   - Reklasifikasi persediaan ke aset tetap sebesar (Rp432.560.000,00)
   - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.500.000,00
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.960.373.315,92 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.224.665,00)
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.154.338.480,92
   - Mutasi keluar ke SKPD lain sebesar (Rp1.198.684.000,00)
   - Hibah masuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.004.813.000,00
   - Temuan stock opname Inspektorat sebesar Rp4.130.500,00
7) Dinas Sosial sebesar Rp352.807.317,31 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.185.953,00)
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp350.952.269,31
   - Reklas Persediaan ke Aset Tetap sebesar (Rp391.000,00)
   - Reklas Aset ke Persediaan sebesar Rp701.000,00
   - Hibah dari Kementerian Sosial sebesar Rp525.000,00
   - Reklas Aset ke Extracom sebesar Rp2.206.001,00
8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp160.984.363,36 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp281.653,00)

- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp80.222.483,64)
- Reklas dari Beban Hibah ke Persediaan sebesar Rp8.869.520.500,00
- Ekstrakom sebesar Rp425.000,00
- Mutasi masuk Persediaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp30.270.000,00
- Penyesuaian karena salah pencatatan beban sebesar (Rp8.658.727.000,00)

9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar (Rp62.164.657,00) berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.459.403,00)
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp43.667.254,00)
   - Reklas Belanja Aset Tetap ke Belanja Persediaan sebesar Rp1.932.000,00
   - Beban Aset Tetap Ekstrakomptabel sebesar Rp150.000,00
   - Reklasifikasi dari belanja persediaan ke belanja modal sebesar (Rp19.120.000,00)
10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar (Rp595.543.899,44) berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.800.757,00)
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.899.778.512,40
   - Penyesuaian Harga Pokok Produksi sebesar (Rp2.218.295.427,84)
   - Mutasi masuk Persediaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp15.760.000,00
   - Produksi Persediaan (Bahan/Bibit Tanaman) sebesar Rp102.645.562,00
   - Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 644.910,00
   - Reklas dari Beban Hibah sebesar Rp180.020.200,00
   - Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp3.111.500,00)
   - Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp261.959.299,00)
   - Reklas ke Aset Tak Berwujud sebesar (Rp13.500.000,00)
   - Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp62.139.850,00)
   - Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaaan Jalan Irigsai dan Jaringan sebesar (Rp50.566.050,00)
   - Penyesuaian pencatatan beban hibah sebesar (Rp180.020.200,00)
11) Dinas Perhubungan sebesar Rp164.723.278,29 berasal dari :
   - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.134.816,00
   - Selisih Beban Dibayar Dimuka antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp18.530.377,67
   - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.602.266.748,62
   - Ekstrakomtabel sebesar Rp32.683.999,00

- Temuan inspektorat atas Persediaan sebesar Rp2.878.593,00
- Hibah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp164.500.000,00
- Penyesuaian saldo awal Persediaan sebesar (Rp1.731.600,00)
- Reklasifikasi ke Beban Hibah sebesar (Rp2.190.000.000,00)
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp70.386.206,00)
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp89.953.450,00)
- Penyesuaian pencatatan beban pemeliharaan sebesar (Rp306.200.000,00)

12) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp121.074.630,00 berasal dari :
    - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp350.155,00)
    - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp117.860.285,00)
    - Ekstrakomtabel sebesar Rp3.208.540,00
    - Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan ke Alat Komunikasi Telephone sebesar (Rp2.061.270,00)
    - Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Jaringan ke Persediaan Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp238.137.800,00
13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.223.121.697,00 berasal dari :
    - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp19.697.507,00
    - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp51.694.968,75)
    - Ekstrakomtabel sebesar Rp11.993.580,00
    - Kapitalisasi Beban Jasa ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp439.310.250,00)
    - Reklas Persediaan dari Peralatan Mesin sebesar Rp23.393.428,75
    - Reklas Persediaan dari Beban Bantuan Sosial sebesar Rp4.643.192.400,00
    - Reklas Beban Pemeliharaan dari Peralatan Mesin sebesar Rp15.850.000,00
14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp10.324.856,17 berasal dari :
    - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.807.894,00)
    - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.132.750,17
15) Dinas Kebudayaan sebesar (Rp894.988.399,53) berasal dari :
    - Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.615.705,00
    - Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp396.887.695,47
    - Temuan inspektorat atas persediaan sebesar Rp12.740.000,00
    - Ekstrakom sebesar Rp6.009.000,00
    - Reklasifikasi ke Beban Hibah sebesar (Rp442.476.000,00)
    - Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp38.553.150,00)

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp741.700.150,00)
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringansebesar (Rp66.511.500,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp33.000.000,00)

16) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar (Rp697.005.128,37) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp402.104,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp63.592.859,63
- Reklasifikasi dari belanja jasa ke aset lainnya sebesar (Rp780.000.000,00)
- Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan ke aset peralatan dan mesin sebesar (Rp9.435.000,00)
- Mutasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp23.340.000,00
- Pecah Aset menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp5.094.908,00

17) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp501.052.870,68 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.316.045,00)
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp278.187.725,68
- Ekstrakomtabel sebesar Rp2.520.000,00
- Reklasifikasi Persediaan dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.342.000,00
- Reklasifikasi Persediaan dari Beban Hibah Barang sebesar Rp5.745.000.700,00
- Pengakuan hasil produksi sebesar Rp216.319.190,00
- Penyesuaian pencatatan beban hibah sebesar (Rp5.745.000.700,00)

18) Dinas Pariwisata sebesar Rp19.165.221,75 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.892.632,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.845.851,00
- Mutasi masuk sebesar Rp426.738,75

19) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar (Rp802.034.739,18) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.869.652,33
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.854.135,32)
- Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset Tetap sebesar (Rp51.658.000,00)
- Pengurangan persediaan cadangan beras karena diedarkan sebesar (Rp6.288.172,50)
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan sebesar Rp468.000,00
- Penambahan Persediaan dari Belanja Hibah sebesar Rp19.897.015.939,00
- Mutasi Masuk Persediaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.808.000,00
- Kenaikan nilai persediaan karena pertambahan usia dan berkembang biak sebesar Rp1.288.792.095,80

- Penyesuaian pendapatan LO karena perhitungan HPP sebesar (Rp2.035.172.179,49)
- Koreksi karena salah pencatatan beban sebesar (Rp19.897.015.939,00)

20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp63.972.986,65) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.279.235,00)
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp118.454.453,90)
- Ekstrakomtabel sebesar Rp87.172.441,00
- Koreksi Penjualan Karena Perhitungan HPP sebesar (Rp30.410.000,00)
- Persediaan dari belanja hibah sebesar Rp990.668.046,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp425.000,00
- Mutasi Keluar Persediaan ke Dinas Pariwisata sebesar (Rp426.738,75)
- Pembebanan Persediaan Hibah sebesar (Rp996.692.046,00)
- Penyesuaian pencatatan beban hibah sebesar Rp6.024.000,00

21) Sekretariat Daerah sebesar (Rp133.805.548,04) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp7.021.032,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp157.297.580,04)
- Mutasi Persediaan dari BPBD sebesar Rp18.871.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Alat Kantor Lainnya (Rp2.400.000,00)

22) Paniradya Kaistimewan sebesar Rp77.266.670,00 merupakan selisih persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

23) Sekretariat DPRD sebesar Rp7.296.613,00 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.322.442,00)
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp10.121.055,00
- Penyesuaian pencatatan extrakom sebesar Rp498.000,00

24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar (Rp48.043.271,80) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp17.468,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp48.060.739,80)

25) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar (Rp11.761.161.161,50) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp9.479.193,00)
- Selisih Beban Dibayar Dimuka antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp74.073.003,89
- Selisih persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp354.660.983,90
- Defisit Penjualan Barang Milik Daerah sebesar (Rp12.151.286.668,29)

- Ekstrakomtabel sebesar Rp1.700.000,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar (Rp34.059.018,00)
- Reklas dari Peralatan Mesin Rp793.650,00
- Penyesuaian saldo awal persediaan sebesar Rp2.436.080,00

26) Badan Kepegawaian Daerah sebesar (Rp139.581.849,84) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.336.592,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp159.451,84)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Jasa Interior desain sebesar (Rp74.200.000,00)
- Reklasifikasi Jasa Desain Interior ke KDP Bangunan Gedung Kantor sebesar (Rp78.486.990,00)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi PKN ke Persediaan Perlengkapan Dinas sebesar Rp928.000,00

27) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar (Rp1.809.941,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp173.198,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp38.395.769,00)
- Mutasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp34.600.000,00
- Esktrakomtabel sebesar Rp1.812.630,00

28) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp134.960.410,34 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.578.281,00)
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp108.298.691,34
- Reklasifikasi intra Gedung dan Bangunan ke ekstrakomtabel sebesar Rp31.240.000,00

29) Inspektorat sebesar (Rp122.786.963,00) berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp863.856,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp40.949.219,00)
- Kapitalisasi jasa konsultansi sebesar (Rp82.701.600,00)

30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp21.879.984,35 berasal dari :
- Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.521.080,00
- Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp19.358.904,35

Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar Rp117.445.269.029,86 berasal dari :

1) Selisih Utang Barang dan Jasa antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp804.754.021,71)

2) Selisih Beban Dibayar Dimuka antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Rp143.109.338,13
3) Selisih Persediaan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp36.356.929.204,56
4) Selisih Penyesuaian Lainnya sebesar Rp201.248.446.296,88
5) Penyesuaian pencatatan ekstrakomtabel sebesar Rp498.000,00
6) Penyesuaian pencatatan Beban Hibah sebesar (Rp119.622.017.502,00)
7) Penyesuaian Beban Barang Jasa menjadi persediaan sebesar (Rp306.200.000,00)

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.3 Beban Subsidi	**Rp75.368.890.530,00**	**Rp74.269.644.598,00**

Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.368.890.530,00. Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.099.245.932,00 atau sebesar 1,48% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2024 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral melalui PDAB Tirtatama sebesar Rp5.341.600.000,00 dan Dinas Perhubungan melalui PT. AMI (Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja) sebesar Rp70.027.290.530,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum *(public service obligation)*.

Beban Subsidi Pemda DIY Tahun 2024 merupakan beban biaya produksi yang diberikan kepada PDAB Tirtatama yang bertugas dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemberian subsidi pada PDAB Tirtatama mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama dan dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service.* Beban Subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.4 Beban Hibah	**Rp652.312.293.535,00**	**Rp613.132.476.638,17**

Beban Hibah Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp652.312.293.535,00. Beban Hibah Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp39.179.816.896,83 atau sebesar 6,39%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Hibah Pemda DIY merupakan beban hibah yang diberikan dalam bentuk uang dan barang. Beban Hibah Pemda DIY meliputi :

1) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp121.209.558.976,00 ;
2) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp15.567.297.980,00
3) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp278.069.031.422,00
4) Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp10.493.725.000,00
5) Beban Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp107.350.662.655,00
6) Koreksi beban hibah sebesar Rp119.622.017.502,00

Terdapat perbedaan saldo akhir beban hibah dengan belanja hibah Pemda DIY Tahun 2024.
Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Hibah – LO	Rp652.312.293.535,00
Belanja Hibah – LRA	Rp653.554.770.630,00
Selisih =	(Rp 1.242.477.095,00)

Selisih sebesar (Rp1.242.477.095,00) berasal dari beberapa SKPD yaitu :

Tabel 5. 184
Selisih Belanja – Beban Hibah

No.	SKPD	REALISASI LRA (Rp)	REALISASI LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	226.613.406.695,00	226.613.406.695,00	-
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	85.387.537.258,00	81.723.377.663,00	(3.664.159.595,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	944.340.800,00	944.340.800,00	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	239.493.000,00	239.493.000,00	-
6	Dinas Sosial	437.863.000,00	437.863.000,00	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.869.520.500,00	8.658.727.000,00	(210.793.500,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	915.000.000,00	915.000.000,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	180.020.200,00	180.020.200,00	-
10	Dinas Perhubungan	2.152.520.000,00	4.342.520.000,00	2.190.000.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	812.706.486,00	812.706.486,00	-
12	Dinas Kebudayaan	265.575.953.006,00	266.018.429.006,00	442.476.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.745.000.700,00	5.745.000.700,00	-
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.897.015.939,00	19.897.015.939,00	-
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	990.668.046,00	990.668.046,00	-
16	Sekretariat Daerah	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	-
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.493.725.000,00	10.493.725.000,00	-
	JUMLAH	**653.554.770.630,00**	**652.312.293.535,00**	**(1.242.477.095,00)**

Penjelasan :

1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp3.664.159.595,00) merupakan beban persediaan yang belum terealisasi karena masih terdapat barang yang belum diserahkan kepada masyarakat

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar (Rp210.793.500,00) merupakan beban persediaan yang belum terealisasi karena masih terdapat barang yang belum diserahkan kepada Masyarakat di Tahun 2024.
3) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.190.000.000,00 merupakan beban hibah yang terjadi karena hibah tahun lalu yang baru diserahkan pada tahun 2024
4) Dinas Kebudayaan sebesar Rp442.476.000,00 berasal dari :
   - Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp1.243.008.450,00 ke Beban Hibah.
   - Reklasifikasi ke persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar (Rp800.532.450,00)

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial	**Rp29.662.372.000,00**	**Rp28.261.169.932,00**

Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.662.372.000,00 terdiri dari :

1) Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp29.206.800.000,00
2) Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp15.765.000,00
3) Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp380.000.000,00
4) Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp21.000.000,00
5) Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp38.807.000,00

Terdapat perbedaan saldo akhir beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Bantuan Sosial – LO	Rp29.662.372.000,00
Belanja Bantuan Sosial – LRA	Rp53.305.675.334,00
Selisih =	(Rp23.643.303.334,00)

Selisih sebesar (Rp23.643.303.334,00) berasal dari :

1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar (Rp19.000.110.934,00) merupakan reklasifikasi ke persediaan
2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar (Rp4.643.192.400,00) merupakan reklasifikasi ke persediaan

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang	**Rp1.204.537.397,33**	**Rp40.459.215,06**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp1.204.537.397,33 berasal dari :

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp609.750,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset berupa Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi,
2) Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.589.885,83 berupa Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
3) Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.186.337.761,50 berupa :
   - Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi sebesar Rp293.200,00

- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp189.943.929,50
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp152.517.282,00
- Penyesuaian Investasi Non Permanen /Dana Bergulir - penyisihan piutang Dana Bergulir sebesar Rp843.583.350,00

Terdapat selisih sebesar Rp998.479.653,18 antara Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.204.537.397,33 dengan Selisih Penyisihan Piutang (2024-2023) sebesar Rp206.057.744,15. Selisih tersebut berasal dari :

1) penambahan penyisihan piutang sebesar Rp997.390.632,00
2) penghapusan penyisihan piutang sebesar Rp1.089.021,18

		Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.1	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**Rp455.508.600.416,80**	**Rp449.417.178.923,25**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp455.508.600.416,80. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.091.421.493,55 atau 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 185
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201.095.932.536,43	205.791.179.405,56	(4.695.246.869,13)	(2,28)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.786.305.419,80	56.468.902.028,29	2.317.403.391,51	4,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	191.145.467.967,46	181.823.001.806,33	9.322.466.161,13	5,13
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	212.099.743,62	253.656.006,03	(41.556.262,41)	(16,38)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.268.794.749,49	5.080.439.677,04	(811.644.927,55)	(15,98)
	JUMLAH	**455.508.600.416,80**	**449.417.178.923,25**	**6.091.421.493,55**	**1,36**

Penjelasan :

1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp201.095.932.536,43 terdiri dari:
   - Beban Penyusutan Alat Besar sebesar Rp9.694.675.699,82
   - Beban Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp18.885.628.560,64
   - Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp10.309.805.872,51
   - Beban Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp1.494.470.067,77
   - Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp49.914.944.717,77
   - Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp15.688.630.300,69
   - Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp7.307.415.318,65

- Beban Penyusutan Alat Laboratorium sebesar Rp25.337.392.285,93
- Beban Penyusutan sebesar Rp1.023.598.087,16
- Beban Penyusutan Komputer sebesar Rp52.969.163.234,66
- Beban Penyusutan Alat Eksplorasi sebesar Rp164.826.382,3
- Beban Penyusutan Alat Pengeboran sebesar Rp9.493.995,00
- Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp27.174.931,3
- Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp1.887.000,00
- Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp1.045.155.137,51
- Beban Penyusutan Alat Peraga sebesar Rp55.462.102,74
- Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp525.765.667,53
- Beban Penyusutan Rambu-Rambu sebesar Rp6.148.621.842,75
- Beban Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar Rp491.821.331,70

2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp58.786.305.419,80 terdiri dari:
   - Beban Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp57.734.615.360,69
   - Beban Penyusutan Monumen sebesar Rp310.898.220,04
   - Beban Penyusutan Bangunan Menara sebesar Rp16.336.330,00
   - Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp724.455.509,07
3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan JaringanTahun 2024 sebesar Rp191.145.467.967,46 terdiri dari :
   - Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp155.258.216.196,84
   - Beban Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp18.404.428.170,82
   - Beban Penyusutan Instalasi sebesar Rp14.536.555.954,60
   - Beban Penyusutan Jaringan sebesar Rp2.946.267.645,20
4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp212.099.743,62 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
5) Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp4.268.794.794,49 merupakan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tabel 5. 186
Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	124.137.889.091,03	121.671.708.018,94	2.466.181.072,09	2,03
2	Dinas Kesehatan	14.074.353.583,21	13.376.452.592,38	697.900.990,83	5,22
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	175.931.082.889,27	169.007.751.656,45	6.923.331.232,82	4,10
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.001.563.577,32	1.825.800.154,78	(824.236.577,46)	(45,14)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.416.888.834,96	1.328.106.475,10	88.782.359,86	6,68
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.409.874.831,53	3.546.213.478,54	(136.338.647,01)	(3,84)
7	Dinas Sosial	4.032.420.378,66	3.991.743.529,21	40.676.849,45	1,02

No.	SKPD	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.319.829.616,95	3.891.948.685,02	(572.119.068,07)	(14,70)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.117.923.997,32	1.115.523.233,82	2.400.763,50	0,22
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.968.665.322,66	6.489.663.528,68	(520.998.206,02)	(8,03)
11	Dinas Perhubungan	17.360.673.019,02	14.370.140.960,15	2.990.532.058,87	20,81
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.922.361.364,21	14.957.529.726,88	(2.035.168.362,67)	(13,61)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.773.316.925,00	5.373.113.130,26	2.400.203.794,74	44,67
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	482.887.860,92	480.729.668,70	2.158.192,22	0,45
15	Dinas Kebudayaan	12.704.174.260,54	11.940.093.265,34	764.080.995,20	6,40
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.868.671.754,13	8.121.438.397,61	(252.766.643,48)	(3,11)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.243.487.860,90	7.364.411.966,33	3.879.075.894,57	52,67
18	Dinas Pariwisata	3.540.149.909,04	3.416.169.822,68	123.980.086,36	3,63
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.619.306.477,38	6.033.675.383,35	585.631.094,03	9,71
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.227.455.788,23	7.283.416.300,36	(55.960.512,13)	(0,77)
21	Sekretariat Daerah	5.352.932.135,55	5.390.815.712,02	(37.883.576,47)	(0,70)
22	Paniradya Kaistimewan	1.844.443.565,83	1.658.080.475,05	186.363.090,78	11,24
23	Sekretariat DPRD	6.350.058.311,12	6.713.663.467,19	(363.605.156,07)	(5,42)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	492.588.953,98	517.148.858,46	(24.559.904,48)	(4,75)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	13.214.077.853,96	23.979.529.339,91	(10.765.451.485,95)	(44,89)
26	Badan Kepegawaian Daerah	1.318.590.281,07	1.006.347.729,63	312.242.551,44	31,03
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.027.472.365,29	1.089.956.451,50	(62.484.086,21)	(5,73)
28	Badan Penghubung Daerah	1.231.978.343,45	788.796.703,19	443.181.640,26	56,18
29	Inspektorat	2.351.127.788,86	2.488.677.463,54	(137.549.674,68)	(5,53)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	172.353.475,41	198.532.748,18	(26.179.272,77)	(13,19)
	JUMLAH	**455.508.600.416,80**	**449.417.178.923,25**	**6.091.421.493,55**	**1,36**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.3 Beban Transfer	**Rp1.472.896.541.016,82**	**Rp1.449.536.710.919,21**

Beban Transfer Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.472.896.541.016,82. Beban Transfer Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.359.830.097,61 atau 1,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Transfer Pemda DIY Tahun 2024 merupakan Beban Transfer yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY (BPKA DIY) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeran (SKPKD). Beban Transfer Pemda DIY Tahun 2024 terdiri dari :

1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebesar Rp911.842.572.564,00 didapat dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp 870.359.406.509,00 ditambah pengakuan utang belanja bagi hasil atas kurang bayar pajak daerah TA 2024 sebesar Rp43.148.004.520,00 dikurangi pembayaran utang belanja bagi hasil atas kurang bayar pajak daerah TA 2023 sebesar Rp1.664.838.465,00.

2) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp561.053.968.452,82

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 187
Rincian Beban Transfer

No.	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil	911.842.572.564,00	880.433.811.574,00	31.408.760.990,00	3,57
	- Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	911.842.572.564,00	880.433.811.574,00	31.408.760.990,00	3,57
2	Beban Bantuan Keuangan	561.053.968.452,82	569.102.899.345,21	(8.048.930.892,39)	(1,41)
	- Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	428.964.512.711,77	432.033.573.508,53	(3.069.060.796,76)	(0,71)
	- Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	132.089.455.741,05	137.069.325.836,68	(4.979.870.095,63)	(3,63)
	JUMLAH	**1.472.896.541.016,82**	**1.449.536.710.919,21**	**23.359.830.097,61**	**1,61**

Terdapat perbedaan saldo akhir beban transfer dengan belanja transfer Pemda DIY Tahun 2024. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Bagi Hasil – LO Rp1.472.896.541.016,82
Belanja Bagi Hasil – LRA Rp1.431.413.374.961,82
Selisih = (Rp 41.483.166.055,00)

Selisih sebesar (Rp41.483.166.055,00) berasal dari selisih pelunasan utang belanja bagi hasil tahun 2023 dengan pengakuan utang belanja bagi hasil pajak tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.2.4 Beban Tidak Terduga	**Rp20.000.000,00**	**Rp198.487.268,00**

Beban Tidak Terduga Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp20.000.000,00. Beban Tidak Terduga Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp178.487.268,00) atau (89,92%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beban Tidak Terduga Pemda DIY Tahun 2024 merupakan Beban Tidak Terduga yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeran (SKPKD) untuk belanja yang tidak direncanakan bagi korban bencana Hidrometeorologi atas nama Ibu Nuraeni yang dirawat di RS Panti Rapih Yogyakarta.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi – LO	**Rp461.919.001.054,09**	**Rp645.736.622.978,47**

Surplus/Defisit Dari Operasi - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp461.919.001.054,09. Surplus/Defisit Kegiatan - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp183.817.621.924,38 atau 28,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Pemda DIY merupakan Pendapatan - LO sebesar Rp6.072.732.381.987,25 dikurangi dengan Beban sebesar Rp5.610.813.380.933,16.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(Rp41.597.445.331,07)**	**(Rp29.979.985.949,44)**

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar (Rp41.597.445.331,07). Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.617.459.381,63 atau 38,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Non Operasional sebesar Rp1.429.259.326,64 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp43.026.704.657,71. Surplus Non Operasional merupakan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp1.429.259.326,64 sedangkan Defisit Non Operasional merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp43.026.704.657,71.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4.1 Surplus Non Operasional	**Rp1.429.259.326,64**	**Rp2.202.881.429,51**

Surplus Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp1.429.259.326 merupakan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar. Surplus Non Operasional - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp773.622.102,87 atau 35,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4.1.1 Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	**Rp1.429.259.326,64**	**Rp1.718.356.184,51**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.429.259.326,64 berasal dari:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp177.365.187,16 merupakan hasil dari surplus penjualan minyak kayu putih (selisih perhitungan) yang merupakan biaya pengelolaan minyak kayu putih dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp1.852.962.751,00. Produksi yang dihasilkan sebanyak 20.003 liter dengan biaya produksi per liter sebesar Rp92.634,24. Total pendapatan dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.428.770.740,00 sedangkan persediaan yang terjual adalah senilai Rp2.251.405.553,00 sehingga terdapat selisih pendapatan atas penjualan minyak kayu putih dikurangi dengan total persediaan yang terjual.
2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.251.894.139,48 merupakan surplus dari penjualan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:
   - Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah, SMA, SMK dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp358.499.999,24
   - Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 4 sebesar Rp110.409.216,00
   - Penjualan Barang Milik Daerah berupa Tebangan Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan dan Paket Pelebaran Jalan menuju Standar Brosot-Toyan sebesar Rp11.600.000,00
   - Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada

Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp567.999.999,24

- Penjualan berupa 33 (tiga puluh tiga) unit Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp68.000.000,00
- Penjualan berupa : 1) Bangunan Gedung Kantor Permanen (eks Gedung UPTD BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di JL. AM Sangaji No. 41 Yogyakarta. 2) Bangunan Gedung Kantor (eks UPT Kulit-Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) di Jl. Parangtritis Km 11, Manding, Sabdodadi, Kabupaten Bantul sebesar Rp10.626.240,00
- Penjualan berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp16.300.000,00
- Penjualan berupa 25 Ekor Hewan Ternak Kambing/Domba pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sebesar Rp4.458.685,00
- Penjualan BMD berupa Peralatan Mesin dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp61.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon pada Unit Produksi Tambak UPTD BP3MBTP, RS Jiwa Grhasia, TPA Piyungan dan JJLS Segmen Ngremang-Garongan sebesar Rp18.000.000,00
- Penjualan BMD berupa Sisa Tanah Galian pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo-Watugajah sebesar Rp25.000.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**Rp0,00**	**Rp484.525.245,00**

Surplus Penyelesaian Jangka Panjang Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp484.525.245,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4.2 Defisit Non Operasional	**Rp43.026.704.657,71**	**Rp32.182.867.378,95**

Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp43.026.704.657,71. Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.843.837.278,76 atau 33,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.4.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	**Rp43.026.704.657,71**	**Rp32.182.867.378,95**

Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp43.026.704.657,71. Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar. Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.843.837.278,76 atau 33,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Defisit Non Operasional Pemda DIY Tahun 2024 sebesar Rp43.026.704.657,71 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.292.182.227,99 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.016.002.666,25 berasal dari :
   - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp635.377.666,25
   - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO sebesar Rp380.625.000,00
3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp97.249.787,12 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp35.889.203,80 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
5) Dinas Sosial sebesar Rp24.965.981,36 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.023.487.020,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp75.150.000,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
8) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.448.340.489,80 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
9) Dinas Perhubungan sebesar Rp9.634.564.168,15 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
10) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp1.382.576.739,88 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
11) Dinas Kebudayaan sebesar Rp51.097.461,18 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
12) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp14.545.472,01 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
13) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.821.521,53 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
14) Dinas Pariwisata sebesar Rp1.812.696.050,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
15) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.102.120.327,82 berasal dari :
   - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah-LO sebesar Rp227.568.312,8
   - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO sebesar Rp315.567.775,69
   - Defisit Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman-LO sebesar Rp298.869.841,00
   - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp260.114.398,33
16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp132.303.571,00 berasal dari :
   - Defisit Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya-LO sebesar Rp3.410.000,00
   - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp128.893.571,00

17) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.208.373,50 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
18) Sekretariat DPRD sebesar Rp41.340.030,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
19) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp3.744.531,25 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
20) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp10.698.132.412,97 berasal dari :
    - Defisit Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO sebesar Rp6.952.844.222,00
    - Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-LO sebesar Rp 22.258.636,94
    - Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar Rp3.200.745.738,02
    - Defisit Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO sebesar Rp68.338.371,00
    - Defisit Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya-LO sebesar Rp59.367.183,33
    - Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp6.640.217,00
    - Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO sebesar Rp387.938.044,68
21) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp58.873.767,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
22) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.514.755,10 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
23) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp58.898.100,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.4.5 Surplus/Defisit - LO	**Rp420.321.555.723,02**	**Rp615.756.637.029,03**

Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp420.321.555.723,02. Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp195.435.081.306,01 atau 31,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit - LO Pemda DIY Tahun 2024 merupakan selisih antara Surplus/Defisit LO dari Operasi (Pendapatan-LO dengan Beban-LO) sebesar Rp461.919.001.054,09 dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp41.597.445.331,07).

5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Insentif Fiskal, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, Hibah dan Penerimaan Lainnya, dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	**Rp6.021.952.319.745,08**	**Rp5.836.455.695.443,65**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.021.952.319.745,08 berasal dari:

Tabel 5. 188
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	2.157.532.293.945,00	2.069.612.267.000,57
2	Penerimaan Retribusi Daerah	79.460.801.542,00	33.213.267.052,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.935.677.671,93	109.790.680.460,56
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.459.940.884,15	151.957.646.091,52
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	114.258.373.000,00	105.991.568.501,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	100.412.000,00	93.403.856,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.337.180.068.000,00	1.267.622.165.192,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	674.709.425.040,00	635.781.168.630,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.396.157.452.432,00	1.372.725.809.224,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	80.876.155.000,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	12.089.917.000,00	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	983.805.230,00	835.906.420,00
13	Penerimaan Hibah	8.084.153.000,00	7.950.630.000,00
14	Penerimaan Lainnya	-	5.028.016,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**6.021.952.319.745,08**	**5.836.455.695.443,65**

Di dalam Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terdapat Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp120.459.940.884,15, berbeda dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp123.577.792.400,15 di dalam Laporan Realisasi Anggaran karena Penjualan dari Aset Tetap sebesar Rp3.117.851.516,00 merupakan bagian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	**Rp5.021.341.777.356,17**	**Rp4.960.501.194.274,41**

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.021.341.777.356,17 dipergunakan untuk:

Tabel 5. 189

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.651.782.965.460,00	1.572.322.039.241,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.155.896.100.440,35	1.245.945.486.879,20
3	Pembayaran Subsidi	75.368.890.530,00	74.269.644.598,00
4	Pembayaran Hibah	653.554.770.630,00	583.965.119.370,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	53.305.675.334,00	28.286.453.932,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	561.053.968.452,82	569.102.899.345,21
7	Pembayaran Tidak Terduga	20.000.000,00	198.487.268,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	870.359.406.509,00	886.411.063.641,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**5.021.341.777.356,17**	**4.960.501.194.274,41**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.1.3 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**Rp1.000.610.542.388,91**	**Rp875.954.501.169,24**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.610.542.388,91 berasal dari:

Tabel 5. 190

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	6.021.952.319.745,08	5.836.455.695.443,65
2	Arus Keluar Kas	(5.021.341.777.356,17)	(4.960.501.194.274,41)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**1.000.610.542.388,91**	**875.954.501.169,24**

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.2.1 Arus Kas Masuk	**Rp3.478.527.516,00**	**Rp7.389.129.648,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.478.527.516,00 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 191

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penjualan atas Tanah	25.000.000,00	-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.645.996.016,00	584.945.979,0(
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	195.750.000,00	2.330.982.569,0(

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	251.105.500,00	570.340.000,00
5	Penjualan atas Aset Lainnya	-	619.037.100,00
6	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	360.676.000,00	3.283.824.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**3.478.527.516,00**	**7.389.129.648,00**

Penjelasan:

1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Tanah sebesar Rp25.000.000,00 merupakan Penjualan Tanah yang merupakan sisa urugan atau timbunan pada perbaikan jalan.
2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.645.996.016,00 merupakan penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.116.208.800,00, dan Alat Angkutan sebesar Rp1.529.787.216,00.
3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp195.750.000,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp251.105.500,00 merupakan penjualan Hewan sebesar Rp205.205.500,00, dan Tanaman sebesar Rp45.900.000,00.
5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp360.676.000,00 merupakan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 192
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat**	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**20.676.000,00**
	- DPM LDPM	10.000.000,00
	- DPM LUEP	10.676.000,00
	BUKP	**340.000.000,00**
	Total	**360.676.000,00**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	**Rp861.653.310.940,95**	**Rp1.050.354.723.452,00**

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp861.653.310.940,95 dipergunakan untuk:

Tabel 5. 193
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Perolehan atas Tanah	35.792.256.125,00	169.306.929.192,00
2	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	204.099.193.397,00	186.110.825.035,00
3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	220.538.449.546,95	150.886.570.710,00
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	182.299.322.051,00	225.450.247.009,00
5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	11.562.606.421,00	13.437.651.506,00
6	Perolehan atas Aset Lainnya	4.861.483.400,00	162.500.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000.000,00	300.000.000.000,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**861.653.310.940,95**	**1.050.354.723.452,00**

Penjelasan :

- Arus Keluar Kas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD DIY.
- Arus Keluar Kas Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan berupa Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat melalui BUKP.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.2.3 Arus Keluar Kas Bersih-Aktivitas Investasi	**Rp(858.174.783.424,95)**	**Rp(1.042.965.593.804,00)**

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(858.174.783.424,95) berasal dari:

Tabel 5. 194
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	3.478.527.516,00	7.389.129.648,00
2	Arus Keluar Kas	(861.653.310.940,95)	(1.050.354.723.452,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	**(858.174.783.424,95)**	**(1.042.965.593.804,00)**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, dalam Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.3.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	**Rp5.617.470.433.226,00**	**Rp5.782.166.417.755,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.617.470.433.226,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 195
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	231.395.383.099,00	49.646.917.980,00
2	Pengembalian UP/GU/TU/LS	38.070.623.118,23	38.499.339.514,79
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU/LS	5.348.004.427.008,77	5.694.020.160.260,21
	Jumlah Arus Kas Masuk	**5.617.470.433.226,00**	**5.782.166.417.755,00**

Arus Masuk Kas yang berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp231.395.383.099,00 terdiri dari:

Tabel 5. 196
Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	37.665.463.860,00
2	PPh Pasal 21	62.841.488.074,00
3	PPn	108.963.103.819,00
4	PPh Pasal 22	4.215.697.009,00
5	PPh Pasal 23	5.078.490.144,00
6	PPh Pasal 4 (2)	12.584.339.600,00
7	Pajak Lainnya	46.800.593,00
	Jumlah	**231.395.383.099,00**

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU/LS sebesar Rp38.070.623.118,23, Pengesahan SPJ UP/GU/TU/S sebesar Rp5.348.004.427.008,77 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 197
Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU/LS (Rp)	SPJ UP/GU/TU/LS (Rp)	Pengembalian UP/TU/GU/LS (Rp)	Sisa uang persediaan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.367.645.161.459,00	1.359.243.399.099,00	8.401.762.360,00	-
2	Dinas Kesehatan	206.508.044.170,00	206.162.740.402,00	345.303.768,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	410.272.162.306,00	408.219.568.017,00	2.052.594.289,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	23.791.719.788,00	23.541.861.132,00	249.858.656,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.028.020.666,00	28.419.558.979,00	608.461.687,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30.134.339.840,00	30.001.581.447,00	132.758.393,00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.122.545.122,00	17.047.525.142,00	75.019.980,00	-
8	Dinas Sosial	100.054.635.341,00	99.308.689.542,00	745.945.799,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.285.074.411,00	72.081.668.422,00	203.405.989,00	-

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU/LS (Rp)	SPJ UP/GU/TU/LS (Rp)	Pengembalian UP/TU/GU/LS (Rp)	Sisa uang persediaan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	16.736.364.824,00	16.694.734.147,00	41.630.677,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61.323.785.767,00	60.640.901.749,00	682.884.018,00	-
12	Dinas Perhubungan	126.583.700.739,00	126.358.226.146,00	225.474.593,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.258.051.693,00	47.147.354.388,00	110.697.305,00	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	184.739.177.716,00	183.749.128.596,00	990.049.120,00	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.572.938.597,00	12.482.470.313,00	90.468.284,00	-
16	Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*	407.137.783.660,00	405.676.354.946,00	1.461.428.714,00	-
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	34.349.598.662,00	33.829.297.726,00	520.300.936,00	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	53.696.123.076,00	53.201.865.281,30	494.257.794,70	-
19	Dinas Pariwisata	34.758.190.762,00	34.275.238.735,00	482.952.027,00	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	97.312.905.528,00	96.916.093.960,00	396.811.568,00	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58.206.536.035,00	57.499.447.388,00	707.088.647,00	-
22	Sekretariat Daerah	137.753.021.682,00	135.899.298.916,00	1.853.722.766,00	-
23	Paniradya Kaistimewan	28.917.020.577,00	28.759.976.677,65	157.043.899,35	-
24	Badan Penghubung Daerah	11.316.739.328,00	11.295.072.195,00	21.667.133,00	-
25	Sekretariat DPRD	124.993.239.102,00	117.864.216.057,00	7.129.023.045,00	-
26	Inspektorat	24.655.456.925,00	24.570.692.785,00	84.764.140,00	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.601.074.607,00	21.289.780.694,00	311.293.913,00	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.546.160.348.548,00	1.537.025.735.371,82	9.134.613.176,18	-
29	Badan Kepegawaian Daerah	80.254.200.981,00	80.131.761.224,00	122.439.757,00	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	18.907.088.215,00	18.670.187.531,00	236.900.684,00	-
	JUMLAH	**5.386.075.050.127,00**	**5.348.004.427.008,77**	**38.070.623.118,23**	**-**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	**Rp5.617.470.433.226,00**	**Rp5.782.166.417.755,00**

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.617.470.433.226,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 198
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	231.395.383.099,00	49.646.917.980,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	5.386.075.050.127,00	5.732.519.499.775,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**5.617.470.433.226,00**	**5.782.166.417.755,00**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.4.3 Arus Kas Bersih	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 199
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	5.617.470.433.226,00	5.782.166.417.755,00
2	Arus Kas Keluar	(5.617.470.433.226,00)	(5.782.166.417.755,00)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.5 Kenaikan Penurunan Kas	**Rp142.435.758.963,96**	**Rp(167.011.092.634,76)**

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp142.435.758.963,96 berasal dari:

Tabel 5. 200
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	1.000.610.542.388,91	875.954.501.169,24
2	Aktivitas Investasi	(858.174.783.424,95)	(1.042.965.593.804,00)
	Jumlah	**142.435.758.963,96**	**(167.011.092.634,76)**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.5.6 Saldo Akhir Kas	**Rp437.696.229.284,44**	**Rp315.881.587.526,42**

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp437.696.229.284,44 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp315.881.587.526,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 201
Rincian Kas Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di BUD	401.871.389.579,29	252.515.577.083,21
2	Kas di Bendahara Penerimaan	37.854.231,00	97.916.954,00
3	Kas di BLUD	35.113.673.098,15	41.402.784.212,27
4	Kas Dana BOS	673.312.376,00	1.244.192.071,00
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	**437.696.229.284,44**	**295.260.470.320,48**
1	Kas Lainnya - Jaminan Tambang	-	20.621.117.205,94
	Jumlah Kas (Neraca)	**437.696.229.284,44**	**315.881.587.526,42**

Penjelasan:

Kas di BUD (Kasda) sebesar Rp401.871.389.579,29 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.854.231,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah terdapat pada :

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.756.000,00.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.368.000,00

3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp14.116.231,00.
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp480.000,00.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp2.784.000,00
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.350.000,00.

Kas di BLUD sebesar Rp35.113.673.098,15 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD di Dinas Kesehatan dan BLUD di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 202
Rincian Kas di BLUD

NO	BLUD	GIRO BPD	JASA GIR0	GIRO BTN	JUMLAH
1	RS Grhasia	8.632.436.440,61	2.294.510,00	509.111.795,56	9.143.842.746,17
2	RS Paru Respira	11.360.881.131,36	6.984.686,00	-	11.367.865.817,36
3	Balai Pelatihan Kesehatan	3.469.720.547,00	-	-	3.469.720.547,00
4	Balai Laboratorium Kesehatan	7.868.575.830,62	9.612.525,00	-	7.878.188.355,62
5	Balai Latihan Pendidkan Teknik (BLPT)	2.593.477.212,00	2.991.683,00	-	2.596.468.895,00
6	SMKN 6 Yogyakarta	326.055.905,00	380.541,00	-	326.436.446,00
7	SMKN 1 Sewon Bantul	78.969.296,00	61.874,00	-	79.031.170,00
8	SMKN 3 Wonosari	68.836.442,00	68.836,00	-	68.905.278,00
9	SMKN 5 Yogyakarta	16.696.047,00	20.307,00	-	16.716.354,00
10	SMKN 2 Depok	10.416.103,00	-	-	10.416.103,00
11	SMKN 2 Yogyakarta	28.311.290,00	29.367,00	-	28.340.657,00
12	SMKN 1 Saptosari	5.415.742,00	6.769,00	-	5.422.511,00
13	SMKN 2 Pengasih	23.662.515,00	29.228,00	-	23.691.743,00
14	SMKN 1 Kalasan	4.949.749,00	2.938,00	-	4.952.687,00
15	SMKN 1 Cangkringan	881.617,00	1.102,00	-	882.719,00
16	SMKN 2 Wonosari	92.702.236,00	88.833,00	-	92.791.069,00
	JUMLAH	**34.581.988.103,59**	**22.573.199,00**	**509.111.795,56**	**35.113.673.098,15**

Kas Dana BOS sebesar Rp673.312.376,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa BOS Reguler sebesar Rp438.632.790,00 dan sisa BOS Kinerja sebesar Rp234.679.586,00. Kas Lainnya - Jaminan Tambang sebesar Rp0,00 karena telah direklasifikasi ke Aset Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya).

5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas, yang antara lain merupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.1 Ekuitas Awal	**Rp13.170.046.237.337,80**	**Rp12.528.014.950.938,50**

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.170.046.237.337,80 mengalami kenaikan sebesar Rp642.031.286.399,30 atau 5,12% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 203
Rincian Ekuitas Awal pada SKPD

No	SKPD	EKUITAS AWAL TAHUN 2024 (Rp)	EKUITAS AWAL TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.726.249.365.085,80	1.663.147.344.422,71	63.102.020.663,09	3,79
2	Dinas Kesehatan	323.170.785.199,53	260.664.368.697,88	62.506.416.501,65	23,98
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.681.472.779.828,78	4.509.119.901.744,19	172.352.878.084,59	3,82
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	111.157.366.779,67	113.763.032.577,45	(2.605.665.797,78)	(2,29)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.602.628.876,07	9.964.835.365,46	2.637.793.510,61	26,47
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.511.492.399,31	27.405.488.989,34	(3.893.996.590,03)	(14,21)
7	Dinas Sosial	104.911.713.561,38	106.614.847.079,64	(1.703.133.518,26)	(1,60)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.659.602.545,45	46.685.203.518,09	(3.025.600.972,64)	(6,48)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	23.596.663.603,86	23.774.975.041,18	(178.311.437,32)	(0,75)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	143.514.924.296,60	122.243.655.298,29	21.271.268.998,31	17,40
11	Dinas Perhubungan	169.908.857.255,52	138.855.618.354,51	31.053.238.901,01	22,36
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.108.521.010,61	51.664.596.586,99	(1.556.075.576,38)	(3,01)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	308.843.200.715,42	178.772.508.985,30	130.070.691.730,12	72,76
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.436.065.465,48	5.530.036.984,45	(93.971.518,97)	(1,70)
15	Dinas Kebudayaan	615.257.289.110,87	512.722.579.505,22	102.534.709.605,65	20,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	158.910.989.079,74	165.417.704.779,25	(6.506.715.699,51)	(3,93)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	321.396.276.484,47	303.903.559.427,76	17.492.717.056,71	5,76
18	Dinas Pariwisata	136.660.436.669,59	137.306.530.561,79	(646.093.892,20)	(0,47)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	252.486.368.497,02	234.871.665.457,55	17.614.703.039,47	7,50

No	SKPD	EKUITAS AWAL TAHUN 2024 (Rp)	EKUITAS AWAL TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69.549.330.721,62	71.181.511.033,15	(1.632.180.311,53)	(2,29)
21	Sekretariat Daerah	243.201.393.709,65	241.625.248.118,65	1.576.145.591,00	0,65
22	Paniradya Kaistimewan	12.664.580.399,38	11.318.688.110,49	1.345.892.288,89	11,89
23	Sekretariat DPRD	88.528.633.522,31	92.553.032.001,10	(4.024.398.478,79)	(4,35)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.172.052.996,27	12.156.297.920,33	15.755.075,94	0,13
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.426.100.449.426,95	3.387.355.288.460,40	38.745.160.966,55	1,14
26	Badan Kepegawaian Daerah	19.871.795.848,69	12.002.758.858,06	7.869.036.990,63	65,56
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.890.671.553,97	25.707.728.605,47	(817.057.051,50)	(3,18)
28	Badan Penghubung Daerah	24.928.140.672,11	24.416.356.395,99	511.784.276,12	2,10
29	Inspektorat	34.081.127.023,65	35.953.947.775,39	(1.872.820.751,74)	(5,21)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.202.734.998,01	1.315.640.282,43	(112.905.284,42)	(8,58)
	JUMLAH	**13.170.046.237.337,80**	**12.528.014.950.938,50**	**642.031.286.399,30**	**5,12**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.2 Surplus/Defisit – LO	**Rp420.321.555.723,02**	**Rp615.756.637.029,03**

Surplus/Defisit LO Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp420.321.555.723,02. Surplus/Defisit LO Pemda DIY Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp195.435.081.306,01) atau (31,74%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus/Defisit LO Pemda DIY merupakan Surplus/Defisit LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 204
Rincian Surplus / Defisit – LO pada SKPD

No.	SKPD	PENDAPATAN - LO (Rp)	BEBAN (Rp)	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS NON OPERASIONAL (Rp)	DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS/DEFISIT LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	99.950.178.026,44	1.652.085.107.997,00	(1.552.134.929.970,56)	-	11.292.182.227,99	(1.563.427.112.198,55)
2	Dinas Kesehatan	81.242.291.849,72	282.950.797.477,90	(201.708.505.628,18)	-	1.016.002.666,25	(202.724.508.294,43)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	2.613.207.501,00	397.882.737.514,50	(395.269.530.013,50)	-	97.249.787,12	(395.366.779.800,62)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	20.115.800.436,32	(20.115.800.436,32)	-	-	(20.115.800.436,32)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	255.812.000,00	31.413.993.474,96	(31.158.181.474,96)	-	-	(31.158.181.474,96)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.162.810.000,00	22.393.510.365,45	(17.230.700.365,45)	-	35.889.203,80	(17.266.589.569,25)
7	Dinas Sosial	2.813.574.638,34	103.485.996.818,97	(100.672.422.180,63)	-	24.965.981,36	(100.697.388.161,99)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.940.626.113,00	74.452.200.140,31	(72.511.574.027,31)	-	1.023.487.020,00	(73.535.061.047,31)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	39.550.000,00	17.702.806.487,32	(17.663.256.487,32)	-	75.150.000,00	(17.738.406.487,32)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.954.109.654,00	64.781.359.199,22	(58.827.249.545,22)	177.365.187,16	4.448.340.489,80	(63.098.224.847,86)
11	Dinas Perhubungan	3.615.148.208,42	127.012.955.041,31	(123.397.806.832,89)	-	9.634.564.168,15	(133.032.371.001,04)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	195.020.000,00	42.598.183.019,21	(42.403.163.019,21)	-	-	(42.403.163.019,21)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	755.478.123,00	84.572.299.679,00	(83.816.821.556,00)	-	1.382.576.739,88	(85.199.398.295,88)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	165.090.000,00	12.751.484.581,09	(12.586.394.581,09)	-	-	(12.586.394.581,09)
15	Dinas Kebudayaan	6.239.461.601,00	415.985.771.660,01	(409.746.310.059,01)	-	51.097.461,18	(409.797.407.520,19)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.091.145.839,00	40.699.858.249,76	(39.608.712.410,76)	-	14.545.472,01	(39.623.257.882,77)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.373.066.292,00	57.242.874.657,58	(55.869.808.365,58)	-	18.821.521,53	(55.888.629.887,11)

No.	SKPD	PENDAPATAN - LO (Rp)	BEBAN (Rp)	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS NON OPERASIONAL (Rp)	DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp)	SURPLUS/DEFISIT LO (Rp)
18	Dinas Pariwisata	226.554.286,00	34.846.879.365,79	(34.620.325.079,79)	-	1.812.696.050,00	(36.433.021.129,79)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.471.878.742,80	92.442.543.580,20	(89.970.664.837,40)	-	1.102.120.327,82	(91.072.785.165,22)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	303.285.624,00	40.674.263.652,58	(40.370.978.028,58)	-	132.303.571,00	(40.503.281.599,58)
21	Sekretariat Daerah	848.988.354,31	135.935.530.213,51	(135.086.541.859,20)	-	1.208.373,50	(135.087.750.232,70)
22	Paniradya Kaistimewan	-	27.477.228.235,83	(27.477.228.235,83)	-	-	(27.477.228.235,83)
23	Sekretariat DPRD	-	123.521.619.509,12	(123.521.619.509,12)	-	41.340.030,00	(123.562.959.539,12)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	21.439.147.376,18	(21.439.147.376,18)	-	3.744.531,25	(21.442.891.907,43)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.851.599.725.109,22	1.578.926.502.631,11	4.272.673.222.478,11	1.251.894.139,48	10.698.132.412,97	4.263.226.984.204,62
26	Badan Kepegawaian Daerah	334.730.000,00	21.457.426.643,23	(21.122.696.643,23)	-	58.873.767,00	(21.181.570.410,23)
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.925.718.400,00	18.462.678.567,29	(15.536.960.167,29)	-	2.514.755,10	(15.539.474.922,39)
28	Badan Penghubung Daerah	605.045.000,00	12.580.435.948,79	(11.975.390.948,79)	-	58.898.100,00	(12.034.289.048,79)
29	Inspektorat	-	26.422.645.970,86	(26.422.645.970,86)	-	-	(26.422.645.970,86)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.886.625,00	28.498.742.438,76	(28.488.855.813,76)	-	-	(28.488.855.813,76)
	JUMLAH	**6.072.732.381.987,25**	**5.610.813.380.933,16**	**461.919.001.054,09**	**1.429.259.326,64**	**43.026.704.657,71**	**420.321.555.723,02**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	**Rp455.227.920.135,14**	**Rp26.274.649.370,24**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp455.227.920.135,14. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp428.953.270.764,90 atau 1.742,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rincian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 205
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	20.453.573,00	24.613.709.309,11
2	Koreksi Penyertaan Modal	(57.517.563.402,35)	(1.044.997.436,81)
3	Koreksi Aset Tetap	553.156.781.993,17	440.546.025,62
4	Kapitalisasi Belanja Jasa Tahun Lalu	-	1.520.181.329,00
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(40.432.968.349,64)	420.259.870,90
6	Koreksi Penyisihan Piutang	1.089.021,18	324.950.272,42
7	Koreksi Pendapatan Diterima di Muka	127.299,78	-
	JUMLAH	**455.227.920.135,14**	**26.274.649.370,24**

Penjelasan :

1) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp20.453.573,00 berasal dari :
   - Penyesuaian Saldo Awal pada Dinas Perhubungan berkurang sebesar Rp1.731.600,00
   - Inventarisasi Persediaan belum tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp2.436.080,00
   - Koreksi Temuan Inspektorat sebesar Rp19.749.093,00 terdapat pada :
     - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp2.878.593,00
     - ✓ Dinas Kebudayaan sebesar Rp12.740.000,00
     - ✓ Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.130.500,00
2) Koreksi Penyertaan Modal berkurang sebesar Rp57.517.563.402,35 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
3) Koreksi Aset Tetap sebesar Rp553.156.781.993,17 adalah koreksi pada:
   - Tanah sebesar Rp543.116.602.658,12
   - Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.454.656.428,06
   - Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.990.318.584,50
   - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.486.813.757,89
   - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp228.229.900,60
   - Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp1.522.317.500,00
   - Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.519.067.500,00
   - Kemitraan dengan Pihak Ketiga berkurang sebesar Rp2.116.589.336,00
4) Koreksi Akumulasi Penyusutan berkurang sebesar Rp40.432.968.349,64 dengan rincian :
   - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp79.026.980,60
   - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp38.524.858.928,15
   - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berkurang sebesar Rp1.990.124.291,81

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp161.041.850,92

5) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp1.089.021,18 merupakan penyesuaian penyisihan piutang pada :
   - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp30.640,00
   - ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.058.381,18
6) Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp127.299,78 terdapat pada Sekretariat Daerah.

Tabel 5. 206
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan pada SKPD

No	SKPD	DAMPAK KUMULATIF 2024 (Rp)	DAMPAK KUMULATIF 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	51.538.904.141,54	1.680.830.330,66	49.858.073.810,88	2.966,28
2	Dinas Kesehatan	41.010.694.010,47	24.657.887.766,31	16.352.806.244,16	66,32
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	419.982.629.576,55	74.247.347.707,43	345.735.281.869,12	465,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(13.787.512.524,66)	-	(13.787.512.524,66)	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.241.798.000,00	29.607.500,00	1.212.190.500,00	4.094,20
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(990.081.268,03)	(42.686.252,00)	(947.395.016,03)	2.219,44
7	Dinas Sosial	(12.850.616.067,41)	12.025.487,50	(12.862.641.554,91)	(106.961,50)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(208.823.261,04)	(23.088.080,00)	(185.735.181,04)	804,46
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(6.991.875,00)	18.156.858,50	(25.148.733,50)	(138,51)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(58.550.056,10)	4.239.818.668,48	(4.298.368.724,58)	(101,38)
11	Dinas Perhubungan	1.177.633,00	30.883.561.452,55	(30.882.383.819,55)	(100,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.318.107.500,00	-	6.318.107.500,00	-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	42.407.984.347,37	30.325.608.601,38	12.082.375.745,99	39,84
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(32.925.727,44)	32.925.727,44	(100,00)
15	Dinas Kebudayaan	(134.279.625.560,68)	94.820.240.600,00	(229.099.866.160,68)	(241,61)
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	118.085.296,20	-	118.085.296,20	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(90.270.156,63)	-	(90.270.156,63)	-
18	Dinas Pariwisata	24.378.238,75	453.035.757,38	(428.657.518,63)	(94,62)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.108.371,94	76.250.000,00	(65.141.628,06)	(85,43)
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.980.119.902,25	82.050.033,50	5.898.069.868,75	7.188,38
21	Sekretariat Daerah	(318.183.819,36)	(244.319.849,44)	(73.863.969,92)	30,23
22	Paniradya Kaistimewan	27.427.857,13	(45.310.132,06)	72.737.989,19	(160,53)
23	Sekretariat DPRD	1.110.909.205,74	29.607.500,00	1.081.301.705,74	3.652,12

No	SKPD	DAMPAK KUMULATIF 2024 (Rp)	DAMPAK KUMULATIF 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(765.187,50)	3.889.252,00	(4.654.439,50)	(119,67)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	47.455.550.609,40	(235.576.951.009,81)	283.032.501.619,21	(120,14)
26	Badan Kepegawaian Daerah	-	2.003.645,50	(2.003.645,50)	(100,00)
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	34.600.000,00	-	34.600.000,00	-
28	Badan Penghubung Daerah	551.099.987,00	675.675.000,00	(124.575.013,00)	(18,44)
29	Inspektorat	6.720.000,00	2.334.259,80	4.385.740,20	187,89
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.954.765,79)	-	(1.954.765,79)	-
	JUMLAH	**455.227.920.135,14**	**26.274.649.370,24**	**428.953.270.764,90**	**1.632,57**

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.6.4 Ekuitas Akhir	**Rp14.045.595.713.196,00**	**Rp13.170.046.237.337,70**

Saldo Ekuitas Akhir Pemda DIY Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.045.595.713.196,00. Saldo Ekuitas Akhir Pemda DIY Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp875.549.475.858,16 atau 6,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Ekuitas Akhir Pemda DIY merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 207
Ekuitas Akhir pada SKPD

No.	SKPD	EKUITAS AKHIR TAHUN 2024 (Rp)	EKUITAS AKHIR TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.838.252.790.358,79	1.726.249.365.085,80	112.003.425.272,99	6,49
2	Dinas Kesehatan	367.615.511.317,57	323.170.785.199,53	44.444.726.118,04	13,75
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.111.697.774.120,71	4.681.472.779.828,78	430.224.994.291,93	9,19
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	100.795.914.950,69	111.157.366.779,67	(10.361.451.828,98)	(9,32)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.432.014.848,11	1.202.734.998,01	11.229.279.850,10	933,65
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.302.346.704,03	12.602.628.876,07	9.699.717.827,96	76,97
7	Dinas Sosial	90.068.198.873,98	23.511.492.399,31	66.556.706.474,67	283,08
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.056.760.546,10	104.911.713.561,38	(64.854.953.015,28)	(61,82)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	22.545.999.388,54	43.659.602.545,45	(21.113.603.156,91)	(48,36)

No.	SKPD	EKUITAS AKHIR TAHUN 2024 (Rp)	EKUITAS AKHIR TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
	Pengendalian Penduduk				
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	132.495.107.320,64	23.596.663.603,86	108.898.443.716,78	461,50
11	Dinas Perhubungan	160.064.774.951,48	143.514.924.296,60	16.549.850.654,88	11,53
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.017.799.879,40	169.908.857.255,52	(108.891.057.376,12)	(64,09)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	449.059.701.470,91	50.108.521.010,61	398.951.180.460,30	796,17
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.167.051.197,39	308.843.200.715,42	(303.676.149.518,03)	(98,33)
15	Dinas Kebudayaan	470.572.624.375,00	5.436.065.465,48	465.136.558.909,52	8.556,49
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	152.142.282.830,17	615.257.289.110,87	(463.115.006.280,70)	(75,27)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	317.462.494.620,03	158.910.989.079,74	158.551.505.540,29	99,77
18	Dinas Pariwisata	134.527.032.513,55	321.396.276.484,47	(186.869.243.970,92)	(58,14)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	256.205.173.766,74	136.660.436.669,59	119.544.737.097,15	87,48
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92.195.330.788,29	252.486.368.497,02	(160.291.037.708,73)	(63,49)
21	Sekretariat Daerah	243.538.841.080,59	69.549.330.721,62	173.989.510.358,97	250,17
22	Paniradya Kaistimewan	13.974.756.698,33	243.201.393.709,85	(229.226.637.011,52)	(94,25)
23	Sekretariat DPRD	83.940.799.245,93	24.282.073.172,11	59.658.726.073,82	245,69
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.018.176.595,34	89.174.701.022,31	(77.156.524.426,97)	(86,52)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	3.694.315.916.388,02	34.081.127.023,65	3.660.234.789.364,37	10.739,77
26	Badan Kepegawaian Daerah	78.487.256.662,46	12.664.580.399,38	65.822.676.263,08	519,74
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25.140.925.662,58	12.172.052.996,27	12.968.872.666,31	106,55
28	Badan Penghubung Daerah	24.134.978.805,32	3.426.100.449.426,95	(3.401.965.470.621,63)	(99,30)
29	Inspektorat	32.235.893.837,79	19.871.795.848,69	12.364.097.989,10	62,22
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.131.483.397,46	24.890.671.553,97	(23.759.188.156,51)	(95,45)
	JUMLAH	**14.045.595.713.196,00**	**13.170.046.237.338,00**	**875.549.475.858,00**	**6,65**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Pelaksanaan Dana Keistimewaan dialokasikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan keistimewaan DIY selanjutnya di tuangkan didalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) pada masing masing urusan keistimewaan yaitu:

1. Tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan fungsi wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengelolaan Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang didanai dengan Dana Keistimewaan mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Penyelenggaraan urusan keistimewaan ini juga dilakukan dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Penugasan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dapat dicari rujukannya dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan sebagai reviu dari Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat DIY. Terakhir penyusunan Grand Desain Keistimewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan, dengan maksud sebagai haluan dan pedoman pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan, sedangkan tujuannya adalah memberikan haluan dan pedoman bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan keistimewaan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan.
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaaan untuk kesejahteraaan masyarakat sangat besar.
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan, sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan.
6. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangggguran
7. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Isu yang berkembang ditengah masyarakat tentang Dana Keistimewaan adalah bahwa selama ini belum banyak informasi yang diterima masyarakat tentang peruntukan Dana Keistimewaan. Kebanyakan mereka mengetahui bahwa Danais banyak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seni dan budaya seperti wayang, atraksi budaya, merti desa/dusun dan lain sebagainya. Sedikit yang mengetahui bahwa Danais juga telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dalam urusan Tata Ruang Keistimewaan dan pengelolaan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. Demikian juga pelaksanaan Danais untuk urusan kebudayaan yang lebih luas, antara lain: pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, pengembangan atraksi wisata budaya, upaya menuju Desa Mandiri Budaya, pembinaan kewirausahaan desa, pendidikan karakter berbasis Budaya, ekosistem kultural berbasis digital, pembangunan taman budaya, pengembangan museum, pengembangan industry kreatif, lumbung Mataraman, konservasi arsip Kraton dan Kadipaten,

pengembangan ekonomi perempuan, peningkatan layanan kesehatan tradisional serta Pengembangan Event Budaya yang menjadi icon dan spektakuler.

6.2 Belanja Dana Keistimewaan

Pada Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu sumber dananya berasal dari Dana Keistimewaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan alokasi pagu anggaran keistimewaan per urusan dari tahun 2013-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Perkembangan Alokasi Anggaran Keistimewaan Per Urusan 2013-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)				
		Pengisian Jabatan	Kelembagaan	Kebudayaan	Pertanahan	Tata Ruang
2013	231.392.653.500,00	0,00	2.516.142.500,00	212.546.511.000,00	6.300.000.000,00	10.030.000.000,00
2014	523.874.719.000,00	400.000.000,00	1.676.000.000,00	375.178.719.000,00	23.000.000.000,00	123.620.000.000,00
2015	547.450.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	420.800.000.000,00	10.600.000.000,00	114.400.000.000,00
2016	547.450.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	179.050.365.000,00	13.850.000.000,00	352.749.635.000,00
2017	800.000.000.000,00	2.832.737.000,00	14.256.040.000,00	439.901.748.000,00	17.197.300.000,00	325.812.175.000,00
2018	1.000.000.000.000,00	0,00	13.845.000.000,00	396.633.000.000,00	23.040.388.000,00	566.481.612.000,00
2019	1.200.000.000.000,00	0,00	15.347.533.000,00	554.102.133.000,00	24.230.505.000,00	606.319.829.000,00
2020	1.320.000.000.000,00	0,00	14.554.391.000,00	744.003.522.000,00	19.469.545.000,00	541.972.542.000,00
2021	1.320.000.000.000,00	0,00	33.350.957.000,00	755.597.151.000,00	21.934.477.000,00	509.117.415.000,00
2022	1.320.000.000.000,00	7.139.034.200,00	41.581.229.524,00	946.505.643.864,00	27.023.359.881,00	297.750.732.531,00
2023	1.420.000.000.000,00	0,00	43.989.773.850,00	1.117.858.933.379,00	28.985.621.575,00	229.165.671.196,00
2024	1.420.000.000.000,00		51.111.796.360,00	1.066.052.433.404,00	35.899.763.890,00	266.936.006.346,00
TOTAL	**11.650.167.372.500,00**	**10.371.771.200,00**	**235.678.863.234,00**	**7.208.230.159.647,00**	**251.530.960.346,00**	**3.944.355.618.073,00**

Alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 (Lampiran V) tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.420.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2024 sebesar Rp1.396.157.452.431,75 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.420.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.842.547.568,25 sesuai Berita Acara.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY. Belanja Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.420.000.000.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 telah terserap sebesar Rp1.396.134.243.366,47 atau 98,32%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
I	**KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH**				
1	KOTA YOGYAKARTA	817.590.000,00	817.160.312,00	99,95	429.688,00
2	KABUPATEN BANTUL	4.329.319.500,00	4.248.950.139,00	98,14	80.369.361,00
3	KABUPATEN KULON PROGO	4.721.781.160,00	4.591.431.393,00	97,24	130.349.767,00
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	8.398.184.000,00	8.178.228.449,00	97,38	219.955.551,00
5	KABUPATEN SLEMAN	2.969.588.800,00	2.862.855.051,00	96,41	106.733.749,00
6	BIRO ORGANISASI SETDA DIY	2.167.302.000,00	2.036.467.718,00	93,96	130.834.282,00
7	BIRO HUKUM SETDA DIY	648.679.150,00	648.679.150,00	100,00	0,00
8	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	1.265.000.000,00	1.211.616.624,00	95,78	53.383.376,00
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.015.380.850,00	970.197.497,00	95,55	45.183.353,00
10	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.306.293.780,00	1.194.449.168,00	91,44	111.844.612,00
11	PANIRADYA KAISTIMEWAN	20.953.889.020,00	20.596.567.104,65	98,29	357.321.915,35
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	295.280.900,00	287.034.398,00	97,21	8.246.502,00
13	DINAS SOSIAL	374.500.000,00	364.469.770,00	97,32	10.030.230,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
14	BPTTG - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	815.000.000,00	774.098.588,00	94,98	40.901.412,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	81.600.000,00	81.362.625,00	99,71	237.375,00
16	SEKRETARIAT DEWAN	952.407.200,00	952.003.200,00	99,96	404.000,00
II	**KEBUDAYAAN**				
1	KOTA YOGYAKARTA	69.957.978.400,00	69.458.696.137,00	99,29	499.282.263,00
2	KABUPATEN BANTUL	29.955.320.417,00	28.617.426.915,00	95,53	1.337.893.502,00
3	KABUPATEN KULON PROGO	70.053.652.777,00	68.847.361.630,00	98,28	1.206.291.147,00
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	29.833.041.200,00	29.379.264.296,00	98,48	453.776.904,00
5	KABUPATEN SLEMAN	25.276.431.300,00	25.074.063.612,00	99,20	202.367.688,00
6	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	358.001.020.851,00	356.283.958.547,00	99,52	1.717.062.304,00
7	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	11.174.072.800,00	11.072.634.967,00	99,09	101.437.833,00
8	MUSEUM SONOBUDOYO YOGYAKARTA	7.209.239.155,00	7.072.540.639,00	98,10	136.698.516,00
9	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	32.914.378.400,00	32.424.865.720,00	98,51	489.512.680,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.751.211.700,00	33.438.574.845,00	99,07	312.636.855,00
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.571.007.527,00	12.017.643.496,00	95,60	553.364.031,00
12	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	4.124.018.800,00	4.109.635.363,00	99,65	14.383.437,00
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.340.306.500,00	2.172.865.376,00	92,85	167.441.124,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.887.595.650,00	5.837.924.170,00	99,16	49.671.480,00
15	DINAS PARIWISATA DIY	18.667.550.500,00	18.156.491.678,00	97,26	511.058.822,00
16	DINAS KESEHATAN	395.000.000,00	389.428.800,00	98,59	5.571.200,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	4.739.867.850,00	4.503.219.775,00	95,01	236.648.075,00
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	166.034.632.528,00	160.384.125.567,00	96,60	5.650.506.961,00
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.992.561.950,00	8.484.964.159,00	94,36	507.597.791,00
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.213.680.000,00	7.036.840.731,00	97,55	176.839.269,00
21	DINAS SOSIAL	2.768.496.500,00	2.726.937.053,00	98,50	41.559.447,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
22	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	1.100.000.000,00	1.099.338.989,00	99,94	661.011,00
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	806.000.000,00	795.387.852,00	98,68	10.612.148,00
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	941.729.000,00	937.352.485,00	99,54	4.376.515,00
25	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	726.681.000,00	669.142.000,00	92,08	57.539.000,00
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.026.955.600,00	15.995.620.115,00	99,80	31.335.485,00
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.651.255.200,00	12.588.716.963,00	99,51	62.538.237,00
28	DINAS PUP-ESDM	19.687.518.800,00	18.926.386.019,00	96,13	761.132.781,00
29	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY	1.601.249.000,00	1.557.879.625,00	97,29	43.369.375,00
30	BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY	161.650.500,00	161.478.500,00	99,89	172.000,00
31	BIRO TATA PEMERINTAHAN	975.551.000,00	973.784.100,00	99,82	1.766.900,00
32	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	202.205.000,00	202.191.000,00	99,99	14.000,00
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	998.631.700,00	991.488.327,00	99,28	7.143.373,00
34	PPKD - BKK KALURAHAN				
	BKK KALURAHAN - DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.500.000.000,00	1.498.395.500,00	99,89	1.604.500,00
	BKK KALURAHAN - KAMPUNG BERKAH KEISTIMEWAAN	400.000.000,00	393.575.000,00	98,39	6.425.000,00
	BKK KALURAHAN - PADAT KARYA	29.925.000.000,00	29.862.528.544,46	99,79	62.471.455,54
	BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA	4.144.920.000,00	4.139.220.000,00	99,86	5.700.000,00
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	24.075.251.799,00	23.941.428.534,00	99,44	133.823.265,00
	BKK KALURAHAN - WBTB	2.000.000.000,00	1.990.500.000,00	99,53	9.500.000,00
	BKK KALURAHAN - DESA BAHARI	3.286.000.000,00	3.237.545.000,00	98,53	48.455.000,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA	3.060.000.000,00	2.980.034.358,00	97,39	79.965.642,00
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN	3.380.000.000,00	3.349.064.200,00	99,08	30.935.800,00
	BKK KALURAHAN - DESA PRIMA	2.274.450.000,00	2.255.310.635,00	99,16	19.139.365,00
	BKK KALURAHAN - DESA PREUNEUR	3.206.320.000,00	3.015.052.840,00	94,03	191.267.160,00
	BKK KALURAHAN - DESA WISATA	7.950.000.000,00	7.925.518.127,00	99,69	24.481.873,00
	BKK KALURAHAN - OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000.000,00	2.033.150.000,00	99,18	16.850.000,00
	BKK KALURAHAN - RTLH KEISTIMEWAAN	21.060.000.000,00	21.042.314.505,00	99,92	17.685.495,00
III	**PERTANAHAN**				
1	KOTA YOGYAKARTA	955.703.700,00	932.719.470,00	97,60	22.984.230,00
2	KABUPATEN BANTUL	7.246.642.000,00	7.031.384.072,00	97,03	215.257.928,00
3	KABUPATEN KULON PROGO	2.339.490.100,00	1.740.077.347,00	74,38	599.412.753,00
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	5.300.799.290,00	4.732.045.308,00	89,27	568.753.982,00
5	KABUPATEN SLEMAN	3.660.924.600,00	3.107.716.688,77	84,89	553.207.911,23
6	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	9.473.365.950,00	9.220.156.694,00	97,33	253.209.256,00
7	BIRO HUKUM SETDA DIY	229.408.600,00	228.492.100,00	99,60	916.500,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	117.355.000,00	117.354.750,00	100,00	250,00
9	BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY	178.571.250,00	175.219.399,00	98,12	3.351.851,00
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	519.870.400,00	519.771.250,00	99,98	99.150,00
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	82.396.000,00	82.396.000,00	100,00	0,00
12	PPKD - BKK KALURAHAN				
	BKK KALURAHAN - URUSAN PERTANAHAN	5.795.237.000,00	5.787.954.350,00	99,87	7.282.650,00
IV	**TATA RUANG**				
1	KOTA YOGYAKARTA	13.219.609.280,00	13.191.706.335,00	99,79	27.902.945,00
2	KABUPATEN BANTUL	13.609.850.980,00	13.329.891.254,00	97,94	279.959.726,00
3	KABUPATEN KULON PROGO	23.962.281.837,00	23.654.759.405,00	98,72	307.522.432,00
4	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	16.960.640.470,00	15.385.397.421,00	90,71	1.575.243.049,00
4	KABUPATEN SLEMAN	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79	1.135.149,00
5	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	3.633.358.600,00	3.536.402.630,00	97,33	96.955.970,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
6	DINAS PERTANIAN	1.608.885.000,00	1.556.674.162,00	96,75	52.210.838,00
7	DINAS PUP-ESDM	119.692.961.145,00	119.031.872.363,00	99,45	661.088.782,00
8	DINAS PERHUBUNGAN DIY	23.792.598.172,00	23.006.496.676,00	96,70	786.101.496,00
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	476.911.200,00	469.318.325,00	98,41	7.592.875,00
10	DINAS KOPERASI DAN UKM	1.284.005.250,00	1.155.186.583,00	89,97	128.818.667,00
11	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	3.383.125.000,00	3.360.305.630,00	99,33	22.819.370,00
12	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY	189.000.000,00	181.700.000,00	96,14	7.300.000,00
13	DINAS PARIWISATA	1.400.000.000,00	1.394.705.594,00	99,62	5.294.406,00
14	RS GRHASIA	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00	98,60	363.139.151,00
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.552.176.500,00	1.538.161.969,00	99,10	14.014.531,00
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	90.000.000,00	89.888.950,00	99,88	111.050,00
17	PPKD - BKK KALURAHAN				
	BKK KALURAHAN - KAWASAN TERPADU	15.670.000.000,00	15.662.722.147,59	99,95	7.277.852,41
Jumlah		**1.420.000.000.000,00**	**1.396.134.243.366,47**	**98,32**	**23.865.756.633,53**

Berdasarkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun oleh Paniradya Kaistimewan Tahun 2025, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3
Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024

URUSAN/OPD	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN S.D. AKHIR TAHUN (Rp)	REALISASI KEUANGAN S.D. AKHIR THN (%)	REALISASI FISIK S.D. AKHIR THN (%)	JML OPD	Keu <100%	Fisik <100%
URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	**51.111.796.360,00**	**49.815.571.186,65**	**97,46%**	**99,98%**			
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**29.875.332.900,00**	**29.116.945.842,65**	**97,46%**	**100,00%**	**11**	**10**	**0**
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	**21.236.463.460,00**	**20.698.625.344,00**	**97,47%**	**99,95%**			
Pemerintah Kabupaten Bantul	4.329.319.500,00	4.248.950.139,00	98,14%	99,76%	11	10	1
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	8.398.184.000,00	8.178.228.449,00	97,38%	100,00%	10	10	0
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	4.721.781.160,00	4.591.431.393,00	97,24%	100,00%	9	9	0
Pemerintah Kabupaten Sleman	2.969.588.800,00	2.862.855.051,00	96,41%	100,00%	9	9	0
Pemerintah Kota Yogyakarta	817.590.000,00	817.160.312,00	99,95%	100,00%	3	1	0
URUSAN KEBUDAYAAN	**1.066.052.433.404,00**	**1.050.051.866.694,46**	**98,50%**	**99,95%**			
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**732.664.067.511,00**	**721.011.416.861,00**	**98,41%**	**99,93%**	**29**	**29**	**3**
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	**225.076.424.094,00**	**221.376.812.590,00**	**98,36%**	**100,00%**			
Pemerintah Kabupaten Bantul	29.955.320.417,00	28.617.426.915,00	95,53%	100,00%	14	12	0
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	29.833.041.200,00	29.379.264.296,00	98,48%	100,00%	11	9	0
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	70.053.652.777,00	68.847.361.630,00	98,28%	100,00%	13	13	0
Pemerintah Kabupaten Sleman	25.276.431.300,00	25.074.063.612,00	99,20%	100,00%	9	9	0
Pemerintah Kota Yogyakarta	69.957.978.400,00	69.458.696.137,00	99,29%	100,00%	6	6	0
URUSAN PERTANAHAN	**35.899.763.890,00**	**33.675.287.428,77**	**93,80%**	**96,44%**			
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**10.600.967.200,00**	**10.343.390.193,00**	**97,57%**	**97,61%**	**6**	**5**	**1**
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	**19.503.559.690,00**	**17.543.942.885,77**	**89,95%**	**94,75%**			
Pemerintah Kabupaten Bantul	7.246.642.000,00	7.031.384.072,00	97,03%	97,95%	2	2	1
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	5.300.799.290,00	4.732.045.308,00	89,27%	99,97%	2	2	1
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	2.339.490.100,00	1.740.077.347,00	74,38%	79,89%	2	2	1
Pemerintah Kabupaten Sleman	3.660.924.600,00	3.107.716.688,77	84,89%	88,96%	1	1	1

URUSAN/OPD	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN S.D. AKHIR TAHUN (Rp)	REALISASI KEUANGAN S.D. AKHIR THN (%)	REALISASI FISIK S.D. AKHIR THN (%)	JML OPD	Keu <100%	Fisik <100%
Pemerintah Kota Yogyakarta	955.703.700,00	932.719.470,00	97,60%	100,00%	1	1	0
URUSAN TATA RUANG	**266.936.006.346,00**	**262.591.518.056,59**	**98,37%**	**99,77%**			
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**182.984.874.779,00**	**180.839.427.643,00**	**98,83%**	**100,00%**	**12**	**12**	**0**
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	**68.281.131.567,00**	**66.089.368.266,00**	**96,79%**	**99,09%**			
Pemerintah Kabupaten Bantul	13.609.850.980,00	13.329.891.254,00	97,94%	100,00%	3	2	0
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	16.960.640.470,00	15.385.397.421,00	90,71%	96,33%	5	5	1
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	23.962.281.837,00	23.654.759.405,00	98,72%	100,00%	4	4	0
Pemerintah Kabupaten Sleman	528.749.000,00	527.613.851,00	99,79%	100,00%	1	1	0
Pemerintah Kota Yogyakarta	13.219.609.280,00	13.191.706.335,00	99,79%	100,00%	3	3	0
TOTAL	**1.420.000.000.000,00**	**1.396.134.243.366,47**	**98,32%**	**99,83%**			

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 30 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan akuntansi pelaporan yang telah dilaksanakan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dalam penyajian aset tetap dan persediaan di neraca sumber datanya berasal dari Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan Penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan merupakan proses aliran data yang dihasilkan dari tahapan perencanaan penganggaran yang berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintahan daerah, serta bagan akun standar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X